BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 21

B. KESIMPULAN

Perubahan Recana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Recana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar kegiatan, sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan kegiatan, sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaijmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional TahunSistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 312);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30;
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 mendahului I (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 30;
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 mendahului II (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 30;
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah.

b. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata Tahun 2025;
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program, kegiatan dan sub Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 di bawah ini.

TAbel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /Kota
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

rusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	
									I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13=6+12	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			16,939,295,822		8,832,292,018		4,532,587,014			561,628,384		1,038,788,749		-		-		1,600,417,133		10,432,709,151
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3,305,044,161		3,103,511,712		1,762,912,743			-		470,322,325		-		-		470,322,325		3,573,834,037
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENIINGKATKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH	100%	3,225,044,161		3,103,511,712		1,762,912,743			-	1	470,322,325		-		-		470,322,325	0	3,573,834,037
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	148 perpust, 170 koleksi, 135 orang, 58 layanan, 69.000 eksmplar, 4 dok.	2,959,746,751		2 perpust.akaan, 30 org, 30 layanan, 29.000 eksmplar	2,295,946,288	1 perpustakaan, 15.000 eksmplar, 131 layanan	717,769,164		-	34 layanan	51,129,968	-	-	-	-	34 layanan	51,129,968	2 perpust.akaan, 30 org, 30 layanan, 29.000 eksmplar	2,347,076,256

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis IS020000 (ITSM : Information Technology Service Management	perpustakaan	3	627,952,740	2	251,835,980	1	134,814,974	-	-		16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	2	267,835,980
Pengembangan Perpustaaan di Tingat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustaaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	13	49,000,000		-		-	-	-		-		-				-	-	-
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangakan	koleksi	170	140,500,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khUsus yang Dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	112	46,049,425		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	12	37,000,000		-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	-
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapatkan sertifikas tenaga perpusta	orang	135	185,837,438	30	112,940,000		-		-		-		-	-	-	-	-		30	112,940,000

	kaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupatenn/Kota																			
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui - peningkatan koleksi	Layanan	58	55,046,925	30	161,807,660	131	327,447,472		-	34	35,129,968		-		-	34	35,129,968	64	196,937,628
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan `pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	eksmplar	69,000	1,799,360,223	29,000	1,769,362,648	15.000	255,506,718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	1,769,362,648
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	*4*	19,000,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Gemar Membaca yang dibuadayakan**	**122 lokus, 10 perpust, 47 orang**	**265,297,410**		**82 lokus, 35 orang, 82 perpustakaan.**	**807,565,424**	**64 lokus, 15 orang, 50 perpustakaan.**	**1,045,143,579**		**-**	**23 lokus, 7 orang, 12 perpustakaan.**	**419,192,357**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23 lokus, 7 orang, 12 perpustakaan.**	**419,192,357**	**15 lokus, 42 orang, 94 perpustakaan.**	**1,226,757,781**
Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus	122	53,000,000	82	314,596,700	64	195,240,661	-	-	23	25,325,000	-	-	-	-	23	25,325,000	105	339,921,700
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	5	75,457,885		-		-	-	-		-		-		-		-	-	-
Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	31	38,000,000	35	294,617,400	15	614,238,092		-	7	380,408,300		-	-	-	7	380,408,300	42	675,025,700

Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	perpustakaan	5	42,339,525	82	198,351,324	50	235,664,826	-	-	12	13,459,057		-	-	-	12	13,459,057	94	211,810,381
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah duta baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	orang	16	56,500,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**JUMLAH KOLEKSI NASKHA NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**100%**	**80,000,000**			**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
Pelestarian Naskha Kuno Millik Daerah Kabupaten/ Kota	**Naskha Kuno yang dilestarikan**	**13 orang, 9 eksmplar**	**50,000,000**		-	-		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	**-**	**-**
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelstarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperansertadalam Penyimpanan, Perawatan, Pelstarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	13	32,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-

Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksmplar	9	18,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan**	**60 ekmplar**	**30,000,000**		-	-		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	**-**	**-**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah budayan budaya etnis nusatara hasil seleksi dan pengadaan	eksmplar	30	15,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Julmlah Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan	eksmplar	30	15,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN			**13,634,251,661**			**5,728,780,306**		**2,769,674,271**		**561,628,384**	**-**	**568,466,424**		**-**		**-**		**1,130,094,808**		**6,858,875,114**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PELAYANAN ADMINSITRASII PERKANTORAN DALAM MENDKUNG TUPOKSII PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**13,109,974,161**	**0**	**5,585,305,810**	**0**	**2,589,757,489**	**0**	**532,575,718**	**0**	**568,466,424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**1,101,042,142**		**6,686,347,952**
kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**20 dok, 20 laporan**	**88,110,549**	**12 dok**	**156,645,100**	**6 dok.**	**44,460,656**	**-**	**-**	**2 dok.**	**28,800,000**		**-**	**-**	**-**	**2 dok.**	**28,800,000**	**14 dok**	**185,445,100**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	8	14,008,750	12	156,645,100	6	44,460,656	-	-	2	28,800,000		-	-	-	-	28,800,000	12	185,445,100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok.	4	14,793,275	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	dok.	4	15,136,850	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-

	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok.	4	15,323,433	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	14,044,408	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	16	14,803,833	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangk**	**116 orang/bln, 11 dokumen, 4 laporan**	**9,291,245,861**		**28 orang/bln, 24 bln, 2 lap.**	**3,959,246,718**	**14 org/bln, 1 dok, 1 laporan**	**2,275,808,904**	**3 org/bln, 1 laporan**	**500,658,886**	**7 \org/bln, 1 laporan**	**500,963,135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 org/bln, 2 la**	**1,001,622,021**	**38 orang/bln, 24 bln, 4 lap.**	**4,960,868,739**

	at Daerah																**po ra n**			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	116	8,714,345,553	28	3,708,444,693	14	2,149,016,745	3	493,058,586	7	500,963,135		-	-	-	3	994,021,721	31	4,702,466,414
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	519,535,625	24	214,670,000	12	124,392,000	-	5,218,000		-		-	-	-	-	5,218,000	24	219,888,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	40,864,983	2	36,132,025	1	2,400,159	1	2,382,300		-	-	-	1	-	1	2,382,300	3	38,514,325
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	7	16,499,700	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16 laporan**	**227,351,124**		**4 lap.**	**170,005,750**	**2 lap.**	**32,910,250**		**900,050**		**-**		**-**	**-**	**-**		**900,050**	**4 laporan**	**170,905,800**
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	8	129,327,583	4	170,005,750	2	32,910,250		900,050		-		-	-	-	-	900,050	4	170,905,800
Sub Kegiatan Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Penguna (LBPS dan LBPT) yang Tersedia	laporan	8	98,023,541	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Adminitrasi Kepegawaian pada Perangkata Daerah**	**4 dokumen, 12 orang**	**270,350,795**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pendataan dan Pengolahan Adminsitrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	45,350,795	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	*12*	225,000,000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183 paket, 90 laporan**	**1,610,365,807**		**4 paket, 3.500 lbr, 40 laporan**	**47,404,441**	**2 paket, 20 laporan**	**18,788,571**	**-**	**-**	**1 paket, 6 laporan**	**4,580,100**		**-**		**-**	**1 paket, 6 laporan**	**4,580,100**	**5 paket, 3.500 lbr, 46 laporan**	**51,984,541**
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediahkan	paket	*22*	72,783,000	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediahkan	paket	150	352,208,000	4	20,884,891	2	8,963,571	-	-	1	1,450,100	-	-	-	-	1	1,450,100	5	22,334,991
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediahkan	lembar	11	938,824,000	3,500	12,864,550		-	-	-		-		-		-	-	-	3,500	12,864,550

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	90	246,550,807	40	13,655,000	20	9,825,000	-		6	3,130,000		-		-	6	3,130,000	46	16,785,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**26 unit**	**826,739,925**		**23 unit**	**801,703,000**	**2 nit**	**15,306,773**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23 unit**	**801,703,000**
Kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	11,000,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	4	600,739,925	23	801,703,000	2	15,306,773		-		-	-	-		-	-	-	23	801,703,000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	unit	6	15,000,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76 laporan**	**488,810,000**		**24 laporan**	**204,152,168**	**12 laporan**	**117,422,335**	**3 laporan**	**19,110,282**	**3 laporan**	**31,623,189**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 laporan**	**50,733,471**	**30 laporan**	**254,885,639**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	4	202,715,000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	TJumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik yang disediahkan	laporan	8	272,575,000	24	204,152,168	12	117,422,335	3	19,110,282	3	31,623,189	-	-	-	-	6	50,733,471	30	254,885,639
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediahkan	laporan	64	13,520,000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**58 unit**	**307,000,100**		**25 unit**	**246,148,633**	**13 unit**	**85,060,000**	**1 uint**	**11,906,500**		**2,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 unit**	**14,406,500**	**26 unit**	**260,555,133**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	58	251,000,050	25	246,148,633	13	85,060,000	1	11,906,500	-	2,500,000	-	-	-	-	1	14,406,500	65	260,555,133
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	19	56,000,050	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH**	**100%**	**191,277,500**			**143,474,496**	**0**	**179,916,782**	**0**	**29,052,666**		**-**		**-**		**-**	**0**	**29,052,666**	**0**	**172,527,162**
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**3.075 berkas, 4 laporan**	**191,277,500**		**47 lap.**	**25,153,875**	**124 laporan**	**75,000,230**		**1,901,950**		**-**		**-**	**-**	**-**		**1,901,950**	**47 laporan**	**27,055,825**
Penciptaan dan Pengunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	3,000	15,000,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang DilakukanPemeliharaan dan	Berkas	75	15,000,000		-		-		-		-		-		-		-	-	-

	Penyusutan																		
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	161,277,500	47	25,153,875	124	75,000,230	-	1,901,950		-		-	-	-	-	1,901,950	47	27,055,825
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten/Kota**		**-**		**16 arsip**	**12,284,796**	**100 arsip**	**104,916,552**	**10 arsip**	**27,150,716**		**-**		**-**		**-**	**10 arsip**	**27,150,716**	**26 arsip**	39,435,512
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	arsip		-	16	12,284,796	100	104,916,552	10	27,150,716		-		-		-	10	27,150,716	26	39,435,512
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi kearsipan daerah**		**-**		**22 pengguna, 35 laporan**	**106,035,825**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22 pengguna, 35 laporan**	**106,035,825**
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Pengguna	-	-	22	61,918,225	-	-			-	-		-	-	-	-	-	22	61,918,225

	Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota	Laporan	-	-	35	44,117,600	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	35	44,117,600
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**100%**	**333,000,000.00**			-		-		-		-		-		-		-		-
Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan**	**4 arsip, 4 berkas**	-			-	-	-		-		-		-		-		-		-

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	4	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	4	-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Presentase penyelamatan arsip OPD yang digabungkan/dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan**	**6 daftar, 12 arsip**	**48,000,000.00**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	6	12,000,000,00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan daftar Penilaian dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	6	12,000,000,00		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	arsip.	6	12,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 arsip.	6	12,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	**Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang dilindungi dan diselamatkan**	**18 arsip**	**30,000,000.00**			-		-		-		-		-		-		-	-	-
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi ,iidentifikas, pemulihan dan penyimpanani akibat bencana	arsip	9	15,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan aikibat bencana	arsip	9	15,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	**Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media diautentifikasi**	**24 arsip**	**30,000,000.00**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**
Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapan	arsip	12	15,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penilaian dan Penetapan Hasil Alihmedia Sesuai Persyaratan Penjaminan Kebasahan Arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alihmedia Sesuai Persyaratan Penjaminan Kebasahan Arsip	arsip	12	15,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	**Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Hilang yang dicari**	**180 arsip**	**225,000,000.00**		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang yang dinalai dan ditetapkan	Arsip	60	75,000,000.00	-		-		-		-		-		-		-	-	-
Evaluasi dan Penetapan Hasil Ahli Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	60	75,000,000.00	-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	60	75,000,000.00	-		-		-		-		-		-		-	-	-
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**TERLAKSANANYA PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**100%**	**60,000,000.00**		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	**Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani**	**3 SOP, 3 arsip**	**60,000,000.00**			-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP	3	30,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar arsip hasil penyediaan daftar dan Penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	3	30,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah(<30%) karena dianggarkan pertriwulan dan dan dianggarakan pada triwulan III dan IV, bahkan realisasi fisik dan keuangan belum ada penyerapan atau 0 %, yang membuat yang realisasi fisik maupun keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih rendah.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
`TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERUSTAKAAN KABUPATEN LEMBATA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Jenis Kegiatan	OPD
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	sesudah\ Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									4,532,587,014	3,784,719,255		DKP
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
`2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							25%		1,647,712,743	1,393,104,133		
`2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH					25%	25%	1,647,712,743	1,393,104,133		
`2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelolah	Jumlah perpustakaan yang dikelolah					25%	25%	602,037,791	597,232,246		

`2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui - peningkatan koleksi	Jumlah layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui - peningkatan koleksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah, Kupang	30 layanan	131 layanan	326,916,099	277,414,834		
`2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewjudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewjudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	23.000 eksmplar	15.000 eksmplar	255,506,718	118,338,200		
`2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis IS020000 (ITSM : Information Technology Service Management	Jumlah Layanan pepustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK berbasis IS020000 (ITSM : Information Technology Service Management	Masyarakat	Masyarakat	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	1 pepustakaan	1 pepustakaan	19,614,974	201,479,212		

`2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gemar Membaca yang dibudayakan	Gemar Membaca yang dibudayakan					25%	25%	1,045,674,952	795,871,887		
`2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inkusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah, Jakarta	50 perpustakaan	50 perpustakaan	194,842,159	189,166,206		
`2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	15 orang	15 orang	666,865,024	512,674,804		
`2.23.02.2.02.0009	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	64 lokus	64 lokus	183,967,769	94,030,877		
`2.23	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN									2,884,874,271	2,391,615,122		

`2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN ADMISITRASI PERKANTORAN DAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN ADMISITRASI PERKANTORAN DAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH					25%	25%	2,704,957,489	2,293,705,921		
`2.24.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					25%	25%	159,660,656	30,227,175		
`2.24.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Aparatur	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	6 dok	6 dok	159,660,656	30,227,175		
`2.24.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					25%	25%	2,275,808,904	2,031,068,156		
`2.24.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Aparatur	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	29 orang/ bln	29 orang/ bln	2,149,016,745	1,913,275,997		

`2.24.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aparatur	Aparatur	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	1 dok.	1 dok.	124,392,000	115,392,000		
`2.24.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur	Aparatur	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	1 lap.	1 lap.	2,400,159	2,400,159		
`2.24.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah					25%	25%	32,910,250	32,910,250		
`2.24.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur	Aparatur	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	2 laporan	2 laporan	32,910,250	32,910,250		
`2.24.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					25%	25%	18,788,571	9,406,182		

`2.24.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dann perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dann perlengkapan kantor yang disediakan	Aparatur	Aparatur	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	36 ;paket	36 ;paket	8,963,571	4,486,182		
`2.24.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur	Aparatur	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	Lewoleba, 9 kec, Kupang, Jakarta	20 laporan	20 laporan	9,825,000	4,920,000		
`2.24.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah					25%	25%	15,306,773	9,091,823		
`2.24.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Aparatur	Aparatur	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab . Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	1 unit	1 unit	15,306,773	9,091,823		
`2.24.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25%	25%	117,422,335	117,422,335		

`2.24.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik yang disediahkan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kounikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik yang disediahkan			Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	*2 laporan*	*2 laporan*	117,422,335	117,422,335		
`2.24.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					25%	25%	85,060,000	63,580,000		
`2.24.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipellihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipellihara dan dibayarkan pajaknya	Aparatur	Aparatur	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	13 unit	13 unit	85,060,000	63,580,000		
`2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH	MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH					25%	25%	179,916,782	97,909,201		
`2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan sistem pengelolaan arsip dinamis	Presentase peningkatan sistem pengelolaan arsip dinamis					25%	25%	75,000,230	36,189,984		

`2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	50 laporan	124 laporan	75,000,230	36,189,984		
`2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota	presentase peningkatan pengelolaan arsip statis daerah	presentase peningkatan pengelolaan arsip statis daerah					25%	25%	104,916,552	61,719,217		
`2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	100 arsip	100 arsip	104,916,552	61,719,217		

Matriks diatas menunjukan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendasar yaitu :

1. Rasionalisasi untuk pergeseran anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Memprioritaskan program/kegiatan pemerintah;
3. Memenuhi Devisit Anggaran Pemerintah Daerah (APBD);
4. Efisiensi Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Dinas tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, Agustus 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lembata,

Anselmus Asan Ola, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710723 199903 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; maka Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

2. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 20180 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19);

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan kesinergisan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta sinergis dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satpol PP Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Satpol PP dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan laporan kinerja.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Satpol PP tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang meliputi pergeseran antar sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru, seta memuat penambahan atau pengurangan target kinerja sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perubahan rencana kerja Satpol PP Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai triwulan II Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satpol PP Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini mengacu pada APBD tahun berjalan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja Satpol PP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2025
(lihat file excel)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, nampak bahwa realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja hingga triwulan II Tahun 2025 adalah 53,54% dengan realisasi keuangan sebesar 48,31% yakni terealisasi Rp.2.064.371.268.- dari total anggaran sebesar Rp.4.273.346.227,- Pencapaian kinerja program/kegiatan dan realisasi keuangan tidak sama dimana realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan lebih besar dari realisasi keuangan karena anggaran program dan kegiatan baru terealisasi pada triwulan berikutnya. Masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan.

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

- Disiplin aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang masih rendah.
- Terbatasnya jumlah aparatur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraiakan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang Capaian Kinerja kegiatan dan realisasi keuangan yang masih 0%. Hal ini disebabkan karena penganggaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV.
2. Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
   - Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf, antar Bidang dan seksi serta antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan stakeholders dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan;
   - Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan target pencapaian kinerja program/kegiatan prioritas dan dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025, mengakomodir 3 program dengan 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.273.346.227,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu Rp. 3.342.073.484,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Satpol PP dalam tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu Rp.4.890.034.607,-.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan pagu Rp. 622.572.700,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Satpol PP dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan pagu Rp.674.920.650,-
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu Rp.151.614.250,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Satpol PP dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu Rp.600.173.120,-

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

BAB IV

PENUTUP

1. Catatan penting dalam pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata Tahun 2025 :
   a. Setiap Kepala Bidang wajib menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Para Kepala Bidang harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas dan konsistensi antara Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025 dengan RDPPA Tahun Anggaran 2025.
   c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Perubahan Renja, maka penyusunan RDPPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.
2. Kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2025
   a. Setiap Bidang yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Perubahan Renja tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Perubahan Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Satpol PP Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2026.
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Lembata Tahun 2025
   a. Setiap Kepala Bidang wajib Menyusun RDPPA dan anggaran kas dan direkap oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk disampaikan kepada TAPD guna mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
   b. Setiap Kepala Bidang sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan wajib mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam DPPA Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Bupati Lembata,

P. Kanisius Tuaq

Lewoleba, 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lembata,

Yohanes Berchmans Daniel Dai , S.IP
NIP. 19731125 200012 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata dan Pemangku kepentingan. Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidak sesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berkenaan, adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus dijadwalkan ulang dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata melakukan perubahan Renja Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target – target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar kegiatan dan sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomr 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023 - 2042
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin keterkaitan, sinergitas, konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target – target kinerja perangkat daerah khusunya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sedangkan tujuan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah:

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.
b. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
c. Menjadi instrumen evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dilakukan perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan memuat uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan Renja. Selain itu dalam Bab ini juga memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja serta menguraikan pokok bahasan (sistematika penulisan).

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kajian evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan triwulan II dan Analisis Kinerja.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

Bab IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target atau belum serta kemungkinan akan tercapai atau tidak pada akhir tahun pelaksanaan sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan Renja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut ini.

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan / Sub Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2))/2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					k	Rp	k		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	%	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**100**	**12,867,874,023**	**20**	**3,236,452,501**	**13**	**2,691,166,396**	**0**	**483,118,676**	**7**	**640,964,786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**1,124,083,462**	**27**	**4,360,535,963**	**27**	**34**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**100**	**12,336,999,921**	**22**	**3,096,458,903**	**13**	**2,641,171,496**	**1**	**483,118,676**	**7**	**640,964,786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**1,124,083,462**	**30**	**4,220,542,365**	**30**	**34**	
1	**Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang berbasis elektronik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksiperangkat daerah**		**100**	**10,353,658,142**	**28**	**2,479,180,381**	**14**	**2,243,342,946**	**2**	**483,118,676**	**6**	**639,083,786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**1,122,202,462**	**36**	**3,601,382,843**	**36**	**35**	
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**94,855,044**	**25**	**11,972,314**	**10**	**2,011,450**	**-**	**275,000**	**9**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**300,000**	**34**	**12,272,314**	**34**	**13**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	18,030,920	2	1,076,241	2	300,000	-	275,000	2	25,000	-	-		-	2	300,000	4	1,376,241	50	8	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	18,030,920	2	1,389,443	1	320,000	-	-	1	-	-	-		-	1	-	3	1,389,443	75	8	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporsn Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,477,499	2	2,049,690	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	2	2,049,690	50	10	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	13,523,190	2	2,974,552	1	589,450	-	-	1	-	-	-		-	1	-	3	2,974,552	75	22	
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	13,523,190	2	2,663,177	1	802,000		-	0.8	-	-	-		-	1	-	3	2,663,177	70	20	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	28	11,269,325	7	1,819,211	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,819,211	25	16	
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah	Laporan		-	0	-		-				-		-		-	-	-	-	-			
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**8,410,396,438**	**25**	**1,977,263,536**	**25**	**2,073,325,817**	**6**	**411,203,676**	**7**	**612,432,286**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**1,023,635,962**	**38**	**3,000,899,498**	**38**	**36**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	7,759,404,758	28	1,866,714,904	14	2,000,359,367	3	393,788,676	5	605,627,286	-	-	-	-	8	999,415,962	36	2,866,130,866	64	37	
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokuman	4	628,453,030	2	107,640,382	1	72,660,000	-	17,415,000	0.5	6,805,000	-	-	-	-	1	24,220,000	3	131,860,382	63	21	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	13,523,190	2	1,426,500	0	-	-		-	-		-	-	-	-	-	2	1,426,500	50	11	
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokuman	144	9,015,460	72	1,481,750	36	312,450	9		9	-	-	-	-	-	18	-	90	1,481,750	63	16	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**90,154,600**	**44**	**21,469,850**	**7**	**20,510,000**	**3**	**5,040,000**	**3**	**3,360,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**8,400,000**	**50**	**29,869,850**	**50**	**33**	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	5,077,300	2	775,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	775,000	25	15	
1.3.2		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	40,000,000	3	20,020,000	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	3	20,020,000	25	50	
1.3.3		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	45,077,300	2	674,850	2	20,510,000	0.5	5,040,000	0.5	3,360,000	-	-		-	1	8,400,000	3	9,074,850	38	20	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan / Sub Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2))/2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**45,077,300**	**25**	**2,288,664**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**2,288,664**	**25**	**5**	
1.4.1		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8	45,077,300	2	2,288,664	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,288,664	25	5	
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**340,034,555**	**25**	**60,021,536**	**14**	**12,311,116**	**3**	**6,250,000**	**4**	**2,606,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**8,856,500**	**32**	**68,878,036**	**32**	**20**	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	6,761,595	4	1,234,014	-	-				-		-	-	-	-	-	4	1,234,014	25	18	
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	62,809,160	1	8,247,152	1	4,282,616	-	1,050,000	0.5	1,606,500		-	-	-	1	2,656,500	2	10,903,652	38	17	
1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	45,077,300	2	5,499,200	2	3,248,500	-	1,025,000	1.0	1,000,000	-	-	-	-	1	2,025,000	3	7,524,200	38	17	
1.5.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	8	225,386,500	2	45,041,170	2	4,780,000	1	4,175,000	-	-	-	-	-	-	1	4,175,000	3	49,216,170	38	22	
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**135,231,900**	**15**	**32,175,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**32,175,000**	**15**	**24**	
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	135,231,900	3	32,175,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	32,175,000	15	24	
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**1,030,552,725**	**25**	**234,691,918**	**25**	**103,814,563**	**-**	**50,095,000**	**13**	**12,800,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**62,895,000**	**38**	**297,586,918**	**38**	**29**	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	908,844,015	1	214,040,000	1	79,231,000		50,095,000	0.5	12,800,000		-	-	-	1	62,895,000	2	276,935,000	38	30	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	112,693,250	1	18,661,000	1	23,846,312	-	-	0.5	-	-	-	-	-	1	-	2	18,661,000	38	17	
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	9,015,460	1	1,990,918	1	737,251			0.5	-	-	-		-	1	-	2	1,990,918	38	22	
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**100**	**207,355,580**	**25**	**139,297,563**	**18**	**31,370,000**	**6**	**10,255,000**	**5**	**7,860,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**18,115,000**	**36**	**157,412,563**	**36**	**76**	
1.8.1		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	76	103,677,790	38	122,847,563	19	31,370,000	6	10,255,000	5	7,860,000	-	-	-	-	11	18,115,000	49	140,962,563	64	136	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	67,615,950	5	6,450,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6,450,000	25	10	
1.8.3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	8	36,061,840	2	10,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,000,000	25	28	
2	**Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik Kepada Masyarakat**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**		**100**	**721,236,800**	**25**	**150,091,586**	**13**	**17,199,450**	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**-**	**34**	**150,091,586**	**34**	**21**	
2.1		**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**		**100**	**721,236,800**	**25**	**150,091,586**	**13**	**17,199,450**	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**-**	**34**	**150,091,586**	**34**	**21**	
2.1.1		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	202,847,850	1	144,401,900	1	17,199,450			0.7	-		-	-	-	0.7	-	2	144,401,900	43	71	
2.1.2		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	518,388,950	1	5,689,686	0	-				-	-	-	-	-	-	-	1	5,689,686	25	1	
3	**Meningkatnya daya saing daerah dengan tersedianya infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika**		**100**	**1,262,104,979**	**13**	**467,186,936**	**13**	**380,629,100**	**-**	**-**	**8**	**1,881,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**1,881,000**	**20**	**469,067,936**	**20**	**37**	
3.1		**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika**		**100**	**423,830,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3.1.1		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	40	423,830,500	0	-	0	-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
3.2		**Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika**		**100**	**838,274,479**	**25**	**467,186,936**	**25**	**380,629,100**	**-**	**-**	**15**	**1,881,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**1,881,000**	**40**	**469,067,936**	**40**	**56**	

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan / Sub Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2))/2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
3.2.1		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	4,940,000	0	-	0	-				-		-	-	-	-	-	-	-		
3.2.3		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	4	833,334,479	1	467,186,936	1	380,629,100	-	-	0.6	1,881,000	-	-	-	-	0.6	1,881,000	2	469,067,936	40	56	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**100**	**353,945,700**	**25**	**67,974,413**	**13**	**22,647,300**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**33**	**67,974,413**	**33**	**19**	
4	**Meningkatnya kualitas serta kuantitas data yang terintegrasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk mencapai Lembata satu data**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Ketersedian Dokumen Statistik dan Informasi Daerah**		**100**	**353,945,700**	**25**	**67,974,413**	**13**	**22,647,300**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**33**	**67,974,413**	**33**	**19**	
4.1		**Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas Dokumen Statistik dan Informasi Daerah**		**100**	**353,945,700**	**25**	**67,974,413**	**13**	**22,647,300**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**33**	**67,974,413**	**33**	**19**	
4.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	4	171,070,700	1	53,921,915	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	53,921,915	25	32	
4.1.2		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Dokumen	4	182,875,000	1	14,052,498	1	22,647,300			0.6	-	-	-	-	-	0.6	-	2	14,052,498	40	8	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**100**	**176,928,402**	**13**	**72,019,185**	**13**	**27,347,600**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**20**	**72,019,185**	**20**	**41**	
5	**Meningkatknya Sumber Daya untuk pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**		**100**	**176,928,402**	**13**	**72,019,185**	**13**	**27,347,600**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**20**	**72,019,185**	**20**	**41**	
5.1		**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengelolaan Persandian**		**100**	**39,442,637**	**25**	**50,583,860**	**25**	**27,347,600**	**-**	**-**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**-**	**40**	**50,583,860**	**40**	**128**	
5.1.1		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pegelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Laporan	4	39,442,637	1	50,583,860	1	27,347,600			0.6	-	-	-	-	-	0.6	-	2	50,583,860	40	128	
5.2		**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengelolaan Persandian**		**100**	**137,485,765**	**-**	**21,435,325**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,435,325**	**-**	**16**	
5.2.1		Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	PD	20	137,485,765	0	21,435,325	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	21,435,325	-	16	
		T O T A L			**100**	**12,867,874,023**	**20**	**3,236,452,501**	**13**	**2,691,166,396**	**0.3**	**483,118,676**	**7**	**640,964,786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.7**	**1,124,083,462**	**27**	**4,360,535,963**	**27**	**34**	
																		Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	**60.99**	**41.77**					
																		Predikat Kinerja	**Sedang**						

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi fisik kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika hingga triwulan II Tahun 2025 adalah 60,99% dengan realisasi keuangan sebesar 41,77%. Terdapat perbedaan Fisik dengan keuangan yang dapat diukur sesuai Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai tabel berikut ini.

Tabel II

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukan pencapaian/realisasi fisik kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika masuk pada interval ke Empat yakni 51% ≤ 65% dengan kriteria penilaian "*Rendah*". Sedangkan pencapaian/realisasi kinerja keuangan masih sangat rendah karena capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yakni pada interval ke lima dibawah 50% dengan kriteria penilaian "*sangat rendah*".

Capaian kinerja keuangan program dan kegiatan masih rendah karena masih terdapat beberapa kegiatan yang belum direalisasikan keuangannya sebagai akibat dokumen pendukung belum lengkap.

- Sub Kegiatan yang tingkat pencapaian realisasi fisik masih di bawah atau sama dengan 50% berserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya :

  1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

     Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan Laporan dibuat/dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas yakni sisanya pada Triwulan III dan IV.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan Laporan Keuangan dibuat/dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas yakni sisanya pada Triwulan III dan IV.
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan Pembayaran Honor Penatausahaan Barang SKPD dibayar/ dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas yakni sisanya pada Triwulan III dan IV.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanjanya sebagian belum dibelanjakan dan akan dibelanjakan pada Triwulan III dan IV sesuai Rencana Anggaran Kas.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanjanya sebagian belum dibelanjakan dan akan dibelanjakan pada Triwulan III dan IV sesuai Rencana Anggaran Kas.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanja Perjalanan Dinasnya sebagian belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sesuai Rencana Anggaran Kas.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.

   Realisasi sebesar 50%, realisasinya sama dengan 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanja Materai/Benda Pos serta Honor PPN-PNS baru sebagian dibelanjakan/dibayar sesuai Rencana Anggaran Kas sebagian akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
   Realisasi sebesar 50%, realisasinya dibawah 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanja untuk 4 Rekening Listrik, untuk rekening Listrik Gedung Kantor terrealisasi sesuai yang direncanakan sedangkan Rekening Listrik Videotron baru sebagian kecil di gunakan karena minimnya penggunaan Videotron diupayakan dapat direalisasikan pada Triwulan III dan IV.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Realisasi sebesar 50%, realisasinya dibawah 50% dikarenakan sub kegiatan ini item belanja pengadaan perabot kantor baru sebagaian di belanjakan, diupayakan dapat direalisasikan pada Triwulan III dan IV sesuai anggaran kas.

- Sub Kegiatan yang tingkat pencapaian realisasi fisik sudah di atas atau sama dengan 51% :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   Realisasi sebesar 100%, realisasinya di atas 50% sesuai yang direncanakan.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD.
   Realisasi sebesar 100%, realisasinya di atas 50% sesuai yang direncanakan.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD.
   Realisasi sebesar 100%, realisasinya di atas 50% sesuai yang direncanakan.
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD.
   Realisasi sebesar 80%, realisasinya di atas 50% sesuai yang direncanakan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   Realisasi sebesar 57,14%, realisasinya di atas 50% sesuai yang direncanakan.
6. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Realisasi sebesar 57,89%, realisasinya di atas 50% dikarenakan sudah terdapat 11 kendaraan yang diservice dari 19 yang direncanakan sebagian akan direalisasikan pada semester III dan IV.

7. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
   Realisasi sebesar 70%, realisasinya di atas 50%, item – item pekerjaan pembentuk dokumen sudah didata dan dikerjakan dalam rancangan dokumen sisanya dan akan dikerjakan dan dirampungkan pada triwulan IV.
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
   Realisasi sebesar 60%, realisasinya di atas 50%, item – item pekerjaan pembentuk dokumen sudah didata dan dikerjakan dalam rancangan dokumen sisanya dan akan dikerjakan dan dirampungkan pada triwulan IV.
9. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.
   Realisasi sebesar 60%, realisasinya di atas 50%, item – item pekerjaan pembentuk dokumen sudah didata dan dikerjakan dalam rancangan dokumen sisanya dan akan dikerjakan dan dirampungkan pada triwulan IV.
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pegelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
    Realisasi sebesar 60%, realisasinya di atas 50%, item – item pekerjaan pembentuk dokumen sudah didata dan dikerjakan dalam rancangan dokumen sisanya dan akan dikerjakan dan dirampungkan pada triwulan IV.

Selain faktor faktor di atas yang menyebabkan persentase realisasi belum maksimal terdapat juga faktor lain sebagai akibat dari tidak maksimalnya pencapaian realisasi tersebut yakni :

1. Adanya penjadwalan ulang program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk penyesuaian alokasi anggaran;
2. Disiplin aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang belum maksimal;

3. Belum efektifnya koordinasi administrasi pelaksanaan tugas.

Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih rendah, maka akan diupayakan melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf dengan stakeholder lainnya dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tanggal 31 Mei Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, dapat disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LEMBATA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**3.868.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.691.166.396,00**							**4.051.580.187,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.868.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.691.166.396,00**							**4.051.580.187,00**	
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**3.692.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.641.171.496,00**							**3.875.580.187,00**	
1	**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**2.764.515.268,00**	**2.328.519.122,00**	**2.243.342.946,00**						**25 %**	**2.764.515.268,00**	
	2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**48 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**9.908.178,00**	**5.198.950,00**	**5.198.950,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**12 Dokumen**	**9.908.178,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.076.241,00	1.000.000,00	300.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Dokumen	1.076.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.389.443,00	1.000.150,00	320.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	1.389.443,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.690,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	2.049.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.484,00	1.115.700,00	589.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	1.840.484,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.672.127,00	2.083.100,00	802.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	2.672.127,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	880.193,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	7 Laporan	880.193,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	4 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.075.233.352,00**	**2.074.210.767,00**	**2.074.210.767,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**100 %**	**2.075.233.352,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	26/14 Orang/bulan	26/14 Orang/bulan	1.970.378.324,00	2.000.353.367,00	2.000.353.367,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	26/14 Orang/bulan	1.970.378.324,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103.581.028,00	72.660.000,00	72.660.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	103.581.028,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	713.900,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Laporan	713.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	560.100,00	1.197.400,00	312.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Sisa Belanja Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	36 Laporan	560.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**16 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**21.339.200,00**	**20.510.000,00**	**20.510.000,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**4 Laporan**	**21.339.200,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	437.500,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Dokumen	437.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	391.700,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Laporan	391.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.510.000,00	20.510.000,00	20.510.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Laporan	20.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**695.618,00**	**0,00**	**0,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**1 Dokumen**	**695.618,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	695.618,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Dokumen	695.618,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	5 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**128.740.082,00**	**22.939.202,00**	**22.939.202,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**100 %**	**128.740.082,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.234.014,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	4 Paket	1.234.014,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.494.518,00	7.917.702,00	4.282.616,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Paket	16.494.518,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.011.550,00	5.391.500,00	3.248.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Paket	11.011.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	9.630.000,00	4.780.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**32.175.000,00**	**0,00**	**0,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**25 %**	**32.175.000,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	32.175.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	7 Unit	32.175.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**48 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**363.662.918,00**	**142.990.203,00**	**142.990.203,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**12 Laporan**	**363.662.918,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	338.000.000,00	117.631.000,00	79.231.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Laporan	338.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.672.000,00	23.878.592,00	23.846.312,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Laporan	23.672.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.990.918,00	1.480.611,00	737.251,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	1 Laporan	1.990.918,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**132.760.920,00**	**62.670.000,00**	**62.670.000,00**			-	-	**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata**	**100 %**	**132.760.920,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	0	19 Unit	19 Unit	19 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	19 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 Unit	15 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	83.624.575,00	62.670.000,00	31.370.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	19 Unit	83.624.575,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	6.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	5 Unit	6.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	42.686.345,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	2 Unit	42.686.345,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**265.442.081,00**	**0,00**	**17.199.450,00**							**25 %**	**265.442.081,00**	
	2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**265.442.081,00**	**0,00**	**0,00**			-	**1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**	**Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata**	**25 %**	**265.442.081,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi																	
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	48 Permohonan	0	12 Permohonan	12 Permohonan	12 Permohonan	33.057.975,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	12 Permohonan	33.057.975,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	232.384.106,00	0,00	17.199.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Sisa Belanja Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	4 Media	232.384.106,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																	
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	12 Orang	0	3 Orang	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	3 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	**2**	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya Penerapan Aplikasi Informatika**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**662.990.850,00**	**0,00**	**380.629.100,00**						**25 %**	**845.622.838,00**	
	2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**662.990.850,00**	**0,00**	**0,00**			-	**1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**	**Pemerintah Kabupaten Lembata**	**25 %**	**845.622.838,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																	
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	198.000.000,00	0,00	380.629.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Sisa Belanja Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Kabupaten Lembata	1 Perangkat Daerah	380.631.988,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	20 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	464.990.850,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Kabupaten Lembata	5 Perangkat Daerah	464.990.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**88.000.000,00**	**0,00**	**22.647.300,00**							**88.000.000,00**	
4	**2**	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Ketersedian Dokumen Statistik dan Informasi Daerah**	**25%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**88.000.000,00**	**0,00**	**22.647.300,00**						**25 %**	**88.000.000,00**	
	2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**4 Buku**	**4 Buku**	**88.000.000,00**	**0,00**	**0,00**			-	**1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**	**Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata**	**4 Buku**	**88.000.000,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																	
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	25%	25%	25%	25%	28.000.000,00	0,00	22.647.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Belanja Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	25%	28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																	
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**88.000.000,00**	**0,00**	**27.347.600,00**							**88.000.000,00**	
5	**2**	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**88.000.000,00**	**0,00**	**27.347.600,00**						**25 %**	**88.000.000,00**	
	2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**			-	**3.Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik**	**Pemerintah Kabupaten Lembata**	**25 %**	**70.000.000,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	27.347.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Sisa Belanja Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3.Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3.Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	5 Perangkat Daerah	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**			-	**3.Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik**	**Pemerintah Kabupaten Lembata**	**25 %**	**18.000.000,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3.Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemerintah Kabupaten Lembata	5 Perangkat Daerah	18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												J U M L A H	**3.868.948.199,00**	**2.328.519.122,00**	**2.691.166.396,00**						**4.051.580.187,00**	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pada perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap SKPD

   Pada Renja tahun 2025 terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.764.515.268, sedangkan pada Perubahan Renja tahun 2025 terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.243.342.946.
2. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

   Pada Renja tahun 2025 terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu Rp. 928.432.931, sedangkan pada Perubahan Renja tahun 2025 terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu Rp. 397.828.550.
3. Urusan Wajib Statistik

   Pada Renja Tahun 2025 terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 88.000.000, sedangkan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 22.647.300.
4. Urusan Wajib Persandian

   Pada Renja Tahun 2025 terdiri dari 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 88.000.000, sedangkan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebanyak 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 27.347.600.
5. Adanya pergeseran anggaran antar Kegiatan dan Sub Kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD serta penyesuaian target kinerja.

Dengan demikian secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan sebelum perubahan adalah 5 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.868.948.199. Sedangkan setelah perubahan terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.166.396.

BAB IV
PENUTUP

Demikian rumusan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan R-DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, Agustus 2025

Dibuat oleh,

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika,

Petrus Demong, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700709 200312 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedomankan pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Surat Ederan Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Perikanan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka

mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar subkegiatan, penambahan maupun penghapusan subkegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Perikanan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70Tahun 2019tentangSistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
11. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perikanan Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang RencanaStrategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I: Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika)

- BAB II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

  Bab ini memuat hasil evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai Triwulan II

- BAB III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

  Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan indikator kinerja, target kinerja, target capaian kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan Pagu Indikatif

-BAB IV: Penutup

  Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 Persen**	**25 Persen**	**3.647.207.515,00**	**3.172.070.646,00**	**2.997.108.695,00**	**-283.610.382,00**							**3.363.597.133,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	8.391.931,00	2.373.641,00	1.413.456,00	-6.978.475,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.391.931,00	2.373.641,00	1.413.456,00	-6.978.475,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.553.934.086,00	2.744.883.944,00	2.743.510.519,00	189.576.433,00			-	- -	Aparatur		2.589.356.433,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	2.612.507.169,00	2.612.507.169,00	2.612.507.169,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.409.900.043,00	DINAS PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	121.390.000,00	132.376.775,00	131.003.350,00	9.613.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.456.390,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	40.160.000,00	36.700.000,00	23.240.000,00	-16.920.000,00			-	- -	Aparatur		56.992.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.160.000,00	36.700.000,00	23.240.000,00	-16.920.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.992.500,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	20.798.130,00	2.612.255,00	1.672.862,00	-19.125.268,00			-	- -	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.798.130,00	2.612.255,00	1.672.862,00	-19.125.268,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	307.757.777,00	194.774.938,00	96.130.880,00	-211.626.897,00			-	- -	Aparatur		256.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.613.622,00	2.706.906,00	2.706.906,00	-2.906.716,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.798.055,00	16.161.432,00	7.387.374,00	-13.410.681,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.346.100,00	15.560.600,00	8.007.600,00	-13.338.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	160.346.000,00	78.029.000,00	-181.971.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			222.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 persen	25 persen	58.075.887,00	53.078.009,00	16.143.119,00	-41.932.768,00			-	- -	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	58.075.887,00	53.078.009,00	16.143.119,00	-41.932.768,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 laporan	12 laporan	287.857.200,00	26.233.475,00	26.233.475,00	-261.623.725,00			-	- -	Aparatur		258.908.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00	2.491.775,00	2.491.775,00	-261.508.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.072.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.240.200,00	22.240.200,00	22.240.200,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.336.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.617.000,00	1.501.500,00	1.501.500,00	-115.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	370.232.504,00	111.414.384,00	88.764.384,00	-281.468.120,00			-	- -	Aparatur		61.840.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	92.013.450,00	91.449.857,00	74.529.857,00	-17.483.593,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			41.840.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	99.455.625,00	11.864.527,00	10.829.527,00	-88.626.098,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.663.429,00	0,00	0,00	-100.663.429,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	65.520.000,00	5.520.000,00	2.760.000,00	-62.760.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.580.000,00	2.580.000,00	645.000,00	-11.935.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**				**9000 ton**	**9000 ton**	**660.000.000,00**	**1.367.299.613,00**	**2.870.709.653,00**	**211.000.000,00**							**871.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				9000 Ton	9000 Ton	250.000.000,00	790.000.000,00	319.700.000,00	69.700.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		685.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	5 Unit	250.000.000,00	790.000.000,00	319.700.000,00	69.700.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*				30 orang	30 orang	410.000.000,00	577.299.613,00	2.551.009.653,00	2.141.009.653,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -	Masyarakat nelayan		186.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	410.000.000,00	577.299.613,00	2.551.009.653,00	2.141.009.653,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- -			99.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			87.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**				**9000 ton**	**9000 ton**	**486.000.000,00**	**520.299.607,00**	**450.100,00**	**559.384.000,00**							**1.045.384.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	486.000.000,00	520.299.607,00	450.100,00	-485.549.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	20 Kelompok	300.000.000,00	295.265.982,00	450.100,00	-299.549.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	186.000.000,00	225.033.625,00	0,00	-186.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*terlaksananya pembudidayaan ikan*				9000 ton	9000 ton	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		515.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			374.384.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			86.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**				**20/492,80 M2**	**20/492,80 M2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Rasio konsumsi ikan**				**50 %**	**50 %**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**855.000.000,00**							**1.030.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha*				50 persen	50 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan*				2 jenis	2 jenis	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Nelayan		980.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4500 Ton	4500 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			580.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H								**4.968.207.515,00**	**5.059.669.866,00**	**5.868.268.448,00**	**900.060.933,00**							**6.349.981.133,00**	

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi fisik maupun keuangan yang masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan berikut:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil,

   Masalah : sub kegiatan ini pada pergeseran tahan dua ini, menjadi satu satunya sub kegiatan dimana ada dua sub kegiatan melebur didalam sub kegiatan ini, mengakibatkan adanya keterlambatan dalam proses realisasi anggaran. Selain itu banyak item belanja didalamnya adalah kegiatan pelatihan yang dalam rencana pelaksanaannya terjadi pada akhir periode triwulan 2 sehingga realisasi masih rendah.

   Solusi : perlu adanya Kerjasama antar bidang dan stakeholders, agar proses pelaporan keuangan pasca kegiatan dapat segera dibuat, sehingga mempercepat proses pelaporan keuangan.

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

‘Perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa subkegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan dasar sebagai berikut:

1. Penyesuaian PAD
2. Penyesuaian alokasi belanja dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian dana transfer ke daerah: DAU, DAK, DBH, maupun transfer dari provinsi
4. Adanya Pergeseran kegiatan dan subkegiatan antar-SKPD maupun internal SKPD Penghapusan subkegiatan dan penyesuaian target kinerja Penyesuaian gaji dan tunjangan Penambahan subkegiatan bersifat penting dan mendesak

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEMBATA

TAHUN ANGGARAN 2025

TRIWULAN II

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jaewab
										I		II		III		IV								
	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	DINAS PERIKANAN				**23.217.015.493**		**4.892.984.162**		**5.868.268.448**		**759.883.002**		**1.089.900.528**						**1.849.783.530**		**6.742.767.692**		137,80	Perikanan
3.25.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**13.177.735.493**	**25 Persen**	**2.844.305.723**	**100 Persen**	**2.997.108.695**	**25 Persen**	**687.806.102**	**25 Persen**	**675.650.508**					**25 Persen**	**1.363.456.610**	**25 Persen**	**4.207.762.333**	**25 Persen**	147,94	Perikanan
3.25.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**48**	**200.000.000**		**2.383.000**	**100 Persen**	**1.413.456**		-		-						-		2.383.000		100,00	Perikanan
3.25.1.02.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**24**	40.000.000	2 dok	2.383.000	6 dokumen	1.413.456				-					2 dok	-		2.383.000		100,00	Perikanan
3.25.1.02.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4	20.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40.000.000		-		-		-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	4	40.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	8	40.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**10.242.772.693**	**25 Persen**	**2.460.888.587**	**100 Persen**	**2.743.510.519**	**25 Persen**	**652.317.463**	**25 Persen**	**620.372.477**					**25 Persen**	**1.272.689.940**	**25 Persen**	**3.733.578.527**	**25 Persen**	151,72	Perikanan
3.25.1.02.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	9.524.947.133	14 orang/bulan	2.362.498.587	14 orang/bulan	2.612.507.169	14 orang/bulan	631.751.463	14 orang/bulan	585.194.477					14 orang/bulan	1.216.945.940	14 orang/bulan	3.579.444.527	14 orang/bulan	151,51	Perikanan
3.25.1.02.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	661.825.560	4dokumen	98.390.000	12 Dokumen	131.003.350	4dokumen	20.566.000	4dokumen	35.178.000					4dokumen	55.744.000	1 dokumen	154.134.000	1 dokumen	156,66	Perikanan
3.25.1.02.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	72	28.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**Laporan**	**16**	**227.970.000**	**25 Persen**	**18.928.000**	**100 Persen**	**23.240.000**	**25 Persen**	**5.470.000**	**25 Persen**	**6.720.000**					**25 Persen**	**12.190.000**	**25 Persen**	**31.118.000**	**25 Persen**	**164,40**	**Perikanan**
3.25.1.02.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	140.000.000		-		-		-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	87.970.000		18.928.000	2 laporan	23.240.000	2 laporan	5.470.000	2 laporan	6.720.000						12.190.000	1 laporna	31.118.000	1 laporna	164,40	Perikanan
3.25.1.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**Laporan**	**4**	**90.000.000**		**2.414.250**	**100 Persen**	**1.672.862**		-	**25 persen**	**397.600**						**397.600**		2.811.850			Perikanan
3.25.1.02.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen	4	40.000.000		2.414.250	1 dokumen	1.672.862		-	1 dokumen	397.600						397.600		2.811.850			Perikanan
3.25.1.02.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	50.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**684.000.000**	**25 Persen**	**84.688.755**	**100 Persen**	**96.130.880**	**25 Persen**	**24.150.000**	**25 Persen**	**7.231.500**					**25 Persen**	**31.381.500**	**25 Persen**	**116.070.255**	**25 Persen**	137,06	Perikanan
3.25.1.02.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	4	10.000.000		1.552.000	1 paket	2.706.906	1 paket	-								-		1.552.000		100,00	Perikanan
3.25.1.02.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000		10.343.775	1 paket	7.387.374		-	1 paket	991.500						991.500		11.335.275		109,59	Perikanan
3.25.1.02.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40.000.000		10.878.000	1 paket	8.007.600		-	1 paket	630.000						630.000		11.508.000		105,79	Perikanan
3.25.1.02.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	550.000.000		61.914.980	1 laporan	78.029.000	1 laporan	24.150.000	1 laporan	5.610.000						29.760.000	1 laporan	91.674.980	1 laporan	148,07	Perikanan

3.25.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**25**	**280.000.000**	**25 Persen**	**29.465.250**	**100 Persen**	**16.143.119**	**25 Persen**	-							**25 Persen**	-	**25 Persen**	**29.465.250**	**25 Persen**		Perikanan
3.25.1.02.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	40.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	120.000.000		**29.465.250**	7 unit	16.143.119		-								-		29.465.250			Perikanan
3.25.1.02.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	60.000.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**48**	**1.035.632.800**	**25 Persen**	**179.281.826**	**100 Persen**	**26.233.475**	**25 Persen**	**5.368.639**	**25 Persen**	**3.771.826**					**25 Persen**	**9.140.465**	**25 Persen**	**188.422.291**	**25 Persen**	105,10	Perikanan
3.25.1.02.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	928.288.000	4 laporan	162.500.000	12 laporan	2.491.775	4 laporan	670.500	4 laporan	690.000					4 laporan	1.360.500	1 laporan	163.860.500	1 laporan	100,84	Perikanan
3.25.1.02.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	97.344.800	4 laporan	15.164.826	12 laporan	22.240.200	4 laporan	3.196.639	4 laporan	3.081.826					4 laporan	6.278.465	1 laporan	21.443.291	1 laporan	141,40	Perikanan
3.25.1.02.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.000.000	**4 laporan**	1.617.000	12 laporan	1.501.500	4 laporan	1.501.500		-					4 laporan	1.501.500		3.118.500		192,86	Perikanan
3.25.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**417.360.000**	**25 Persen**	**66.256.055**	**100 Persen**	**88.764.384**	**25 Persen**	**500.000**	**25 Persen**	**37.157.105**					**25 Persen**	**37.657.105**	**25 Persen**	**103.913.160**	**25 Persen**	156,84	Perikanan
3.25.1.02.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	167.360.000		42.548.430	13 unit	74.529.857			2 unit	36.657.105						36.657.105	2 unti	79.205.535	2 unti	186,15	Perikanan
3.25.1.02.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	100.000.000		-												-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.1.02.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	100.000.000	1 unit	6.315.625	2 unit	10.829.527	1 unit								1 unit	-	1 unit	6.315.625	1 unit	100,00	Perikanan
3.25.1.02.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20.000.000		-												-		-			Perikanan
3.25.1.02.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	52	20.000.000		14.885.000	13 unit	2.760.000	2 unit	500.000	21 unit	500.000						1.000.000	3 unit	15.885.000	3 unit	106,72	Perikanan
3.25.1.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		2.507.000	1 unit	645.000		-								-		2.507.000		100,00	Perikanan
3.25.3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan (Jumlah)**	**Ton**	**9500**	**2.884.000.000**	**2000 ton**	**1.459.889.787**	**8000 ton**	**2.870.709.653**	**2000 ton**	**71.626.900**	**2000 ton**	**414.250.020**					**2000 ton**	**485.876.920**	**400 ton**	**1.945.766.707**	**400 ton**	133,28	Perikanan
3.25.3.02.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Ton**	**9500**	**2.140.000.000**	**2000 ton**	**469.141.268**	**8500 ton**	**319.700.000**	**2125 ton**	**13.601.900**	**2125 ton**	**21.924.000**					**2000 ton**	**35.525.900**	**400 ton**	**504.667.168**	**400 ton**	107,57	Perikanan
3.25.3.02.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	140.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.3.02.01.002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	80	2.000.000.000		469.141.268	5 unit	319.700.000	1 unit	13.601.900	1 unit Los TPI	21.924.000						35.525.900	1 unti	504.667.168	1 unti	107,57	Perikanan
3.25.3.02.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**terwujudnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**orang**	**120**	**744.000.000**	**10 orang**	**990.748.519**	**30 orang**	**2.551.009.653**	**10 orang**	**58.025.000**	**10 orang**	**392.326.020**					**10 orang**	**450.351.020**		**1.441.099.539**		145,46	Perikanan

3.25.3.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	120	396.000.000	10 orang	990.748.519	30 orang	2.551.009.653	10 orang	58.025.000	30 pelaku usaha, 87 coolbox, 15 freezerbox, 10 kapal/sampan, 75 alat tangkap, 5 rumpon, 1 paket bibit rumput laut, 1 mesin kapal., rumah penjemuran ikan 1 paket, vacum sealer 1 unit, bak fermentasi 1 unit, meja penjemuran ikan 1 unit, etalase 1 unit, freezer chest 1 unit, coolbox 2 unit	392.326.020					10 orang	450.351.020		1.441.099.539			Perikanan
3.25.3.02.02.003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	348.000.000		-				-							-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan kelompok nelayan (Jumlah)**	**Ton**	**9500**	**3.855.280.000**	**2000 ton**	**588.788.652**	**8500 ton**	**450.100**	**2125 ton**	**450.000**		-					**2000 ton**	**450.000**		**589.238.652**		100,08	Perikanan
3.25.04.02.02	**Pemberdayaan Budi Daya Ikan Kecil**	**Terlaksananannya Pemberdayaan Budi Daya Ikan Kecil**	**Kelompok**		-	**2 kelompok**	**588.788.652**	**9 kelompok**	**450.100**	**2 kelompok**	**450.000**		-					**2 kelompok**	**450.000**		**589.238.652**			Perikanan
3.25.04.02.02.001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	200			266.995.390	20 kelompok	450.100	1 kelompok	450.000		-						450.000		267.445.390			Perikanan
3.25.04.02.02.004	Pemberiaan Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Penegetahuaan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Penegetahuaan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	200			321.793.262	20 kelompok	-		-		-						-		321.793.262			Perikanan
3.25.04.02.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase**	**100**	**140.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.04.02.03.001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	40	140.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.04.02.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**terlaksananya pembudidayaan ikan**	**Ton**	**9500**	**3.715.280.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.04.02.04.001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	220.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.04.02.04.002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	40	3.201.280.000		-				-								-		-			Perikanan
3.25.04.02.04.010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	120	294.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.05.	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**	**Point**	**5/10**	**160.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.05.02.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**terlaksanya pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase**	**100**	**160.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.05.02.01.001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	16	80.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.05.02.01.002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	16	80.000.000		-				-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.06.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Rasio Konsumsi Ikan**	**Ton**	**4750**	**3.140.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.06.02.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha**	**Dokumen**	**200**	**200.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.06.02.01.005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	200	200.000.000		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan

3.25.06.02.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan**	**jenis**	**8**	**2.940.000.000**		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.06.02.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	4.750	1.000.000.000		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan
3.25.06.02.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	120	1.940.000.000		-		-		-								-		-		#DIV/0!	Perikanan

BAB IV. PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, Juli 2025
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lembata,

Hadi Umar, S.Pd., MT
Pembina Uama Muda
NIP.19710412 199903 1 016

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedomankan pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar subkegiatan, penambahan maupun penghapusan subkegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengukur kinerja penyelenggaraan PemerintahanDaerah

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN
(Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika)

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini memuat hasil evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai Triwulan II

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan indikator kinerja, target kinerja, target capaian kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan Pagu Indikatif

BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		**%**	**103**	**10,457,492,254**	**29**	**2,599,517,299**	**43**	**2,652,244,897**	**0.62**	**400,777,542**	**0.73**	**440,635,262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**841,412,804**	**30**	**3,440,930,103**	**29.46626**	**32.90**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**%**	**100**	**7,578,174,450**	**37**	**2,284,021,213**	**34**	**1,823,324,833**	**2.49**	**400,777,542**	**2.93**	**440,635,262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**841,412,804**	**42**	**3,125,434,017**	**42.29167**	**41.24**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**%**	**100**	**200,000,000**	**34**	**45,863,391**	**25**	**15,429,650**	**9.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**-**	**44**	**45,863,391**	**43.75**	**22.93**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	40,000,000	3.00	9,454,190	2	2,468,000	1.00	-							1	-	4	9,454,190	50	23.64
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	2.00	4,818,066	1	2,468,250	1.00	-							1	-	3	4,818,066	75	24.09
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus	Dokumen	4	20,000,000	1.00	4,935,500	1	2,467,150		-							-	-	1	4,935,500	25	24.68

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		unan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	2.00	9,450,948	1	2,468,200	1.00	-							1	-	3	9,450,948	75	23.63
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	1.00	7,824,200	1	2,453,150		-							-	-	1	7,824,200	25	19.56
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin	Laporan	8	40,000,000	2.00	9,380,487	2	3,104,900		-							-	-	2	9,380,487	25	23.45

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		asi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**%**	**100**	**6,203,427,410**	**27.2222**	**1,863,433,064**	**25**	**1,531,911,205**	**2.22**	**351,158,182**	**5.56**	**407,432,349**	**0**	**-**	**0**	**-**	**8**	**758,590,531**	**35**	**2,622,023,595**	**35**	**42.27**
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	56	5,672,355,570	18	1,743,669,576	14	1,401,913,875	4.00	351,158,182	4	363,608,349					8	714,766,531	26	2,458,436,107	46.42857	43.34
2.18.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	475,071,840	12	116,254,090	12	125,240,700		-	6	43,824,000					6	43,824,000	18	160,078,090	37.5	33.70
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Laporan	4	28,000,000	1	1,302,588	1	2,432,850		-							-	-	1	1,302,588	25	4.65

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Tahun SKPD																							
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28,000,000	18	2,206,810	18	2,323,780		-									-	-	18	2,206,810	25	7.88
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**%**	**100.00**	**70,784,000**	**31.25**	**24,356,960**	**25.00**	**27,227,800**	**6.25**	**-**	**6.25**	**10,430,000**					**13**	**10,430,000**	**44**	**34,786,960**	**43.75**	**49.15**
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28,000,000	3	3,846,960	2	2,468,550	1.00	-							1	-	4	3,846,960	50	13.74
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	42,784,000	2	20,510,000	2	24,759,250		-	1	10,430,000					1	10,430,000	3	30,940,000	37.5	72.32

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**	**100**	**40,000,000**	**25**	**4,054,774**	**25**	**2,430,050**	**-**	**-**							**-**	**-**	**25**	**4,054,774**	**25**	**10.14**
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000	1	4,054,774	1	2,430,050		-							-	-	1	4,054,774	25	10.14
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**%**	**100**	**355,000,000**	**25**	**82,739,402**	**25**	**45,948,700**	**-**	**-**	**3.33**	**4,605,000**					**3**	**4,605,000**	**28**	**87,344,402**	**28.33333**	**24.60**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	10,000,000	1	15,117,000	1	4,981,200		-							-	-	1	15,117,000	25	151.17
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000	1	6,431,872	1	3,055,100		-							-	-	1	6,431,872	25	8.04
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000	1	2,013,650	1	6,618,400		-							-	-	1	2,013,650	25	5.03
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyel	Laporan	48	225,000,000	12	59,176,880	12	31,294,000		-	2	4,605,000					2	4,605,000	14	63,781,880	29.16667	28.35

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Konsultasi SKPD	enggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**100**	**60,000,000**	**25**	**51,328,180**	**25**	**-**	**-**	**-**							**-**	**-**	**25**	**51,328,180**	**25**	**85.55**
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	20	60,000,000	5	51,328,180	5	-		-							-	-	5	51,328,180	25	85.55
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**100**	**448,522,640**	**27**	**156,826,112**	**25**	**128,938,028**	**2.08**	**41,869,560**	**8.33**	**17,267,913**					**10**	**59,137,473**	**38**	**215,963,585**	**37.5**	**48.15**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	350,709,240	12	134,945,441	12	93,854,250		34,100,000	6	9,600,000					6	43,700,000	18	178,645,441	37.5	50.94
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	48	87,813,400	15	15,817,524	12	30,083,800	3.00	7,769,560	6	7,667,913					9	15,437,473	24	31,254,997	50	35.59

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan																					
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	10,000,000	12	6,063,147	12	4,999,978		-							-	-	12	6,063,147	25	60.63
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**100**	**200,440,400**	**100**	**55,419,330**	**96**	**71,439,400**	**-**	**7,749,800**		**900,000**					**-**	**8,649,800**	**100**	**64,069,130**	**100**	**31.96**
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	180,440,400	5	37,579,330	5	31,269,400		7,624,800		375,000					-	7,999,800	5	45,579,130	100	25.26
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang layak operasi	Unit	20	10,000,000	20	7,845,000	20	-		-							-	-	20	7,845,000	100	78.45

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	1	9,995,000	-	40,170,000		125,000		525,000					-	650,000	1	10,645,000	100	106.45
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**%**	**100**	**293,200,000**	**25**	**10,067,200**	**25**	**23,179,700**	**-**	**-**							**-**	**-**	**25**	**10,067,200**	**25**	**3.43**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**100**	**293,200,000**	**25**	**10,067,200**	**25**	**23,179,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**10,067,200**	**25**	**3.43**
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	12	293,200,000	3	10,067,200	3	23,179,700		-							-	-	3	10,067,200	25	3.43
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**%**	**100**	**2,004,317,614**	**54**	**198,959,986**	**82**	**706,022,514**	**-**	**-**							**-**	**-**	**54**	**198,959,986**	**53.52**	**9.93**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**%**	**100**	**2,004,317,614**	**54**	**198,959,986**	**82**	**706,022,514**	**-**	**-**							**-**	**-**	**54**	**198,959,986**	**53.52**	**9.93**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	Jumlah Perizinan	2,000	1,246,904,427	1,338	198,959,986	1,538	673,999,414		-							-	-	1,338	198,959,986	66.9	15.96
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	250	252,400,910	-	-	250	12,944,400		-							-	-	-	-	0	-
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha	Kegiatan Usaha	250	505,012,277	-	-	250	19,078,700		-							-	-	-	-	0	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dari pelaku usaha																							
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**%**	**110**	**581,800,190**	**-**	**106,468,900**	**30**	**99,717,850**	**-**	**-**							**-**	**-**	**-**	**106,468,900**	**0**	**18.30**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**110**	**581,800,190**	**-**	**106,468,900**	**30**	**99,717,850**	**-**	**-**							**-**	**-**	**-**	**106,468,900**	**0**	**18.30**
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Perusahaan Tahun	50	200,000,000	0	-	10	12,370,700		-							-	-	-	-	0	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perusahaan Tahun	50	150,000,000	0	-	10	39,446,750		-							-	-	-	-	0	-
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverivikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta	Perusahaan Tahun	50	150,000,000	0	106,468,900	10	15,174,750		-							-	-	-	106,468,900	0	70.98

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha																							
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Lamanya Proses Perijinan**	**Hari**	**5**	**27,266,730**	**-**	**-**	**5**	**10,908,550**																
2.18.05.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lamanya Proses Perijinan**	**Hari**	**5**	**27,266,730**	**-**	**-**	**5**	**10,908,550**																
2.18.05.2.01.0002	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	**Dokumen**	5	27,266,730	**-**	-	5	10,908,550		-							-	-	-	-	0	-		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi fisik maupun keuangan yang masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistim perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik
    - Terhadap kegiatan Belanja PC belum diproses

      Masalahnya : Terjadinya perubahan anggaran pada pekerjaan pengadaan PC sehingga belum dilakukan proses penujukan langsung.

      Solusi : Proses PL sedang dilakukan koordinasi dengan PPK.
    - Terhadap kegiatan Sosialisasi MPP (Mal Pelayanan Publik) belum dilakukan kegiatan

      Masalahnya : Terjadi pengurangan peserta kegiatan diprioritaskan hanya untuk dua kecamatan

      Solusi : Sedang dilakukan proses persiapan dan koordinasi untuk peserta kegiatan sosialisasi.
2. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

   Masalah : Kegiatan berupa pemantauan sudah dilaksanakan tetapi belum semua laporan terkumpul, sehingga belum bisa dibuat laporan hasil kegiatan

   Solusi : Percepatan proses penyelesaian pemantauan agar segera dibuat laporan kegiatan
3. Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko

   Masalah : Penyediaan kanal konsultasi berupa layanan tatap muka, layanan daring (online) layanan telepon dan media social belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha sehingga masih sedikit yang memanfaatkan kanal konsultasi yang disediakan

   Solusi : Pelaku usaha yang berkonsultasi melalui layanan tatap muka secara langsung diberikan pemahaman, penjelasan dan dianjurkan untuk menggunakan kanal layanan yang tersedia.
4. Sub Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

   Masalah : Terhadap sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun yakni ketika data perizinan sudah terinput secara keseluruhan

   Solusi : Sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun ketika semua data sudah diolah dan segera diinput

5. Sub Kegiatan Promosi Penanaman Modal

   (Masalah) : Pada Sub Kegiatan ini Kurangnya jaringan dan promosi yang luas

   Solusi : akan di gunakan berbagai platform digital seperti media sosial, situs web resmi misalnya Facebok,WA,Tiktok ,instagram, dan lain-lain untuk mempromosikan penyebaran informasi mengenai potensi investasi yang ada di Lembata

6. Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya

   Masalah : Ada Perubahan Anggaran sehingga kegiatan ini belum dilakanakan

   Solusi : Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus

7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

   Masalah : Ada Perubahan Anggaran sehingga kegiatan ini belum dilakukan

   Solusi : kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September setelah penetapan perubahan Anggaran Murni

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa subkegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan dasar sebagai berikut:

1. Penyesuaian PAD
2. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian Dana Insentif Fiskal
4. Penysuaian dengan Visi dan Misi Bupati Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029
5. Adanya Pergeseran kegiatan dan subkegiatan antar-SKPD maupun internal SKPD Penghapusan subkegiatan dan penyesuaian target kinerja Penyesuaian gaji dan tunjangan Penambahan subkegiatan bersifat penting dan mendesak

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**3.486.394.370,00**							**2.892.842.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.486.394.370,00**							**2.892.842.350,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.486.394.370,00**							**2.892.842.350,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	**-**			**100 Persen**	**2.306.394.370,00**						**-**	**2.103.242.300,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase capaian kinerja perencanaan dan penganggaran*	-			100 persen	50.000.000,00			-	-	Aparatur	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi keuangan*	-			100 persen	1.657.394.370,00			-	-	Aparatur	-	1.603.805.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.518.394.370,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		1.471.037.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		118.767.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase kualiatas tata kelola administrasi penatausahaan aset*	-			100 persentase	17.696.000,00			-	-	Aparatur	-	17.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.696.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.696.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah*	-			100 persen	10.000.000,00			-	-	Aparatur	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase kualitastata kelola administrasi kepegawaian dan umum*	-			100 persentase	137.000.000,00			-	-	Aparatur	-	84.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi penatausahaan aset*	-			100 persentase	130.000.000,00			-	-	Aparatur	-	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dan Umum*	-			100 Persen	224.304.000,00			-	-	Aparatur	-	112.130.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	168.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		87.677.310,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		21.953.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.304.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase kualitas tata kelola administrasi penatausahaan aset*	-			100 persentase	80.000.000,00			-	-	Aparatur	-	65.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		45.110.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**92.050.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Aparatur	-	92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Aparatur		92.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Lamanya Perizinan***	**-**			**5 Hari**	**640.000.000,00**						**-**	**349.225.810,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan*	-			250 Dokumen	640.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha	-	349.225.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	400.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		134.872.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	140.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		138.753.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				250 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		75.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)***	**-**			**5 Investor**	**370.000.000,00**						**-**	**321.057.510,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*	-			12 Kegiatan	370.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha	-	321.057.510,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	70.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		132.391.537,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		86.359.246,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		102.306.727,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)***	**-**			**5 Investor**	**70.000.000,00**						**-**	**27.266.730,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	-			250 Dokumen	70.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha	-	27.266.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				250 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Peningatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelaku Usaha		27.266.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**3.486.394.370,00**							**2.892.842.350,00**	

BAB IV. PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Kabupaten Lembata disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Kepala Dinas,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab.Lembata,

Benediktus Leuobi, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 2 012

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan; (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: orientasi mengenai perubahan renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja dan penetapan perubahan renja setelah Perubahan RKPD ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata wajib melakukan penyusunan perubahan rancangan renja.

Perubahan Rancangan Renja-Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Selanjutnya dokumen Perubahan Rancangan Renja ini disempurnakan menjadi rancangan akhir perubahan renja dan ditetapkan menjadi dokumen renja perubahan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan.

Dokumen perubahan renja perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sebagai komitmen bersama menuju Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing menuju Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupen Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Lembata Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 288);

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor).
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja adalah : mengakomodir berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran 2025 serta mewujudkan sinergisitas antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I tentang PENDAHULUAN, memuat latar belakang penyusunan perubahan renja yang menjelaskan keterkaitan antara perubahan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, landasan hukum yang memuat penjelasan tentang peraturan perundangan-undangan yang dijadikan acuan penyusunan perubahan renja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II tentang EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan II, menguraikan capaian kinerja, permasalahan atau faktor penghambat dalam merealisasikan kinerja serta solusi atau tindak lanjut yang diperlukan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Bab III tentang RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Pada bagian ini juga diuraikan kompilasi jumlah program/kegiatan dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bagian.

Bab IV PENUTUP, memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target atau belum serta kemungkinan akan tercapai atau tidak pada akhir tahun pelaksanaan sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan Renja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target RKPD pada tahun 2026 (akhir periode RKD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2025	
												I		II			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2					2	3		4		5		6		7		8	
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA	**100**	**30,047,655,100**	**0**	**18,491,983,016**	**20**	**8,605,196,435**	**11.57**	**996,651,589**	**19.68**	**1,467,685,211**	31	**2,464,336,800**
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**100**	**12,634,493,320**	**0**	**7,574,686,377**	**20**	**4,020,784,576**	**8**	**775,794,589**	**13**	**878,659,711**	21	1,654,454,300
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**11,694,858,900**	**0**	**5,579,518,984**	**25**	**2,854,413,589**	**25**	**764,344,539**	**38**	**721,620,701**	63	1,485,965,240
1	**06**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**120,000,000**	**0**	**15,075,150**	**100**	**3,479,200**	**50.00**	**2,775,200**	**25.00**	**467,950**	75	3,243,150
1	06	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	90,000,000	2	7,344,375	2	1,925,350	**1.00**	1,424,700		265,650	1	1,690,350
1	06	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8	30,000,000	2	7,730,775	2	Rp1,553,850	**1.00**	1,350,500	**1.00**	202,300	2	1,552,800
1	**06**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**9,567,358,900**	**0**	**4,849,467,042**	**100**	**2,682,568,694**	**25.0**	**713,338,528**	**29.5**	**684,709,119**	55	1,398,047,647
1	06	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56	8,697,358,900	14	4,580,097,002	14	2,546,990,294	**3.00**	680,459,528	5.00	651,036,819	8	1,331,496,347
1	06	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	750,000,000	9	256,731,550	12	134,066,000	**3.00**	32,879,000	3.00	32,529,000	6	65,408,000

1	06	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72	120,000,000	18	12,638,490	18	1,512,400	**5.00**		5.00	1,143,300	10	1,143,300
1	**06**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**45,000,000**	**0**	**43,478,747**	**25**	**20,940,100**	**0.00**	**5,040,000**	**####**	**5,545,000**	100	10,585,000
1	06	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	45,000,000	1	43,478,747	2	20,940,100	**0.00**	5,040,000	2.00	5,545,000	2	10,585,000
1	**06**	**1**	**2.03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**275,000,000**	**0**	-	**25**	**2,320,080**	**60.00**	**494,000**	**16.00**	**410,000**	76	904,000
1	06	1	2.03	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	45,000,000	1	-	50	2,320,080	**30.00**	494,000	**8.00**	410,000	38	904,000
				00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		230,000,000		-	3	-				-		
1	**06**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**765,000,000**	**0**	**186,034,425**	**100**	**11,702,691**	**14.29**	**1,968,911**	71.43	**7,672,380**	86	9,641,291
1	06	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	80,000,000	20	16,385,304	2	1,685,051	**1.00**	1,278,851			1	1,278,851
1	06	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	60,000,000	1	14,369,383		-				-	-	-
1	06	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	80,000,000	1	12,501,700	2	1,337,640	**1.00**	690,060		647,380	1	1,337,440
1	06	1		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	545,000,000	10	142,778,038	10	8,680,000			10.00	**7,025,000**	10	7,025,000
1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**100**	**225,000,000**		**32,225,000**		**-**		**-**		**-**		**-**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	225,000,000		32,225,000	4	-		-		-	-	-
																-	

1	**06**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**597,500,000**	**0**	**283,294,245**	**100**	**84,487,824**	**16.67**	**36,180,900**	**16.67**	**13,999,950**	33	50,180,850
1	06	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	375,000,000	12	226,980,000	12	62,400,000	**3.00**	33,600,000	3.00	9,600,000	6	43,200,000
1	06	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	190,000,000	12	42,847,655	12	19,468,660	**3.00**	2,580,900	3.00	4,399,950	6	6,980,850
1	06	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	32,500,000	12	13,466,590	12	2,619,164	**0.00**				-	-
1	**06**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**600,000,000**	**0**	**202,169,375**	**100**	**48,915,000**	**8.33**	**4,547,000**	**6.94**	**8,816,302**	15	13,363,302
1	06	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200	570,000,000	50	189,789,375	50	41,240,000	**3.00**	3,922,000	5.00	8,816,302	8	12,738,302
1	06	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	30,000,000	20	12,380,000	20	3,160,000	**3.00**	625,000		-	3	625,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	35,000,000		10,001,964	2	4,515,000						-
																-	
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**25**	**145,000,000**	**0**	**313,805,929**	**25**	**125,720,400**		**2,134,650**		**33,331,630**	-	35,466,280
1	**6**	**2**	**2.01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**100**	**145,000,000**	0	**313,805,929**	**100**	**125,720,400**		**2,134,650**	**0.00**	**33,331,630**	-	35,466,280
1	6	2	**2.01**	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	175	145,000,000	100	23,002,586		-					-	-
1	06	02	**2.01**	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		145,000,000		290,803,343	50	125,720,400		2,134,650		33,331,630		35,466,280
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-		-		-		-		-		-

					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-					
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**25**	**475,000,000**	**0**	**1,464,575,784**	**25**	**1,040,650,587**	**0.00**	**9,315,400**	1.46	**123,707,380**	1.46	133,022,780
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100**	**475,000,000**	**0**	**1,464,575,784**	**100**	**1,040,650,587**	**0.00**	**9,315,400**	**1.46**	**123,707,380**	1.46	133,022,780
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	130	150,000,000	30	650,039,335	30	769,826,100		**9,315,400**	23.00	**110,650,000**	23	119,965,400
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175	175,000,000	40	516,448,645	45	192,520,708					-	-
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5500	150,000,000	100	298,087,804	1500	78,303,779				13,057,380	-	13,057,380
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**25**	**319,634,420**		**216,785,680**	**20**	**-**				**-**	-	-
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**						-				-		-
1	**06**	**06**	2.01	01	Penyediaan Makanan						-				-		
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100**	**319,634,420**	**0**	**216,785,680**						**-**	-	-
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	36	319,634,420	9	216,785,680							-	-

2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**100**	**17,413,161,780**	**0**	**10,917,296,639**	**25**	**4,584,411,859**	**14.84**	220,857,000	**26.23**	589,025,500	###	809,882,500
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**25**	**330,000,000**	**0**	**391,232,568**	**25**	**295,851,600**	**25.00**	**18,907,000**	25.00	**20,734,500**	###	39,641,500
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**330,000,000**	**0**	**391,232,568**	**100**	**295,851,600**	**25.00**	**18,907,000**	**25.00**	**20,734,500**	100	39,641,500
2	14	02	2.02	11	Penyediaan data dan Informasi Keluarga	48	180,000,000	12	**180,900,000**	12	218,446,000	**3.00**	-	**3.00**	-	6	-
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	48	150,000,000	12	210,332,568	12	77,405,600	**3.00**	18,907,000	**3.00**	20,734,500	6	39,641,500
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**25**	**14,291,321,780**	**0**	**7,454,180,423**	**25**	**3,256,905,259**	**4.51**	**2,630,000**	**38.68**	**477,238,000**	###	479,868,000
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**3,980,000,000**	**0**	**3,092,335,148**	**100**	**1,115,230,077**	**4.51**	**2,630,000**	**38.35**	**79,648,000**	###	82,278,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	48	200,000,000	12	660,271,986	12	329,286,577	**3.00**		3.00		6	-
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	48	1,800,000,000	12	1,584,868,272	12	362,340,500	**3.00**	2,630,000	3.00	6,763,000	6	9,393,000
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes, dan Mini Lokakarya	432	1,600,000,000	108	552,245,000	108	300,400,000			45.00	72,885,000	45	72,885,000
2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	380,000,000	1	294,949,890	1	123,203,000					-	-

2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100**	**3,299,200,000**	**0**	**916,135,000**	**100**	**1,254,410,000**	**0.00**	-	**####**	**180,020,000**	**###**	180,020,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	1208	2,699,200,000	302	755,000,000	302	1,064,550,000			302	113,250,000	302	113,250,000
2	14	03	2.02	05	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4	600,000,000	1	161,135,000	1	**189,860,000**			1	**66,770,000**	1	66,770,000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**5,159,000,000**	**0**	**2,991,800,275**		**814,775,232**	**0.00**	-	**16.38**	**217,570,000**	**###**	217,570,000
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48	76,000,000	12	81,087,375	12	14,400,000			0.00	3,600,000	-	3,600,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7230	2,583,000,000	1659	1,777,311,650	1820	800,375,232		-	####	213,970,000	300	213,970,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40	2,500,000,000	24	1,133,401,250		-					-	-
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						-						
2	14	03	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan						-						
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**100**	**1,853,121,780**	**0**	**453,910,000**	**100**	**72,489,950**	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-

2	14	03	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	92	1,853,121,780	23	453,910,000	23	72,489,950					23	-
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**25**	**2,791,840,000**	**-**	**3,071,883,648**	**25**	**1,031,655,000**	**15.00**	**199,320,000**	15.00	**91,053,000**	###	290,373,000
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**2,791,840,000**	**0**	**3,071,883,648**	**100**	**1,031,655,000**	**15.00**	**199,320,000**	**15.00**	**91,053,000**	100	290,373,000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	276	140,000,000	0	868,198,848	453						-	-
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan, serta pengelolaan Keuangan Keluarga	10	800,000,000		277,840,000	10	**35,055,000**		**-**				-
2	14	04	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1812	1,851,840,000	10	,925,844,800	10	996,600,000	**3.00**	199,320,000	3.00	91,053,000	6	290,373,000

Tabel 2.1 terlihat realisasi anggaran Dinas Sosial-P2KB sebesar Rp. 8.605.196.435,- dengan tingkat capaian sebesar 28,64% dan tingkat capaian kinerja masih sangat rendah. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan dalam 2 triwulan kedepan.

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang sampai dengan triwulan II belum memenuhi target (40%)/belum dapat diukur target dan realisasi keuangannya, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
8) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
9) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
10) Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
11) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
12) Penyediaan data dan Informasi Keluarga
13) Pengendalian Program KKBPK
14) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
15) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes, dan Mini Lokakarya
16) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
17) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)
18) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
19) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
20) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
21) Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Terdapat 9 Sub Kegiatan yang telah terealisasi (di atas 40%) dan diprediksikan dapat memenuhi target sampai dengan tri wulan akhir.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah:

1) Terhadap 8 sub kegiatan yang belum teralisasi karena Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
2) Terjadinya efisiensi anggaran yang bersumber dari DAU Spesifik Grand dan DAK sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali..
3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia pendukung kegiatan ini sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan hasil evaluasi beserta faktor penghambatnya, dapat diambil langkah untuk pelaksanaan Renja sampai dengan akhir tahun maupun tahun berikutnya antara lain:

1. Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi keuangan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.
2. Perumusan indikator kinerjanya harus konsisten mulai dari Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja serta DPPA sehingga tidak menghambat dalam proses pengukuran indikator kinerja.
3. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.

2.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANALISIS KEBUTUHAN			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesudah	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.708.529.044,00	8.514.037.126,00	8.605.196.435,00		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8,368,227,890	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.414.765.044,00	3.927.989.767,00	4.020.784.576,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,776,626,396	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.414.765.044,00	3.927.989.767,00	4.020.784.576,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3,776,626,396	
1	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	140.000.000,00	422.999.950,00	125.720.400,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	125,720,400	
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	90.000.000,00	206.999.950,00	206.999.950,00		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	125,720,400	
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT												
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT												
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50 Keluarga	40.000.000,00	206.999.950,00	125.720.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	125,720,400	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	

	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	0 Keluarga	25.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI	-	-	-	942.000.000,00	591.400.128,00	1.040.650.587,00		PROGRAM REHABILITASI	-	-	1,040,650,5	

						SOSIAL								SOSIAL			87	
	1	0 6	0 4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	917.000.000,00	591.400.128,0 0	591.400.128,0 0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1,040,650,5 87	
	1	0 6	0 4	2.0 1	000 1	Penyediaan Permakanan												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 4	2.0 1	000 3	Penyediaan Alat Bantu												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 4	2.0 1	000 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 4	2.0 1	000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	240.000.000,00	241.069.250,0 0	769.826.100,0 0	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	769,826,100	Kab. Lembata, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 4	2.0 1	000 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												

							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang	245.000.000,00	223.123.452,00	192.520.708,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	192,520,708	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	1500 Orang	240.000.000,00	127.207.426,00	78.303.779,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	78,303,779	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3028 Orang	3028 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3028 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan											
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	25.000.000,00	0,00	0,00		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	320.000.000,00	0,00	0,00		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar												
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000000 Orang	10000000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000000 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12618 Keluarga	12618 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12618 Keluarga	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat												
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	155.000.000,00	0,00	0,00		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	55.000.000,00	0,00	0,00		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana												
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kampung	9 Kampung	25.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kampung	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana												

							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.807.765.044,00	2.913.589.689,00	2.854.413.589,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2,610,255,409	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	110.000.000,00	5.798.400,00	5.798.400,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3,479,200	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2.899.200,00	1.925.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,925,350	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2.899.200,00	1.553.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,553,850	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.608.265.044,00	2.683.955.494,00	2.683.955.494,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2,438,410,514	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.368.265.044,00	2.546.990.294,00	2.546.990.294,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2,302,832,114	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	134.066.000,00	134.066.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134,066,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	2.899.200,00	1.512.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,512,400	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	37.000.000,00	21.719.850,00	21.719.850,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	20,940,100	
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	21.719.850,00	20.940.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20,940,100	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	115.000.000,00	21.030.080,00	21.030.080,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2,320,080	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	2.987.080,00	2.320.080,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	2,320,080	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35 Dokumen	35 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35 Dokumen	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	18.043.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	157.500.000,00	15.176.602,00	15.176.602,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11,702,691	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1	0 6	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.494.702,00	1.685.051,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,685,051	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.501.900,00	1.337.640,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1,337,640	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	10.180.000,00	8.680.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8,680,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	250.000.000,00	0,00	0,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
	1	0 6	0 1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba

												Timur						Timur
	1	0 6	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 7	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur
	1	0 6	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	160.000.000,00	113.924.263,00	113.924.263,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	84,487,824	
	1	0 6	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	89.600.000,00	62.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62,400,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	19.468.660,00	19.468.660,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,468,660	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur
	1	0 6	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	4.855.603,00	2.619.164,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,619,164	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba

												Timur						Timur
	1	0 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	370.000.000,00	51.985.000,00	51.985.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48,915,000	
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	250.000.000,00	41.240.000,00	41.240.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	41,240,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 5	Pemeliharaan Mebel												
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	20.000.000,00	4.940.000,00	3.160.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,160,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	5.805.000,00	4.515.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,515,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur
	1	0 6	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur

	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.293.764.000,00	4.586.047.359,00	4.584.411.859,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,591,601,494	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.293.764.000,00	4.586.047.359,00	4.584.411.859,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4,591,601,494	
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	560.000.000,00	295.846.000,00	295.851.600,00		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	150,605,600	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	195.000.000,00	0,00	0,00		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	
	2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan												
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	10 Organisasi	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga												

							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal											
							Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	365.000.000,00	295.846.000,00	295.846.000,00		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	150,605,600	
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	218.446.000,00	218.446.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	73,200,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	77.400.000,00	77.405.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	77,405,600	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain											
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	23 Unit	23 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	23 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana											
							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	3.383.764.000,00	3.258.546.359,00	3.256.905.259,00		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	3,444,395,894	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	850.000.000,00	1.116.978.830,00	1.116.978.830,00		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1,112,779,790	

	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	331.075.330,00	329.286.577,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	325,042,040	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana											
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	362.340.500,00	362.340.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	362,352,750	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	108 Laporan	108 Laporan	200.000.000,00	300.360.000,00	300.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	108 Laporan	300,385,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											

							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	123.203.000,00	123.203.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125,000,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	1.000.000.000,00	1.254.410.000,00	1.254.410.000,00		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	1,432,834,700	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB												
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	9 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	302 Orang	302 Orang	200.000.000,00	1.064.550.000,00	1.064.550.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	302 Orang	1,207,999,700	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua

												Kel/Desa					Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 2	000 5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	189.860.000,00	189.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	224,835,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 2	000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.273.764.000,00	814.697.529,00	814.697.529,00		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	826,031,404	
	2	1 4	0 3	2.0 3	000 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											

							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	43.655.850,00	14.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	14,400,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1820 Orang	1820 Orang	663.764.000,00	771.041.679,00	800.375.232,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1820 Orang	811,631,404	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	15 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB											
							Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Orang	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2	1 4	0 3	2.0 3	001 6	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan												
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	375 Orang	375 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	375 Orang	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	260.000.000,00	72.460.000,00	72.460.000,00		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	72,750,000	
	2	1 4	0 3	2.0 4	000 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	23 Dokumen	23 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	23 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 4	000 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB												
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 4	000 5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas												
							Jumlah DASHAT di Kampung KB	23 Unit	23 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah DASHAT di Kampung KB	23 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	1 4	0 3	2.0 4	000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												

							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Kampung	23 Kampung	100.000.000,00	72.460.000,00	72.489.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Kampung	72,750,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	1.350.000.000,00	1.031.655.000,00	1.031.655.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	996,600,000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	1.250.000.000,00	1.031.655.000,00	1.031.655.000,00		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	996,600,000	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)												
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	35.055.000,00	35.055.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)												
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												

							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	69 Orang	69 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	69 Orang	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200 Orang	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	453 Orang	453 Orang	950.000.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	453 Orang	996,600,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	100.000.000,00	0,00	0,00		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											

							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	12 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)												
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2000 laporan	2000 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2000 laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	JUMLAH									**10.708.529.044,00**	**8.514.037.126,00**	**8.605.196.435,00**					**8,368,227,890**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**10.708.529.044,00**	**8.514.037.126,00**	**8.605.196.435,00**	**-2.103.332.609,00**							**11.874.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.414.765.044,00**	**3.927.989.767,00**	**4.020.784.576,00**	**-1.393.980.468,00**							**5.169.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.414.765.044,00**	**3.927.989.767,00**	**4.020.784.576,00**	**-1.393.980.468,00**							**5.169.500.000,00**	
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**140.000.000,00**	**422.999.950,00**	**125.720.400,00**	**-5.000.000,00**							**135.000.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	90.000.000,00	206.999.950,00	125.720.400,00	35.720.400,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	40.000.000,00	206.999.950,00	125.720.400,00	85.720.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	216.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	0 Keluarga	25.000.000,00	216.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**942.000.000,00**	**591.400.128,00**	**1.040.650.587,00**	**-602.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	917.000.000,00	591.400.128,00	1.040.650.587,00	123.650.587,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		320.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	240.000.000,00	241.069.250,00	769.826.100,00	529.826.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	245.000.000,00	223.123.452,00	192.520.708,00	-52.479.292,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	240.000.000,00	127.207.426,00	78.303.779,00	-161.696.221,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				3028 Orang	3028 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**320.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000000 Orang	10000000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				12618 Keluarga	12618 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Kampung	9 Kampung	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.807.765.044,00**	**2.913.589.689,00**	**2.854.413.589,00**	**36.734.956,00**							**3.844.500.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	5.798.400,00	3.479.200,00	-106.520.800,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2.899.200,00	1.925.350,00	-48.074.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2.899.200,00	1.553.850,00	-13.446.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.608.265.044,00	2.683.955.494,00	2.682.568.694,00	74.303.650,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		2.740.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.368.265.044,00	2.546.990.294,00	2.546.990.294,00	178.725.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	134.066.000,00	134.066.000,00	-65.934.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	2.899.200,00	1.512.400,00	-28.487.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	37.000.000,00	21.719.850,00	20.940.100,00	-16.059.900,00			-	- -	-		37.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	21.719.850,00	20.940.100,00	10.940.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	21.030.080,00	2.320.080,00	-112.679.920,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	2.987.080,00	2.320.080,00	-7.679.920,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35 Dokumen	35 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	40.000.000,00	18.043.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	157.500.000,00	15.176.602,00	11.702.691,00	-145.797.309,00			-	- -	-		207.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.494.702,00	1.685.051,00	-18.314.949,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	2.501.900,00	1.337.640,00	-18.662.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	10.180.000,00	8.680.000,00	-91.320.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.000.000,00	113.924.263,00	84.487.824,00	-75.512.176,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	89.600.000,00	62.400.000,00	-37.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	19.468.660,00	19.468.660,00	-30.531.340,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	4.855.603,00	2.619.164,00	-7.380.836,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	370.000.000,00	51.985.000,00	48.915.000,00	-321.085.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	250.000.000,00	41.240.000,00	41.240.000,00	-208.760.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10 Unit	20.000.000,00	4.940.000,00	3.160.000,00	-16.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	5.805.000,00	4.515.000,00	-55.485.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.293.764.000,00**	**4.586.047.359,00**	**4.584.411.859,00**	**-709.352.141,00**							**6.705.000.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.293.764.000,00**	**4.586.047.359,00**	**4.584.411.859,00**	**-709.352.141,00**							**6.705.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**560.000.000,00**	**295.846.000,00**	**295.851.600,00**	**-50.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		205.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				10 Organisasi	10 Organisasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	365.000.000,00	295.846.000,00	295.851.600,00	-69.148.400,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		305.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	218.446.000,00	218.446.000,00	188.446.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	77.400.000,00	77.405.600,00	-72.594.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				23 Unit	23 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**3.383.764.000,00**	**3.258.546.359,00**	**3.256.905.259,00**	**1.061.236.000,00**							**4.445.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	850.000.000,00	1.116.978.830,00	1.115.230.077,00	265.230.077,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.010.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	331.075.330,00	329.286.577,00	279.286.577,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	362.340.500,00	362.340.500,00	162.340.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				108 Laporan	108 Laporan	200.000.000,00	300.360.000,00	300.400.000,00	100.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	123.203.000,00	123.203.000,00	23.203.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	1.000.000.000,00	1.254.410.000,00	1.254.410.000,00	254.410.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				302 Orang	302 Orang	200.000.000,00	1.064.550.000,00	1.064.550.000,00	864.550.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	189.860.000,00	189.860.000,00	39.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.273.764.000,00	814.697.529,00	814.775.232,00	-458.988.768,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.435.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	43.655.850,00	14.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1820 Orang	1820 Orang	663.764.000,00	771.041.679,00	800.375.232,00	136.611.232,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	15 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				375 Orang	375 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	260.000.000,00	72.460.000,00	72.489.950,00	-187.510.050,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				23 Dokumen	23 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				23 Unit	23 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Kampung	23 Kampung	100.000.000,00	72.460.000,00	72.489.950,00	-27.510.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.350.000.000,00**	**1.031.655.000,00**	**1.031.655.000,00**	**400.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	1.250.000.000,00	1.031.655.000,00	1.031.655.000,00	-218.345.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		1.650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	35.055.000,00	35.055.000,00	-64.945.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				2 Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				69 Orang	69 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				453 Orang	453 Orang	950.000.000,00	996.600.000,00	996.600.000,00	46.600.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	12 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				2000 laporan	2000 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan 2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**10.708.529.044,00**	**8.514.037.126,00**	**8.605.196.435,00**	**-2.103.332.609,00**							**11.874.500.000,00**	

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Catatan Penting dalam Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

a. Setiap Bidang/Seksi, wajib menyusun RKA Perubahan Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Perubahan Renja, maka penyusunan RKA Perubahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

4.2. Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

a. Setiap Bidang/Seksi yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Perubahan Renja tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Perubahan Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

a. Setiap Bidang/Seksi sebagai PPTK harus mendalami Perubahan Renja Tahun 2025 secara sungguh-sungguh saat pembahasan perubahan anggaran.

b. Setiap Bidang/Seksi wajib menyusun DPPA dan Anggaran Kas dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris

Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Setiap Bidang/Seksi selaku PPTK wajib melaksanakan DPPA sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

d. Setiap Bidang/Seksi wajib mengendalikan pelaksanaan DPPA dan membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rumusan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA tahun 2025 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, 2025

Kepala Dinas,

Markus Labi, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196803031995031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perubahan meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

   Meliputi orientasi mengenai Renja Perubahan PD serta penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan

   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B.100.3.4.2/Bapp/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor : 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra PD untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja PD dengan Renstra PD. Penyusunan Renja PD memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya, Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun berkenan dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian,kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan

Evaluasi pelaksanaan renja Triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut ini.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat diikuti pada **tabel 2.2.** Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PMD Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Bumdes yang dibentuk, didampingi dan diberdayakan				-	33,66%	37,38 %	33,66	-			
2.	Persentase Bumdes Aktif				2,08%	27,72%	31,77%	27,72 %				
3.	Persentase Bumdes Berkembang, Maju dan Mandiri				-	27,72%	31,77%	27,72 %	-			
4.	Persentase Desa yang penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berkategori				20,13%	34,03 %	47,91%	40,28%	-			

	"Baik"											
5.	Persentase Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa dan BPD				25%	25%	30%	0%				Tahun 2024 Tidak dianggarkan dalam DPA Dinas
6.	Indeks Desa Membangun(sangat Tertinggal,Tertinggal,Berkembang,Maju dan Mandiri)				10,41%	6,94 %	13,88 %	6,94 %				
7.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				50%	55%	60%	55%				
8.	Persentase PKK Aktif				100%	100%	100%	100%				
9.	Persentase Posyandu Aktif				100%	100%	100%	100%				
10	Persentase Desa yang ditata				2,77%	0,69 %	1,38%	0%				Tahun 2024 Tidak dianggarkan dalam DPA Dinas
11	Persentase Desa yag Melaksanakan Kerjasama				-	-	1,38 %	-				

12	Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-	-	1,38 %	-				
13	Persentase Pengangkatan dan Pemberhentian Kades, Perangkat dan BPD				100%	100%	100%	0%				
14	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				54,34%	50%	55%	45,45%				

Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d semester 1 Tahun 2025, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
   1) Keterbatasan dalam fasilitas peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa;
   2) Belum optimalnya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Membangun Desa;
   3) Rumusan indicator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan selalu tdak selaras denga napa yang dirumuskan dalam dokumen penganggaran sehingga capaian kinerja sulit terukur.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

   Tantangan :
   1) Regulasi yang cukup banyak dan kapasitas SDM di desa yang terbatas;
   2) Masih minimnya fasilitasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di desa;
   3) Angka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Rendah karena belum optimalnya sinkronisasi indicator kinerja dalam dokumen perencanaan dan anggaran sehingga sulit dilakukan pengukuran evaluasi kinerja.

   Peluang :
   1) Adanya Undang-undang yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk transparan dan akuntable dalam penyelenggaraan kewenangan desa;
   2) Adanya SDM pada Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang perlu difasilitasi dan dibina;
   3) Penerapan SIPD dalam perencanaan, penganggaran dan penatausahaan.

   Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang perlu

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat;
2. Optimalisasi peran Lembaga pemberdayaan Masyarakat desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan keberdayaan Masyarakat khususnya terhadap isu nasional dan masalah daerah yang sedang berkembang;
3. Keterbukaan informasi melalui digitalisasi untuk meningkatkan daya saing desa menuju kemandirian desa.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan akhir RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Dari tabel perbandingan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat dijelaskan bahwa Pagu indikatif pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan berbeda, dimana pagu rancangan akhir RKPD sebesar Rp. 4.046.391.876,00 sedangkan pagu hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 4.778.392.743,00

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat yang merupakan prioritas kecamatan, diajukan/disampaikan saat musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, disesuaikan/dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan unsur penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada tahun rencana 2025, tidak terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tabel usulan program/kegiatan/sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 termuat pada tabel **2.4** di bawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penataan Desa	Kecamatan Wulandoni		15 Desa	
2	Penataan Desa	Kecamatan Buyasuri		20 Desa	
3	- Persehatian Batas Desa - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kecamatan Omesuri		22 Desa	
4	- Penataan Desa - Pelatihan LKM, LPMD dan Lembaga Adat - Pemetaan Wilayah Desa dan Status Desa - Evaluasi, Asistensi dan Posting dilakukan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Ile Ape Timur Desa Jontona Desa Lamawolo Desa Lamatokan		9 Desa	
5	- Persehatian Batas Desa - Penetapan dan Penegasan Batas Desa - Pelatihan Keterampilan dan manajemen BUMDesa	Kecamatan Nagawutun Desa Ile Boli		18 Desa	

	- Pelatihan Keterampilan Karang Taruna - Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD - Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa - Pembangunan Gapura Batas Kecamatan - Bantuan Perumahan P2LDT	Desa Atawai, Liwulagang, Tewaowutung, Belabaja Tawaowutung Lusiduawutun Baobolak			Kewenangan Desa Kewenangan Kecamatan Kewenangan Disperkimtan
6.	- Persehatian Batas Desa - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kecamatan Atadei		15 Desa	
7	- Persehatian Batas Desa dan Kecamatan - Seminar Syandarisasi Urusan Adat	Kecamatan Ile Ape		17 Desa	
8	- Pelatihan Manajemen Bumdes - Pemasangan Pilar Batas Desa - Penyuluhan dan Pelatihan Kader Kesehatan - Pelatihan Kelompok Pelaksana SDGs Desa - Sosialisasi Sadar Hukum tentang Ulayat dan Hak Adat Desa - Pemberdayaan Karang Taruna	Kecamatan Lebatukan		17 Desa	Kewenangan Dinkes

9	- Penguatan Kapasitas Perangkat Desa - Fasilitasi Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa - Fasilitasi Penyelesaian Batas Administrasi Desa - Pelatihan Aparat/Perangkat Desa dan BPD - Penguatan Kelembagaan SDM, Sarana Prasarana serta Modal Usaha Bumdes - Pembangunan Kantor Desa - Pembangunan kantor BPD - Pemeliharaan Monumen Gapura Masuk Desa - Persehatian Batas Desa - Pembinaan PKK - Penyelenggaraan Bulan bakti Gotong Royong -	Kecamatan Nubatukan	11 Desa		Kewenangan Setda Bagian Adm. Pemerintahan Kewenangan Desa Kewenangan Desa Kewenangan Desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia(HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritime industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda.
2. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik; Prioritas nasional ini diturunkan ke dalam program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas Transformasi Pelayanan Publik. Program dan kegiatan prioritas nasional ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	*2*	*3* Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 terlihat pada **tabel 3.1** berikut	*4*	*5*
1.	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan.	Meningkatnya Nilai tambah dan Lapangan kerja	➢ Persentase Bumdes yang dibentuk, didampingi dan diberdayakan ➢ Persentase Bumdes Aktif ➢ Persentase Bumdes berkembang, Maju dan Mandiri	Ada Ada Ada
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi (terkhusus bekaitan dengan pembinaan serta	Terwujudnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	➢ Persentase Desa yang penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan keuangan	Ada

	pengawasan Pemerintahan Desa)		dan asset Desa berkatgori Baik ➢ Persentase Pembinaan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa dan BPD ➢ Indeks Desa Membangun (sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri)	 Ada Ada
3.	Meningkatnya Kemandirian Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa, Lembaga Adat ingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta cakupan sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Desa	➢ Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK ➢ Persentase PKK Aktif ➢ Persentase Posyandu Aktif	Ada Ada Ada
4.	Memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada urusan pemerintahan di	➢ Persentase Desa yan ditata ➢ Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama ➢ Persentase Penetapan dan Penegasan batas Desa ➢ Persentase Pengangkatan dan Pemberhentian Kades,	Ada Ada Ada Ada

		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai Perda Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah	Perangkat dan BPD ➢ Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Ada

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
b. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026.
c. Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2025 sebanyak 4 Program, 10 Kegiatan, 24 sub kegiatan, dengan total pagu indikatif terbaru hasil efisiensi sebesar Rp. 4.046.391.876,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.442.480.414,-
2. Program Penataan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 74.999.800,-
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 37.924.950,-.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 65.704.475,-.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp.1.425.282.237,-.

   Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata dalam Perubahan Renja 2025, sebagaimana **tabel 4.1** berikut :

BAB IV.

PENUTUP

Renja Perubahan PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja Perubahan PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja perubahan ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penjabaran Renja Perubahan ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2025

Kepala Dinas PMD,

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS PMD

Yosep Raya, S.Sos

Nip. 19661224 199503 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Renja memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan perencanaan operasional dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen ini secara spesifik merupakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Lembata untuk Tahun 2025. Status "Perubahan" ini merefleksikan sebuah proses perencanaan yang dinamis dan adaptif, yang tidak hanya berorientasi ke depan, tetapi juga bercermin pada pelaksanaan kinerja di masa lalu. Keputusan untuk menyusun Renja Perubahan didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mengidentifikasi adanya sejumlah tantangan dan kendala dalam implementasi program dan kegiatan tahun 2024. Ditemukan adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realisasi capaian kinerja dan serapan anggaran. Sejumlah besar sub-kegiatan menunjukkan realisasi yang sangat rendah, bahkan nol, yang mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Kondisi ini menuntut adanya peninjauan kembali dan penyesuaian strategis agar perencanaan tahun 2025 menjadi lebih realistis, efektif, dan mampu menjawab isu-isu prioritas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih optimal.

Dengan demikian, Renja Perubahan ini disusun dengan fokus pada pengkajian ulang terhadap kondisi internal perangkat daerah, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan penyelarasan kembali dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata

Tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi Dinas P2PA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang lebih tajam, terukur, dan akuntabel untuk diimplementasikan pada tahun anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Selanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator TIngkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Sagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
10. Peraturan Supati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Serita daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata (Serita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Serita daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Mengetahui hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II
2. Mengetahui Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dokumen Renja Perubahan.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRW II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan 11, menguraikan capaian kinerja, permasalahan atau faktor penghambat dalam merealisasikan kinerja serta solusi atau tindak lanjut yang diperlukan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,penambahan atau pengurangan target kinerja,pagu indikatir, lokasi, Kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan dan penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau pemerintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Pada

bagian ini j dmraikan kompilasi jumlah program/kegiatan dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bagian.

BAB IV: PENUTUP

Ba · i memuat kaida pelaksanaan perubahan Renja Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, mengidentifikasi Realisasi pencapaian target kinerja Program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target Kinerja yang ditetapkan atau belum? Dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target/belum serta kemungkinan akan tercapai atau tidak pada akhir tahun pelaksanaan sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel 11.1

EVAUASI HASIL

PELAKSANAAN RENJA

SAMPAITRWII

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian Urusan PemerIntah Daerah, Organisasl, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome)/ Kegiatan (Output)	ISatuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhlr Perlode Renstra SKPD)renstra 2023 -2026		Realisasl Capalan KInerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran dan Renja SKPD Tahun Berjalan 2025 yang Dlevaluasl		Realisasl Triwulan II	Realisasl Capalan KInerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dlevaluasl			Realisasi Kfnerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026		Target Capalan KInerja dan Reallsasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun %		UnttSKPD Penanggung jawab
1	2	3		4		5		6		7			8=7/6*100%		9=5+7		10=9/4*100%	11
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16,486,095,486		3,471,588,070		3,031,197,929		554,825,958	33,33	18		4,026,414,028		24.42	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan program penunjang urusan pemerIntah daerah			9,570,607,534		1,620,276,145		1,753,296,343		475,197,737		27		2,095,473,882		21.89	

2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasl Klnerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasl Klnerja Perangkat Daerah	Dokumen	....	175,102,390		12,194,229		6,861,350	-	4,537,400	-	66		16,731,629		9.56	Sekretarlat
2.08.01..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	25,119,780		2,414,005	9	1,327,750		1,102,750		83		3,516,755		14.00	Sekretariat
2.08.01.12.01.00[]2	Koordinasl dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	25,000,000		2,398,546	9	1,599,150		929,150		58		3,327,696		13.31	Sekretarlat
2.08.01.2.01.0003	Koordinasl dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordlnasl	Dokumen	4	25,000,000		2,468,525	9	1,448,550		594,600		41		3,063,125		12.25	Sekretarlat

		Penyusunan Dokumen Perubahan																
	Koordlnasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordlnasl Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	25,000,000		0		0		0		-		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasll Koordinasl Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	4	25,000,000		-		-		-		-		-		-	

2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtJsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan lkhtJsar Reallsasl Kinerja SKPD dan Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtlsar Reallsasl Klnerja SKPD	Dokumen	4	24,982,610		2,447,369	2	1,161,950		811,950		70		3,259,319		13.05	Sekretariat
2.08.01..01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasl Klnerja Perangkat Daerah	Ookumen	16	25,000,000		2,465,784	4	1,323,950		1,098,950		83		3,564,734		14.26	Sekretarlat
2.08.01.2.02	Admlnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Admlnistrasi Keuangan Oaerah	Laporan	57	7,212,664,188		1,381,700,962		1,599,826,930		441,184,087		28		1,822,885,049		25.27	Sekretarlat

2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajl dan Tunjangan ASN	bulan	56	6,635,118,652		1,292,636,386	14	1,498,363,730		391,180,087		26		1,683,816,473		25.38	Sekretarlat

""

2.08.01.2.02.0002	Penyedlaan AdmlnlstraslPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen HasIl Penyediaan AdminlstraslPelaksanaan TugasASN	bulan	48	549,916,200		86,940,000	14	100,008,000		50,004,000		50		136,944,000		24.90	Sekretarlat
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPDdan Laporan Hasi Koordinasl Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	lapora n	8	27,629,336		2,124,576	2	1,455,200		-		-		2,124,576		7.69	Sekretariat
2.08.01.2.03	Admlnistrasl Barang Mllik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Mllik Daerah pada Perangkat Daerah	Doku men	16	100,990,988		14,653,854		14,202,150		6,480,000		46		21,133,854		20.93	Sekretariat
	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana	Unit	8	23,000,000				-		-		-		-		-	

	Kebutuhan Barang Mllik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Mlllk Daerah SKPD																
2.08.01.2.03.0005	Rekonsillasi dan Penyusunan Laporan Barang Mlllk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonslllasl dan Penyusunan Laporan Barang Millk Daerah pada SKPD	Lapor an	8	77,990,988		14,653,854	2	14,202,150		6,480,000		46		21,133,854		27.10	Sekretarlat
2.08.01.2.05	Admlnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasl Kepegawaian	Doku men	8	335,100,000				3,216,536		-		-		-		-	
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Admlnistrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Admlnlstrasl Kepegawalan	Doku men	3	15,000,000				1,685,800		-		-		-		-	
	Koordlnasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasll	Doku men	4	22,000,000													

	Slstem Informasl Kepegawalan	Koordlnasl dan Pelaksanaaan Slstem Inforrnasl Kepegawalan									·		·		·		·	
	Soslallsasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Menglkutl Soslallsasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	360	138,100,000						·		·		-		·	
	Blmblngan Teknis Implementasl Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikutl Bimblngan Teknis Implementasl Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	160,000,000						-		-		-		-	
2.08.01.2.05.0005	Monltoring,Evaluasl, dan Penilaian KlnerJa Pegawal								1,530,736		-		-		·		-	
2.08.01.06		Cakupan Pelayanan Admnlstrasl Umum		100	1648,111,071		45,883,311		39,822,327		5,656,250		14		51,539,561		7.95	Sekretarlat

	AdmlnlstrasI Umum Perangkat Daerah	Perkantoran yang tersedla pada Perangkat Daerah	Dokumen															
	Penyedlaan Komponen Instalasl Llstrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasl Llstrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	10,000,000						-		-		-		-	Sekretarlat
2.08.01.2.06.0002	Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	117,500,000	10	3,584,741	10	8,458,627		-		-		3,584,741		3.05	Sekretarlat
2.08.01.2.06.0005	Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedlakan	Paket	50	90,000,000	12	2,647,220	13	3,815,700		1,951,250		51		4,598,470		5.11	Sekretarlat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	4	2,000,000		-				-		-		-		-	

	Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan															
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasl dan Konsultasl SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasl SKPD	Dokumen	80	1428,611,071	20	39,651,350	20	27,548,000		3,705,000		13		43,356,350		10.12	Sekretariat
	Pengadaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerlntah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	1410,000,000						-		-		·		-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operaslonal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan yang Dlsediakan	Unit	4	90,000,000						·		·		·		-	Sekretarlat
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel																

		yang Dlsediakan	Paket	12	1200,000,00						.		.		.		.	Sekretarlat
	Pengadaan Peralatan dan Mesln Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	120,000,000						.		.		.		.	Sekretariat
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapor an	144	385,638,897		26,717,800		51,387,050		3,841,500		7		130,559,300		33.86	Sekretariat
2.08.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	48	176,980,000	12	80,360,000	12	4,254,250		2,000,000		47		82,360,000		46.54	Sekretarlat
2.08.01.2.08.00 02	Penyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ustrlk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasl, SumberDaya Airdan Ustrlk	Lapor an	48	57,500,000	12	15,307,800	12	15,307,800		1,841,500		12		17,149,300	.	29.82	Sekretarlat

		yang Dlsedlakan																
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedlakan	Laporan	48	151,158,897	12	31,050,000	12	31,825,000		-		-		31,050,000		20.54	Sekretariat
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertntahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondlsl Baik (setelah dllakukan Pemellharaan)	Unit	120	03,000,000		39,125,989		37,980,000		13,498,500		36		52,624,489		17.37	Sekretarlat
2.08.01.2.09.0001	Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlzlnan Kendaraan perorangan Dlnas atau kendaraan dlnas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan yang Dlpellhara dan dlbayarkan Pajak dan Pertzlnannya	Unit	40	200,000,ooo		39,125,989	10	37,980,000		13,498,500		36		52,624,489		26.31	Sekretarlat

	Pemellharaan Peralatan dan Mesln Lalnnya	Jumlah Peralatan dar Mesln Lalnnya yang Dlpelihara	Unit	40	23,000,000						·		·		·		·	Sekretarlat
	Pemellharaan/Reh ablll tasl Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lalnnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lalnnya yang Dlpelihara/Dir ehabllitasl	Unit	40	80,000,000						·		-		·		-	Sekretarlat
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase anggaran yang responsif gender pada APBD	Paket	13	1,815,000,000		59,895,54E		483,381,697		19,141,486		4		579,037,034		31.90	PUG
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemertntah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/Insta nsl pemerintah tlngkat daerah		39	1,280,000,000		·		·		·		-		·		-	PUG

		kabupaten/kota yang telah																
2.08.02.2.01.0002	Koordinasl dan Slnkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenagan Kabupaten/Kota								-		-		-		-		0	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasl dan Slnkronlsasi Perumusan Kebljakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasl dan Sinkronisasi Perumusan Kebljakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	Dokumen	4	340,000,000						-		-		-		-	
	Koordinasi dan Slnkronlsasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	Dokumen	4	-						-		-		-		0	

	Advokasl Kebijakan dan Pendamplngan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikutl Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembanguna n Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/K ota		156	.						-		-		.		0	
2.08.02.2.01.00 08	Sosiallsasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenagan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikutl Soslalisasl Kebijakan Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG) Termasuk		156	1340,000,000				.		-		-		-		.	

		Perencaan Pembanguna n Responsif Gender (PPRG) Kewenangan																
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bldang Polltlk, Hukum, Soslal, dan Ekonoml pada Organisasl Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasl Masyarakat yang Mendapat Advokasl dan Pendampinga n Kebljakan Peningkatan Partisipasi Perempuan d Bidang Politik, Hukum, Soslal dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/K ota		100	l260,000,00C		47,778,540		67,561,697		19,141,486		28		66,920,026		25.74	PUG
	Soslallsasl Peningkatan Partislpasl Perempuan di Bldang Polltlk,	Jumlah Dokumen Hasil Soslalisasl Penlngkatan Partislpast Perempuan di	Ooku men	4	20,000,000						-		-		-		-	

	Hukum, Soslal dan Ekonoml	Bidang Politlk, Hukum, Soslal dan Ekonoml Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.08.02.2.02.0002	Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan Peningkatan Partislpasl Perempuan dan Polltlk, Hukum, Soslal dan Ekonoml	Jumlah Organlsasl Masyarakat yang Mendapat Advokasidan Pendamplnga n Kebljakan Penlngkatan Partlslpasl Perempuan di Bldang Politlk, Hukum, Sosial dan Ekonoml Kewenangan	Jenls	**25**	**40,000,00CJ**	8	**47,778,540**	6	**67,561,697**		**19,141,486**		**28**		**66,920,026**		**47.80**	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedla l,.ayanan yang dllatlh dan dldamplngl	Jenls	**50**	1275,000,000		12,117,008		**415,820,000**		**-**		**-**		**512,117,008**		**186.22**	**PUG**

	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.08.02.2.03.0004	Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan kepada Lembaga Penyedla Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedla Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasl dan	lembaga	50	140,000,000	10	1410,835,000	20	415,820,000		·		·		410,835,000	-	293.45	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kmunikasi, Informasi dan Edukasl {KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedla Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penlngkatan Kapasltas	lembaga	50	135,000,000		101,282,00S	50			·		·		101,282,008		75.02	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Raslo terhadap Kekerasan Perempuan		100	1,322,096,103		449,793,765		266,374,884		31,923,876		12		481,717,641		36.44	P3KTPA

		termasuk Korban TPPO (Per 100.000 Penduduk)																
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan LIngkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasll Koordinasl dan SInkronisasl Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1237,096,103		22,482,752		266,374,884		31,923,876		12		154,406,628		65.12	P3KTPA
	Koordinasi dan SInkronIsasi Pelaksanaan Kebljakan, Program dan Keglatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Jumlah Dokumen Hasll Koordinasl dan SInkronIsasl Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Keglatan Penc8iJahan	Ookumen	4	1237,096,103						-		-		-		-	

	Perempuan LIngkup Daerah	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
2.08.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Advokasi Kebljakan dan Pendampingan Layanan PerlIndungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga advokasi kebljakan dan pendaplngan layanan perlIndungan perempuan kewenangan			-	2	122.482,76	2	266,374,884		31,923,876		12		**154,406,628**		-	
2.08.03.2.02	Penyedlaan Layanan Rujukan Lanjutan bagl Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordlnasl Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayanl		100	1435,000,000		1206,112,131		-		-		-		206,112,131		47.38	P3KTPA
	Penyedlaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan **Kewenangan**	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan TIngkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	Laporan	64	55,000,000						-		-		-		-	

		Layanan Pengaduan																
2.08.03.2.02.0002	Koordinasl dan Slnkronfsasi Pelaksanaan Penyedlaan Layanan Rujukan Lanjutan bagl Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tlndak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordlnasl dan Slnkronlsasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K **Ota**		**48**	1180,000,000	12	206,112,131	13	**-**		**-**		**-**		206,112,131		**114.51**	
2.08.03.2.03	Panguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Perllndungan Perempuan Tlngkat Daerah	Jumlah organlsasi kemasyaraka1an yang bergerak dim bldang perempuan tlngkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		**25**	S0.000,00<J		1121,**198,88**		**-**		**-**		**-**		121,**198,882**		**18.65**	**P3KTPA**

	Advokasl Kebljakan dan Pendampingan Penyedlaan Sarana Prasarana Layanan bagl Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasl Kebljakan dan Pendampinga n Penyedlaan Sarana Prasarana Layanan bagl Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Unit	4	1650,000,00C					-		-		-		-	
2.08.03.2.03.00 02	Sub Keglatan Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Lembaga Penyedla Layanan Penanganan bagl Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						21,198,88		-		-		-		121,198,882		0	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditanganl	Unit	100	1,040,000,0 00		46,557,585		150,318,079		-		-		146,557,585		14.09	P3KTPA

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Plhak Llngkup Oaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartlslpasl dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Llngkup Daerah Kabupaten/Kota	Unit	39	40,000,000		146,557,585		150,318,079		-		-		146,657,585		81.07	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi Kebljakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan Pelaksanaan Kebljakan, Program dan Keglatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Unit	39	140,000,000		146,557,585		150,318,079		-		-		146,557,585		104.68	

		Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Koordlnasi dan Slnkronisasl Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasll Koordinasl dan Sinkronisasl Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan		4	100,000,000						-		-		-		-	
10402 2.01	Penyedlaan Layanan bagl Anak yang Memerlukan Perllndungan Khusus yang Memerlukan Koordlnasl Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perllndungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		80	1400,000,000		-				-		-		-		-	
	Penyedlaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagl Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perllndungan Khusus																

1.04.02.2.01.0002	Memer1ukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		**80**	100,000,ooo						-		-		-		-	
1.04.02.2.01.0003	KoordInasI dan Sinkronisasl Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan PerlIndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan TIndak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasl dan Sinkronisasl bagi Anak yang Memerlukan PerlIndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**200**	00,000,000						-		-		-		-	
	Pengembangan KomunIkasI, InformasI dan EdukasI Anak yang Memerlukan PerlIndungan Khusus	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasl (KIE) Anak yang Memerlukan PerlIndungan		4	00,000,000								-		-		-	

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Khusus Kewenangan Kabupaten/K **Ota**																
	Penguatan Jejarlng antar **Lembaga** Penyedla Layanan **Anak** yang Memerlukan Perllndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarlng Antar Lembaga Penyedla Layanan Anakyang Memerlukan Perllndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/K **Ota**		**4**	00,000,000						**-**		**-**		**-**		**-**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan bagl Anak yang Memertukan Pertlndungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedla Layanan bagl Anakyang		8	400,000,000		**-**						**-**		**-**		**-**	

		Memer1ukan Per11ndungan Khusus TIngkat Daerah Kabupaten/K Ota																

	Koordlnasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagl Anakyang Memerlukan Perlindungan Khusus Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasl dan Slnkronisasl Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anakyang Memerlukan Perllndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/K **Ota**		4	200,000,000							-		-		-	
	Koordlnasl dan Sinkronisasi Penlngkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan **Anak** yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasll Koordinasl dan Slnkronisasi Peningkatan Kapasltas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anakyang Memerlukan Perllndungan		**4**	100,000,000						-		-		-		-	

		Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Koordlnasl dan Slnkronlsasl Penguatan Jejarlng antar Lembaga Penyedla Layanan Anak yang Memerlukan Perllndungan Khusus Tlngkat Oaerah Kabupaten/Kota PROGRAM	Jumlah Ookumen Hasll Koordinasi dan Slnkronlsasl Penguatan Jejaring anta Lembaga Penyedla Layanan Anakyang Memerlukan Perllndungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan		4	1100,000,000						-		-		-		-	
2.08.04	PENINGKA TAN KUALITAS KELUARGA	pelaksanaan PUG dalam keluarga		100	804,000,00(1		295,940,502		252,560,939		20,108,508		8		316,049,010		39.31	PUG

2.08.04.2.01	Peningkatan Kualltas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak TIngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasl, Informasl, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender(KG) dan Perlindungan Anak bagl Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	84,000,000		116,655,117		87,871,319		8,960,111		10		125,615,228		32.71	
	Advokasl Kebljakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan PerlIndungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasl dan Pendampinga n Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan PerlIndungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		156	04,000,00(		45,085,960				-		-		45,085,960		22.10	

2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Infonnasi dan Edukasi KG dan Perllndungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Infonnasl, Edukasl (KIE) Kesetaraan Gender(KG) dan Perlindungan Anak bagl Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang		3	180,000,00(				-		-		-		-		-
2.08.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengembangan Keglatan Masyarakat untuk Penlngkatan Kualltas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						71,569,157		87,871,319		8,960,111		10		80,529,268		-

2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualltas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan HakAnak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualltas Keluarga yang mendapat Advokasl dan Pendamplngan		4	280,000,000		179,285,385		164,689,620		11,148,397		7		190,433,782		68.01	
2.08.04.2.02.0001	Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Penlngkatan Kualltas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendamplngan		4	140,000,000		112,402,127		124,723,384		5,858,911		5		118,261,038		84.47	
	Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Lembaga	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedla																

2.08.04.2.02.0002	Penyedia Layanan Penlngkatan Kualltas Keluarga Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Penlngkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penlngkatan Kapasltas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		80	140,000,000		66,883,258		39,966,236		6,289,486		13		72,172,744		51.55	
1.04.02.2.03.01	Penyedlaan Layanan bagl Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan om prehens If bagl Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Perlindunga n Anak yang Wllayah Kerjanya Llngkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedla	Unit	80	140,000,000						-		-		-		-	

	Pelaksanaan Penyedlaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam MewuJudkan KG dan Perlindungan Anak yang WIlayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan ,<omprehens If bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindunga n Anakyang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia		80	140,000,000						-		.		.		-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPDyang Memanfaatk an Ssitem Data berbasls Gender dalam Perencanaa n Daerah		100	341,410,000		-					-		-		-	

	Pengumpulan, Pengolahan Anallsls dan Penyajlan Data !Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Kabupaten/ Kota yang Tersedla		8	341,410,000		-				-		-		-		
	Penyedlaan Data K,ender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedla		8	70,500,000						-		-		-		
	Penyajlan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajlan dan Pemanfaatan Data Genderdan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan		8	270,910,000						-		-		.		.

2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak		100	1,592,981,849		399,124,525		125,265,987		8,454,351		7		407,578,876		25.59	PJKPA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerIntah, NonpemerIntah, dan Dunla Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasll pelaksaan Pelembagaan **PHA pada** Lembaga PemerIntah, Nonpemerintah, dan Dunla Usaha Kewenangan		**4**	**1,177,981,849**		**399,124,525**		**125,265,987**		**8,454,351**		7		**407,578,876**		**34.60**	**P3KPA**
2..08.06.2.01.0001	Advokasl Kebljakan dan Pendamplngan Pemenuhan Hak **Anak pada** Lembaga PemerIntah, Non PemerIntah, **Media** dan Dunla Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OrganIsasl PemerIntah, Non PemerIntah, **Media** dan Dunla Usaha yang Mendapat Advokasl Kebljakan dan Pendamplng		4	260,000,000		**399,124,525**		**125,265,987**		**8,454,351**		7		**407,578,876**		**156.76**	**P3KPA**

		an Pemenuhan HakAnak pada Organisasl Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan																
	KoordlnasI dan SlnkronlsasI Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasII Koordinasl dan SlnkronlsasI Pelembagaan Pemenuhan HakAnak Kewenangan		4	917,981,849						-		-		-		-	P3KPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan PenIngkatan Kualltas HIdup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasIlPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan PenIngkatan		8	1415,000,000						-		-		-		-	

		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota																
	Penyedlaan Layanan Penlngkatan Kualltas Hldup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anakyang Mendapatkan Layanan Penlngkatan Kualltas HldupAnak Kewenangan		80	H15,000,00c						.		.		.		.	P3KPA
	Koordlnasl dan Slnkronlsasl Pelaksanaan Pendamplngan Penlngkatan Kualltas Hldup Anak Tlngkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasll Koordlnasl dan Slnkronlsasl Pelaksanaan Penlngkatan Kualltas HldupAnak Kewenangan		4	H00,000,000						.		.		.		.	P3KPA

	Pengembangan Komunikasl, lnfonnasl dan Edukasl Pemenuhan Hak Anak bagl Lembaga Penyedia Layanan Penlngkatan Kualltas Hidup Anak Tlngkat Daerah	Jumlah Dokumen Komunlkasl lnfonnasl dan Edukasl (KIE) Pemenuhan HakAnak bagi Lembaga Penyedla Layanan Peningkatan Kualitas HldupAnak Kewenangan n Kabupaten/ Kota		4	1100,000,000						-		-		-		-	P3KPA

	Penguatan Jejarlng antar Lembaga Penyedia Layanan PenIngkatan Kualltas Hidup Anak TIngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasll Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hldup Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota		4	00,000,00(1						-		-		-		-	

Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan P rlIndungan An*t*ak

'Marla Anastasia Bara Bale,S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda
19760911199511 2 001

Dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Efisiensi Belanja Negara sebagaimana diamanatkan oleh *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,* serta sebagai pelaksanaan teknis dari *Permenkeu No. 56 Tahun 2025* dan *Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025,* serta berdasarkan surat Edaran Bupati Lembata Nomor 8/900.1.1/34/KAD/II/2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 maka dilakukan penyesuaian terhadap Alokasi Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal, dihapus dan dengan demikian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan hanya ada Sumber Dana Dau Blok Grand, PAD, Spesifik Grand Pendidikan. Oleh karena itu Belanja yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal dialihkan ke Sumber Dana Spesidik Grand Pendidikan. Dan akibat dari Pengalihan ini maka terdapat beberapa Sub Kegiatan harus mengalami pengosongan anggaran dan anggarannya ditambahkan ke sub bagian lainnya yang dapat dijelaskan sbb:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu
   1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota dengan Pagu sebesar Rp 58.074.086 dinolkan ;2. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota dengan total pagu Rp.87.728.786 juga dinolkan dan kedua sub kegiatan ini dialokasikan untuk menambahkan anggaran pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota dengan Total pagu anggaran sebesar Rp. 123.283.919 dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota dengan Total Pagu sebesar Rp. 45.068.779 kedua sub kegiatan ini dinolkan dan anggarannya digabungkan ke sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG)Kewenangan Kab/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota dengan Total Pagu sebesar Rp.78.129.352 dikosongkan dan pagunya digeserkan untuk menambahkan pada sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota.dan Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota.

   Oleh karena itu terdapat 6 sub kegiatan pada 3 program yang anggarannya dinolkan karena efisiensi anggaran tersebut diatas.

Mengevaluasi Renja dalam pelaksanaan teknisnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD / DPA SKPD. Karena rencana kerja yang termuat dalam dokumen perencanaan diwujudkan dalam rencana kerja anggaran dan dokumen anggaran. Dengan kata lain instrumen pelaksanaan rencana kerja adalah pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.1 terlihat relaisasi anggaran sebesar Rp.554,825,958 dengan tingkat capaian sebesar 18,30% dan tingkat capaian kinerja yaitu sebesar 33,33% diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan dalam dua triwulan ke depan.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang sampai dengan triwulan II belum memenuhi target/ belum dapat diukur target dan realisasi keuangannya, yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdapat 19 sub kegiatan yang telah terealisasi dan diprediksi dapat memenuhi target samapai dengan triwulan akhir. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah :

- Terdapat 6 sub kegiatan yang belum terealisasi karena ada pergeseran diantara beberapa kode rekening didlamnya lalu disesuaikan dengan anggaran kas yang direncanakan dan akan direalisasikan pada triwulan lll danlV

  Berdasarkan hasil evaluasi serta faktor penghambatnya dapat diambil langka untuk pelaksanaan Renja sampai dengan akhir Tahun maupun Tahun berikutnya antara lain:

  a. Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi keuangan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran
  b. Perumusan indikator kinerjanya harus konsisten mulai dari Renstra Perangkat Daerah,RKPD dan Renja serta DPPA sehingga tidak menghambat dalam proses pengukuran indikator Kinerja.
  c. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan
  d. Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan II masih belum memenuhi target hal ini disebabkan oleh terjadinya beberapa kali Pergeseran Anggaran sehingga menyebabkan Anggaran yang telah dialokasikan harus dilakukan penyesuaian lagi karena anggaran kasnya bergeser. sehingga penyerapannya tidak sesuai target.

2.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 11.3

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Kode Rekenlng					Rancaangan Perubahan RKPD				Analisls Kebutuhan				Catatan Penting
					Program/Keglatan	Indlkator Klnerja	Target	Pagu indikatlf	Program/Keglatan	Indikator	Target	Keb.Dana	
2	08				DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANN ANAK			3.031.197.929				2.854.662.871	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan program penunjang urusan pemerlntah daerah		1.753.296.343	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan program penunjang urusan pemerlntah daerah		1.576.745.067	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah		6.861.350	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasl Klnerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.821.350	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.327.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.327.750	

2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.599.150	Koordinasl dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.559.150	
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.448.550	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.448.550	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.161.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.161.950	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.323.950	Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.323.950	
2	08	01	2.02		AdminIstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Admfnistrasi Keuangan Daerah		1.599.826.930	Administrasl Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Adminfstrasi Keuangan Daerah		1.423.255.654	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.498.363.730	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.321.720.454	
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 bulan	100.008.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 bulan	100.080.000	

2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.455.200	Koordinasl dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.455.200	
2	08	01	2.03		Administrasl Barang Mllik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen AdmlnIstrasi Barang Millk Daerah pada Perangkat Daerah		14.202.150	Admlnistrasl Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admlnistrasi Barang Mllllk Daerah pada Perangkat Daerah		14.202.150	
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah oada SKPD	2 Dokumen	14.202.150	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah oada SKPD	2 Dokumen	14.202.150	
2	08	01	2.05		Administrasl Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian		3.216.536	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian		3.216.536	
2	08	01	2.05	0001	Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	6 dokumen	1.685.800	Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian		1.685.800	
2	08	01	2.05	0002	Monitoring,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.530.736	Monitoring,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring,Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai		1.530.736	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah		39.822.327	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah		39.822.327	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	20 jenis dan 10 unit pemeliharaan	8.458.627	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	20 jenis dan 10 unit pemeliharaan	8.458.627	

2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6311 dan 50 buku yang di jilid	3.815.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6311 dan 50 buku yang di jilid	3.815.700	
2	8	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali dalam daerah dan 5 kaliluar daerah	27.548.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasl dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali dalam daerah dan 5 kali luar daerah	27.548.000	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51.387.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerfntah Daerah		51.447.250	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lembar	4.254.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lembar	4.254.250	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	15.307.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	15.267.800	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 gedung 12 jenis 16 jenis	31.825.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 gedung 12 jenis 16 jenis	31.825.000	
2	08	01	2.09		Pemellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Millk Daerah Dalam Kondlsl Baik (setelah dllakukan Pemellharaan)		37.980.000	Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondlsl Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)		37.980.000	

2	08	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 paket	**37.980.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operaslonal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit mobil dinas jabatan	**37.980.000**	
2	**08**	02			**PROGRAM PENGARUSUTAM** AAN GENDER **DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Prosentase** anggaran yang responsif gender **padaAPBD**		**483.381.697**	**PROGRAM PENGARUSUTAMA** AN GENDER DAN **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Prosentase** anggaran yang responslf gender **padaAPBD**		**472.461697**	
2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota**	Jumlah dokumen **hasll koordinasl dan sinkronlsasl hasll pelaksanaan perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/kota**		**0**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota**	Jumlah dokumen **hasll koordinasl dan slnkronlsasi hasil pelaksanaan perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/kota**		**0**	
2	**08**	02	2.01	0001	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenagan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenagan kabupaten/kota	1 Dokumen	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenagan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenagan kabupaten/kota	1 Dokumen	0	
2	**08**	02	2.01	0002	Sosialisasi Penyelenggaraan kebijakan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta Sosialisasi Penyelenggaraan kebijakan PUG Kewenangan kabupaten/kota	39 Orang	0	Sosialisasi Penyelenggaraan kebijakan PUG Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta Sosialisasi Penyelenggaraan kebijakan PUG Kewenangan kabupaten/kota	39 Orang	0	

2	08	02	,2 .0 2		Pemberdayaan Perempuan Bldang Polltik, Hukum, Soslal, dan Ekonomi pada Organlsasl Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organlsasl Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendamplngan Kebljakan Penlngkatan Partlslpasl Perempuan di Bldang Polltik, Hukum, Soslal dan Ekonoml Kewenangan Kabupaten/Kota		67.561.697	Pemberdayaan Perempuan Bldang Polltlk, Hukum, Soslal, dan Ekonoml pada Organlsasl Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organlsasl Masyarakat yang Mendapat Advokasl dan Pendamplngan Kebljakan Penlngkatan Partisipasi Perempuan di Bldang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		56,641,697	
2	08	02	2. 0 2	0 0 0 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	223 orang 320 layanan	67.561.697	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	223 orang 320 layanan	56,6-t1,697	
2	08	02	2. 0 3		Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedi a Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabuoaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan didamplngi		415.820.000	Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabuoaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih dan didamplngi		415.820.000	
2	08	02	2. 0 3	0 0 0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 layanan	415.820.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 layanan	415.820.000	

2	08	02	2.03	0002	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan SIAP di bidang ekonomi/lestari/sehat/ pintar/kepemimpinan/ hukum pada LPLPP tingkat kab/kota	50 org	0	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan SIAP di bidang ekonomi/lestari/sehat/ pintar/kepemimpinan/ hukum pada LPLPP tingkat kab/kota	50 org	0	
2	08	02	2.03	0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kmunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	404 Orang	0	Sub Kegiatan Pengembangan Kmunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	404 Orang	0	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Raslo terhadap Kekerasan Perempuan termasuk Korban TPPO (Per 100.000 Penduduk)		266.374.884	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio terhadap Kekerasan Perempuan termasuk Korban TPPO {Per 100.000 Penduduk)		266.374.823	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan LIngkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Keglatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		266.374.884	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan LIngkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		266.374.823	

2	08	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga advokasi kebijakan dan pendapingan layanan perlindungan perempuan kewenangan	39 perangkat daerah	266.374.884	Sub Kegiatan Advokasi Kebljakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga advokasi kebijakan dan pendapingan layanan pertindungan perempuan kewenangan	12 Bulan	266.374.823	
2	08	03	2.02		Penyedlaan Layanan Rujukan Lanjutan bagl Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordlnasl Kewenangan Kabuoaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayanl		0	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagl Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordlnasl Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayanl		0	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan sinkrinisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenagan kabuoaten/kota	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenagan kab/kota	50 layanan	0	Koordinasi dan sinkrinisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagl perempuan korban kekerasan kewenagan kabupaten/kota	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenagan kab/kota	50 layanan	0	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Perllndungan Perempuan Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organlsasi kemasyarakatan yang bergerak dim bldang perempuan tlngkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perllndungan Perempuan Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organlsasi kemasyarakatan yang bergerak dim bldang perempuan tlngkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		0	

2	08	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 layanan	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 layanan	0	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaksanaan PUG dalam keluarga		252.560.939	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaksanaan PUG dalam keluarga		235.597.289	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualltas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak TIngkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunlkasl, Infonnasi, Edukasl (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perllndungan Anak bagl Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		87.871.319	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasl, Edukasl (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		87.871.319	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KGdan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keiuarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak KewenanganKabupaten/Kota	39 perangkat daerah	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak KewenanganKabupaten/Kota	39 perangkat daerah	0	
2	08	04	2.01	0003	Pelaksanaan Komunikasi,informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagl keluarga	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi,informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagl keluarga kewenaaan kab/kota	50 dokumen	0	Pelaksanaan Komunikasi,informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenagan kab/kota	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi,informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenaaan kab/kota	50 dokumen	0	

					kewenagan kab/kota								
2	08	04	2.01		Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lembata,Semua Kecamatan.semua kelurahan	87.871.319	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lembata,Semua Kecamatan.semua kelurahan dan desa	87.871.319	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabuoaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Penlngkatan Kualltas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendamplngan		164.689.620	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Penlngkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasldan Pendampingan		147.725.970	
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100 Lembaga	124.723.384	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	39 Perangkat Daerah	88.434.884	
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. lembata, semua Kecamatan.semua kelurahan dan desa	39.966.236	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, semua Kecamatan.semua kelurahan dan desa	59.291.086	

2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak		125.265.987	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak		136.745.916	
2	08	06	2.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasllPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedla Layanan Penlngkatan Kualitas Hldup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		125.265.987	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Penlngkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasllPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hldup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		136.745.916	
2	08	06	201	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kelurahan, Desa dan Sekolah	125.265.987	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kelurahan, Desa dan Sekolah	136.745.916	
2	08	07			PROGRAM PERUNDUNGAN KHUSUSANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditanganl		150.318.079	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani		166.738.079	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Llngkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartlsipasi dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Llngkup Daerah Kabupaten/Kota		150.318.079	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Mellbatkan para Pihak Llngkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasl dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Mellbatkan para Plhak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		166.738.079	

2	08	07	2.01	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakKewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	**150.318.079**	Advokasl Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakKewenangan Kabupaten/Kota	kelurahan, desa dan sekolah	**166.738.079**	
							TOTAL	**3.031.197.929**			TOTAL	**2.854.662.871**	

BAB III
RENCANAN KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang termuat dalam perubahan Renja Tahun 2025 mengacu dan Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai termuat dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025

Uraian lengkap Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel Berikut:

Tabel IV.1

Matriks Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)	Justifikasi Perubahan	Lokasi	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.854.662.871	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan hasil review RKPD.	Kab. Lembata	2.854.662.871
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.576.745.067	Optimalisasi anggaran untuk mendukung operasional dasar dinas.	DP2PA	1.576.745.067
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.821.350	Efisiensi anggaran untuk kegiatan perencanaan rutin.	DP2PA	57.800.000
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.327.750	Alokasi dasar untuk penyusunan Renja dan Renstra.	DP2PA	5.300.000

2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.559.150	Alokasi dasar untuk penyusunan dokumen penganggaran	DP2PA	5.500.000
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkthisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.448.550	Alokasi untuk pelaporan kinerja secara berkala.	DP2PA	35.500.000
2.08.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.323.950	Alokasi untuk Evaluasi Kinerja SKPD	DP2PA	
2.08.01.2.02	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.423.255.654			
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.321.720.454			
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.008.000			
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1.455.200			
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	14.202.150	Alokasi untuk penatausahaan aset sesuai regulasi.	DP2PA	20.000.000
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang semester dan	2 Dokumen	14.202.150			

		Laporan Barang Tahunan					
2.08.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Dokumen	3.216.536			
2.08.01.2.04.01	Pendataan dan Pengelolaan Aministrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.685.800			
2.08.01.2.04.02	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.530.736			
2.08.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	1 Paket	39.822.327	Alokasi untuk kebutuhan ATK, cetak, dan rapat koordinasi.	DP2PA	101.640.000
2.08.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Paket	127.029.450	Alokasi untuk jasa surat, komunikasi, air, dan listrik.	DP2PA	158.489.000
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia jumlah Bahan Bangunan, dan Kontruksi, Jumlah Perabot Kantor dan jumlah Alat Listrik	20 Jenis dan 10 Unit Pemeliharaan	8.458.627			
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan,	6311 lembar dan 50	3.815.700			

		jumlah buku yang dijilid	buku yang dijilid				
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlahg Rapat Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan ,jumlah Rapar Koorsinasi Luar daerah yang diikuti	50 x Dalam daerah dan 5 x Luar daerah	27.548.000			
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Paket	51.447.050	Alokasi untuk jasa surat, komunikasi, air, dan listrik.	DP2PA	158.489.000
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Benda Pos	300 L	4.254.250			
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jas aTelepon Listrik dan Air	12 bulan	15.367.800			
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor '	Jumlah Gedung yang disewa, Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia,Jumlah Peralatan Listrik yang tersedia	1 Gedung,16 Jenis,12 Jenis	31.825.000			
2.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.980.000			

2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyedia jasa pemelihaaraan kendaraan roda 4	1 Unit mobil dinas jabatan	37.980.000			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase anggaran yang responsif gender pada APBD	15%	472..461.697	Peningkatan alokasi untuk merespons rendahnya capaian 2024.	Kab. Lembata	220.000.000
2.08.02.2.02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota			0			
2.08.02.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39 PD	0			
	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Keenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39 PD	0			

2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat pendampingan	25 Kelompok	56.641.697	Melanjutkan program pendampingan yang sudah berjalan.	Kab. Lembata	90.000.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasidan Pendampingan	25 Kelompok	56.641.697			
2.08.02.2.01.0002	Penguatan dan Pengembanganlembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang dilatih	50 layanan	415.820.000	Fokus pada penguatan kapasitas lembaga layanan sebagai ujung tombak.	Kab. Lembata	324.500.000
2.08.02.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanana yang mendapatkan Advokasidan Pendampingan	40 Lembaga 40 Lembaga	415.820.000 415.820.000			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Menurun	266.374.823	Alokasi signifikan untuk layanan korban kekerasan, merespons evaluasi 2024.	Kab. Lembata	640.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedomankan pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun

berjalan.Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar subkegiatan, penambahan maupun penghapusan subkegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70Tahun 2019tentangSistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
11. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 26);

15. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023)
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
20. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jaewab
														I		II		III		IV								
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/6*100		15
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				9,433,261,200		2,938,238,442		3,683,835,203	1.12	41,117,100	14	513,813,190		-		-	15	554,930,290		3,493,168,732		118.89	Nakertrans
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah	Persentase	100	4,873,752,080	100 Persen	2,070,815,171	100 Persen	1,890,973,247	0.01	15,177,100	26	482,777,578		-		-	26.33	497,954,678	25 Persen	2,568,769,849	25 Persen	124.05	Nakertrans
3	25	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	48	200,000,000	12 dokumen	18,365,810	12 dokumen	7,473,895		-	34	2,517,508					34	2,517,508		20,883,318		113.71	Nakertrans

						Perangkat Daerah																					
3	25	1	2:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40,000,000	8 dokumen	6,987,220	6 dokumen	1,399,094	-	-	34	469,094					2	469,094		7,456,314		106.71	Nakertrans
3	25	1	2:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	1 dokumen	3,394,595	1 dokumen	1,535,153	-	-		-						-		3,394,595		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	1 dokumen	1,771,745	1 dokumen	1,196,049	-	-	83	991,049						991,049		2,762,794		155.94	Nakertrans
3	25	1	2:01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	1 dokumen	1,592,250	1 dokumen	1,328,040	-	-		-						-		1,592,250		100.00	Nakertrans

3	25	1	2:01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	1 dokumen	1,575,725	1 dokumen	958,194	-	-		-						-		1,575,725		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	40,000,000	5 dokumen	3,044,275	2 dokumen	1,057,365	-	-	100	1,057,365						1,057,365		4,101,640		134.73	Nakertrans
3	25	1	2:01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun	Laporan		1,645,680	4 dokumen	1,645,530				-								-		1,645,530		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Persentase	100	3,420,166,210	100 %	1,688,574,076	100 Persen	1,775,883,261	17,86 %	-	26	459,868,590					25 Persen	25,326,000	25 Persen	1,713,900,076	25 Persen	101.50	Nakertrans

3	25	1	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	56	2,906,176,930	Terbayar 14 gaji bulanan dan tunjangan, 20 orang /Bulan	1,473,374,182	22 orang/bulan	1,672,205,529	-		26	433,616,379					14 orang/bulan	433,616,379		1,906,990,561	14 orang /bulan	129.43	Nakertrans
3	25	1	2:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	457,989,280	12 Dokumen	210,078,560	12 Dokumen	101,304,000	-		25	25,326,000					6 Dokumen	25,326,000	1 dokumen	235,404,560	1 dokumen	112.06	Nakertrans
3	25	1	2:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000	3 dokumen dan 1 Laporan	3,357,935	1 laporan	1,207,521	-	-	-	-						-		3,357,935		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	72	28,000,000	4 laporan	1,763,399	14 laporan	1,166,211	-	-	79	926,211						926,211		2,689,610		152.52	Nakertrans

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																								
3	25	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan	4	73,797,320	100 %	26,965,452	4 Laporan	15,648,453	21	3,240,000	28	4,370,153					25 Persen	7,610,153	25 Persen	34,575,605	25 Persen	128.22	Nakertrans
3	25	1	2:03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	28,000,000	2 laporan	1,048,372	2 Dokumen	1,168,787	-	-	73	858,787						858,787		1,907,159		181.92	Nakertrans
3	25	1	2:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	45,797,320	2 Laporan	25,917,080	2 laporan	14,479,666	22	3,240,000	24	3,511,366						6,751,366	1 laporna	32,668,446	1 laporna	126.05	Nakertrans
3	25	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan	4	90,000,000	1 laporan	1,128,504	1 laporan	986,602	-	-	-	-						-		1,128,504		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000	1 laporan	1,128,504	1 dokumen	986,602	-	-	-	-						-		1,128,504		100.00	Nakertrans

3	25	1	2:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000		-			-									-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah	Persentase	100	438,000,000	99,30%	145,319,088	100 Persen	30,575,507	27	8,315,000	6	8,986,950					25 Persen	17,301,950	25 Persen	162,621,038	25 Persen	111.91	Nakertrans
3	25	1	2:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,000,000	1 Paket	2,713,650	1 paket	642,950	-	-	100	642,950						642,950		3,356,600		123.69	Nakertrans
3	25	1	2:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000	2 Paket	6,181,351	1 paket	2,133,557	-	-	-	-						-		6,181,351		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000	2 paket	14,786,580	1 paket	804,000	-	-	100	804,000						804,000		15,590,580		105.44	Nakertrans
3	25	1	2:06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	4	8,000,000		-	-	-		-								-		-		#DIV/0!	Nakertrans

						yang Disediakan																					
3	25	1	2:06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	300,000,000	2 laporan	121,637,507	1 laporan	26,995,000	31	8,315,000	28	7,540,000						15,855,000	1 laporan	137,492,507	1 laporan	113.03	Nakertrans
3	25	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	240,000,000	25 Persen	31,175,000	25 persen	20,359,682	-	-	-	-						-	25 Persen	31,175,000	25 Persen	100.00	Nakertrans
3	25	1	2:07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	50,000,000		-				-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40,000,000		-	6 unit	7,389,458	-	-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	80,000,000		-	3 Unit	12,970,224	-	-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	10,000,000	5 unit	31,175,000	-	-		-		-						-		31,175,000		100.00	Nakertrans

						Lainnya yang Disediakan																							
3	25	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60,000,000		-				-								-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Lapor an	48	168,017,990	25 Pers en	102,881,491	12 lapor an	17,365,847	6	1,100,000	21	3,729,477					25 Pers en	4,829,477	25 Persen	107,710,968	25 Perse n	104 .69	Nakertrans
3	25	1	2:08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Lapor an	48	7,200,000	1 pak et dan 12 lapo ran	42,395,625	12 lapor an	1,203,345	-		45	546,975					6 Lap oran	546,975	1 lapora n	42,942,600	1 lapora n	101 .29	Nakertrans
3	25	1	2:08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	48	75,341,600	14 lapo ran	12,730,978	12 lapor an	14,935,400	7	1,100,000	15	2,220,000						3,320,000	1 lapora n	16,050,978	1 lapora n	126 .08	Nakertrans
3	25	1	2:08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang layak pakai	Lapor an		44,292,630	37 pera ltan jeni s kant or yan g laya	44,263,420																-	

										k pak e																		
3	25	1	2:08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	4	41,183,760	2 lapo ran	3,491,468	1 lapor an	1,227,102	-		78	962,502						962,502		4,453,970		127 .57	Nake rtran s
3	25	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persen tase	100	243,770,560	99,1 5%	56,405,750	100 Pers en	22,680,000	11	2,522,100	15	3,304,900					25 Pers en	5,827,000	25 Persen	62,232,750	25 Perse n	110 .33	Nake rtran s
3	25	1	2:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Ope rasional yang layak operasi roda dua, jumlah kendaraan dinas/oper asional yang layak operasi roda empat	Unit				-											-	2 unti	-	2 unti	#DI V/0 !	Nake rtran s
3	25	1	2:09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	Unit	6	168,770,560	2 unit	56,405,750	2 unit	22,680,000	11	2,522,100	15	3,304,900					5,827,000	2 unti	62,232,750	2 unti	110 .33	Nake rtran s
3	25	1	2:09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit	30	10,000,000		-											-		-		#DI V/0	Nake rtran

						Dipelihara																				!	s
3	25	1	2:09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	10,000,000		-														-	1 unit	-	1 unit	#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000		-														-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	13	20,000,000		-														-	3 unit	-	3 unit	#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	30	15,000,000		-				-										-		-		#DIV/0!	Nakertrans
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	67.50	69,774,920		3,370,105		1,917,307	-	-		-							-		3,370,105		100.00	Nakertrans
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Tersediany a Dokumen Data	Dokumen	4	69,774,920		3,370,105	3 orang	1,917,307	-	-		-							-		3,370,105		100.00	Nakertrans

					(RTK)	Ketenagakerjaan																							
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Dokumen	4	69,774,920		3,370,105		1,917,307	-	-		-						-		3,370,105		100.00	Nakertrans
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi	Persentase	100	2,209,852,680		650,421,152	40	1,710,472,268	1	24,000,000	2	28,255,000					15 Orang	52,255,000		702,676,152		108.03	Nakertrans
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompotensi	Orang	160	2,209,852,680	40 Orang	650,421,152	40	1,710,472,268	1.4	24,000,000	1.7	28,255,000						52,255,000		702,676,152		108.03	Nakertrans
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi pada tahun-n	Orang	80	2,133,126,920	93 orang berkompotensi	644,264,242	77 Orang	1,710,472,268	1	24,000,000	2	28,255,000						52,255,000		696,519,242		108.11	Nakertrans
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada	Lembaga	80	24,627,640	2 paket kerja sama dengan lembaga swasta	6,156,910				-							-		6,156,910		100.00	Nakertrans

						tahun-n																						
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Paket	4	52,098,120		-				-										-		-		#DIV/0!	Nakertrans
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase	44.5	1,959,164,560	25%	52,628,968	25	8,529,351	-	700,000		-							700,000		53,328,968		101.33	Nakertrans
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersediany a data Informasi Pasar Kerja manual dan online	Dokumen	48	42,518,360		8,710,436	12	3,363,889	-	-		-							-		8,710,436		100.00	Nakertrans
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	Orang	48	42,518,360	12 dokumen dan 50 orang	8,710,436	50 Orang	3,363,889	-	-		-							-		8,710,436		100.00	Nakertrans
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Orang	200	1,916,646,200	50 Orang	43,918,532	50	5,165,462	14	700,000		-							700,000		44,618,532		101.59	Nakertrans

2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompotensinya	Orang	200	1,896,646,200	36 Orang	40,933,982	30	5,165,462	14	700,000		0						700,000		41,633,982		101.71	Nakertrans
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Kelompok	48	20,000,000	12 kelompok	2,984,550		-	#DIV/0!	-								-		2,984,550		100.00	Nakertrans
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun	Point	37.2	263,043,520	53,2 point	55,892,088	42,5 Point	14,476,032	9	1,240,000	19.2083852 8	2,780,612						4,020,612		59,912,700		107.19	Nakertrans
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Dokumen	20	78,048,880	5 Dokumen	27,700,940	5	9,682,695	-	-	14.5184269 5	1,405,775						1,405,775		29,106,715		105.07	Nakertrans
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta	Laporan	120	78,048,880	172 perusahaterdata dan 1 laporan	27,700,940	1	9,682,695	13	1,240,000	14.5184269 5	1,405,775						2,645,775		30,346,715		109.55	Nakertrans

						Jamsostek serta pengupaha																					
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Kasus	40	184,994,640	10 Kasus	28,191,148	10	4,793,337	-	-	28.6822205	1,374,837						1,374,837		29,565,985		104.88	Nakertrans
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	40	113,401,920	18 kasus terselesaikan	19,458,048	10	4,793,337	-		28.6822205	1,374,837						1,374,837		20,832,885		107.07	Nakertrans
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	8	71,592,720	1 LKS tripartit 6 LKS Bripartit	8,733,100				-								-		8,733,100		100.00	Nakertrans
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				57,673,440		105,110,958		57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran swakarsa	Persentase	10	57,673,440		105,110,958	10	57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans

3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan sebaran penduduk	Orang	40	57,673,440		105,110,958	10	57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sikronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	22,650,400		1,732,000				-						-		1,732,000		100.00	Nakertrans
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Kepala Keluarga	120	35,023,040	16 kali dan 1 dokument	103,378,958	45 kk	57,466,998	-	-		0						-		103,378,958		100.00	Nakertrans

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi fisik maupun keuangan yang masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan berikut:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi belanja peralatan pelatihan yang diserahkan ke Masyarakat masih dalam proses Pengadaan
Solusi: Percepatan proses Pengadaan dan secepatnya dibuatkan Pelatihan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa subkegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan dasar sebagai berikut:

1. Penyesuaian PAD
2. Penyesuaian alokasi belanja dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian dana transfer ke daerah: DAU, DAK, DBH, maupun transfer dari provinsi
4. Adanya Pergeseran kegiatan dan subkegiatan antar-SKPD maupun internal SKPD Penghapusan sub kegiatan dan penyesuaian target kinerja Penyesuaian gaji dan tunjangan Penambahan sub kegiatan bersifat penting dan mende

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**3.159.865.003,00**	**3.420.592.944,00**	**3.683.835.203,00**	**523.970.200,00**							**3.379.137.551,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat partisipasi angkatan kerja**				**63,30 Persen**	**63,30 Persen**	**20.000.000,00**	**2.587.313,00**	**1.917.307,00**	**-3.742.270,00**							**16.257.730,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		16.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tanaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**600.000.112,00**	**1.298.389.135,00**	**1.710.472.268,00**	**30.585.058,00**							**630.585.170,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				40 Orang	40 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		630.585.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	102 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			611.403.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.156.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			13.024.530,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**				**44 Persen**	**44 Persen**	**303.769.984,00**	**18.399.572,00**	**8.529.351,00**	**258.271.156,00**							**562.041.140,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online*				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja*				50 Orang	50 Orang	283.769.984,00	14.880.107,00	5.165.462,00	-278.604.522,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pencari Kerja, Calon Pekerja Migran Indonesia, dan PMI		551.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	133.769.984,00	12.299.481,00	5.165.462,00	-128.604.522,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			546.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	2.580.626,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun**				**42,5 Point**	**42,5 Point**	**116.230.016,00**	**25.118.636,00**	**14.476.032,00**	**-49.969.136,00**							**66.260.880,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahan dan Tenaga Kerja		19.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	5 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			18.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial*				10 Kasus	10 Kasus	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		47.248.660,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	15 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				18 Perkara	18 Perkara	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			29.350.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.898.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**3.32.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 Persen**	**25 Persen**	**2.019.865.003,00**	**1.976.099.192,00**	**1.890.973.247,00**	**69.709.268,00**							**2.089.574.271,00**	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	14.811.150,00	14.285.444,00	7.473.895,00	-7.337.255,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.468.525,00	2.307.344,00	1.399.094,00	-1.069.431,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.291.231,00	1.535.153,00	-933.372,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.386.231,00	1.196.049,00	-1.272.476,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.467.690,00	1.328.040,00	-1.140.485,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.432.744,00	958.194,00	-1.510.331,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.468.525,00	2.400.204,00	1.057.365,00	-1.411.160,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	1.677.442.053,00	1.778.387.694,00	1.775.883.261,00	98.441.208,00			-	- -	Aparatur		1.668.500.961,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.585.865.003,00	1.672.205.529,00	1.672.205.529,00	86.340.526,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.540.003.641,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	86.640.000,00	101.304.000,00	101.304.000,00	14.664.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.497.320,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.409.971,00	1.207.521,00	-1.261.004,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.468.525,00	2.468.194,00	1.166.211,00	-1.302.314,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	17.897.050,00	17.683.908,00	15.648.453,00	-2.248.597,00			-	- -	Aparatur		18.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.525,00	2.368.842,00	1.168.787,00	-1.299.738,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.428.525,00	15.315.066,00	14.479.666,00	-948.859,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			11.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00			-	- -	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persentase	100 Persentase	129.239.800,00	63.061.635,00	30.575.507,00	-98.664.293,00			-	- -	Aparatur		109.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.068.525,00	642.950,00	642.950,00	-2.425.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.179.251,00	5.170.235,00	2.133.557,00	-4.045.694,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.549.980,00	2.710.450,00	804.000,00	-4.745.980,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	114.442.044,00	54.538.000,00	26.995.000,00	-87.447.044,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 Persentase	25 Persentase	105.500.000,00	38.455.324,00	20.359.682,00	-85.140.318,00			-	- -	Aparatur		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	15.500.000,00	14.312.050,00	7.389.458,00	-8.110.542,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	90.000.000,00	24.143.274,00	12.970.224,00	-77.029.776,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	42.506.425,00	18.607.649,00	17.365.847,00	-25.140.578,00			-	- -	Aparatur		30.931.340,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.102.500,00	1.203.345,00	1.203.345,00	-23.899.155,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			1.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.935.400,00	14.935.400,00	14.935.400,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			18.835.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.468.904,00	1.227.102,00	-1.241.423,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.295.940,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00			-	- -	Aparatur		62.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2 Unit	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			42.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran swakarsa**				**10 Persen**	**10 Persen**	**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-85.581.528,00**							**14.418.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penataan sebaran penduduk*				10 Orang	10 Orang	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Calon Transmigran Swakarsa dan Warga Translok		14.418.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.662.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				45 Kepala Keluarga	45 Kepala Keluarga	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.755.760,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**3.159.865.003,00**	**3.420.592.944,00**	**3.683.835.203,00**	**-17.964.619.425,00**							**3.379.137.551,00**	

BAB V
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

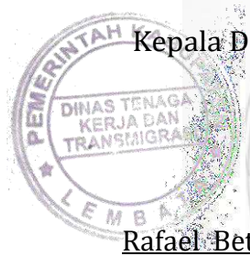

Rafael Betekeneng, SH
NIP. 19681023 199403 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedomankan pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun

berjalan.Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar subkegiatan, penambahan maupun penghapusan subkegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70Tahun 2019tentangSistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan KeuanganDaerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
11. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 26);

15. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023)
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
20. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
3. Menjadi instrumen evaluasi dan pengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jaewab
														I		II		III		IV								
2					3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/6*100		15
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				9,433,261,200		2,938,238,442		3,683,835,203	1.12	41,117,100	14	513,813,190		-		-	15	554,930,290		3,493,168,732		118.89	Nakertrans
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah	Persentase	100	4,873,752,080	100 Persen	2,070,815,171	100 Persen	1,890,973,247	0.01	15,177,100	26	482,777,578		-		-	26.33	497,954,678	25 Persen	2,568,769,849	25 Persen	124.05	Nakertrans
3	25	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	48	200,000,000	12 dokumen	18,365,810	12 dokumen	7,473,895		-	34	2,517,508					34	2,517,508		20,883,318		113.71	Nakertrans

						Perangkat Daerah																					
3	25	1	2:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	40,000,000	8 dokumen	6,987,220	6 dokumen	1,399,094	-	-	34	469,094					2	469,094		7,456,314		106.71	Nakertrans
3	25	1	2:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	1 dokumen	3,394,595	1 dokumen	1,535,153	-	-		-						-		3,394,595		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20,000,000	1 dokumen	1,771,745	1 dokumen	1,196,049	-	-	83	991,049						991,049		2,762,794		155.94	Nakertrans
3	25	1	2:01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	1 dokumen	1,592,250	1 dokumen	1,328,040	-	-		-						-		1,592,250		100.00	Nakertrans

3	25	1	2:01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40,000,000	1 dokumen	1,575,725	1 dokumen	958,194	-	-		-						-		1,575,725		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	40,000,000	5 dokumen	3,044,275	2 dokumen	1,057,365	-	-	100	1,057,365						1,057,365		4,101,640		134.73	Nakertrans
3	25	1	2:01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun	Laporan		1,645,680	4 dokumen	1,645,530				-								-		1,645,530		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah	Persentase	100	3,420,166,210	100 %	1,688,574,076	100 Persen	1,775,883,261	17,86 %	-	26	459,868,590					25 Persen	25,326,000	25 Persen	1,713,900,076	25 Persen	101.50	Nakertrans

3	25	1	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	56	2,906,176,930	Terbayar 14 gaji bulanan dan tunjangan, 20 orang /Bulan	1,473,374,182	22 orang/bulan	1,672,205,529	-		26	433,616,379					14 orang/bulan	433,616,379		1,906,990,561	14 orang /bulan	129.43	Nakertrans
3	25	1	2:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	457,989,280	12 Dokumen	210,078,560	12 Dokumen	101,304,000	-		25	25,326,000					6 Dokumen	25,326,000	1 dokumen	235,404,560	1 dokumen	112.06	Nakertrans
3	25	1	2:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28,000,000	3 dokumen dan 1 Laporan	3,357,935	1 laporan	1,207,521	-	-	-	-						-		3,357,935		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	72	28,000,000	4 laporan	1,763,399	14 laporan	1,166,211	-	-	79	926,211						926,211		2,689,610		152.52	Nakertrans

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																								
3	25	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah	Laporan	4	73,797,320	100 %	26,965,452	4 Laporan	15,648,453	21	3,240,000	28	4,370,153					25 Persen	7,610,153	25 Persen	34,575,605	25 Persen	128.22	Nakertrans
3	25	1	2:03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	28,000,000	2 laporan	1,048,372	2 Dokumen	1,168,787	-	-	73	858,787						858,787		1,907,159		181.92	Nakertrans
3	25	1	2:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	45,797,320	2 Laporan	25,917,080	2 laporan	14,479,666	22	3,240,000	24	3,511,366						6,751,366	1 laporna	32,668,446	1 laporna	126.05	Nakertrans
3	25	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah	Laporan	4	90,000,000	1 laporan	1,128,504	1 laporan	986,602	-	-	-	-						-		1,128,504		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40,000,000	1 laporan	1,128,504	1 dokumen	986,602	-	-	-	-						-		1,128,504		100.00	Nakertrans

3	25	1	2:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000		-			-									-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah	Persentase	100	438,000,000	99,30%	145,319,088	100 Persen	30,575,507	27	8,315,000	6	8,986,950					25 Persen	17,301,950	25 Persen	162,621,038	25 Persen	111.91	Nakertrans
3	25	1	2:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10,000,000	1 Paket	2,713,650	1 paket	642,950	-	-	100	642,950						642,950		3,356,600		123.69	Nakertrans
3	25	1	2:06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,000,000	2 Paket	6,181,351	1 paket	2,133,557	-	-	-	-						-		6,181,351		100.00	Nakertrans
3	25	1	2:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40,000,000	2 paket	14,786,580	1 paket	804,000	-	-	100	804,000						804,000		15,590,580		105.44	Nakertrans
3	25	1	2:06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	4	8,000,000		-	-	-		-								-		-		#DIV/0!	Nakertrans

						yang Disediakan																					
3	25	1	2:06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	300,000,000	2 laporan	121,637,507	1 laporan	26,995,000	31	8,315,000	28	7,540,000						15,855,000	1 laporan	137,492,507	1 laporan	113.03	Nakertrans
3	25	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	240,000,000	25 Persen	31,175,000	25 persen	20,359,682	-	-	-	-						-	25 Persen	31,175,000	25 Persen	100.00	Nakertrans
3	25	1	2:07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	50,000,000		-				-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40,000,000		-	6 unit	7,389,458	-	-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	80,000,000		-	3 Unit	12,970,224	-	-		-						-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	10,000,000	5 unit	31,175,000	-	-		-		-						-		31,175,000		100.00	Nakertrans

						Lainnya yang Disediakan																							
3	25	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60,000,000		-				-								-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Lapor an	48	168,017,990	25 Pers en	102,881,491	12 lapor an	17,365,847	6	1,100,000	21	3,729,477					25 Pers en	4,829,477	25 Persen	107,710,968	25 Perse n	104 .69	Nakertrans
3	25	1	2:08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Lapor an	48	7,200,000	1 pak et dan 12 lapo ran	42,395,625	12 lapor an	1,203,345	-		45	546,975					6 Lap oran	546,975	1 lapora n	42,942,600	1 lapora n	101 .29	Nakertrans
3	25	1	2:08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	48	75,341,600	14 lapo ran	12,730,978	12 lapor an	14,935,400	7	1,100,000	15	2,220,000						3,320,000	1 lapora n	16,050,978	1 lapora n	126 .08	Nakertrans
3	25	1	2:08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang layak pakai	Lapor an		44,292,630	37 pera ltan jeni s kant or yan g laya	44,263,420																-	

										k pak e																		
3	25	1	2:08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	4	41,183,760	2 lapo ran	3,491,468	1 lapor an	1,227,102	-		78	962,502						962,502		4,453,970		127 .57	Nake rtran s
3	25	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persen tase	100	243,770,560	99,1 5%	56,405,750	100 Pers en	22,680,000	11	2,522,100	15	3,304,900					25 Pers en	5,827,000	25 Persen	62,232,750	25 Perse n	110 .33	Nake rtran s
3	25	1	2:09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Ope rasional yang layak operasi roda dua, jumlah kendaraan dinas/oper asional yang layak operasi roda empat	Unit				-											-	2 unti	-	2 unti	#DI V/0 !	Nake rtran s
3	25	1	2:09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	Unit	6	168,770,560	2 unit	56,405,750	2 unit	22,680,000	11	2,522,100	15	3,304,900					5,827,000	2 unti	62,232,750	2 unti	110 .33	Nake rtran s
3	25	1	2:09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang	Unit	30	10,000,000		-											-		-		#DI V/0	Nake rtran

						Dipelihara																				!	s
3	25	1	2:09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	10,000,000		-														-	1 unit	-	1 unit	#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000		-														-		-		#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	13	20,000,000		-														-	3 unit	-	3 unit	#DIV/0!	Nakertrans
3	25	1	2:09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	30	15,000,000		-				-										-		-		#DIV/0!	Nakertrans
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	67.50	69,774,920		3,370,105		1,917,307	-	-		-							-		3,370,105		100.00	Nakertrans
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Tersediany a Dokumen Data	Dokumen	4	69,774,920		3,370,105	3 orang	1,917,307	-	-		-							-		3,370,105		100.00	Nakertrans

					(RTK)	Ketenagakerjaan																							
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Dokumen	4	69,774,920		3,370,105		1,917,307	-	-		-						-		3,370,105		100.00	Nakertrans
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi	Persentase	100	2,209,852,680		650,421,152	40	1,710,472,268	1	24,000,000	2	28,255,000					15 Orang	52,255,000		702,676,152		108.03	Nakertrans
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompotensi	Orang	160	2,209,852,680	40 Orang	650,421,152	40	1,710,472,268	1.4	24,000,000	1.7	28,255,000						52,255,000		702,676,152		108.03	Nakertrans
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi pada tahun-n	Orang	80	2,133,126,920	93 orang berkompotensi	644,264,242	77 Orang	1,710,472,268	1	24,000,000	2	28,255,000						52,255,000		696,519,242		108.11	Nakertrans
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada	Lembaga	80	24,627,640	2 paket kerja sama dengan lembaga swasta	6,156,910				-							-		6,156,910		100.00	Nakertrans

						tahun-n																						
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Paket	4	52,098,120		-				-										-		-		#DIV/0!	Nakertrans
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase	44.5	1,959,164,560	25%	52,628,968	25	8,529,351	-	700,000		-							700,000		53,328,968		101.33	Nakertrans
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersediany a data Informasi Pasar Kerja manual dan online	Dokumen	48	42,518,360		8,710,436	12	3,363,889	-	-		-							-		8,710,436		100.00	Nakertrans
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	Orang	48	42,518,360	12 dokumen dan 50 orang	8,710,436	50 Orang	3,363,889	-	-		-							-		8,710,436		100.00	Nakertrans
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Orang	200	1,916,646,200	50 Orang	43,918,532	50	5,165,462	14	700,000		-							700,000		44,618,532		101.59	Nakertrans

2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompotensinya	Orang	200	1,896,646,200	36 Orang	40,933,982	30	5,165,462	14	700,000		0						700,000		41,633,982		101.71	Nakertrans
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Kelompok	48	20,000,000	12 kelompok	2,984,550		-	#DIV/0!	-								-		2,984,550		100.00	Nakertrans
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun	Point	37.2	263,043,520	53,2 point	55,892,088	42,5 Point	14,476,032	9	1,240,000	19.2083852 8	2,780,612						4,020,612		59,912,700		107.19	Nakertrans
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Dokumen	20	78,048,880	5 Dokumen	27,700,940	5	9,682,695	-	-	14.5184269 5	1,405,775						1,405,775		29,106,715		105.07	Nakertrans
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta	Laporan	120	78,048,880	172 perusahaterdata dan 1 laporan	27,700,940	1	9,682,695	13	1,240,000	14.5184269 5	1,405,775						2,645,775		30,346,715		109.55	Nakertrans

						Jamsostek serta pengupaha																					
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	Kasus	40	184,994,640	10 Kasus	28,191,148	10	4,793,337	-	-	28.6822205	1,374,837						1,374,837		29,565,985		104.88	Nakertrans
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	perkara	40	113,401,920	18 kasus terselesaikan	19,458,048	10	4,793,337	-		28.6822205	1,374,837						1,374,837		20,832,885		107.07	Nakertrans
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	8	71,592,720	1 LKS tripartit 6 LKS Bripartit	8,733,100				-								-		8,733,100		100.00	Nakertrans
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				57,673,440		105,110,958		57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran swakarsa	Persentase	10	57,673,440		105,110,958	10	57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans

3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan sebaran penduduk	Orang	40	57,673,440		105,110,958	10	57,466,998	-	-		-						-		105,110,958		100.00	Nakertrans
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sikronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	22,650,400		1,732,000				-						-		1,732,000		100.00	Nakertrans
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	Kepala Keluarga	120	35,023,040	16 kali dan 1 dokument	103,378,958	45 kk	57,466,998	-	-		0						-		103,378,958		100.00	Nakertrans

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi fisik maupun keuangan yang masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan berikut:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi belanja peralatan pelatihan yang diserahkan ke Masyarakat masih dalam proses Pengadaan
Solusi: Percepatan proses Pengadaan dan secepatnya dibuatkan Pelatihan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa subkegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan dasar sebagai berikut:

1. Penyesuaian PAD
2. Penyesuaian alokasi belanja dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian dana transfer ke daerah: DAU, DAK, DBH, maupun transfer dari provinsi
4. Adanya Pergeseran kegiatan dan subkegiatan antar-SKPD maupun internal SKPD Penghapusan sub kegiatan dan penyesuaian target kinerja Penyesuaian gaji dan tunjangan Penambahan sub kegiatan bersifat penting dan mende

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**3.159.865.003,00**	**3.420.592.944,00**	**3.683.835.203,00**	**523.970.200,00**							**3.379.137.551,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3.059.865.115,00**	**3.320.593.848,00**	**3.626.368.205,00**	**566.503.090,00**							**3.364.719.191,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat partisipasi angkatan kerja**				**63,30 Persen**	**63,30 Persen**	**20.000.000,00**	**2.587.313,00**	**1.917.307,00**	**-3.742.270,00**							**16.257.730,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		16.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.257.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	2.587.313,00	1.917.307,00	-18.082.693,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tanaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**600.000.112,00**	**1.298.389.135,00**	**1.710.472.268,00**	**30.585.058,00**							**630.585.170,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				40 Orang	40 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Angkatan Kerja		630.585.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	102 Orang	600.000.112,00	1.298.389.135,00	1.710.472.268,00	1.110.472.156,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			611.403.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			6.156.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			13.024.530,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**				**44 Persen**	**44 Persen**	**303.769.984,00**	**18.399.572,00**	**8.529.351,00**	**258.271.156,00**							**562.041.140,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Manual dan Online*				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	3.519.465,00	3.363.889,00	-16.636.111,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.629.590,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja*				50 Orang	50 Orang	283.769.984,00	14.880.107,00	5.165.462,00	-278.604.522,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pencari Kerja, Calon Pekerja Migran Indonesia, dan PMI		551.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	133.769.984,00	12.299.481,00	5.165.462,00	-128.604.522,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			546.411.550,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	2.580.626,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun**				**42,5 Point**	**42,5 Point**	**116.230.016,00**	**25.118.636,00**	**14.476.032,00**	**-49.969.136,00**							**66.260.880,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahan dan Tenaga Kerja		19.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	5 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	71.230.016,00	12.574.244,00	9.682.695,00	-61.547.321,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			18.012.220,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial*				10 Kasus	10 Kasus	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		47.248.660,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				15 Perkara	15 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				18 Perkara	18 Perkara	45.000.000,00	12.544.392,00	4.793.337,00	-40.206.663,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			29.350.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.898.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**3.32.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 Persen**	**25 Persen**	**2.019.865.003,00**	**1.976.099.192,00**	**1.890.973.247,00**	**69.709.268,00**							**2.089.574.271,00**	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	14.811.150,00	14.285.444,00	7.473.895,00	-7.337.255,00			-	- -	Aparatur		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.468.525,00	2.307.344,00	1.399.094,00	-1.069.431,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.291.231,00	1.535.153,00	-933.372,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.386.231,00	1.196.049,00	-1.272.476,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.467.690,00	1.328.040,00	-1.140.485,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.432.744,00	958.194,00	-1.510.331,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.468.525,00	2.400.204,00	1.057.365,00	-1.411.160,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	1.677.442.053,00	1.778.387.694,00	1.775.883.261,00	98.441.208,00			-	- -	Aparatur		1.668.500.961,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.585.865.003,00	1.672.205.529,00	1.672.205.529,00	86.340.526,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.540.003.641,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	86.640.000,00	101.304.000,00	101.304.000,00	14.664.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.497.320,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.409.971,00	1.207.521,00	-1.261.004,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.468.525,00	2.468.194,00	1.166.211,00	-1.302.314,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	17.897.050,00	17.683.908,00	15.648.453,00	-2.248.597,00			-	- -	Aparatur		18.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.525,00	2.368.842,00	1.168.787,00	-1.299.738,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.428.525,00	15.315.066,00	14.479.666,00	-948.859,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			11.449.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan pegawai perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00			-	- -	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.157.538,00	986.602,00	-1.481.923,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*				100 Persentase	100 Persentase	129.239.800,00	63.061.635,00	30.575.507,00	-98.664.293,00			-	- -	Aparatur		109.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.068.525,00	642.950,00	642.950,00	-2.425.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.179.251,00	5.170.235,00	2.133.557,00	-4.045.694,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.549.980,00	2.710.450,00	804.000,00	-4.745.980,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	114.442.044,00	54.538.000,00	26.995.000,00	-87.447.044,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				25 Persentase	25 Persentase	105.500.000,00	38.455.324,00	20.359.682,00	-85.140.318,00			-	- -	Aparatur		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	15.500.000,00	14.312.050,00	7.389.458,00	-8.110.542,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	90.000.000,00	24.143.274,00	12.970.224,00	-77.029.776,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	42.506.425,00	18.607.649,00	17.365.847,00	-25.140.578,00			-	- -	Aparatur		30.931.340,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.102.500,00	1.203.345,00	1.203.345,00	-23.899.155,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			1.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.935.400,00	14.935.400,00	14.935.400,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			18.835.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	2.468.904,00	1.227.102,00	-1.241.423,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			10.295.940,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persentase	100 Persentase	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00			-	- -	Aparatur		62.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	2 Unit	30.000.000,00	43.460.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			42.192.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-42.532.890,00**							**14.418.360,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran swakarsa**				**10 Persen**	**10 Persen**	**99.999.888,00**	**99.999.096,00**	**57.466.998,00**	**-85.581.528,00**							**14.418.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penataan sebaran penduduk*				10 Orang	10 Orang	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Calon Transmigran Swakarsa dan Warga Translok		14.418.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.662.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				45 Kepala Keluarga	45 Kepala Keluarga	99.999.888,00	99.999.096,00	57.466.998,00	-42.532.890,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			7.755.760,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**3.159.865.003,00**	**3.420.592.944,00**	**3.683.835.203,00**	**-17.964.619.425,00**							**3.379.137.551,00**	

BAB V
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Rafael Betekeneng, SH
NIP. 19681023 199403 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
b Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor *40* Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; maka Renja Satuan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yang penetapannya dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor *40* Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor *40*);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-pogramprioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan kesinergian program kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta sinergis dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah :

a Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025;
b Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
c Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
d Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan yang meliputi pergeseran antar kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru, seta memuat penambahan atau pengurangan target kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan renja merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				57.819.059.721,00	54.417.398.730,00	26.861.974.162,00							65.825.383.252,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.819.059.721,00	54.417.398.730,00	26.861.974.162,00							65.825.383.252,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				57.819.059.721,00	54.417.398.730,00	26.861.974.162,00							65.825.383.252,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi	100 %	100 %	6.853.870.821,00	5.804.244.131,00	5.546.379.872,00							7.357.212.341,00	

						N DAERAH KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah													
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	415.500.000,00	5.798.750,00	5.798.750,00			-	-	ASN PUPR Kab Lembata		404.000.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	2.899.375,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN

												an, Semua Kel/ Desa								PENATAANRUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	-			7.000.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAANRUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	2.899.375,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN

													Desa							RUANG
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	-			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 0	1 0	10.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	20 %	20 %	5.438.603.676,00	5.514.975.813,00	5.514.975.813,00			-	-	ASN PUPR Kab Lembata		5.509.712.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.218.603.676,00	5.281.772.438,00	5.281.331.107,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.246.275.814,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	230.304.000,00	118.736.775,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			258.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UMUM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	2.899.375,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			1.916.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 1	2 . 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	66.336.200,00	66.336.200,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur	ASN PUPR Kab Lembata		33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	0 3	0 1	2 . 0 3	0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	66.336.200,00	29.525.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah	20 %	20 %	274.227.485,00	80.835.089,00	80.835.089,00			-	-	ASN PUPR Kab Lembata		220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	25.900.000,00	0,00	0,00	-	Dana Alokasi Umu	-	-			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN

							Bangunan Kantor yang Disediakan							m (DAU)							UM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 1	2 . 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.327.485,00	5.535.782,00	4.706.044,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 1	2 . 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	5.061.307,00	3.951.785,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	70.238.000,00	21.800.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umu	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkata			149.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN

													Desa	m (DAU)		n infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	20 %	20 %	75.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN PUPR Kab		80.000.000,00	DINAS PEKERJAA

						Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	urusan pemerintah daerah										Lembata			NUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

				07	06															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhati			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																kan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20 %	20 %	56.297.950,00	23.486.836,00	23.486.836,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan penge	ASN PUPR Kab Lembata		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																mbangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamat	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi			774.492.330,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UMDAN

														an, Semua Kel/ Desa			melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.797.950,00	23.486.836,00	23.177.718,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			120.007.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamat	-	-	-			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN

														an, Semua Kel/ Desa						PENATAANRUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 %	20 %	529.241.710,00	112.811.443,00	112.811.443,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis	ASN PUPR Kab Lembata		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

																dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	179.241.710,00	112.811.443,00	63.151.443,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umu	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkata			190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN

														Desa	m (DAU)		n infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	-	-			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/	-	-	-			14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN

													Des a							RUA NG
2	1	0 3	0 2			PROGR AM PENGEL OLAAN SUMBE R DAYA AIR (SDA)	Meningkatny a Persentase air baku	16 %	16 %	1.358.0 21.000, 00	211.80 0.000,0 0	0,00							950.00 0.000,0 0	
	1	0 3	0 2	2 . 0 1		Pengelo laan SDA dan Bangun an Pengam an Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat en/Kota	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten	2 Pake t	2 Pake t	1.358.0 21.000, 00	0,00	0,00			-	1. Penin gkata n ketah anan ekono mi melal ui penin gkata n infrast ruktur pelaya nan dasar dan	Mas yara kat Kab. Lem bata		500.00 0.000,0 0	DIN AS PEKE RJAA N UM UM DAN PEN ATA AN RUA NG

																pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	02	2.01	013	Pembangunan Kanal Banjir															

							Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,7 KM	0,7 KM	698.021.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya															
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,7 KM	0,7 KM	660.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekund	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2 Paket	2 Paket	0,00	211.800.000,00	211.800.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui	Masyarakat Kab. Lembata		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATA

						er pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				AN RUANG
	1	03	02	2.	00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																

				0 2	0 8															
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	1 KM	0,00	211.800.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun BerjalanDAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhati			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																kan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	81 %	81 %	9.193.181.250,00	8.813.646.000,00	8.033.829.792,00							7.268.005.811,00	

	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpasangnya Jumlah Sambungan Rumah (SR)	200 Unit	200 Unit	9.193.181.250,00	8.813.646.000,00	8.813.646.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek	Masyarakat Kab. Lembata		7.268.005.811,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15 Liter /Detik	15 Liter /Detik	8.193.181.250,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar			7.268.005.811,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															

							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter /Detik	12 Liter /Detik	1.000.000.000,00	8.813.646.000,00	8.033.829.792,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Sisa Belanja Lainnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

														DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan		pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	7.825.357.900,00	6.288.937.669,00	5.138.655.528,00							0,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domesti	-	-	-	7.825.357.900,00	6.288.937.669,00	6.288.937.669,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melal	Masyarakat Kab. Lembata		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PEN

						k dalam Daerah Kabupaten/Kota										ui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				ATAAN RUANG

	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	7.825.357.900,00	6.288.937.669,00	5.138.655.528,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

														Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM		memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
5	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)	50 %	50 %	32.363.628.750,00	33.220.754.980,00	8.143.108.970,00							49.663.351.420,00	

	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan yang terbangun	10 KM	10 KM	32.363.628.750,00	33.220.754.980,00	33.220.754.980,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek	Masyarakat Kab. Lembata		49.663.351.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	10 KM	30.628.008.750,00	32.163.269.980,00	6.709.528.207,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Belanja Lainnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar			48.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

														yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah		dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				

														Afirmasi						
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	100 KM	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkata			963.351.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN

													Desa	Umum		n infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan															

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,5 KM	0,5 KM	1.385.620.000,00	1.057.485.000,00	1.433.580.763,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/ Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Opsen PKB	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
6	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	20 %	20 %	75.000.000,00	5.860.000,00	0,00							75.000.000,00	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memadai	15 %	15 %	25.000.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur	Masyarakat Kab. Lembata		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota															

							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi Tertib Usaha	15 %	15 %	50.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan	Masyarakat Kab. Lembata		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	11	2.04	004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota															
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Sem	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UMUM DAN PENATA

							Penyelenggaraan						ua Kel/ Desa			peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				AN RUANG

7	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	72.155.950,00	0,00							511.813.680,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya	2 Kali	2 Kali	10.500.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan	Masyarakat Kab. Lembata		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang	1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	22.650.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATA

							penataan ruang.						ua Kel/ Desa	Umum (DAU)		peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				AN RUANG

	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang	25 Dokumen	25 Dokumen	139.500.000,00	49.505.950,00	49.505.950,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek	Masyarakat Kab. Lembata		386.813.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM UM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	6.275.950,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar			261.813.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang															

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	64.500.000,00	43.230.000,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penghematan Belanja Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

																pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					
	J U M L A H									**57.819.059.721,00**	**54.417.398.730,00**	**26.861.974.162,00**							**65.825.383.252,00**		

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, nampak bahwa realisasi kinerja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga triwulan II Tahun 2025 adalah 62,5% dengan realisasi keuangan sebesar 6,25% yakni terealisasi Rp.3.309.861.353,- dari total anggaran sebesar Rp.52.947.862.820,- Pencapaian kinerja program/kegiatan dan realisasi keuangan tidak sama dimana realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan lebih besar dari realisasi keuangan karena anggaran program dan kegiatan baru terealisasi pada triwulan berikutnya. Masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan.

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

1. Disiplin aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang masih rendah.
2. Terbatasnya jumlah aparatur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraiakan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang Capaian Kinerja kegiatan dan realisasi keuangan yang masih 0%. Hal ini disebabkan karena penganggaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV.
2. Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
   a Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf, antar Bidang dan seksi serta antara Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan stakeholders dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan;
   b Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan target pencapaian kinerja program/kegiatan prioritas dan dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renja Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor *40* Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, mengakomodir 7 program dengan 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.52.947.862.820,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu Rp. 5.546.379.871,25- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan pagu Rp. 6.853.870.821,-.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 0 kegiatan dan 0 sub kegiatan dengan pagu Rp.0,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu Rp. 1.358.021.000,-.
3. Program Pengelolaaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu Rp. 8.033.829.792,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu Rp. 9.193.181.250,-.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 5.138.655.528,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 7.825.357.900,-.
5. Program Penyelenggaraan Jalan
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu Rp. 8.143.108.971,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu Rp. 32.363.628.750,-.
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 0 kegiatan dan 0 sub kegiatan dengan pagu Rp.0,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu Rp. 75.000.000,-.
7. Program Penyelengaraan Penataan Ruang
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 0 kegiatan dan 0 sub kegiatan dengan pagu Rp.0,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tahun anggaran 2025

terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu Rp. 150.000.000,-.

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

PERUBAHAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				LOKASI	SUMBER DANA	KELOMPOK SASARAN	Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**57.819.059.721,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**26.861.974.160,25**				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**57.819.059.721,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**26.861.974.161,25**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**57.819.059.721,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**26.861.974.162,25**				
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	**100 %**	**6.853.870.821,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	**100 %**	**5.546.379.871,25**				

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen	415.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen	0,00			ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	350.000.000,00		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12.500.000,00		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		15.000.000,00		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		12.500.000,00		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan*	1 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEN

		Dokumen Perubahan DPA-SKPD				*Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*			tan, Semua Kel/ Desa	UMUM		ATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.500.000,00		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	20 %	5.438.603.676,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*	20 %	5.400.067.881,25			ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Kinerja SKPD						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	5.218.603.676,00		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14 Orang/bulan	5.281.331.106,25	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	200.000.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	14 Dokumen	118.736.775,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.500.000,00		*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.500.000,00		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksanany a penatausahaa n barang milik daerah pada perangkat daerah*		65.000.0 00,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksa nanya penatausahaan barang milik daerah pada perangka t daerah*		29.525.0 00,00			ASN PUP R Kab Lem bata	DINA S PEK ERJ AAN UMU M DAN PEN ATA AN RUA NG
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD		65.000.0 00		*Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Lapo ran	29.525.0 00	Kab. Lem bata , Sem ua Kec amatan, Sem ua Kel/ Des a	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	ASN PUP R Kab Lem bata	DINA S PEK ERJ AAN UMU M DAN PEN ATA AN RUA NG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanany a penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah*	20 %	274.227. 485,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksa nanya penataan aktivitas sumber daya perangka t daerah*	20 %	30.457.8 29,00			ASN PUP R Kab Lem bata	DINA S PEK ERJ AAN UMU M DAN PEN ATA AN RUA NG
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan	1 Pak et	25.900.0 00,00		*Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/Pe nerangan*		0,00	Kab. Lem bata , Sem ua Kec	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK	ASN PUP R Kab Lem bata	DINA S PEK ERJ AAN UMU M DAN

		Kantor yang Disediakan				*Bangunan Kantor yang Disediakan*			amatan, Semua Kel/ Desa	ASI UMUM		PENATAANRUANG
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		33.327.485,00		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4.706.044,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK ASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		65.000.000,00		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	3.951.785,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK ASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	150.000.000,00		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan*	2 Laporan	21.800.000,00	Kab. Lembata, Semua Kec	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

		Konsultasi SKPD				*Konsultasi SKPD*			amatan, Semua Kel/ Desa	ASI UMUM		PENATAAN RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	75.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	0,00			ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0 Unit	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.000.000,00		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	0	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

									Kel/ Desa			RUANG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	56.297.950,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	20 %	23.177.718,00			ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12.500.000,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	0 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.797.950,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	23.177.718,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	0	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	20 %	529.241.710,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	20 %	63.151.443,00			ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	179.241.710,00		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	10 Unit	63.151.443,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000,00		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	0	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000,00		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN PUPR Kab Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Meningkatnya Persentase air baku***	**16 %**	**1.358.021.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Meningkatnya Persentase air baku***	**0 %**	**0,00**				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian Banjir pada Daerah Kabupaten*	2 Paket	1.358.021.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Air ,Bangunan Pengaman Pantai dan Pengendalian*	0	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Banjir pada Daerah Kabupaten						
	Pembangunan Kanal Banjir				Pembangunan Kanal Banjir							
		Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,7 KM	698.021.000,00		*Panjang Kanal Banjir yang Dibangun*	0	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							

		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		660.000.000,00		*Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun*	0 Paket	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*	2 Paket	0,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi, Rawa dan*	0 Paket	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEN

						Jaringan Pengairan Lainnya						ATAAN RUANG
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	0,00		*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	0 KM	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase penduduk berakses air minum***	**81 %**	**9.193.181.250,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase penduduk berakses air minum***	**81 %**	**8.033.829.792,00**				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpasangnya Jumlah Sambungan Rumah (SR)*	200 Unit	9.193.181.250,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpasangnya Jumlah Sambungan Rumah (SR)*	750 Unit	8.033.829.792,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							

		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15 Liter/ Detik	8.193.181.250,00		*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*	15 Liter/ Detik	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter/ Detik	1.000.000.000,00		*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa*	12 Liter/ Detik	8.033.829.792,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	-	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

						n yang dibangun			Semua Kel/ Desa			RUANG
4,	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**70%**	**7.825.357.900,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**70%**	**5.138.655.528,00**				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar*		7.825.357.900,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar*		5.138.655.528,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat							
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	600 Rumah Tangga	7.825.357.900,00		*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*	250 Rumah Tangga	5.138.655.528,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)***	**50 %**	**32.363.628.750,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dengan kecepatan (>40 Km/Jam)***	**50 %**	**8.143.108.971,00**				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jalan yang terbangun*	10 KM	32.363.628.750,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jalan yang terbangun*	3 KM	8.143.108.971,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rekonstruksi Jalan				Rekonstruksi Jalan							
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi		30.628.008.750,00		*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	2,6 KM	6.709.528.207,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK,	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

										DANA INSENTIF DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				Survey Kondisi Jalan/Jembatan							
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	350.000.000,00		*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	0 KM	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

										UMUM		
	Pemeliharaan Rutin Jalan				Pemeliharaan Rutin Jalan							
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,5 KM	1.385.620.000,00		*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	0,4 KM	1.433.580.764,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6,	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi***	**20 %**	**75.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi***	**0 %**	**0,00**				

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memadai*	15 %	25.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang memadai*	0 %	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	25.000.000,00		*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	0 Dokumen	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Penyedia jasa Konstruksi Tertib Usaha*	15 %	50.000.000,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Penyedia jasa Konstruksi Tertib Usaha*	0 %	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota							
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang	1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00		*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi*	0 Paket Pekerjaan	0,00	Kab. Lembata, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJA	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM

		Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				*Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*			Kecamatan, Semua Kel/ Desa	KROKOK-PELAYANAN KESEHATAN		DAN PENATAAN RUANG
7,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah***	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah***	**0 Dokumen**	**0,00**				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya*	2 Kali	10.500.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR dan regulasi turunannya*	0 Kali	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang							
		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	10.500.000,00		*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*	0 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang*	1 Dokumen	139.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang*	0 Dokumen	0,00			Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		75.000.000,00		*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*		0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang							

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	64.500.000,00		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang*	0 Laporan	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Masyarakat Kab. Lembata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				57.819.059.721,00				**26.861.974.162,25**				

IV

PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kgiatan tahun anggaran 2025. Renja Perubahan tahun 2025 diharapkan akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Renja Perubahan Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025 mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 serta Renstra Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 – 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan, Visi dan Misi Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta memacu tercapainya kualitas kinerja.

Lewoleba, Agustus 2025

Dibuat Oleh,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

GERARDUS I. ATABURAN, ST,. MT

NIP.19740829 200501 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenan. Perangkat Daerah menyusun perubahan renja perangkat Daerah dan dalam penyusunanya berkoordinasi, bersinergi dengan Bappelitbangda dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 34 Permendagri 86 tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian Program Kegiatan, juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dasar amanat permendagri tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah dengan cara melakukan pergeseran antar kegiatan, penambahan maupun penghapusan kegiatan, penambahan maupun penghapusan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3480)
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata;
15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 - 2026;

16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perengkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan Penganggaran/Pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah umumnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

a. Menjadi Acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025.
b. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan.
c. Menjadi instrument/dasar evaluasi dalam mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB IV
PENUTUP

Catatan Penting dalam Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025

a. Setiap Kepala bidang wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
b. Para Kepala Bidang harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Renja, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata tahun 2025 dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Dinas tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEMBATA

Drs. YOHANES DEDEO ARIMON
Pembina Utama Muda
NIP.19731110 199303 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.250.823.444,25**	**4.048.392.857,00**	**3.842.617.869,00**	**-219.829.869,45**							**4.030.993.574,80**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	56.578.837,00	9.828.525,00	9.828.525,00	-46.750.312,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		52.079.537,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.888.362,00	1.753.900,00	1.753.900,00	-8.134.462,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.888.362,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.695.200,00	1.695.200,00	1.695.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			4.424.225,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.923.525,00	1.571.650,00	1.571.650,00	-7.351.875,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			8.923.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.798.525,00	1.491.400,00	1.491.400,00	-8.307.125,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.798.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.733.700,00	1.563.850,00	1.563.850,00	-8.169.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.733.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.311.200,00	1.752.525,00	1.752.525,00	-7.558.675,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			9.311.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.208.377.333,25	3.472.519.103,00	3.471.141.503,00	262.764.169,75			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		2.919.557.513,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	3.366.061.608,00	3.366.061.608,00	3.366.061.608,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.767.993.713,80	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	102.586.545,00	102.314.595,00	102.314.595,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			130.538.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.892.700,00	1.441.200,00	1.441.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			9.991.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	1.978.250,00	1.324.100,00	1.324.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			11.034.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	37.914.825,00	31.410.500,00	30.959.000,00	-6.955.825,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		37.914.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.936.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	31.410.500,00	30.959.000,00	30.959.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			32.978.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	6.139.950,00	0,00	0,00	-6.139.950,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		21.139.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.139.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	83.101.053,00	82.611.545,00	36.226.584,00	-46.874.469,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		83.101.053,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.751.606,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.443.845,00	1.657.934,00	1.657.934,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			12.358.947,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.981.700,00	5.396.650,00	5.396.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.212.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	71.186.000,00	29.172.000,00	29.172.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			45.778.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	39.149.296,00	41.551.453,00	21.617.151,00	-17.532.145,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		39.149.296,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	41.551.453,00	21.617.151,00	21.617.151,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			29.149.296,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	707.630.361,00	349.261.731,00	230.625.106,00	-477.005.255,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		715.176.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	334.858.950,00	217.116.200,00	217.116.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			584.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107.870.986,00	12.617.400,00	12.617.400,00	-95.253.586,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			111.176.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.785.381,00	891.506,00	891.506,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah*				100 %	100 %	111.931.789,00	61.210.000,00	42.220.000,00	-69.711.789,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		162.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	94.077.146,00	54.930.000,00	35.940.000,00	-58.137.146,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			52.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	9.790.300,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-6.270.300,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.393.150.017,75**	**1.400.559.576,00**	**896.998.126,00**	**-571.759.530,00**							**821.390.487,75**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	9.286.755,00	0,00	0,00	-9.286.755,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.286.755,00	0,00	0,00	-9.286.755,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	906.618.437,75	1.166.928.250,00	714.822.800,00	-191.795.637,75			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		606.618.437,75	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				40 Unit	88 Unit	906.618.437,75	1.166.928.250,00	714.822.800,00	-191.795.637,75	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			606.618.437,75	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	52.472.775,00	64.621.475,00	53.949.475,00	1.476.700,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Lalulintas Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan ASN pada Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	52.472.775,00	64.621.475,00	53.949.475,00	1.476.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	214.772.050,00	165.274.051,00	124.814.501,00	-89.957.549,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	ASN pada Dinas Perhubungan, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		204.772.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				750 Unit	750 Unit	11.828.950,00	0,00	0,00	-11.828.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			11.828.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				750 Dokumen	750 Dokumen	15.747.700,00	7.470.650,00	1.651.650,00	-14.096.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			15.747.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	128.181.400,00	157.803.401,00	123.162.851,00	-5.018.549,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			128.181.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	29.014.000,00	0,00	0,00	-29.014.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.014.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur*				80 %	80 %	210.000.000,00	3.735.800,00	3.411.350,00	-206.588.650,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengguna Angkutan Umum di Kab. Lembata		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				102 Unit	102 Unit	200.000.000,00	3.735.800,00	3.411.350,00	-196.588.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Pada	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**62.279.354,00**	**87.996.925,00**	**106.432.124,00**	**54.344.532,00**							**116.623.886,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Terselenggaranya pengelolaan pelayaran*				75 %	75 %	62.279.354,00	87.996.925,00	106.432.124,00	44.152.770,00			-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Pengguna Pelabuhan Pengumpan Lokal		116.623.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			116.623.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	62.279.354,00	87.996.925,00	106.432.124,00	44.152.770,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PAJAK PENERANGAN JALAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**5.706.252.816,00**	**5.536.949.358,00**	**4.846.048.119,00**	**-860.204.697,00**							**4.969.007.948,55**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor *40* Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; maka Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Tahun 2025 yang penetapannya dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana
2. telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 20180 Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor *40* Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor *40*);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-perogram prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan kesinergisan program kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta sinergis dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 adalah :

a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025;
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja berupa Program, Kegiatan beserta pemdanaannya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perubahan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan renja merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	**Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 .(Akhir Periode Renstra SKPD) renstra 2023 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2023,2024		Target Kinerja dan Anggaran dan Renja SKPD Tahun Berjalan 2025 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun.....%		Unit SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
				k	Rp	k	Rp	k		Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				**56.187.326.070**		**11.862.146.251**			**3.988.049.059**		**603.746.106**		**699.893.975**		-				**1.303.640.081**		**13.163.235.232**		**23,43**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYA**				**53.773.592.630**		**11.399.976.210**			**3.677.781.655**		**603.746.106**		**696.482.571,00**		-		-		**1.300.228.677**		**12.697.653.787**		**23,61**	

	NAN DASAR																							
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				53.773.592.630		11.399.976.210			3.677.781.655		603.746.106		696.482.571,00	-	-	-	-		1.300.228.677		12.697.653.787	-	23,61	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintaahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi prkantoran dalam mendukung Tupoksi			12.718.656.290		5.072.330.919	25	%	2.633.828.168		603.746.106		671.775.296,00		-		-		1.275.521.402		6.347.852.321		49,91	
1.04.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi serta tersedianya dokumen Perencanaan			84.751.800	24 dokumn	31.530.996	12	Dokumen	8.531.148			-	4.473.212		-		-		4.473.212		36.004.208		42,48	

		penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah																							
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD dan dokumen perubahannya	Dokumen	10	10.260.120	4 dokumen	17.035.744	2	Dokumen	1.028.212				1.028.212						1.028.212		18.063.956		176,06	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	5	15.209.720	2	2.898.645	1	Dokumen	1.182.586										-		2.898.645		19,06	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Prubahan RKA	Dokumen	5	12.412.680	2	2.899.017	1	Dokumen	1.394.650										-		2.899.017		23,36	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	5	15.427.440	2	2.899.255	1	Dokumen	1.449.600				1.449.600		-				1.449.600		4.348.855		28,19	

1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	5	12.066.680	2		1	Dokumen	1.480.700						-		-		-		-		-	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD	Laporan	10	13.766.000	4	2.899.170	2	Laporan	1.995.400				1.995.400				-		1.995.400		4.894.570		35,56	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	Laporan	20	5.609.160	8	2.899.165	4	Laporan									-		-		2.899.165		51,69	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.013.595.566**		**4.457.460.312**	**100**	**%**	**2.439.805.211**		**555.807.779**		**616.328.941**		**-**		**-**		**1.172.136.720**		**5.629.597.032**		**51,11**	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	70	10.055.855.936	28	4.220.321.357	14	bln	2.340.654.539	3	555.807.779	4	560.745.269						1.116.553.048		5.336.874.405		53,07	

1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	Dokumen	60	909.074.950	24	227.840.056	12	Dokumen	97.099.000			6	53.532.000						53.532.000		281.372.056		30,95	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Laporan	5	22.173.760	2	5.000.083	1	Laporan	1.051.386			1	1.051.386						1.051.386		6.051.469		27,29	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/semester yang tersusun	Laporan	90	18.007.080	36	3.298.121	18	Laporan	1.000.286			9	1.000.286						1.000.286		4.298.407		23,87	
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yg tersusun	Dokumen	10	8.483.840	2	1.000.695	1	Dokumen	-										-		1.000.695		11,80	

1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah kendaraan dinas jabatan/ kendaraan dinas oprasionalterpelihara**			**139.061.840**		**45.302.270**	**4**	**laporan**	**13.925.800**				**3.845.800,00**		**-**		**-**		**3.845.800**		**49.148.070**		**35,34**	
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang milik Daerah (RKBMD)SKPD yg tersusun	Dokumen	5	14.405.800	2	2.899.370	1	Dokumen	-										-		2.899.370		20,13	
1.04.01.2.05.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Pengguna (LBPS dan LBPT)yg tersusun	Laporan	10	124.656.040	4	19.670.000	2	Laporan	-										-		19.670.000		15,78	
1.04.01.2.05.03	Penatausaha Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun	Laporan	5	-	2	22.732.900	1	Laporan	13.925.800			1	3.845.800						3.845.800		26.578.700		-	
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**				**-**		**2.331.045**			**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		**2.331.045**	**-**	**-**	

	Daerah																							
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolahan administrasi Kepegawaian	Dokumen			1	2.331.045			-										-		2.331.045		-	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**705.954.300**		**74.477.252**	**100**	**%**	**39.256.411**				**10.548.429,00**		**-**	**-**	**-**		**10.548.429**		**85.025.681**		**12,04**	
1.04.01.2.06.0001	Penydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Ilistrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	38.168.000	2	4.816.174	1	Paket	2.529.544				2.529.544						2.529.544		7.345.718		19,25	
1.04.01.2.06.0002	Pnyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	5	61.195.780	2	41.048.931	1	Paket	3.069.385			1	2.539.135						2.539.135		43.588.066		71,23	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah barang cetak dan penggandaa	Paket	5	62.182.520	2	8.357.147	1	Paket	2.332.482				869.750						869.750		9.226.897		14,84	

	dan Penggandaan	n																							
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	Jenis	2	4.800.000					-											-		-		-	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	10	539.608.000	1	20.255.000	1	Laporan	31.325.000				4.610.000							4.610.000		24.865.000		4,61	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	-	-	**3**	**Unit**	-			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia						3	Unit	-											-		-		-	

1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia																	-		-		-	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Bulan**		**581.944.784**		**315.556.060**			**110.683.104**		**37.176.823**		**36.578.914,00**		**-**		**-**		**73.755.737**		**389.311.797**		**66,90**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	Laporan	60	474.144.000	24	276.900.000	12	Laporan	92.755.840	3	35.150.000	3	30.400.000						65.550.000		342.450.000		72,22	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon,Meteran Air dan Meteran listrik	Laporan	60	92.700.784	24	32.287.950	12	Laporan	16.537.400	3	2.026.823	3	4.789.050						6.815.873		39.103.823		42,18	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	15.100.000	2	6.368.110	1	Laporan	1.389.864			1,00	1.389.864						1.389.864		7.757.974		51,38	

1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**193.348.000**		**145.672.984**	**100**	**%**	**21.626.494**		**10.761.504**		**-**		**-**		**-**		**10.761.504**		**156.434.488**		**80,91**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	7	133.508.000	7 Unit	88.773.672	6	Unit	21.626.494	**3**	10.761.504								10.761.504		99.535.176		74,55	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit	2	39.000.000															-		-		-	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	4	20.840.000	5 Unit	7.299.592			-										-		7.299.592		35,03	

1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	Unit			1 Unit	49.599.720													-		49.599.720		-	
1.04.01.2.09.0010	Penyediaan Jasa Sewa Gedung / Rujab	Jumlah Gedung yang disewa	Unit																	-		-		-	
1 04 02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Bertambahnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat Kab. Lembata**	**%**	**29,60**	**1.540.000.140**	**29,46**	**612.597.466**	**29,53**	**Unit**	**131.978.281**				**12.873.175**		**-**		**-**		**12.873.175**		**622.919.541**		**40,45**	
1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**			**80.000.060**	**-**	**-**		**%**	**9.582.050**				**7.487.050**		**-**		**-**		**7.487.050**		**5.187.950**		**9,28**	

1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah Dokumen Data identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						1	Dokumen	2.524.150				1.474.150						1.474.150		1.474.150		-	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sbelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kejadian sbelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1	40.000.000			1	Dokumen	2.299.100				2.299.100						2.299.100		2.299.100		5,75	
1.04.02.2.01.0004	Pengumpulan data tingkat kerusakan rumah akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kejadian sbelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1	40.000.000			1	Dokumen	2.299.100				2.299.100						2.299.100		2.299.100		5,75	
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerim Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi						2	Dokumen											-		-		-	

	Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi																							
1.04.02.2.01.0009	identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/Kota	Dokumen	1	40.000.060			1	Dokumen	2.459.700				1.414.700						1.414.700				1.414.700		3,54	
1 04 02 2.02	**Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab/ Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**			**2.120.000.160**		**612.597.466**			**3.321.150**				**252.000,00**		**-**		**-**		**252.000**		**617.983.591**		**53,25**	

1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	jumlah Dokumen Data identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						1	Dokumen	3.321.150				252.000						252.000		252.000		-		
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksanannya Pembangunan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**1.160.000.080**	**12**	**612.597.466**			**119.075.081**				**5.134.125,00**		**-**		**-**		**5.134.125**		**617.731.591**		**53,25**		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitas Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksanannya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	16	200.000.000	12	612.597.466	2	Unit	119.075.081				5.134.125						5.134.125		617.731.591		308,87		Bid. Perumahan
1.04.02.2.03.0003	Pengadaan Lahan untuk pembangunan rumah bagi	Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	50	400.000.040																	-		-		

	korban bencana																								
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit	100	560.000.040																		-		-	
1.04.02.2.05	**Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**Terlaksananya Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**			**300.000.000**		**-**			**-**				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		-	
1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	50	300.000.000																		-		-	
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**	**Meningkatnya kualitas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**	**%**		**2.000.000.000**		**754.487.076**	**25**	**%**	**143.050.350**			**-**	**3.913.350,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.913.350**	**-**	**758.400.426**	**-**	**37,92**	

1.04.03.2.01	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kwalitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**		**Dokumen**		**2.000.000.000**		**754.487.076**	**1**	**Dokumen**	**143.050.350**			**-**	**3.913.350,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.913.350**	**-**	**758.400.426**	**-**	**37,92**	
1.04.03.2.01.0002	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		Dokumen	2	2.000.000.000	1 Dokumen	754.487.076	1	Dokumen	143.050.350				3.913.350						3.913.350		758.400.426		37,92	Bidang PSU

1.04.03	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**%**	**14,77**	**30.764.936.200**	**15,05**	**3.274.469.770**	**14,91**	**%**	**768.924.856**				**7.920.750,00**		**-**		**-**		**7.920.750**		**3.282.390.520**		10,67	
1.04.03.2.01	**Pencegahan Prumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**	**Unit**		**30.764.936.200**	**74**	**3.274.469.770**	**60**	**Unit**	**768.924.856**				**7.920.750,00**		**-**		**-**		**7.920.750**		**3.282.390.520**		**10,67**	
1.04.03.2.01.0001	Perbaikan Rumah Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dngan luas di bawah	Terlaksananaya Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	194	15.382.468.100	74	3.274.469.770	60	Unit	768.924.856				7.920.750						7.920.750		3.282.390.520		21,34	Bid. Perumahan

	10 Ha																									
1.04.03.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhdap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Ragka Pencegahan Kumuh	Unit		15.382.468.100			25	Unit												-		-		-	Bid. Perumahan

1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Terlaksananya Penanganan/Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman**	**%**	**10024**	**6.750.000.000**	**7540**	**1.686.090.979**	**7532**	**%%**	-				-		-		-		-		**1.686.090.979**		24,98	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Prosentasi Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman**	**%**		**6.750.000.000**	**5 lokasi**	**1.686.090.979**	**25**	**%**	-				-		-		-		-		**1.686.090.979**		24,98	
1.04.05.2.01.0002	Penydiaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diperumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah desa yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman	lokasi	1	6.750.000.000	5 lokasi	1.686.090.979													-		1.686.090.979		24,98	Bidang PSU
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**				**2.413.733.440**		**462.170.041**			**310.267.404**			**-**	**3.411.404,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.411.404**	**-**	**465.581.445**	**-**	**19,80**	

	DASAR																								
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**2.413.733.440**		**462.170.041**			**310.267.404**			**-**	**3.411.404,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.411.404**	**-**	**465.581.445**	**-**	**19,80**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Prosentase penyelesian sengketa tanah garapan Menurunnya sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**13100**	**42.500.000**	**875**		**11100**	**%%**	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota**				**42.500.000**					**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerh Kabupaten / Kota	Dokumen	1	42.500.000			1	Dokumen											-		-		-	Bid. Pertanahan
2.10.05	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Presentase Penduduk yang Terlayani sistem Air Limbah yang Memadai**	**Dokumen**		**2.351.234.400**	**1 Dokumen**	**462.170.041**	**115**	**Dokumen Jumlah**	**310.267.404**				**3.411.404,00**		**-**		**-**		**3.411.404**		**465.581.445**		**19,80**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugiaan dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Optimalnya Penguasaan ,Kepemilikan,Penggunaan Tanah**	**Dokumen**		**2.351.234.400**	**1 Dokumen**	**462.170.041**	**25**	**%**	**310.267.404**				**3.411.404,00**		**-**		**-**		**3.411.404**		**465.581.445**		**19,80**	

2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah,Pengadaan Tanah Dan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah	Dokumen	1	2.351.234.400	1 Dokumen	462.170.041	1	Dokumen	310.267.404				3.411.404						3.411.404		465.581.445		19,80	Bid. Pertanahan
2.10.07	**Program Penataan Tanah Ulayat**				**21.500.000**	-	-			-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat tang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota**		**%**		**21.500.000**	-	-	**25**	**%**	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota oleh Bupati	Dokumen	1	21.500.000			1	Dokumen											-		-		-		Bid. Pertanahan
2.10.08	**Program Pengelolaan tanah kosong**				**19.999.040**	-	-			-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**		**%**		**19.999.040**	-	-	**25**	**%**	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10.08.2.02.0001	pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong yang di Inventarisasi	laporan	1	19.999.040			1	Laporan											-		-		-		Bid. Pertanahan
					56.187.326.070		**11.862.146.251**			**3.988.049.059**		**603.746.106**		**699.893.975,00**		-	-	-	-	**1.303.640.081**		**13.163.235.232**		**23,43**		

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, nampak bahwa realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hingga triwulan II Tahun 2025 yang dilihat pada masing – masing sub kegiatan belum mencapai target di tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar 23,43% yakni terealisasi Rp. 1.303.640.081.- dari total anggaran sebesar Rp. 3.988.049.059,- Pencapaian kinerja sub kegiatan yang mendukung program dan kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi keuangan tidak sejalan dimana realisasi keuangan lebih maju dari realisasi kinerja karena, realisasi kinerja yang bisa dihitung setiap triwulannya adalah sub kegiatan yang berada di Program Penunjang Urusan Pemerintaahan Daerah Kabupaten/ Kota, sementara untuk sub kegiatan yang merupakan tupoksi bidang – bidang adalah pekerjaan fisik yang mana produk hasinya adalah produk fisik berupa bangunan rumah utuh, sertifikat tanah, dan pengaman tanah, terealisasi pada triwulan berikutnya. Masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan.

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

- Disiplin aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang masih rendah.
- Terbatasnya jumlah aparatur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertnahan.

Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraiakan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang Capaian Kinerja kegiatan dan realisasi keuangan yang masih 0%. Hal ini disebabkan karena penganggaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV.
2. Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
   - Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf, antar Bidang dan seksi serta antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan stakeholders dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan target pencapaian kinerja program/kegiatan prioritas dan dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025, mengakomodir 6 program dengan 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.677.781.655,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.633.828.168,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan pagu Rp. 3.077.091.605,-.
2. Program Pengembangan Perumahan
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu Rp. 131.976.281,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu Rp. 210.000.000,-
3. Program Kawasan Permukiman
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 148.050.350,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 400.000.000,-
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.768.924.187,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.000.000.000,-

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 0,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 10.772.000,-
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp.50.000.000,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp.1.350.000.000,-
7. Program Penetapan Tanah Ulayat
   Dalam Renja Perubahan tahun 2025 direncanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp. 19.000.000,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu Rp.0,-

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LEMBATA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							7.047.863.605,00	6.045.925.769,00	3.988.049.059,00							11.815.704.062,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.697.863.605,00	5.712.134.132,00	3.677.781.655,00							10.396.704.062,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							5.697.863.605,00	5.712.134.132,00	3.677.781.655,00							10.396.704.062,00	
1	1	04	01			PROGRAM PENU	Cakupan pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	-	-	3.077.091.605,00	2.649.759.064,00	2.633.828.168,						100%	3.779.825.340,00	

						NJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah								00								
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	-	-	35.000.000,00	14.740.422,00	14.740.422,00			-	-	-	100%	35.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	2.020.262,00	1.028.212	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	2 Dokumen	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.391.086,00	1.182.586,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	1 Dokumen	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

																						PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.416.808,00	1.394.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	1 Dokumen	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.563.172,00	1.449.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	1 Dokumen	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.450.022,00	1.480.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	1 Dokumen	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERT

																							ANA HAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.899.072,00	1.995.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	2 Laporan	5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-	ASN Disperkimtan	4 Laporan	5.050.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	2.471.900.718,00	2.455.528.061,00	2.455.528.061,00			-	-	-	100%	3.025.466.323,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

				02	01																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	32 Orang / Bulan	14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	2.345.780.987,00	2.354.094.539,00	2.340.654.539,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Disperkimtan	14 Orang/ Bulan	2.771.409.817,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	111.119.731,00	97.152.000,00	97.099.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Disperkimtan	12 Dokumen	240.673.719,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

																							DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	5.000.000,00	2.249.436,00	1.051.386,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Disperkimtan	1 Laporan	6.097.784,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Dokumen Laporan	18 Dokumen Laporan	5.000.000,00	2.032.086,00	1.000.286,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	ASN Disperkimtan	18 Laporan	4.951.947,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-	ASN Disperkimtan	2 Dokumen	2.333.056,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERT

																							ANAHAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	42.000.000,00	1.968.750,00	1.968.750,00			-	-	-	100%	53.842.006,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lew	-	-	-	ASN Disperkimtan	2 Dokumen	3.961.595,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAW

																oleb a							ASA N PER MUK IMA N DAN PERT ANA HAN
	1	0 4	0 1	2 . 0 3	0 0 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Dok ume n	2 Dok ume n Lapo ran	2 Dok ume n Lapo ran	7.000. 000,0 0	0,00	0,00	Kab. Lem bata , Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a Kab. Lem bata , Nub atuk an, Lew oleb a	-	-	-	ASN Dispe rkimt an	2 Lap ora n	34.280 .411,0 0	DINA S PERU MAH AN RAKY AT, KAW ASA N PER MUK IMA N DAN PERT ANA HAN

	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	0,00	1.968.750,00	13.925.800,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	ASN Disperkimtan	2 Laporan	15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	5.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-	100%	5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERT

																							ANAHAN
	1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-		2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	256.074.021,00	35.962.321,00	35.962.321,00			-	-	-	100%	220.258.995,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAW

																							ASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.529.544,00	2.529.544,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	10.496.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.472.945,00	3.069.385,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	19.303.845,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.074.021,00	3.894.832,00	2.332.482,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	18.609.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERT

																							ANAHAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokume	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		1 Dokumen	1.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	230.000.000,00	25.065.000,00	31.325.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	170.529.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100 %	-	-	45.000.000,00	9.457.690,00	9.457.690,00			-	-	-	100%	64.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.	00	Pengadaan Mebel																	

				07	05																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit		15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-			33.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit		30.000.000,00	9.457.690,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	31.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

																						DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Meperintahan Daerah	100%	100%	100%	-	-	187.825.860,00	110.475.326,00	110.475.326,00			-	-	-	100%	159.682.316,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00	91.155.840,00	92.755.840,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lew	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	130.389.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAW

															oleba							ASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.537.400,00	16.537.400,00	16.537.400,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	25.492.716,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.288.460,00	2.782.086,00	1.389.864,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	3.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	-	-	34.291.006,00	21.626.494,00	21.626.494,00			-	-	-	100%	214.925.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

				09	01																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2 Unit	2 Unit	7 Unit	7 Unit	0,00	21.626.494,00	21.626.494,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Unit	36.219.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lew	-	-	-		2 Unit	9.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAW

																oleba						ASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	3.460.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-		4 Unit	3.806.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	-	-	-		1 Unit	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	29,6	29,36	29,46	29,53	-	210.000.000,00	174.998.906,00	131.978.281,00						29,60 %	136.600.000,00	

	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	-	45.000.000,00	19.999.250,00	19.999.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan	Masyarakat Kab Lembata Korban Bencana Alam	100%	65.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melal ui peran aktif koper asi.	berke adilan					
	1	0 4	0 2	2 . 0 1	0 0 0 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			

							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.875,00	2.524.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		1 Dokumen	16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melal ui peran aktif koper asi.	berke adilan					
	1	0 4	0 2	2 . 0 1	0 0 0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																			

							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.775,00	2.299.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan				
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		

							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.999.775,00	2.299.100,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan					
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.999.825,00	2.459.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	-		1 Dokumen	10.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melalui peran aktif koperasi.					
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	4 Dokumen			1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		1 Dokumen	16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melal ui peran aktif koper asi.	berke adilan				

	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	15.000.000,00	4.999.925,00	4.999.925,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan	Masyarakat Kab Lembata Korban Bencana Alam	100%	16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan					
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		

							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	80 Orang			20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	4.999.925,00	3.321.150,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		20 Orang	16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melal ui peran aktif koper asi.	berke adilan				

	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100%	100%	100 %	100 %	100 %	150.000.000,00	149.999.731,00	149.999.731,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan	-	100%	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melal ui peran aktif koper asi.	berke adilan					
	1	0 4	0 2	2 . 0 3	0 0 0 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		

							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	16 Unit	9 Unit	3 Unit	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	150.000.000,00	149.999.731,00	119.075.081,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		25 Unit	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																	ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan					
9	1	04	03			PROGRAM KAWASAN	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	24 %			32%	-	400.000.000,00	24.999.975,00	143.050.350,00						25 %	400.100.000,00	

						PERMUKIMAN																
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersedianya Permukiman yang tertata	100%		-	25%	-	400.000.000,00	24.999.975,00	24.999.975,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim indust	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan	-	25%	400.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	berkualitas dan berkeadilan					
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		

							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		400.000.000,00	24.999.975,00	143.050.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		2 dokumen	400.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan				
10	1	04	04			PROGRAM PERUMAHA	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah	14,77%	15,19%	15,05%	14,91%	15,01%	2.000.000.000,00	2.862.376.187,00	768.924.856,00						14,77%	4.230.178.722,00	

						N DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tidak Layak Huni																

	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	95%	15%	20%	30%	-	2.000.000.000,00	2.862.376.187,00	2.862.376.187,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	-	Masyarakat Kab Lembata yang berpenghasilan rendah	30%	4.230.178.722,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																		ksi melal ui peran aktif koper asi.					
	1	0 4	0 4	2 . 0 1	0 0 0 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	

							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	194 Unit	74 Unit	60 Unit	75 Unit Rumah	18 Unit Rumah	2.000.000.000,00	2.862.376.187,00	768.924.856,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	-		60 unit	4.230.178.722,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																	ksi melal ui peran aktif koper asi.							
11	1	04	05			PROGRAM PENINGKATA	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah	100%	75%		-	-	10.772.000,00	0,00	0,00							100% 24%	1.850.000.000,00	

						N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dilengkapi PSU															

	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	15 %	20%	25 %	25 %	10.772.000,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan	Masyarakat Kab Lembata yang berpenghasilan rendah	20 %	1.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan					
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			

							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	5 Lokasi		7 Paket Lokasi		10.772.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan		9 Lokasi	1.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																	ksi melalui peran aktif koperasi.	berkeadilan					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.350.000.000,00	333.791.637,00	310.267.404,00							1.419.000.000,00	
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.350.	333.7	310.26							1.419.	

		0										000.000,00	91.637,00	7.404,00							000.000,00	
12	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	- Persentase Penanganan Sengketa Tanah Pemerintah yang Dilakukan Melalui Mediasi - Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	13 % 100 %	8 % 50 %	8 % 75 %	13% 100 %	-	1.350.000.000,00	333.791.637,00	310.267.404,00						13 % 100%	1.400.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabup	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	25 %	25%	25%	-	1.350.000.000,00	333.791.637,00	333.791.637,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemda Lembata dan Masyarakat Kab Lembata	25 %	1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

						aten/Kota																	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000,00	333.791.637,00	310.267.404,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik		1 Dokumen	1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1 3	2	1 0	0 7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Meningkatnya Kwalitas Penataan Penguasaa Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%			25%	-	0,00	0,00	0,00							19.000.000,00	

	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%			25%	-	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Pemda Lembata dan Masyarakat Kab Lembata		19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																			ksi melal ui peran aktif koper asi.						
	2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																		

							Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota oleh Bupati/Wali kota	4 Laporan			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produ	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

																	ksi melalui peran aktif koperasi.							
	J U M L A H												**7.047.863.605,00**	**6.045.925.769,00**	**3.988.049.059,00**								**11.815.704.062,00**	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Renja Perubahan tahun 2025 diharapkan akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Lembata Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 – 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan, Visi dan Misi Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta memacu tercapainya kualitas kinerja.

Lewoleba, Agustus 2025

Dibuat Oleh,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

GERARDUS I. ATABURAN, ST,. MT

NIP.19740829 200501 1 004

Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerh, yang disusun berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan;dan /atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025, namun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19 Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata sampai dengan triwulan I Tahun 2025, menunjukan adanya ketidak sesuaian perkembangan keadaan meliputi asumsi

kerangka ekonomi dan keuangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025. Perubahan dilakukan dengan melakukan pergeseran antar program, kegiatan, sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan menjadi pedoman penyusunan perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 075);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 40);

14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaran bidang urusan pemerintahan Umum dan Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan I.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP
Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan terhadap Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sampai dengan Triwulan I perlu dilakukan untuk memastikan target Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaiamana tersaji pada tabel berikut ini.

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sanga rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahanya itu :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah akan dilaksanakan pada triwulan III;
2) Sub Kegiatan Koodinasi, dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD akan dilaksanakan pada triwulan III;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pada triwulan III
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD akan dilaksanakan pada triwulan III;
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan dilaksanakan pada triwulan III
6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum dilaksanakan karena adanya pergeseran anggaran:
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya akan dilaksanakan pada triwulan III;
8) Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilakukan pada triwulan III dan IV
9) Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk akan dilakukan pada triwulan III

10) Sub kegaiatan Peningkatan dan Pelayanan Pencatatan Sipil akan dilakukan pada triwulan III dan IV
11) Sub kegaiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil akan dilakukan pada triwulan III dan IV
12) Sub kegaiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan akan dilakukan pada triwulan III dan IV
13) Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan akan dilakukan pada triwulan III dan IV

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut: (terlampir)

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Kabupaten Lembata,

Siprianus Suya

Tabel.2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lembata
Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target RPD Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024				C								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra		PD Penanggung jawab
											I		II		III		IV							
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =8+9+10+11*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5 x 100%*		*15*
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					\			123	4.168.824.341	409	709.379.201		-					409	709.379.201	409	709.379.201		#DIV/0!	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Daerah**						50	3.055.177.628	9	670.366.788		-					9	670.366.788	9	670.366.788	25,82	#DIV/0!	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas**		32	81.604.600		9.054.600	12	12.279.265	3	1.037.675		-					3	1.037.675	3	10.092.275	50,00	12,367	DUKCAPIL
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	8	13.887.100	2	2.417.600	2	2.270.819	-	-	-	-	-	-			-	-	2	2.417.600	25,00	17,41	DUKCAPIL
		Koodinasi, dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dok	4	-		-	1	1.540.406	0	-		-					-	-	-	-	0,00	-	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dok	4	-		-	1	2.177.281	0	-	-	-		-			-	-	-	-	0,00	-	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dok	4	26.590.500	1	2.362.000	1	2.176.146	0	968.200		-	-	-		-	-	-	1,00	2.362.000	25,00	8,88	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dok	4	28.079.800	1	2.279.600	1	2.224.025	1	-		-	-	-			1,00	-	2,00	2.279.600	50,00	8,12	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Lap	8	13.047.200	2	1.995.400	2	1.890.588	2	69.475	-	-		-			2	69.475	4	2.064.875	50,00	15,826	DUKCAPIL
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	18	-		-	4										-		-	-	0,00	0	DUKCAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	**lap**	**4**			**2.490.489.142**		**2.767.018.400**		**639.562.300**		-	**3**				**3**	**639.562.300**	**3**	**3.130.051.442**	**32,81**	**-**	DUKCAPIL
		Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	9.002.810.840	14	2.389.431.142	14	2.642.138.121	4	609.851.675	-	-	0	-			4	609.851.675	18	2.999.282.817	32,14	33,31	DUKCAPIL
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksaan Pengelolaan Keuangan yang terbayar	org/bulan	48	310.560.000	12	98.640.000	12	120.432.000	3	28.716.000	-	-	0	-			3	28.716.000	15	127.356.000	31,25	41,01	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	lap	4	56.726.400	1	2.418.000	1	2.023.529	0,5	890.325	-	-		-		-	0,5	890.325	1,5	3.308.325	37,50	5,83	DUKCAPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	lap	56	7.274.250	14	2.011.000	14	2.424.750	3	104.300	-	-	0				3	104.300	17	2.115.300	30,36	35,71	DUKCAPIL
		Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pronosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Perangkat Daerah	lap	0	-			0	-	0	-	-						-	-	-	-		-	DUKCAPIL
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**		**8**			**22.452.800**	**2**	**22.650.880**	**1,00**	**5.040.000**	-	-		-	-	-	**1**	**5.040.000**	**1**	**27.492.800**		**29,03**	DUKCAPIL
		Rekonsitasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Tahunan Barang Pengguna		8	94.715.200	2	22.452.800	2	22.650.880	1	5.040.000	-	-		-	-	-	1	5.040.000	3	27.492.800	37,50	29,03	DUKCAPIL
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber daya Perangkat Daerah**		**55**				**0**	-		-		-					-	-	-	-	**0,00**		DUKCAPIL
		Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Sosialisasi	kali	45	-				-				-					-	-	-	-	0,00	0,00	DUKCAPIL
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Manajemen PNS (Bibingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM)	kali	10	-				-				-					-	-	-	-	0,00		DUKCAPIL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**lap**	**4**			**96.778.185**		**89.325.870**	**1,8**	**15.735.063**		-					**2**	**15.735.063**	**2**	**112.513.248**	**32,50**	**40,44**	DUKCAPIL
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen alat listrik/penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	7.302.144	1	3.214.000	1	1.855.655	0,4	760.000	-	-				-	0,4	760.000	1	3.974.000	35,00	54,42	DUKCAPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	132.525.180	1	13.977.000	1	10.610.915	0,2	2.941.663	-	-					0,2	2.941.663	1	16.918.663	30,00	12,77	DUKCAPIL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	4	50.000.000	1	6.429.200	1	3.777.300	0,2	360.200	-	-					0,2	360.200	1	6.789.400	50,00	50,00	DUKCAPIL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	40	156.688.000	12	73.157.985	20	73.082.000	1	11.673.200	-	-					1	11.673.200	13	84.831.185	32,50	54,14	DUKCAPIL
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**207**	**449.500.000**		**325.188.000**	**2**	**17.514.950**	**0**		-	-					-	-	-	**325.188.000**	**53,33**	**72,34**	DUKCAPIL
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	15	449.500.000	8	325.188.000	2	17.514.950	0	-	-	-	0				-	-	8	325.188.000	53,33	72,34	DUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**144**	**826.809.400**		**223.240.450**	**36**	**78.750.263**	**3**	**8.691.750**	-	-	-		-		**3**	**8.691.750**	**3**	**231.932.200**	**2,08**	**28,05**	DUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	Lap	48	569.500.000	12	152.395.000	12	5.303.250	3	600.000	-	-					3	600.000	15	152.995.000	31,25	26,86	DUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik, air dan telpon	Lap	48	246.069.600	12	**67.217.450**	12	70.455.405	3	7.591.750	-	-					3	7.591.750	15	74.809.200	31,25	30,40	DUKCAPIL
		Penyediaan jasa jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	Lap	48	11.239.800	12	3.628.000	12	2.991.608	3	500.000	-	-					3	500.000	15	4.128.000	31,25	36,73	DUKCAPIL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Lap**	**1**			**33.579.661**		**67.638.000**		**300.000**								**300.000**	**-**	**33.879.661**			DUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	206.640.000	14	25.360.161	14	57.620.000	0	-	-	-		-			-	-	14	25.360.161	23,33	12,27	DUKCAPIL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	60	313.068.000	15	6.035.000	10	5.890.000	1	300.000	-	-					1	300.000	16	6.335.000	26,67	2,02	DUKCAPIL
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dipelihara/rehabilitasi	unit	3	40.000.000		2.184.500	1	4.128.000	0	-	-		-	-			-	-	-	2.184.500	0,00	5,46	DUKCAPIL

		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**					**104.748.599**		**503.101.061**		**1.210.000**						**-**	**1.210.000**	**-**	**105.958.599**	**50,00**	**29,01**	**DUKCAPIL**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**4**			**38.993.999**		**39.128.040**		**1.210.000**		**-**				**-**	**1.210.000**	**-**	**40.203.999**	**50,00**	**29,01**	**DUKCAPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pencatatan,Penatausahan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	dok	5000	138.566.500	2000	38.993.999	1000	39.128.040	500	1.210.000	-	-				500	1.210.000	2.500	40.203.999	50,00	29,01	**DUKCAPIL**
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk**	**dok**	**4**				**0**	**463.973.021**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**55.236.000**	**0,00**	18,41	**DUKCAPIL**
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir,dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Blanko Admisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	dok	4	300.000.000	1	55.236.000	0	463.973.021	-		-	-				-	-	1	55.236.000	25,00	18,41	**DUKCAPIL**
		Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Laporan Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk**	**dok**	**4**				**0**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**10.518.600**	**0,00**	10,52	**DUKCAPIL**
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	dok	4	100.000.000	1	10.518.600	0	-	-		-	-				-	-	1	10.518.600	25,00	10,52	**DUKCAPIL**
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**		**4**				**71**	**565.045.064**	**400**	**36.165.788**						**400**	**36.165.788**	**400**	**36.165.788**	**36,39**	**-**	**DUKCAPIL**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil**	**lap**	**4**				**71**	**19.845.324**	**400**	**2.565.788**		**-**				**400**	**2.565.788**	**400**	**2.565.788**	**45,00**	**-**	**DUKCAPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan,penatausahan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dok	9000	50.000.000	3000	9.096.000	1000	8.706.680	400	1.372.394	-	-				400	1.372.394	3.400	10.468.394	40,00	120,23	**DUKCAPIL**
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	72	50.000.000	18	8.781.000	18	11.138.644	0	1.193.394	-	-				-	1.193.394	18	9.974.394	50	89,55	**DUKCAPIL**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**180**				**71**	**545.199.740**	**0**	**33.600.000**		**-**				**-**	**33.600.000**	**-**	**33.600.000**	**27,78**	**97,13**	**DUKCAPIL**
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Lap	180		50	495.967.685	71	545.199.740	0	33.600.000	-	-				-	33.600.000	50	529.567.685	27,78	97,13	**DUKCAPIL**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Cakupan Pengelolaan Infarasi Kependudukan**							**33.079.725**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**			**DUKCAPIL**
		Pengumupulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Bease Kependudukan	**Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan Kependudukan**							**33.079.725**		**-**												
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	**5**	**dok**	**60.000.000**				**14.040.662**		**-**							-	-	-		-	
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	**4**	**dok**	**50.000.000**		-		**19.039.063**														
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Ketersedian Dokumen Profil KependudukanKabupaten Lembata**		**4**	**22.980.000**	**1**	**5.745.000**	**2**	**12.420.863**	**0,35**	**1.636.625**	**-**	**-**				**0,35**	**1.636.625**	**1,35**	**7.381.625**	**33,75**	**32,12**	**DUKCAPIL**
		Penyusunan Profil Kependudukan	Ketersediaan Data Penduduk yang Akurat		4	22.980.000	1	5.745.000	1	**12.420.863**	0,35	**1.636.625**	-	-				**0,35**	**1.636.625**	**1,35**	**7.381.625**	**33,75**	**32,12**	**DUKCAPIL**
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil	dok	4	22.980.000	1	5.745.000	1	12.420.863	0,35	1.636.625	-	-				0,35	1.636.625	1,35	7.381.625	33,75	32,12	**DUKCAPIL**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.173.469.270,00**	**3.055.177.628,00**	**2.971.696.615,00**	**187.670.730,00**							**3.361.140.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.000.000,00	12.279.265,00	6.645.190,00	-10.354.810,00			-	- -	-		19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.270.819,00	1.187.406,00	-812.594,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.540.406,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.177.281,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.176.146,00	2.079.646,00	-1.420.354,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.224.025,00	2.089.025,00	-2.910.975,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	1.890.588,00	1.289.113,00	-1.210.887,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.454.643.749,00	2.767.018.400,00	2.766.051.960,00	311.408.211,00			-	- -	-		2.555.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.347.503.749,00	2.642.138.121,00	2.642.138.121,00	294.634.372,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.447.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	98.640.000,00	120.432.000,00	120.432.000,00	21.792.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			98.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.023.529,00	1.704.383,00	-1.795.617,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.424.750,00	1.777.456,00	-3.222.544,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.550.926,00	22.650.880,00	21.795.905,00	-755.021,00			-	- -	-		23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.550.926,00	22.650.880,00	21.795.905,00	-755.021,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	79.000.000,00	89.325.870,00	43.457.469,00	-35.542.531,00			-	- -	-		87.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.855.655,00	1.855.655,00	-144.345,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	10.610.915,00	5.993.514,00	-6.006.486,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.777.300,00	2.007.300,00	-2.992.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	11 Laporan	60.000.000,00	73.082.000,00	33.601.000,00	-26.399.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.774.595,00	17.514.950,00	0,00	-208.774.595,00			-	- -	-		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	17.514.950,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	275.500.000,00	78.750.263,00	77.447.091,00	-198.052.909,00			-	- -	-		281.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	197.000.000,00	5.303.250,00	5.303.250,00	-191.696.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			197.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	70.455.405,00	70.455.405,00	-4.544.595,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	2.991.608,00	1.688.436,00	-1.811.564,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.000.000,00	67.638.000,00	56.299.000,00	-59.701.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	57.620.000,00	50.335.000,00	-49.665.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	6.000.000,00	5.890.000,00	3.900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	4.128.000,00	2.064.000,00	-7.936.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**503.101.061,00**	**245.637.795,00**	**5.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	100.000.000,00	39.128.040,00	10.696.590,00	-89.303.410,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3000 Dokumen	3000 Dokumen	100.000.000,00	39.128.040,00	10.696.590,00	-89.303.410,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	100.000.000,00	463.973.021,00	234.941.205,00	134.941.205,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	463.973.021,00	234.941.205,00	134.941.205,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**540.000.000,00**	**565.045.064,00**	**540.431.137,00**	**50.000.000,00**							**590.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	110.000.000,00	19.845.324,00	12.918.444,00	-97.081.556,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				3000 Dokumen	3000 Dokumen	70.000.000,00	8.706.680,00	6.757.400,00	-63.242.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	18 Layanan	40.000.000,00	11.138.644,00	6.161.044,00	-33.838.956,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	430.000.000,00	545.199.740,00	527.512.693,00	97.512.693,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				60 Laporan	60 Laporan	430.000.000,00	545.199.740,00	527.512.693,00	97.512.693,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**275.000.000,00**	**33.079.725,00**	**10.346.499,00**	**-150.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	175.000.000,00	33.079.725,00	10.346.499,00	-164.653.501,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	14.040.662,00	7.116.186,00	-67.883.814,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	19.039.063,00	3.230.313,00	-96.769.687,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**12.420.863,00**	**6.879.738,00**	**-25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	12.420.863,00	6.879.738,00	-43.120.262,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.420.863,00	6.879.738,00	-43.120.262,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**4.238.469.270,00**	**4.168.824.341,00**	**3.774.991.784,00**	**-463.477.486,00**							**4.306.140.000,00**	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja Setda) Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Pertauran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 92 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata;
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026(Berita Derah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44)
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Setda Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Setda Tahun 2025 adalah

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Setda untuk memastikan pencapaian target tahuan Renstra Setda dan RPD di tahun 2025
b. Sebagai instrumen akuntabilias kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah Sekretariat Daerah dan laporan kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Setda tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Setda tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang meliputi pergeseran antar sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru, serta memuat penambahan atau pengurangan target kinerja sub bagian.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Setda tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target atau belum serta kemungkinan akan tercapai atau tidak pada akhir tahun pelaksanaan sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan Renja.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, dan Kegiatan *(output)*	Target Renstra Tahun 2023 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2024		Target Kinerja & Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 6+12*		*14 = 13/5x100%*		*15*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		Belanja							**21.826.868.192**															

1	**Semakin meningkatnya cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran guna mendukung tupoksi Perangkat daerah**	**PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM MENDUKUNG TUPOKSI PERANGKAT DAERAH**	**1.189**	**73.619.905.037**	**293**	**66.917.116.911**	**300**	**19.427.456.790**	**7**	**3.414.023.383**	**23**	**8.238.685.269**					**30**	**8.027.267.095**	**291**	**74.944.384.006**	**24**	**102**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**60**	**260.000.000**	**11**	**1.912.519.516**	**10**	**62.544.825**	**-**	**-**	**-**	**13.482.275**					**-**	**13.482.275**	**11**	**1.926.001.791**	**150**	**741**	

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2021	24	60.000.000	6	73.341.621	6	35.354.100	-	-		5.250.000					-	5.250.000	6,00	78.591.621	25,00	130,99	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	4	40.000.000	1	438.646.200	1	3.982.400		-							-	-	1,00	438.646.200	25,00	1.096,62	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun	4	40.000.000	1	459.646.150	1	7.859.550	-	-		4.203.050					**1,00**	4.203.050	2,00	463.849.200	50,00	1.159,62	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Disusun	4	80.000.000	1	466.955.050	1	5.428.625	-	-							-	-	1,00	466.955.050	25,00	583,69	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Disusun	4	40.000.000	1	473.930.495	1	9.920.150	-	-		4.029.225					-	4.029.225	1,00	477.959.720	25,00	1.194,90	

		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2023 Per Triwulan Disusun	16	-	0	-												-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4	-	1,00																		

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**176**	**45.892.362.569**	**44**	**21.948.414.964**	**45**	**9.377.258.957**	**6**	**2.171.678.784**	**6**	**4.525.227.245**					**12**	**6.695.940.629**	**38**	**28.644.355.593**	**125**	**62**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48	42.025.022.569	12	18.055.586.292	12	8.712.480.157	3,00	2.171.678.784	6,00	4.308.697.045					9,00	6.480.375.829	21,00	24.535.962.121	43,75	58,38	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Yang Terbayar	48	3.768.540.000	12	3.582.711.782	12	652.314.600	3,00	-		214.794.900					3,00	214.794.900	15,00	3.797.506.682	31,25	100,77	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	4	52.800.000	1	161.663.690	1	7.112.000	-	-		769.900					-	769.900	1,00	162.433.590	25,00	307,64	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	36.000.000	18		18	5.352.200		-		965.400											
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	10.000.000	1	148.453.200	2	-	-								-	-	1,00	148.453.200	25,00	1.484,53	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**16**	**323.965.708**	**4**	**80.991.427**	**4**	**60.841.350**	**-**	**-**	**2**	**24.998.650**					**2**	**23.843.900**	**3**	**104.835.327**	**38**	**32**	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LBPS dan LBPT	8	323.965.708	2	80.991.427	2	58.086.600	-		1,00	23.843.900					1,00	23.843.900	3,00	104.835.327	37,50	32,36	

		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	28.000.000	2	7.000.000	2	2.754.750			1,00	1.154.750											
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**9**	**90.000.000**				**3.693.350**		**-**	**0,5**	**1.757.250**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		4	40.000.000			1	3.693.350	-	-	0,5	1.757.250											
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek.	5	50.000.000						-												

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**32**	**2.287.056.000**	**8**	**5.923.920.530**	**9**	**731.301.986**	**-**	**54.328.364**	**3**	**162.156.807**					**3**	**216.485.171**	**11**	**6.140.405.701**	**273**	**2.488**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	60.000.000	0	15.000.000	1	18.183.614	-	-	0,50	4.206.318					0,50	4.206.318	0,50	19.206.318	12,50	32,01	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	4	80.000.000	0	281.003.180	1	20.492.386	-	-	0,50	8.654.773					0,50	8.654.773	0,50	289.657.953	12,50	362,07	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Makan dalam 1 Tahun Jumlah minum dalam 1 Tahun Snack dalam 1	4	550.432.000	0	1.059.574.840	1	197.975.000	-	-	0,50	35.797.500					0,50	35.797.500	0,50	1.095.372.340	12,50	199,00	

			Tahun																				
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang cetakan (blangko disposisi) jumlah pengadaan jumlah penjilitan	4	259.488.000	4	429.101.680	1	34.999.858	-		0,50	3.772.998					0,50	3.772.998	4,50	432.874.678	112,50	166,82	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Praturan perundang undangan	4	9.000.000	1	99.000.000	1	-		-							-	-	1,00	99.000.000	25,00	1.100,00	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi	4	314.996.000	1	365.495.580	1	44.011.628	-	-	0,50	1.671.322					0,50	1.671.322	1,50	367.166.902	37,50	116,56	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	4	950.000.000	1	3.603.223.280	1	412.140.000	-	54.328.364	0,20	106.679.596					0,20	161.007.960	1,20	3.764.231.240	30,00	396,23	

		Konsultasi SKPD																					
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsib dinamis pimpinan perkantoran danpegawai	4	63.140.000	1	71.521.970	1	3.499.500	-	-	0,20	1.374.300					0,20	1.374.300	1,20	72.896.270	30,00	115,45	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**3**	**3.647.035.000**	**1**	**2.229.175.050**	**1**	**289.900.625**	**-**	**-**	**-**	**143.621.000**					**-**	**-**	**1**	**2.229.175.050**	**33**	**61**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pendgadaan Mebel						100.997.838				143.621.000											
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Peroranga n /Jabatabn						**2**	-															
		Sub Kegiatan Pengadaa n						**1**	289.900.625															

		Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi rumah jabatan yang diadakan ,jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (leptop),jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (microphon) ,jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (printer)	12	3.647.035.000	2	2.229.175.050	1	-		-							-	-	2,00	2.229.175.050	16,67	61,12	

		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah fasilitasi rumah jabatan yang diadakan ,jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (leptop),jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (microphon) ,jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (printer)	3	3.647.035.000	1	2.229.175.050	1	-		-							-	-	1,00	2.229.175.050	33,33	61,12	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi PerangkatDaerah**	**12**	**5.808.108.703**	**3**	**2.399.352.856**	**3**	**1.567.648.200**	**-**	**413.614.526**	**2**	**663.900.594**					**2**	**1.077.515.120**	**5**	**3.476.867.976**	**38**	**60**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	jumlah pelayanan administrasi surat menyurat	4	3.819.236.747	1	649.423.000	1	988.689.200	-	355.200.000	0,40	518.400.000					0,40	873.600.000	1,40	1.523.023.000	35,00	39,88	

		Menyurat																					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pelayanan telpon meteran air,dan meteran listrik	4	1.978.871.956	1	1.095.200.248	1	567.157.542	-	58.414.526	0,20	133.699.136					0,20	192.113.662	1,20	1.287.313.910	30,00	65,05	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium ajudan operator kendaraan perorangan dinas pramu saji,rujab kepala daerah /wakil kepala daerah ,jumlah pelayanan kebersihan kantor	4	10.000.000	1	654.729.608	1	11.801.458	-	-	1,00	11.801.458					1,00	11.801.458	2,00	666.531.066	50,00	6.665,31	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**306**	**435.000.000**	**76**	**5.606.395.302**	**82**	**774.788.500**	**-**	**135.640.000**	**7**	**359.151.278**					**7**	**-**	**76**	**5.606.395.302**	**80**	**11.714**	

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	250.000.000	0	1.519.799.176	1	190.585.400		2.772.000	0,10	11.459.250					0,10	-	0,10	1.519.799.176	5,00	607,92	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan mendapat izin operasi	288	50.000.000	72	2.280.840.830	72	400.349.700		16.895.000	0,10	126.446.028					0,10		72,10	2.280.840.830	25,03	4.561,68	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel						5	7.200.000		7.200.000	5,00	7.200.000					5,00						
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	12	110.000.000	3	219.558.955	3	41.800.400									-		3,00	219.558.955	25,00	199,60	

		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor termasuk aula yang dipelihara/direhab ,jumlah jaringan istalasi listrik,telp air kantoryang dipelihara ,jumlah rumah jabatan yangdipelihara	4	25.000.000	1	1.586.196.341	1	102.243.000		102.178.000	1	102.178.000							1,00	1.586.196.341	25,00	6.344,79	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	353.999.993			1	39.810.000		6.595.000	1	111.868.000											
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**12**	**2.540.174.936**	**3**	**1.011.381.609**	**3**	**607.409.272**	**1**	**45.386.040**	**1**	**227.659.551**					**2**	**-**	**3**	**1.011.381.609**	**75**	**166**	

		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah penyediaan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah	4	1.499.357.976	1	421.970.697	1	500.834.352		-	0,10	176.574.071							1,00	421.970.697	25,00	28,14	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pelaksanaan medical chak up kepala daerah dan wakil kepala daerah	4	240.816.960	1	221.189.240	1	56.574.920		41.036.040	1	46.735.480							1,00	221.189.240	25,00	91,85	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	800.000.000	1	368.221.672	1	50.000.000	1,00	4.350.000	0,10	4.350.000							1,00	368.221.672	25,00	46,03	

		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**8**	**13.659.224.824**	**2**	**13.731.536.932**	**2**	**4.041.159.050**	**-**	**315.325.042**	**1**	**1.451.170.782**					**1**	**-**	**2**	**13.731.536.932**	**50**	**191**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	4	10.059.224.824	1	10.703.413.160	1	2.397.746.672		193.062.184	0,50	740.747.568							1,00	10.703.413.160	25,00	106,40	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	4	3.600.000.000	1	3.028.123.772	1	1.643.412.378		122.262.858	0,50	710.423.214							1,00	3.028.123.772	25,00	84,11	

		Kegiatan Penataan Organisasi	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi PerangkatDaerah**	**552**	**1.132.852.000**	**138**	**1.832.875.468**	**138**	**431.725.428**	**-**	**-**	**0**	**10.628.950**					**0**	**-**	**138**	**1.832.875.468**	**100**	**668**	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan anjab (evaluasi kelembagaan anjab dan ABK,evaluasi jabatan,standar kompotensi jabatan	480	261.480.000	120	1.087.018.865	120	86.025.200			0,10	1.031.100							120,00	1.087.018.865	25,00	415,72	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen pelayannan publik dan tatalaksanan SPM,SPP,pengembangan budaya kerja ,survei IKM,SPIP,SOP	32	549.200.000	8	490.759.443	8	159.389.650			0,10	275.100							8,00	490.759.443	25,00	89,36	

		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen kinerja dan revormasi birokrasi LAKIP.RKT,PKRoad map dan pemantauan tindaklanjut RB,tindaklanjut pemeriksaan APIB,BPK,LHKPN,indeks presepsi korupsi	32	218.172.000	8	164.193.970	8	144.206.058											8,00	164.193.970	25,00	75,26	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen EPPD dan RLPPD yang disusun	8	104.000.000	2	90.903.190	2	42.104.520			0,10	9.322.750							2,00	90.903.190	25,00	87,41	
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi Perangkat Daerah**	**12**	**3.352.234.000**	**3**	**10.240.553.257**	**3**	**1.479.185.247**	**-**	**278.050.627**	**0**	**654.930.887**					**0**	**-**	**3**	**10.240.553.257**	**75**	**902**	

		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan KDH/WKDH atau pejabat yang mewakili ,difasilitasi keprotokolerannya	4	74.424.000	1	243.867.280	1	10.204.100			0,20	3.931.950							1,00	243.867.280	25,00	327,67	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah koordinasi keperintah tingkat atas pemda lainnya ,jumlah pidato yang disusun	4	3.203.010.000	1	9.795.571.517	1	1.459.004.147		278.050.627	0,10	648.062.787							1,00	9.795.571.517	25,00	305,82	
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan acara yangdiikuti dan dipublikasi	4	74.800.000	1	201.114.460	1	9.977.000			0,10	2.936.150							1,00	201.114.460	25,00	268,87	

	Meningkatnya kinerja Penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah dan instrumen hukum lainnya	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Penyusunan Produk hukum dan Pelayanan Hukum, Jumlah Kordinasi Pengembangan Wilayah Bawahan, Cakupan Kordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar**	**1.156**	**4.696.148.468**	**289**	**10.943.193.023**	**574**	**2.019.104.879**	**-**	**132.901.270**	**1**	**930.382.357**					**1**	**1.030.127.779**	**289**	**10.943.193.023**	**25**	**3.284**	

		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**Cakupan Penyusunan Produk hukum dan Pelayanan Hukum, Jumlah Kordinasi Pengembangan Wilayah Bawahan, Cakupan Kordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan dan Hari-Hari Besar**	**12**	**1.828.951.000**	**3**	**3.332.304.403**	**287**	**674.998.695**	**-**	**114.863.346**	**1**	**412.454.453**					**1**	**527.317.799**	**3**	**3.332.304.403**	**75**	**892**	
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan	4	64.235.000	1	3.232.332	1	22.362.450											1,00	3.232.332	25,00	5,03	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	106.040.000	1	777.718.390	1	3.079.155											1,00	777.718.390	25,00	733,42	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	1.658.676.000	1	2.551.353.681	1	649.557.090		114.863.346	0,50	412.454.453							1,00	2.551.353.681	25,00	153,82	

		Otonomi Daerah																					
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Cakupan Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, dokumen evaluasi dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**	**12**	**1.627.733.468**	**3**	**4.799.181.690**	**3**	**1.082.252.121**	**-**	**1.460.000**	**1**	**501.349.980**					**1**	**502.809.980**	**3**	**4.799.181.690**	**78**	**1.304**	

		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual(koordinasipembinaan kehidupan beragama, fasilitasiMTQ/LPTQ, Manasiq Haji dan Buka Puasa Bersama,fasilitasi pembinaan rohani kelompok kategorial	4	318.720.000	1	3.236.504.200	1	899.999.510		1.460.000	0,50	500.148.480							1,00	3.236.504.200	25,00	1.015,47	

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial (fasilitasi ormas PMI, Dharma Wanita, GOPTKI dan Komisi Daerah Lanjut Usia, koordinasi pelaksanaan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak, fasilitasi komisi penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Lembata)	4	1.257.013.468	1	1.473.759.560	1	178.251.461			0,10	406.500							1,00	1.473.759.560	25,00	117,24	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah rakor pelaksanaan PPSP dan pelaksanaan UKS	4	52.000.000	1	88.917.930	1	4.001.150			0,10	795.000					0,10		1,10	88.917.930	27,50	171,00	

		terkait Kesejahteraan Masyarakat																					
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Cakupan Ranperda yang disetujui DPRD, Perbup/KeputusanBupati/Peraturan DPRD/Keputusan yang ditindalajuti,jumlah Perda yang dibatalkan, jumlah instrumenhukum lainnya yang ditetapkan serta jumlah dokumenRencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), penanganan perkara perdata dan TUN dan warta peraturan perundang - undangan**	**1.132**	**1.239.464.000**	**283**	**2.811.706.930**	**283**	**259.574.563**	**-**	**16.577.924**	**0**	**16.577.924**					**0**	**-**	**283**	**2.811.706.930**	**75**	**1.088**	

		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Ranperda yang disetujui DPRD, Perbup/Keputusan Bupati/Peraturan DPRD/Keputusan yang ditindalajuti, jumlah Perda yang dibatalkan, jumlah instrumen hukum lainnya yang ditetapkan serta jumlah dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1084	327.040.000	271	1.486.995.930	271	126.198.925		16.577.924	0,10	16.577.924					0,10		271,10	1.486.995.930	25,01	454,68	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN	12	829.684.000	3	889.335.000	3	130.042.300									-		3,00	889.335.000	25,00	107,19	
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaa	Jumlah buku warta peraturan perundang - undangan dan Jumlah desa sadar hukum	36	82.740.000	9	435.376.000	9	3.333.338									-		9,00	435.376.000	25,00	526,20	

		n Informasi Hukum																					
		Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	**Jumlah MOU Kerja Sama Pemda dengan Pemda lainnya serta kerja sama dengan pihak ketiga**	**25**	**538.000.000**			**1**	**2.279.500**		**-**	**0,00**										**20,00**		
		Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama Pemda dengan Pemda lainnya serta kerja sama dengan pihak ketiga	5	200.000.000	1	430.400.000	1	2.279.500									-			1,00		20,00	
	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah dala	**PROGRAM PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**332**	**1.840.412.000**	**83**	**6.313.893.289**	**80**	**380.306.523**	**-**	**1.003.500**	**5**	**59.214.250**					**5**	**24.236.800**		**92**	**6.330.743.099**	**28**	**5.691**

	mpelaksanaan pembangunan Daerah																						
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Cakupan laporan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, laporan pengendalian dan distribusi Rastra, dan pengawasan ekonomi mikrokecil**	**40**	**495.020.000**	**10**	**405.326.440**	**10**	**15.059.700**	**-**	**-**	**0**	**4.453.900**					**0**	**-**	**10**	**405.326.440**	**75**	**609**	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaaan BUMD	8	28.000.000	2	51.292.870	2	5.060.400			0,10	774.800							2,00	51.292.870	25,00	183,19	

		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan distribusi Rastra, BBM dan fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	16	75.508.000	4	313.596.570	4	9.999.300			0,1	854.650							4,00	313.596.570	25,00	415,32	
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan pengawasan ekonomi mikro kecil	16	391.512.000	4	40.437.000	4				0,10	2.824.450							4,00	40.437.000	25,00	10,33	
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Cakupan dokumen kebijakan daerah bidang pembangunan dan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan**	**76**	**199.840.000**	**19**	**3.184.560.360**	**19**	**92.062.372**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**19**	**3.184.560.360**	**50**	**3.066**	
		Fasilitasi penyusunan program Pembangunan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan Daerah Yang dihasilkan	4	48.405.000	3	20.000.000	1	23.879.150									-						

		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang dikendaklikan	12	105.280.000	3	2.799.448.220	3	46.918.500									-		3,00	2.799.448.220	25,00	2.659,05	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan hasil pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan (RFK, Action Plan, DAK)	64	94.560.000	16	385.112.140	16	21.264.722											16,00	385.112.140	25,00	407,27	
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Cakupan Jumlah kajian RUP, paket lelang melalui LPSE dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa**	**196**	**1.001.220.000**	**49**	**1.442.861.339**	**49**	**258.629.301**	**-**	**1.003.500**	**5**	**41.521.000**					**5**	**12.118.400**	**58**	**1.447.592.749**	**79**	**524**	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kajian RUP laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pedum/Juklak/Juknis	96	179.756.000	24	313.324.970	24	57.093.754			2,00	9.750.000							24,00	313.324.970	25,00	174,31	

			yang di susun																					
		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket lelang melalui LPSE	84	783.804.000	21	926.023.369	21	199.118.171		1.003.500	3,00	31.771.000					3,00		24,00	926.023.369	28,57	118,14	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan	16	37.660.000	4	203.513.000	4	2.417.376									-		4,00	208.244.410	25,00	231,38	
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Cakupan laporan koordinasi kebijakan pengelolaan SDA dan Kehutanan dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**	**20**	**144.332.000**	**5**	**1.281.145.150**	**2**	**14.555.150**	**-**	**-**	**1**	**13.239.350**					**1**	**12.118.400**	**6**	**1.293.263.550**	**53**	**1.492**	

		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi kebijakan pengelolaan SDA dan Kehutanan	16	40.000.000	4	151.696.000	1	5.000.000			0,50	12.118.400					0,50	12.118.400	4,50	163.814.400	28,13	409,54	
		Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Deinstalasi Jaringan Listrik PLTD, Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Yang dipelihara, Jumlah laporan koordinasi pengembanganketenagalistrikan , Jumlah PLTS/Solar sell yangdipelihara/diperbaiki dan Jumlah PLTS/solar sell yang Terpasang	4	104.332.000	1	1.129.449.150	1	9.555.150	-			1.120.950						-	1,00	1.129.449.150	25,00	1.082,55	
				2.677	**80.156.465**	**29.67**	**84.174.203**	**954**	**21.826.868.**	**7**	**3.547.928.1**	**29**	**9.228.281.87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**12.776.210.**	**29.70**	**96.950.413.**	**60,88**	**120,95**	

					.505	2	.223		192		53,00		6						029,0 0	8	252			

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa realisasi kinerja Setda untuk Tahun 2025 hingga triwulan II adalah 29 % dengan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar 42,27% yakni realisasi sebesar Rp.9.228.281.876 dari total anggaran sebesar Rp.21.826.868.192. Untuk pencapaian kinerja program/kegiatan tahun 2025 sampai triwulan II tersebut di atas masih sesuai dengan yang direncanakan meskipun realisasi keuangan masih sangat rendah, dan capaian kinerja program dan kegiatan tersebut baik (karena ada yang telah menunjukan prosentasi capaian mulai mendekati angka 100%), namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Selain karena beberapa kegiatan tersebut dianggarkan pada triwulan III dan triwulan IV, juga terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi antara lain:

- Belum konsitensinya pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan;
- Waktu melaksanakan program/kegiatan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan masih rendah;
- Penyusunan anggaran kas tidak dilakukan dengan cermat;

Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah yang direncanakan pada triwulan III dan IV agar dapat diselesaikan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Paraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024. Seiring Dengan adanya perubahan RKPD tahun 2025, maka perubahan Renja Setda tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Setda Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa Pada Renja tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 20 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan pagu Rp. 23.565.612.025, sedangkan pada Perubahan Renja tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 20 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan pagu Rp.19.097.620.354. atau mengalami pengurangan sebesar Rp.4.467.991.671

Dengan demikian secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan sebelum perubahan adalah 3 program 20 kegiatan dan Sub Kegiatan 67 dengan anggaran sebesar Rp. 23.565.612.025 sedangkan setelah perubahan terdiri dari 3 program 20 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan kesimpulan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Induk sama dengan Renja Perubahan sedangkan yang mengalami perubahan hanya pada pagu Anggaran baik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Uraian lengkap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pada perubahan Renja Setda Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel
3.1

Kode					Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan		Rencana Tahun 2025								
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sebelm Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertabah/ berkurang
1					2	3	4				5	6				7
					SEKRETARIAT DAERAH									23.565.612.025	19.097.620.354	-4.467.991.671
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung					100	100	21.657.955.291	17.106.804.687	-4.551.150.604

						tupoksi perangkat daerah	**tupoksi perangkat daerah**								
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**					**10**	**10**	**140.000.000**	**42.115.300**	**(97.884.700)**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	6	6	50.000.000	25.130.350	-24.869.650
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	2.410.900	-17.589.100
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	ASN Setda dan Mas	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	25.000.000	6.032.750	-18.967.250

					RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	yarakat								
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	25.000.000	2.735.475	-22.264.525
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	5.805.825	-14.194.175
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**	**Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah**					**100**	**100**	**11.618.900.819**	**8.253.153.529**	-3.365.747.290
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	ASN Setda dan	ASN Setda dan Masyar	Kabupaten Lem	Kabupaten Lem	115	115	10.632.720.819	7.594.433.179	-3.038.287.640

						Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	Masyarakat	akat	bata	bata				
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	12	12	956.180.000	651.224.900	-304.955.100
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	15.000.000	4.048.550	-10.951.450
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	18	18	15.000.000	3.446.900	-11.553.100

						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang dan aset**					**4**	**4**	**110.000.000**	**57.498.650**	-52.501.350
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	10.000.000	1.154.750	-8.845.250
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	100.000.000	56.343.900	-43.656.100
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Terselenggaranya manajemen PNS**	**Terselenggaranya manajemen PNS**					**100**	**100**	**15.000.000**	**5.616.500**	-9.383.500

					Daerah											
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	15.000.000	5.616.500	-9.383.500
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah**					**100**	**100**	**724.872.000**	**468.372.036**	-256.499.964
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	18.183.614	-1.816.386
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	30.000.000	21.069.886	-8.930.114
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ASN Setda dan	ASN Setda dan Masyar	Kabupaten Lem	Kabupaten Lem	1	1	200.000.000	148.440.000	-51.560.000

								Masyarakat	akat	bata	bata				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	64.872.000	18.119.608	-46.752.392
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	10.000.000	-	-10.000.000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	80.000.000	44.011.628	-35.988.372
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	300.000.000	217.173.000	-82.827.000

4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	1.374.300	-18.625.700
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**					**10**	**10**	**640.000.000**	**207.539.845**	-432.460.155
4	**01**	**01**	2.07	**01**	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan						Kabupaten Lembata	**1**	**2**	**350.000.000**	-	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	-		-
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	ASN Setda dan	ASN Setda dan Masyar	Kabupaten Lem	Kabupaten Lem	5	5	20.000.000	171.334.175	151.334.175

								Masyarakat	akat	bata	bata				
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	50.000.000	36.205.670	-13.794.330
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	-	-20.000.000
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	200.000.000	-	-200.000.000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan**	**Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan**					**3**	**3**	**1.504.527.807**	**1.776.890.960**	272.363.153

						pemerintah daerah	**pemerintah daerah**									
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	907.370.000	1.373.174.800	465.804.800
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	567.157.807	387.774.207	-179.383.600
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	30.000.000	15.941.953	-14.058.047
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang**					**128**	**128**	**820.000.000**	**827.377.400**	7.377.400

					Pemerintahan Daerah	**urusan pemerintahan daerah**	**urusan pemerintahan daerah**									
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	200.000.000	154.683.400	-45.316.600
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	64	64	500.000.000	362.677.000	-137.323.000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	ASN Setda dan	ASN Setda dan Masyar	Kabupaten Lem	Kabupaten Lem	20	20	10.000.000	7.200.000	-2.800.000

								Masyarakat	akat	bata	bata				
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	**40**	**40**	50.000.000	5.110.000	-44.890.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	50.000.000	155.827.000	105.827.000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	10.000.000	141.880.000	131.880.000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	ASN Setda dan Masyara	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	-		-

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kat								
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**					**100**	**100**	**644.839.494**	**534.912.969**	-109.926.525
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	374.839.494	422.638.609	47.799.115
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	70.000.000	62.274.360	-7.725.640

4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	200.000.000	50.000.000	-150.000.000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**					**100**	**100**	**4.314.806.206**	**3.507.354.073**	-807.452.133
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	2.514.806.206	1.872.270.344	-642.535.862
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	1.800.000.000	1.635.083.729	-164.916.271
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Organisasi**	**Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Organisasi**					**138**	**138**	**284.543.000**	**102.024.900**	-182.518.100

4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	120	120	50.000.000	3.943.600	-46.056.400
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	8	8	150.000.000	54.538.850	-95.461.150
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	8	8	54.543.000	23.598.050	-30.944.950
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	30.000.000	19.944.400	-10.055.600
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan**	**Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan**	**Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan**					**3**	**3**	**840.465.965**	**1.323.948.525**	483.482.560

					Komunikasi Pimpinan	**Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Protokol dan Komunikasi Pimpinan**									
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.465.965	5.608.600	-14.857.365
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	800.000.000	1.312.052.375	512.052.375
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	6.287.550	-13.712.450
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) dan Kinerja Penyelenggaraan**	**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) dan Kinerja Penyelenggaraan**							**1.208.316.734**	**1.668.809.782**	460.493.048

						Pemerintahan Daerah (EKPPD)	**Pemerintahan Daerah (EKPPD)**								
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan**					**8**	**8**	**439.669.000**	**683.478.190**	243.809.190
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	5.000.000	7.256.650	2.256.650
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	4	4	20.000.000	-	-20.000.000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	3	3	414.669.000	676.221.540	261.552.540

4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**396.226.734**	**924.877.067**	528.650.333
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	79.680.000	881.034.985	801.354.985
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	301.546.734	40.182.182	-261.364.552

						Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	15.000.000	3.659.900	-11.340.100

4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					**100**	**100**	**322.421.000**	**59.230.775**	-263.190.225
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	85.000.000	59.230.775	-25.769.225
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	207.421.000	-	-207.421.000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata			30.000.000	-	-30.000.000
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah**					**1**	**1**	**50.000.000**	**1.223.750**	-48.776.250

4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	50.000.000	1.223.750	-48.776.250
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian**	**Cakupan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Perekonomian**					**100**	**100**	**699.340.000**	**322.005.885**	-377.334.115
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**					**10**	**10**	**129.340.000**	**6.983.950**	-122.356.050
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	2	2	10.000.000	1.616.050	-8.383.950

4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	4	4	18.836.000	2.142.150	-16.693.850
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	4	4	100.504.000	3.225.750	-97.278.250
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**					**16**	**16**	**170.000.000**	**16.715.186**	-153.284.814
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	55.000.000	5.445.350	-49.554.650
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	ASN Setda dan	ASN Setda dan Masyar	Kabupaten Lem	Kabupaten Lem	3	3	55.000.000	5.518.750	-49.481.250

					Pembangunan	Program Pembangunan	Program Pembangunan	Masyarakat	akat	bata	bata				
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	12	12	60.000.000	5.751.086	-54.248.914
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**					**2**	**2**	**330.000.000**	**268.452.049**	-61.547.951
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	60.000.000	42.651.100	-17.348.900
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	250.000.000	222.479.049	-27.520.951

4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	50	50	20.000.000	3.321.900	-16.678.100
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**					**2**	**2**	**70.000.000**	**29.854.700**	-40.145.300
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	20.000.000	27.310.400	7.310.400

4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	ASN Setda dan Masyarakat	ASN Setda dan Masyarakat	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	1	1	50.000.000	2.544.300	-47.455.700

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting dalam Pelaksanaan Perubahan Renja Setda Tahun 2025

a. Setiap Kepala bagian dibawah koordinasi Asisten yang membidangi, wajib menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Perencanaan Anggaran untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
b. Para Kepala bagian harus saling berkoordinasi untuk menjamin Ssinergitas dan konsistensi antara Perubahan Renja dengan R-DPPA Tahun Anggaran 2025 yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Reformasi Birokrasi dan Keuangan.
c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam Perubahan Renja, maka penyusunan R-DPPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

4.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Setda Tahun 2025

a. Setiap Bagian yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi Perubahan Renja tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Perubahan Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
b. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Setda Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Setda Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut Perubahan Renja Setda Tahun 2025

a. Setiap Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus mendalami Perubahan Renja Tahun 2025 secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan persetujuan komisi DPRD sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan perubahan anggaran.
b. Setiap Kepala bagian berkoordinasi dengan TAPD untuk penyerasian final dalam Rancangan Perubahan APBD setelah disetujui oleh komisi DPRD terkait dan Badan Anggaran DPRD.

c. Setiap Kepala Bagian wajib menyusun DPPA dan Anggaran Kas dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
d. Setiap Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaksanakan DPPA sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
e. Setiap Kepala Bagian wajib mengendalikan pelaksanaan DPPA dan membuat laporan kepada Sekda sebagai pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rumusan Perubahan Renja Setda tahun 2025 sebagai acuan bagi Setda dalam penyusunan R-DPPA Setda tahun 2025 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, Agustus 2025

Kepala Sekretariat Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA SEKRETARIAT DAERAH

PASKALIS OLA TAPO BALI, AP.MT
Pembina Utama Madya
NIP.19740415 199412 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Perangkat Daerah wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; maka Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6)
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta sinergis dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD dan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2025
b. Sebagai instrument akuntasbilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan yang meliputi pergeseran antar sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, sub penambahan kegiatan baru serta memuat penambahan atau pengurangan target kinerja sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatannya, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Lembata

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3		4		5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	02				SEKRETARIAT DPRD			100	24,287,545,470	100	24,393,803,187	100	23,593,804,778	71	5,781,119,758	119	6,298,795,680	-	-	-	-	190	12,079,915,438	290.00	35,673,720,216	-	146
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Persentase	100	17,630,275,470	100	17,831,061,075	100	18,623,441,128	66	4,291,505,391	118	4,733,475,568	-	-	-	-	184	9,024,980,959	284.00	26,856,042,034		626
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan	48	50,000,000	12	11,126,200	11	8,127,275	-	-	2	745,000	-	-	-	-	2	745,000	14.00	11,871,200	29.17	24
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	10,000,000	6	2,310,325	6	1,652,425	-	-	1	355,000	-	-	-	-	1	355,000	7.00	2,665,325	29.17	27
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	10,000,000	1	2,015,300	1	1,368,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	2,015,300	20.00	20
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	10,000,000	1	2,325,450	1	1,107,725	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	2,325,450	20.00	23
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	10,000,000	1	2,235,025	1	1,291,875	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	2,235,025	20.00	22
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	5,000,000	1	-	1	1,394,675	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	-	20.00	-
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	5,000,000	2	2,240,100	1	1,312,175	-	-	1	390,000	-	-	-	-	1	390,000	3.00	2,630,100	60.00	53
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Dok.Laporan/ orang	161	2,732,375,000	58	2,491,222,084	51	2,741,747,986	41	700,812,689	43	749,574,626	-	-	-	-	84	1,450,387,315	142.00	3,941,609,399	2,840.00	144
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	2,515,245,000	35	2,346,723,209	35	2,599,469,836	38	695,625,689	38	687,238,626	-	-	-	-	76	1,382,864,315	111.00	3,729,587,524	2,220.00	148
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	202,130,000	12	141,488,500	12	140,318,950	3	5,187,000	3	61,796,000	-	-	-	-	6	66,983,000	18.00	208,471,500	360.00	103
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	5,000,000	1	1,480,150	2	1,959,200	-	-	2	540,000	-	-	-	-	2	540,000	3.00	2,020,150	60.00	40
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa	Laporan	2	5,000,000	2	-	2		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.00	-	40.00	-
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	5,000,000	8	1,530,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	8.00	1,530,225	160.00	31
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	16	50,000,000	6	32,943,280	2	31,862,925	-	-	1	15,430,000	-	-	-	-	1	15,430,000	7.00	48,373,280	140.00	97
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	8	10,000,000	2	2,000,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.00	2,000,150	40.00	20
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	8	35,000,000	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.00	-	40.00	-
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		5,000,000	2	30,943,130	2	31,862,925	-	-	1	15,430,000	-	-	-	-	1	15,430,000	3.00	46,373,130	60.00	927
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Manajemen PNS	Dokumen/Orang	5	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Pertauran Perundangang-undangan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administarsi Kepegawaian Jumlah Paket	Orang	5	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket/Laporan/Dokumen	25	309,274,125	7	164,637,270	5	82,051,927	-	15,839,206	4	9,392,000	-	-	-	-	4	25,231,206	11.00	189,868,476	220.00	61
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11,000,000	1	22,351,380	1	3,336,400	-	-	2	345,000	-	-	-	-	2	345,000	3.00	22,696,380	60.00	206
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80,274,125	1	8,948,185	1	7,652,359	-	-	2	7,567,000	-	-	-	-	2	7,567,000	3.00	16,515,185	60.00	21
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5,000,000	1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	-	20.00	-
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35,000,000	1	10,004,715	1	22,715,168	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	10,004,715	20.00	29

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3		4		5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	48,000,000	1	3,850,000	1	2,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	3,850,000	20.00	8
4	02	01	2.06	08	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10,000,000	1	4,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	4,650,000	20.00	47
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	120,000,000	1	114,832,990	1	45,798,000	-	15,839,206	-	1,480,000	-	-	-	-	0	17,319,206	1.00	132,152,196	20.00	110
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	58	555,000,000	2	28,065,975	7	580,367,008	-	-	20	353,051,000	-	-	-	-	20	353,051,000	22.00	381,116,975	440.00	69
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	10,000,000	1	28,065,975	2	8,873,196	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	28,065,975	20.00	281
4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	15,000,000	1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	-	20.00	-
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	100,000,000	-	-	5	571,493,812	-	-	20	353,051,000	-	-	-	-	20	353,051,000	20.00	353,051,000	400.00	353
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	20	831,000,000	3	989,575,138	3	955,583,710	-	190,106,644	10	119,227,819	-	-	-	-	10	309,334,463	13.00	1,298,909,601	260.00	156
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	600,000,000	1	249,275,975	1	114,507,750	-	44,930,000	2	19,200,000	-	-	-	-	2	64,130,000	3.00	313,405,975	60.00	52
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	125,000,000	1	144,864,114	1	124,998,840	-	39,576,644	2	34,347,819	-	-	-	-	2	73,924,463	3.00	218,788,577	60.00	175
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	106,000,000	1	595,435,049	1	716,077,120	-	105,600,000	6	65,680,000	-	-	-	-	6	171,280,000	7.00	766,715,049	140.00	723
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Unit	119	845,000,000	261	518,875,287	63	537,941,160	-	29,704,919	10	144,445,881	-	-	-	-	10	174,150,800	271.00	693,026,087	5,420.00	82
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	350,000,000	1	43,439,675	3	89,080,000	-	15,209,919	6	26,513,000	-	-	-	-	6	41,722,919	7.00	85,162,594	140.00	24
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	88	100,000,000	1	124,173,132	14	100,650,000	-	10,170,000	-	21,569,056	-	-	-	-	0	31,739,056	1.00	155,912,188	20.00	156
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	70,000,000	-	61,378,840	42	27,979,160	-	-	2	8,717,000	-	-	-	-	2	8,717,000	2.00	70,095,840	40.00	100
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	5,000,000	78	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	78.00	-	1,560.00	-
4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset TetapTak berwujud	Jumlah Aset TetapTak berwujud yang Dipelihara	Unit	4	10,000,000	78	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	78.00	-	1,560.00	-
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100,000,000	78	289,883,640	2	276,732,000	-	3,291,000	2	86,101,825	-	-	-	-	2	89,392,825	80.00	379,276,465	1,600.00	379
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	100,000,000	3	-	2	43,500,000	-	1,034,000	-	1,545,000	-	-	-	-	0	2,579,000	3.00	2,579,000	60.00	3
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	100,000,000	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	22.00	-	440.00	-
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang/Paket	54	10,783,626,345	51	12,490,316,481	52	12,050,982,965	25	2,919,701,703	25	2,914,580,772	-	-	-	-	50	5,834,282,475	101.00	18,324,598,956	2,020.00	170
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	25	10,106,326,345	25	11,563,549,830	25	11,349,104,390	25	2,919,701,703	25	2,914,580,772	-	-	-	-	50	5,834,282,475	75.00	17,397,832,305	1,500.00	172
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	287,000,000	1	604,286,500	2	367,438,575	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	604,286,500	20.00	211
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Orang	25	390,300,000	25	322,480,151	25	334,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	25.00	322,480,151	500.00	83
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	Dokumen/Laporan	13	1,409,000,000	3	1,104,299,360	7	1,634,776,172	-	435,340,230	3	427,028,470	-	-	-	-	3	862,368,700	6.00	1,966,668,060	120.00	140
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	4	329,000,000	1	251,974,994	2	261,982,825	-	65,045,000	1	55,395,000	-	-	-	-	1	120,440,000	2.00	372,414,994	40.00	113
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4	50,000,000	1	72,173,250	2	14,962,500	-	2,115,000	1	3,070,000	-	-	-	-	1	5,185,000	2.00	77,358,250	40.00	155
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	1,030,000,000	1	780,151,116	3	1,357,830,847	-	368,180,230	1	368,563,470	-	-	-	-	1	736,743,700	2.00	1,516,894,816	40.00	147

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3		4		5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dokumen	169	6,657,270,000	31	6,562,742,112	45	4,970,363,650	5	1,489,614,367	1	1,565,320,112	-	-	-	-	6	3,054,934,479	37.00	9,617,676,591	740.00	144
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Ranperda yang Dibahas	Dokumen	33	703,000,000	11	1,112,470,477	6	644,045,225	1	28,016,400	1	6,395,000	-	-	-	-	2	34,411,400	13.00	1,146,881,877	260.00	163
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	5,000,000	-	-	2	2,573,675	-	765,000	1	1,546,000	-	-	-	-	1	2,311,000	1.00	2,311,000	20.00	46
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	20	588,000,000	5	1,016,954,327	2	530,207,950	-	390,000	-	4,849,000	-	-	-	-	0	5,239,000	5.00	1,022,193,327	100.00	174
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perudang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Difasilitasi	Dokumen	5	10,000,000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5.00	-	100.00	-
4	02	02	2.01	04	Fasiltasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	100,000,000	1	95,516,150	2	111,263,600	1	26,861,400	-	-	-	-	-	-	1	26,861,400	2.00	122,377,550	40.00	122
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen/Laporan	28	360,000,000	5	410,075,500	5	367,956,075	-	-	-	5,255,000	-	-	-	-	0	5,255,000	5.00	415,330,500	100.00	115
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	4	20,000,000	1	11,537,800	1	9,762,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	11,537,800	20.00	58
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	4	20,000,000	1	8,961,500	1	7,397,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	8,961,500	20.00	45
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Laporan	4	95,000,000	1	137,926,350	1	114,827,025	-	-	-	1,890,000	-	-	-	-	0	1,890,000	1.00	139,816,350	20.00	147
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Laporan	4	95,000,000	1	113,937,925	1	115,530,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	113,937,925	20.00	120
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Laporan	8	10,000,000	-	-	-	5,756,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	4	120,000,000	1	137,711,925	1	114,682,750	-	-	-	3,365,000	-	-	-	-	0	3,365,000	1.00	141,076,925	20.00	118
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	32	190,000,000	3	168,557,250	10	122,950,850	-	-	-	10,080,000	-	-	-	-	0	10,080,000	3.00	178,637,250	60.00	94
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	4	65,000,000	1	46,624,525	3	57,732,400	-	-	-	2,580,000	-	-	-	-	0	2,580,000	1.00	49,204,525	20.00	76
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	4	65,000,000	1	108,874,500	3	56,355,000	-	-	-	5,409,000	-	-	-	-	0	5,409,000	1.00	114,283,500	20.00	176
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4	10,000,000		-	3	6,131,950	-	-	-	1,006,000	-	-	-	-	0	1,006,000	-	1,006,000	-	10
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	10,000,000	1	13,058,225	1	2,731,500	-	-	-	1,085,000	-	-	-	-	0	1,085,000	1.00	14,143,225	20.00	141
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	36	1,117,670,000	3	1,590,313,692	7	1,116,561,125	1	127,564,117	-	482,024,118	-	-	-	-	1	609,588,235	4.00	2,199,901,927	80.00	197
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	-	2	508,642,000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0	-	2.00	508,642,000	40.00	#DIV/0!
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	16	1,012,670,000	1	1,081,671,692	2	1,054,336,000	1	127,564,117	-	482,024,118	-	-	-	-	1	609,588,235	2.00	1,691,259,927	40.00	167
4	02	02	2.04	03						-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Tim Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Tim Pakar dan Tim Ahli	Dokumen	4		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang dalam Kelompok Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dokumen	7		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	#DIV/0!
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	4	50,000,000	-	-	1	1,615,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	4	50,000,000	-	-	4	60,610,125	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	20	2,959,000,000	5	1,966,403,125	5	1,909,543,400	1	972,270,000	-	907,175,000	-	-	-	-	1	1,879,445,000	6.00	3,845,848,125	120.00	130
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dokumen	4	150,000,000	1	15,925,000	1	15,050,000	-	3,375,000	-	3,550,000	-	-	-	-	0	6,925,000	1.00	22,850,000	20.00	15

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1					2	3		4		5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	4	19,000,000	1	11,408,125	1	9,593,400	-	-	-	8,650,000	-	-	-	-	0	8,650,000	1.00	20,058,125	20.00	106
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	12	2,790,000,000	3	1,939,070,000	3	1,884,900,000	1	968,895,000	-	894,975,000	-	-	-	-	1	1,863,870,000	4.00	3,802,940,000	80.00	136
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Dokumen hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	5	5,000,000	2	27,333,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.00	27,333,125	40.00	547
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD yang Dihasilkan	Laporan	1	-	1	15,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	15,925,000	20.00	#DIV/0!
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4	5,000,000	1	11,408,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	11,408,125	20.00	228
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Tersedianya dokumen hasil fasilitasi dan verifikasi Pembahasan Kerjasama Daerah	Dokumen	3	5,000,000	2	27,333,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2.00	27,333,125	40.00	547
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Dokumen	2	-	1	15,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	15,925,000	20.00	#DIV/0!
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	1	5,000,000	1	11,408,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	11,408,125	20.00	228
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen/laporan	20	1,317,600,000	4	1,314,922,068	12	809,306,975	2	361,763,850	-	154,390,994	-	-	-	-	2	516,154,844	6.00	1,831,076,912	120.00	139
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4	1,262,600,000	1	1,304,927,068	4	669,526,000	1	293,295,082	-	91,514,643	-	-	-	-	1	384,809,725	2.00	1,689,736,793	40.00	134
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	4	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4	15,000,000	1	9,995,000	4	5,861,975	-	-	-	3,970,000	-	-	-	-	0	3,970,000	1.00	13,965,000	20.00	93
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	20,000,000	1	-	4	133,919,000	1	68,468,768	-	58,906,351	-	-	-	-	1	127,375,119	2.00	127,375,119	40.00	637
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	4	15,000,000	1	-	-		-		-	-	-	-	-	-	0	-	1.00	-	20.00	-

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3		4		5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

Berdasarkan tabel tersebut diatas diatas nampak bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2025 hingga triwulan II adalah 51,20 % yakni terealisasi Rp. 12.079.915.438,- dari total anggaran sebesar Rp. 23.593.804.778.- Pencapaian kinerja program/kegiatan dan realisasi keuangan sesuai dengan perencanaan, adapun beberapa kegiatan realisasi keuangan masih sangat rendah, dan capaian kinerja program dan kegiatan tersebut baik (karena ada yang telah menunjukan peresentasi capaian mulai mendekati angka 100%), namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Selain karena beberapa kegiatan tersebut dianggarkan pada triwulan III dan triwulan IV, sesuai perencanaan. Masih terdapat beberapa program atau kegiatan yang belum dilaksanakan. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah :

- Disiplin aparatur dalam melaksanakan program atau kegiatan yang masih rendah;
- Terbatasnya jumlah aparatur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas;
- Penyusunan anggaran kas tidak dilakukan dengan cermat;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD.

Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya nol persen, hal ini disebabkan penganggaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV ;
2. Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
    - Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf, dan Bagian serta Sekretaris DPRD dengan

Stakholder dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan target pencapaian kinerja program/kegiatan prioritas dan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.
Secara umum rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, mengakomodir dari 2 (dua) program, 16 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan pagu Rp. 23.593.804.778,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Dalam perubahan Renja Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 10 kegiatan, 39 sub kegiatan dengan pagu Rp. 18.623.441.128,-
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   Dalam perubahan Renja Tahun 2025 terdapat 1 (satu) program dukungan 6 (enam) kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan pagu Rp. 4.970.363.650,-.

Uraian lengkap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pada perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

RUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							22.865.477.007,00	24.763.913.007,00	23.593.804.778,00	728.327.771,00							30.360.389.183,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.865.477.007,00	24.763.913.007,00	23.593.804.778,00	728.327.771,00							30.360.389.183,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							22.865.477.007,00	24.763.913.007,00	23.593.804.778,00	728.327.771,00							30.360.389.183,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dok	12 Dok	17.563.695.754,00	19.419.458.920,00	18.623.441.128,00	2.397.686.429,00							19.961.382.183,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	15.081.875,00	8.127.275,00	-46.872.725,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		60.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	3.015.850,00	1.652.425,00	-9.180.575,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.550.075,00	1.368.400,00	-9.464.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.040.350,00	1.107.725,00	-9.725.275,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.833.000,00	2.367.625,00	1.291.875,00	-9.541.125,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.916.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.834.000,00	2.399.375,00	1.394.675,00	-4.439.325,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.417.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.834.000,00	2.708.600,00	1.312.175,00	-4.521.825,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.417.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.796.729.409,00	2.746.030.918,00	2.741.747.986,00	-54.981.423,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.076.402.349,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.576.785.660,00	2.599.469.818,00	2.599.469.836,00	22.684.176,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.834.464.226,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.734.583,00	142.388.950,00	140.318.950,00	-64.415.633,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			225.208.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.604.583,00	4.172.150,00	1.959.200,00	-5.645.383,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.365.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.604.583,00	0,00	0,00	-7.604.583,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			8.365.041,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	33.045.850,00	31.862.925,00	-13.137.075,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		49.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	33.045.850,00	31.862.925,00	-3.137.075,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			38.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	ASN Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.000.000,00	140.883.302,00	82.051.927,00	-233.948.073,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		347.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	6.074.775,00	3.336.400,00	-17.663.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.000.000,00	7.652.359,00	7.652.359,00	-74.347.641,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			90.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	22.715.168,00	22.715.168,00	-22.284.832,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			49.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.000.000,00	5.100.000,00	2.550.000,00	-55.450.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			63.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	99.341.000,00	45.798.000,00	-64.202.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			121.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	577.340.000,00	818.657.881,00	580.367.008,00	3.027.008,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sarana Prasarana Sekretariat DPRD		1.427.578.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	225.340.000,00	0,00	0,00	-225.340.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.040.378.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	13.000.000,00	247.164.069,00	8.873.196,00	-4.126.804,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	273.000.000,00	571.493.812,00	571.493.812,00	298.493.812,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			300.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			58.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	831.000.000,00	764.906.135,00	955.583.710,00	124.583.710,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sekretariat DPRD		914.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	180.733.950,00	114.507.750,00	-485.492.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			660.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	124.998.840,00	124.998.840,00	-1.160,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			137.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	106.000.000,00	459.173.345,00	716.077.120,00	610.077.120,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			116.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	739.000.000,00	1.167.099.160,00	537.941.160,00	-201.058.840,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Sarana Prasana Sekretariat DPRD		701.042.855,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	352.857.143,00	130.980.000,00	89.080.000,00	-263.777.143,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			388.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	23 Unit	111.857.143,00	189.230.000,00	100.650.000,00	-11.207.143,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.185.714,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	12.857.143,00	0,00	0,00	-12.857.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			14.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	46 Unit	52.857.143,00	60.069.160,00	27.979.160,00	-24.877.983,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			58.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	102.857.143,00	553.320.000,00	276.732.000,00	173.874.857,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			113.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	52.857.143,00	233.500.000,00	43.500.000,00	-9.357.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			58.142.857,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52.857.142,00	0,00	0,00	-52.857.142,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			58.142.856,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	10.783.626.345,00	12.059.790.415,00	12.050.982.965,00	1.267.356.620,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		11.822.658.979,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	10.106.326.345,00	11.349.104.390,00	11.349.104.390,00	1.242.778.045,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.116.958.979,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	287.000.000,00	368.146.025,00	367.438.575,00	80.438.575,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			315.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	390.300.000,00	342.540.000,00	334.440.000,00	-55.860.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			390.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.410.000.000,00	1.673.963.384,00	1.634.776.172,00	224.776.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		1.551.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	329.333.000,00	265.152.450,00	261.982.825,00	-67.350.175,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			362.266.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	50.333.000,00	29.090.875,00	14.962.500,00	-35.370.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			55.366.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.030.334.000,00	1.379.720.059,00	1.357.830.847,00	327.496.847,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.133.367.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5 Dok	5 Dok	5.301.781.253,00	5.344.454.087,00	4.970.363.650,00	5.097.225.747,00							10.399.007.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-						713.000.000,00	774.116.900,00	644.045.225,00	-68.954.775,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		784.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	3.320.025,00	2.573.675,00	-15.926.325,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	581.000.000,00	635.165.925,00	530.207.950,00	-50.792.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			639.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	113.500.000,00	135.630.950,00	111.263.600,00	-2.236.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			124.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	390.000.000,00	468.671.650,00	367.956.075,00	-22.043.925,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		429.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.393.925,00	9.762.300,00	-15.237.700,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.609.650,00	7.397.350,00	-17.602.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	141.454.025,00	114.827.025,00	14.827.025,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	142.160.225,00	115.530.350,00	15.530.350,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	10.573.850,00	5.756.300,00	-9.243.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	141.479.975,00	114.682.750,00	-10.317.250,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			137.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	270.000.000,00	140.546.450,00	122.950.850,00	-147.049.150,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD		297.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	61.887.050,00	57.732.400,00	-17.267.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	60.890.200,00	56.355.000,00	-18.645.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			82.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	12.390.200,00	6.131.950,00	-13.868.050,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.379.000,00	2.731.500,00	-17.268.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	647.670.000,00	1.138.400.837,00	1.116.561.125,00	468.891.125,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintahan		4.195.447.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	520.170.000,00	1.072.769.000,00	1.054.336.000,00	534.166.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.122.187.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	3.230.000,00	1.615.000,00	-55.885.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.025.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.021.420.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	62.401.837,00	60.610.125,00	3.110.125,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.025.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	2.959.000.000,00	2.003.126.300,00	1.909.543.400,00	-1.049.456.600,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat		3.254.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	30.690.000,00	15.050.000,00	-134.950.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			165.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	13.136.300,00	9.593.400,00	-9.406.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.790.000.000,00	1.959.300.000,00	1.884.900.000,00	-905.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.069.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	322.111.253,00	819.591.950,00	809.306.975,00	487.195.722,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	DPRD dan Pemerintah		1.438.360.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	277.111.253,00	669.526.000,00	669.526.000,00	392.414.747,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.388.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	11.646.950,00	5.861.975,00	-9.138.025,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	138.419.000,00	133.919.000,00	108.919.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	J U M L A H								22.865.477.007,00	24.763.913.007,00	23.593.804.778,00	728.327.771,00							30.360.389.183,00	

BAB IV
PENUTUP

1. Catatan penting dalam pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2025
   a. Setiap kepala bidang wajib menyusun Rancangan dokumen pelaksanaan Anggaran (RDPPA) Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh sub bagian perencanaan program/kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Para Kepala Bidang harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas dan konsistensi untuk Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan RDPPA Tahun Anggaran 2025.
   c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana temuat dalam perubahan renja, maka penyusunan RDPPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

2. Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2025
   a. Setiap bidang yang menjadi unit kerja pelaksanaan Renja harus mengevaluasi perubahan renja tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Perubahan Renja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Hasil evaluasi pelaksanaan perubahan renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025
   a. Setiap kepala bidang wajib menyusun RDPPA dan Anggaran Kas dan direkap oleh Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada TAPD guna mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Penegelola Keuangan Daerah.
   b. Setiap kepala bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan wajib mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam DPPA Tahun.

Lewoleba, 2025

Sekretariat DPRD

NASRUN NEBOQ
Pembina Utama Muda
NIP.196806122000121009

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerh, yang disusun berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan;dan /atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata sampai dengan triwulan I Tahun 2025, menunjukan adanya ketidak sesuaian perkembangan keadaan meliputi asumsi kerangka

ekonomi dan keuangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025. Perubahan dilakukan dengan melakukan pergeseran antar program, kegiatan, sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan menjadi pedoman penyusunan perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. eraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaran bidang pengawasan urusan pemerintahan dan Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan terhadap Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I perlu dilakukan untuk memastikan target Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Inpektorat Tahun 2025.

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut ini.

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(output)*	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2023)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		INSPEKTORAT DAERAH		863	27.583.631.789	411	5.789.997.558	270	5.819.819.136		1.584.513.524		-	-	-	-	-	-	1.584.513.524	411	7.374.511.082	47,62	26,74	Inspektorat
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	513	20.281.677.579	170	4.944.739.297	119	5.123.563.039		1.411.474.524		-	-	-	-	-	-	1.411.474.524	170	6.356.213.821	33,14	31,34	Inspektorat
2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen/komponen yang dibutuhkan	71	133.707.608	12	28.904.700	6	17.390.060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.904.700	16,90	21,62	Inspektorat

		Kinerja Perangkat Daerah																					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	31	17.000.000	2	15.610.800	2	3.533.600									-	-	2	15.610.800	6,45	91,83	Inspektorat
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4	16.000.000	1	2.105.400	1	2.881.765									-	-	1	2.105.400		13,16	Inspektorat
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	13.600.000	1	2.105.400	1	3.999.885									-	-	1	2.105.400	25,00	15,48	Inspektorat
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4	12.600.000	1	2.105.400	1	2.974.825									-	-	1	2.105.400	25,00	16,71	Inspektorat
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	16.690.000	1	2.976.900	1	3.999.985									-	-	1	2.976.900	25,00	17,84	Inspektorat
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	8	23.690.000	2	2.105.400	-	-									-	-	2	2.105.400	25,00	8,89	Inspektorat

7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	34.127.608	4	1.895.400	-	-								-	-	4	1.895.400	25,00	5,55	Inspektorat
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	142	18.007.628.864	37	4.380.143.299	31	4.811.761.843		1.215.657.035		-	-	-	-	-	-	1.215.657.035	37	5.595.800.334	26,06	31,07	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	17.340.309.520		4.259.199.399	14	4.696.786.851		1.185.372.035								1.185.372.035					Inspektorat
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	621.204.357	16	109.176.700	12	106.320.000		30.285.000						-	30.285.000	16	139.461.700	33,33	22,45	Inspektorat
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	16.744.388	1	3.145.400	1	2.654.400								-	-	1	3.145.400	25,00	18,78	Inspektorat
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68	13.265.000	18	4.016.900	16	2.955.680								-	-	18	4.016.900	26,47	30,28	Inspektorat

8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	16.105.599	2	4.604.900	2	3.044.912									-	-	2	4.604.900	25,00	28,59	Inspektorat
2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi Perangkat Daerah.	8	212.400.000	2	22.190.500	2	20.160.000		5.040.000		-	-	-	-	-	-	5.040.000	2	27.230.500	25,00	12,82	Inspektorat
6		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	212.400.000	2	22.190.500	2	20.160.000		-		-	-	-	-	-	-	-	2	22.190.500	25,00	10,45	Inspektorat
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								5.040.000								5.040.000					
2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan pegawai Perangkat Daerah	24	700.000.000	-	125.627.039	-	-		129.640.568		-	-	-	-	-	-	129.640.568	-	255.267.607	-	36,47	Inspektorat
9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	700.000.000	-	125.627.039	-	-		129.640.568		-	-	-	-	-	-	129.640.568	-	255.267.607	-	36,47	Inspektorat

2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah	68	562.439.158	27	130.934.202	40	69.404.106		15.221.000		-	-	-	-	-	15.221.000	27	146.155.202	39,71	25,99	Inspektorat
		Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				-																Inspektorat
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	77.666.158	1	39.699.771	32	69.404.106		8.256.000						-	8.256.000	1	47.955.771	25,00	61,75	Inspektorat
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	101.400.000	2	42.051.550	-	-		-		-		-	-	-	-	-	2	42.051.550	50,00	41,47	Inspektorat
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	-		-					-		-	-	-	-	-	-		-	Inspektorat
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	383.373.000	24	49.182.881	8	-		6.965.000		-	-	-			6.965.000	24	56.147.881	40,00	14,65	Inspektorat

2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang uerusan Pemerintah Daerah	-	-	-	33.487.500	-	-		-			-		-	-	-	-	-	33.487.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
		Pengadaan peralatan dan mesin lainya	jumlah peralatan dam mesin lainnya				33.487.500		-		-			-				-		33.487.500			
9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0						-		-	-	-	-	-	-		-	Inspektorat
10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0						-		-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137	191.192.618	26	161.457.117	24	141.744.280		37.015.921		-	-	-	-	-	37.015.921	26	198.473.038	18,98	103,81	Inspektorat

1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	24.455.300	12	117.950.000	12	115.200.000		28.800.000							-	28.800.000	12	146.750.000	25,00	600,07	Inspektorat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39	146.353.800	12	38.204.554	12	26.544.280		8.215.921							-	8.215.921	12	46.420.475	30,77	31,72	Inspektorat
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	20.383.518	2	5.302.563	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.302.563	4,00	26,01	Inspektorat
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Pemeliharaan barang milik Daerah	63	474.309.331	33	61.994.940	16	63.102.750		8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	8.900.000	33	70.894.940	52,38	14,95	Inspektorat
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	63	474.309.331	15	61.994.940	16	63.102.750			-	-	-	-	-	-	-	-	15	61.994.940	23,81	13,07	Inspektorat

		Dinas Jabatan																					
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18	-	-	-		8.900.000							-	8.900.000	18	8.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16	-	_	-															
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah dan % Capaian Temuan dan Penyelesaian Hasil pengawasan APIP	290	5.676.297.599	241	773.609.836	137	657.373.186		173.039.000		-	-	-	-	-	-	173.039.000	241	946.648.836	83,10	16,68	Inspektorat
2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala	243	3.909.645.881	227	656.653.136	122	459.757.445		145.069.000		-	-	-	-	-	-	145.069.000	227	801.722.136	93,42	20,51	Inspektorat
1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	52	567.257.650	28	264.605.746	8	29.287.525									-	-	28	264.605.746	53,85	46,65	Inspektorat

			Pemerintah Daerah																				
2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	772.215.171	30	72.356.875	4	108.985.750		101.619.000							-	101.619.000	30	173.975.875	50,00	22,53	Inspektorat
3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84	836.342.426	2	127.273.000	10	128.715.115		19.125.000							-	19.125.000	2	146.398.000	2,38	17,50	Inspektorat
4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25	816.677.234	3	86.044.900	8	94.213.650		24.325.000							-	24.325.000	3	110.369.900	12,00	13,51	Inspektorat
5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			144	-	88	3.181.940									-	-	144	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22	917.153.400	20	106.372.615	4	95.373.465		-							-	-	20	106.372.615	90,91	11,60	Inspektorat
2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan	Jumlah kasus kerugian negara/daerah yang diselesaikan	47	1.766.651.718	14	116.956.700	15	197.615.741		27.970.000		-	-	-	-	-	-	27.970.000	14	144.926.700	29,79	8,20	Inspektorat

		Tujuan Tertentu																					
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	1.000.000.000	10	11.293.150	5	22.040.429									-	-	10	11.293.150	50,00	1,13	Inspektorat
2		Pengawasan Dengan TujuanTertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27	766.651.718	4	105.663.550	10	175.575.312		27.970.000							-	27.970.000	4	133.633.550	14,81	17,43	Inspektorat
3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	60	1.625.656.611	-	71.648.425	14	38.882.911		-		-		-	-	-	-	-	-	71.648.425	-	4,41	Inspektorat
2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah peraturan di bidang Pengawasan	1	863.223.166	-	-	1	31.043.050		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	1	863.223.166	-	-	1	31.043.050		-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	Inspektorat

			Pengawasan yang Disusun																					
2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Terlaksananya Kegiatan pendampingan dan Asistensi	59	762.433.445	-	71.648.425	13	7.839.861		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.648.425	-	9,40	Inspektorat
2		Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31	422.433.445	-	35.114.250	3	2.103.025				-	-			-	-	-	-	-	35.114.250	-	8,31	Inspektorat
2		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	28	340.000.000	-	36.534.175	5	4.337.761					-	-		-	-	-	-	-	36.534.175	-	10,75	Inspektorat
2		pendampingan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi	28	340.000.000	-	36.534.175	5	1.399.075					-	-		-	-	-	-	-	36.534.175	-	10,75	Inspektorat

Lewoleba, 10 Maret 2025

An. Inspektur Daerah
PLT. Sekretaris,

Kasmirus Murin, S.Sos
Pembina Tk I
NIP.19680304 200012 1 008

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sanga trendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahanya itu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi kinerja Penjabat Daerah
2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja akan dilaksanakan pada triwulan III danIV
3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan akan dilaksankan pada triwulan III dan IV
4) Sub Kegiatan Pengawasan Desa akan dilaksankan pada triwulan III dan IV
5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP akan dilakukan pada triwulan III dan IV
6) Sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
7) Sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu akan dilakukan pada triwulan III dan IV
8) Sub kegaiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi akan dilakukan pada triwulan III dan IV
9) Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilakukan pada triwulan III dan IV

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah				100 %	100 %	5.617.106.851,00	10.664.801.368,00	7.246.558.654,00	-5.612.606.851,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00	15.795.276,00	15.795.276,00	-8.704.724,00			-	- -	ASN Inspektorat Daerah		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.256.468,00	2.256.468,00	2.256.468,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-2.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tersdiannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Dokumen	14 Dokumen 14 Laporan	4.813.606.851,00	4.884.214.100,00	4.814.542.361,00	935.510,00			-	- -	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58/14 Orang/bulan	58/14 Orang/bulan	4.696.786.851,00	4.749.044.696,00	4.679.372.957,00	-17.413.894,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	106.320.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	22.080.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-243.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				-	2 Laporan	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				32 orang	1 Laporan 32 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	32 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				17 Laporan 37 Laporan	17 Laporan	256.000.000,00	179.948.193,00	176.536.593,00	-79.463.407,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.697.100,00	2.697.100,00	-3.302.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	30.670.793,00	30.670.793,00	10.670.793,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	16.701.300,00	23.639.700,00	-6.360.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	129.879.000,00	119.529.000,00	-80.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah J*				8 Unit	10 Unit	62.000.000,00	2.787.875.584,00	877.395.458,00	815.395.458,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10Unit	0,00	1.698.797.270,00	244.591.866,00	244.591.866,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				193 Unit	193 Unit		166.050.686,00	161.920.020,00	161.920.020,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	62.000.000,00	923.027.628,00	470.883.572,00	408.883.572,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				25 Laporan	25 Laporan	170.000.000,00	135.784.215,00	103.904.966,00	-66.095.034,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	76.800.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	52.823.400,00	52.823.400,00	823.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	6.160.815,00	3.081.566,00	1.081.566,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Laporan	89.000.000,00	108.210.000,00	249.420.000,00	160.420.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	64.000.000,00	108.210.000,00	108.210.000,00	44.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	141.210.000,00	131.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan				25 Dokumen	25 Dokumen	926.914.515,00	2.379.435.156,00	1.500.043.806,00	-926.914.515,00							0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Tersedianya laporan hasil pengawasan internal*				40 LLaporan	40 Laporan	701.914.515,00	1.893.383.340,00	1.207.321.466,00	505.406.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	241.341.800,00	118.692.982,00	48.692.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	108.985.750,00	266.734.080,00	247.359.901,00	138.374.151,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	128.715.115,00	183.556.690,00	188.921.708,00	60.206.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				11 Laporan	11 Laporan	114.213.650,00	241.730.070,00	307.907.015,00	193.693.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan	8 Laporan	140.000.000,00	439.499.488,00	180.944.880,00	40.944.880,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	140.000.000,00	520.521.212,00	163.494.980,00	23.494.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				-	2 Laporan	225.000.000,00	486.051.816,00	292.722.340,00	67.722.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	38.234.426,00	24.099.970,00	-25.900.030,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	447.817.390,00	268.622.370,00	93.622.370,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	65.000.000,00	310.488.126,00	227.691.040,00	-65.000.000,00							0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	44.672.820,00	27.131.360,00	-7.868.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	35.000.000,00	44.672.820,00	27.131.360,00	-7.868.640,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Tersedianya Laporan Pendampingan dan Asistensi*				-	1 Rekomendasi	30.000.000,00	265.815.306,00	200.559.680,00	170.559.680,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	10.000.000,00	179.970.870,00	141.588.265,00	131.588.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	39.763.827,00	20.045.970,00	45.970,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	46.080.609,00	38.925.445,00	38.925.445,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	

Inspektur Daerah,

Patrisius Emi Ujan, S.Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196806101997021009

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.256.468,00	2.256.468,00	-1.743.532,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				-	2 Laporan	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				32 orang	1 Laporan 32 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	32 Orang	180.000.000,00	2.532.814.000,00	988.804.000,00	808.804.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				17 Laporan 37 Laporan	17 Laporan	256.000.000,00	179.948.193,00	176.536.593,00	-79.463.407,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.697.100,00	2.697.100,00	-3.302.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	30.670.793,00	30.670.793,00	10.670.793,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	16.701.300,00	23.639.700,00	-6.360.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	129.879.000,00	119.529.000,00	-80.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah J*				8 Unit	10 Unit	62.000.000,00	2.787.875.584,00	877.395.458,00	815.395.458,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10Unit	0,00	1.698.797.270,00	244.591.866,00	244.591.866,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				193 Unit	193 Unit		166.050.686,00	161.920.020,00	161.920.020,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	62.000.000,00	923.027.628,00	470.883.572,00	408.883.572,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				25 Laporan	25 Laporan	170.000.000,00	135.784.215,00	103.904.966,00	-66.095.034,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	ASN Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	76.800.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.609.021.366,00	13.354.724.650,00	8.974.293.500,00	2.365.272.134,00							4.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	52.823.400,00	52.823.400,00	823.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	6.160.815,00	3.081.566,00	1.081.566,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Laporan	89.000.000,00	108.210.000,00	249.420.000,00	160.420.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	64.000.000,00	108.210.000,00	108.210.000,00	44.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	141.210.000,00	131.210.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan				25 Dokumen	25 Dokumen	926.914.515,00	2.379.435.156,00	1.500.043.806,00	-926.914.515,00							0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Tersedianya laporan hasil pengawasan internal*				40 LLaporan	40 Laporan	701.914.515,00	1.893.383.340,00	1.207.321.466,00	505.406.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	241.341.800,00	118.692.982,00	48.692.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	108.985.750,00	266.734.080,00	247.359.901,00	138.374.151,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	128.715.115,00	183.556.690,00	188.921.708,00	60.206.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				11 Laporan	11 Laporan	114.213.650,00	241.730.070,00	307.907.015,00	193.693.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan	8 Laporan	140.000.000,00	439.499.488,00	180.944.880,00	40.944.880,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	140.000.000,00	520.521.212,00	163.494.980,00	23.494.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				-	2 Laporan	225.000.000,00	486.051.816,00	292.722.340,00	67.722.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	38.234.426,00	24.099.970,00	-25.900.030,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	447.817.390,00	268.622.370,00	93.622.370,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	65.000.000,00	310.488.126,00	227.691.040,00	-65.000.000,00							0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	44.672.820,00	27.131.360,00	-7.868.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Obyek Pemeriksa		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Inspektur Daerah,

Patrisius Emi Ujan, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda

NIP.196806101997021009

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P- RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

P-RKPD Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan merupakan indikasi program/kegiatan Tahun III RPD Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) Tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok fungsi serta urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh, berkembang yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah Pembangunan Nasional, Provinsi dan mendukung arah perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengertian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 :

(1) Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Perumusan Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKP;

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Memuat Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan ditambahkan dengan Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
Dibawah ini dasar hukum yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

1.3. Maksud Dan Tujuan;

- Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan Daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Maksud Penyusunan Renja :

  1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan jangka pendek (1 Tahun);
  2. Menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dengan pelayanan Dinas Pendidikan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja Tahun lalu menjadi Rencana Strategis (Renstra)
  3. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan pendidikan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;

  Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja):

  1. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Pendidikan dan berbagai komponen pembangunan berbasis pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  2. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang;
  3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
  4. .Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana anggaran Dinas Pendidikan;

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut

1. Bab I. PENDAHULUAN

   Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika Renja SKPD.

2. Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

   Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan III tahun 2025.

3. Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

   Memuat Program, Kegiatan dan Pendanaan.

4. Bab IV. PENUTUP

   Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan Dua dan Realisasi Renstra SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan dua dan realisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan laporan realisasi APBD Dinas Pendidikan 2025 yang merupakan tahun awal perencanaan periode Renstra (2025-2030).

Secara umum tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan dua tahun 2025 sebesar **48,15 %** dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :

- Non Urusan Pagu Anggaran Rp.**182,673,880,799** dengan realisasi Rp. **104,671,133,594** atau mencapai 57,30%.
- Urusan Wajib Pendidikan pagu anggaran **Rp.39,048,272,647 ,-** dengan realisasi keuangan **Rp.2,151,373,906 ,-**atau mencapai 5,51**%**.

2.1.2. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ***(TIDAK ADA)***

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja program/ kegiatan yaitu : (tidak ada)

.

Tabel. 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Propinsi Nusa Tenggara Timur- Kabupaten Lembata

SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata (berisi target dan realisasi kinerja berdasarkan indikatornya bukan besarnya anggaran)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja RPD 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi pada tahun 2025 (Per Triwulan) II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPD s/d tahun 2023 (%)		OPD Penanggung jawab
2					*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9= (8/7) x 100*		*10 = 6 + 8*		*11 = (10/5) x 100*		12
								k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	**01**																					**DISDIK**
					DINAS PENDIDIKAN				**662,791,738,266**		**174,595,033,594**		**221,872,155,446**		**73,140,607,262**				**247,735,640,856**		**37.38**	
					BELANJA LANGSUNG				**662,791,738,266**		**174,595,033,594**		**221,872,155,446**		**73,140,607,262**				**247,735,640,856**		**37.38**	
1	01	01			**PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupooksi Perangkat Daerah**		**100**	**482,702,810,600**	**100**	**153,107,659,162**	**100**	**182,673,880,799**	**47**	**71,416,447,126**	**47**	**39**	**147**	**224,524,106,288**	**147**	**46.51**	
1	**01**	**01**	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**82,662,600**	**100**	**18,380,575**	**100**	**6,858,250**	**38**	**2,364,250**	**38**	**34**	**138**	**20,744,825**	**138**	**25.10**	

1	**01**	**01**	2.01	**0001**	Sub. Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	dokumen	**8**	**-**	2	3,693,350	**2**	1,174,950		833,700	**-**	**71**	**2**	**4,527,050**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.01	**0002**	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	**4**	**-**		2,521,400	**2**	738,500		-	**-**	**-**	**-**	**2,521,400**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.01	**0003**	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	**4**	82,662,600	1	3,161,025	**1**	1,199,800		1,084,300	**-**	**90**	**1**	**4,245,325**	**25**	**5.14**	
1	**01**	**01**	2.01	**0004**	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	**4**	**-**		2,889,425	**1**	862,400		-	**-**	**-**	**-**	**2,889,425**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.01	**0005**	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	**4**	**-**	1	2,714,775	**1**	1,137,500		446,250	**-**	**39**	**1**	**3,161,025**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.01	**0006**	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**8**	0	1	3,400,600	**2**	1,745,100		-	**-**	**-**	**1**	**3,400,600**	**13**	**#DIV/0!**	

1	**01**	**01**	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD**		**100**	**474,747,944,360**	**19.35**	**152,976,734,914**	**100**	**182,352,982,529**	**23**	**71,300,160,297**	**23**	**39**	**42**	**224,276,895,211**	**42**	**47.24**	
1	**01**	**01**	2.02	0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	473,110,292,424	3	152,672,868,564	14	182,014,907,129		71,148,912,447	-	**39**	**3**	**223,821,781,011**	**5**	**47.31**	
1	**01**	**01**	2.02	0002	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	bulan	48	1,424,218,840	3	297,597,575	2	334,758,100		151,247,850	-	**45**	**3**	**448,845,425**	**6**	**31.52**	
1	**01**	**01**	2.02	0005	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	72	213,433,096	1	3,177,350	1	1,460,900		-	-	**-**	**1**	**3,177,350**	**1**	**1.49**	
1	**01**	**01**	2.02	0007	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	dokumen	72		3	3,091,425	18	1,856,400		-	-	**-**	**3**	**3,091,425**	**4**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**256,503,600**	**100**	**5,363,450**	**100**	**54,957,950**	**50**	**24,887,500**	**50**	**45**	**150**	**30,250,950**	**150**	**11.79**	

1	**01**	**01**	2.03	0001	Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	**8**			1,670,100	2	1,257,900		-	**-**	**-**	**-**	**1,670,100**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.03	0006	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen	**8**	256,503,600	1	3,693,350	2	53,700,050		24,887,500	**-**	**46**	**1**	**28,580,850**	**13**	**11.14**	
1	**01**	**01**	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dihasilkan**		**100**	**-**	**-**	**1,299,375**	**100**	**943,950**		-	**-**	**-**	**-**	**1,299,375**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.05	0003	Sub.Keg.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4			1,299,375	1	943,950		-	**-**	**-**	**-**	**1,299,375**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**440,893,520**	**7.41**	**400,000**	**100**	**39,431,550**		**29,878,690**		**76**	**7**	**30,278,690**	**7**	**6.87**	
1	**01**	**01**	2.06	0001	Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	**4**		1	0	1	-		-	**-**	**#DIV/0!**	**1**	**-**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**01**	2.06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	paket	4	44,051,560		0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	**01**	**01**	2.06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cCtak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	19,523,200		400,000	1	1,936,550		-	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**-**	**2.05**	

1	**01**	**01**	2.06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	lapor an	96	377,318,760	1	0		37,495,000		29,878,690	**#DIV /0!**	**80**	**1**	**29,878,690**	**1**	**7.92**	
1	**01**	**01**	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan**		**100**	-	**100**	**-**	**100**	**61,521,350**		-	**-**	**-**	**100**	**-**	**100**	**#DIV /0!**	
1	**01**	**01**	2.07	0005	Sub.Keg.Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Disediakan	unit	8			0		12,540,092		-	**#DIV /0!**	-	-	-	-	**#DIV /0!**	
1	**01**	**01**	2.07	0006	Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8			0	2	48,981,258		-	-	-	-	-	-	**#DIV /0!**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**6,881,765,280**	**100**	**57,960,420**	**100**	**87,191,220**	**67**	**34,431,000**	**67**	**39**	**167**	**92,391,420**	**167**	**1.34**	
1	**01**	**01**	2.08	01	Sub Keg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapor an	4	6,765,312,280	1	3,687,100	1	3,315,600		1,500,000	-	**45**	**1**	**5,187,100**	**25**	**0.08**	
1	**01**	**01**	2.08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air yang Disediakan	jenis	4	107,229,000	1	**54,273,320**	1	83,875,620		32,931,000	-	**39**	**1**	**87,204,320**	**25**	**81.33**	
1	**01**	**01**	2.08	03	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	**100**				1	-		-	-	**#DIV /0!**	-	-	-	**#DIV /0!**	
1	**01**	**01**	2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum	Lapo ran	4	9,224,000	1		1	-		-	-	**#DIV /0!**	**1**	-	**25**	-	

			08			Kantor yang Disediakan															
1	**01**	**01**	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	kendaraan	124	**293,041,240**	**55.36**	**47,520,428**	**100**	**69,994,000**		**24,725,389**	**-**	**35**		**72,245,817**	**-**	**24.65**	
1	**01**	**01**	2.09	0001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kendaraan	124	18,350,240	31	47,520,428	31	-		-	-	**#DIV/0!**	**31**	**47,520,428**	**25**	**258.96**	
1	**01**	**01**	2.09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya.	jenis	92	102,883,000				44,710,000		24,725,389	**#DIV/0!**	**55**	**-**	**24,725,389**	**-**	**24.03**	
1	**01**	**01**	2.09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diprlihara	unit	4	76,808,000		0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	**01**	**01**	2.09	09	Sub.Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	95,000,000		0	1	-		-	-	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	**01**	**01**	2.09	10	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	**4**			0	1	25,284,000		-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	

1	**01**	**02**			**PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa Sesuai SPM Pendidikan.**		**100**	**177,256,506,824.00**	**70.03**	**19,576,954,903.00**		**39,048,272,647.00**		**1,705,148,906**	**#DIV/0!**	**4**	**70**	**21,282,103,809**	**70**	**12.01**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Cakupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan.**	ruang	44	**89,160,371,140**	**64.07**	**10,078,238,404**		**22,299,023,346**		**432,968,300**	**#DIV/0!**	**2**	**64**	**10,511,206,704**	**146**	**11.79**	
1	**01**	**02**	**2.01**	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	40	4,279,479,156	14	628,786,887	5	213,477,400		-	-	-	**14**	**628,786,887**	**35**	**14.69**	
1	**01**	**02**	**2.01**	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	ruang	12	1,483,921,600	5	809,774,682	10	-		-	-	**#DIV/0!**	**5**	**809,774,682**	**42**	**54.57**	
1	**01**	**02**	**2.01**	05	Sub Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang Telah Dibangun	jamban	48	1,266,948,400	2	425,979,925	3	-		-	-	**#DIV/0!**	**2**	**425,979,925**	**4**	**33.62**	
1	**01**	**02**	**2.01**	06	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	mes guru	48	3,060,653,600	15	0		341,018,000		-	**#DIV/0!**	**-**	**15**	**-**	**31**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.01**	07	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	80	1,801,608,672	7	1,562,415,144	12	391,595,981		-	-	-	**7**	**1,562,415,144**	**9**	**86.72**	
1	**01**	**02**	**2.01**	09	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi, Sedang/Berat	siswa	16	0	2	259,475,018	1	-		-	-	**#DIV/0!**	**2**	**259,475,018**	**13**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.**	10	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	unit	16	0	5	84,648,558	2	-		-	-	**#DIV/0!**	**5**	**84,648,558**	**31**	**#DIV/0!**	

			01		Unit Kesehatan Sekolah	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat															
1	**01**	**02**	**2.01**	11	Sub Keg. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang direhab	paket	136	-	1	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**-**	**1**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	13	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhab	sekolah	12	-	2	0	1	-		-	**-**	**#DIV/0!**	**2**	**-**	**17**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	14	Sub Keg. Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Mebeler Sekolah yang Tersedia	sekolah	4	3,588,890,600	1	1,567,495,000	1	204,257,250		25,100,000	**-**	**12**	**1**	**1,592,595,000**	**25**	**44.38**	
1	**01**	**02**	**2.01**	22	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang Tersedia	siswa	640	22,661,636,388	1	945,225,960	1	-		-	**-**		**1**	**945,225,960**	**0**	**4.17**	
1	**01**	**02**	**2.01**	25	Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa							136,679,300		62,802,950							
1	**01**	**02**	**2.01**	27	Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Komptensi dan Kulaifikasi	sekolah	640		20	859,314,700	20	933,111,125		248,770,000	**-**	**27**	**20**	**1,108,084,700**	**3**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	28	Sub.Keg.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata							44,511,050		10,890,000							
1	**01**	**02**	**2.**	29	Sub Keg Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah SD yang Mengelolah Dana BOS	unit	20	39,086,009,560	160	139,468,003	160	13,655,180,000		-	**-**	**-**	**160**	**139,468,003**	**800**	**0.36**	

			01																		
1	**01**	**02**	**2.01**	30	Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekjolah Dasar	jumlah satuan pendidikan yang mengelolah dana BOS							158,376,700		1,325,000							
1	**01**	**02**	**2.01**	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	unit	16		2	1,465,200,707	8	-		-	**-**	**#DIV/0!**	**2**	**1,465,200,707**	**13**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SD	Jumlah Laboratorium SD yang telah direhabilitasi	sekolah	640		2	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**2**	**-**	**0**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	37	Sub.Keg.Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi							27,406,550		-							
1	**01**	**02**	**2.02**	38	Sub.Keg. Koordinasi,Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Laporan	**100**		160	85,024,925	1	-		14,035,000	**-**	**#DIV/0!**	**160**	**99,059,925**	**160**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.02**	41	Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan							52,770,300		-							
1	**01**	**02**	**2.02**	43	Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan Layanan Pendampingan							53,797,575		-							
1	**01**	**02**	**2.01**	46	Sub Keg. Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia	paket	12	-	1	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**-**	**8**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.01**	47	Sub Keg. Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	ruang	12	5,299,140,200	9	0		839,900,150		-	**#DIV/0!**	**-**	**9**	**-**	**75**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.**	48	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Sarana	Jumlah Sarana dan Utilitas Sekolah yang	ruang	4	-	6	105,593,239	1	473,739,600		-	**-**	**-**	**6**	**105,593,239**	**150**	**#DIV/0!**	

			01		Prasarana dan Utilitas Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																
1	**01**	**02**	**2.02**	49	Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							94,235,025		-							
1	**01**	**02**	**2.01**	50	Sub Keg. Penyelengagaaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD/Mi yang Mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022	orang	80	203,887,644				19,963,400		-	**#DIV/0!**	-	-	-	-	-	
1	**01**	**02**	**2.01**	51	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi, Sedang/Berat	unit	8	6,428,195,320	33	1,139,835,656	21	2,974,940,940		70,045,350	-	**2**	**33**	**1,209,881,006**	**413**	**18.82**	
					Sub.Keg.Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Dasar	jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi	sekolah	640		160	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**160**	**-**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.02**	55	Sub.Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa							1,684,063,000		-		**-**					
1	**01**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Cakupan Satuan Pendiikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelolah Sesuai Stanar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan.**	ruang	20	**74,568,245,108**	**45.09**	**7,282,395,587**		**11,597,884,175**		**1,187,282,356**	**#DIV/0!**	**10**	**45**	**8,469,677,943**	**225**	**11.36**	
1	**01**	**02**	**2.02**	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	unit	8	3,468,123,096	4	434,721,535		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**4**	**434,721,535**	**50**	**12.53**	
1	**01**	**02**	**2.02**	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	unit	16	1,782,431,938	1	329,687,304		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**329,687,304**	**6**	**18.50**	

1	**01**	**02**	**2.02**	06	Sub Keg. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	unit	12	1,631,876,146	1	1,067,613,447	4	-		-	**-**	**#DIV/0!**	**1**	**1,067,613,447**	**8**	**65.42**	
1	**01**	**02**	**2.02**	09	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun	unit	8	2,961,868,000	2	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**2**	**-**	**25**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.02**	12	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang telah dibangun	ruang	24	4,183,112,000	3	0		109,684,500		437,500	**#DIV/0!**	**0**	**3**	**437,500**	**13**	**0.01**	
1	**01**	**02**	**2.02**	14	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	20	4,874,052,280	3	1,292,621,399	6	803,889,400		572,585,706							
	01	**02**	**2.02**	17	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan yang Memadai	jamban	8	2,107,467,200				-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.02**	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bearat	ruang	20			798,960,932	1	-		-			**-**	**798,960,932**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.02**	21	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang Direhab	Paket	8	2,004,348,000				-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.02**	24	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumah Sarana Prasarana Sekolah yang Telah Direhabiloitasi Sedang/Berat	Paket	12	2,896,625,200	4	927,567,638	5	-		-	**-**		**4**	**927,567,638**	**33**	**32.02**	
1	**01**	**02**	**2.02**	25	Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler Sekolah yang Tersedia	unit	4	4,080,836,000	1	1,083,626,115	1	43,273,700		-	**-**	**-**	**1**	**1,083,626,115**	**25**	**26.55**	
1	**01**	**02**	**2.02**	27	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	Sekolah	208	-	1	0		190,901,350		-			**1**	**-**	**0**	**#DIV/0!**	

1	**01**	**02**	**2.02**	35	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	siswa	208	7,837,327,760	1	166,283,375	3	-		-			**1**	**166,283,375**	**0**	**2.12**	
1	**01**	**02**	**2.02**	38	Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa							85,960,050		70,219,150							
					Sub.Keg.Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah Pertama	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi		208	-	52	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**52**	**-**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.02**	40	Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Vasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi. Profesionalisme	sekolah	208		15	247,627,767	45	1,064,796,600		528,940,000	**-**	**50**	**15**	**776,567,767**	**7**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	41	Sub.Keg.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata		**100**			0		24,162,950		-	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	42	Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah SMP yang Mengelola Dana BOS	paket	24	25,728,949,924	52	81,349,025	52	8,722,483,000		-	**-**	**-**	**52**	**81,349,025**	**217**	**0.32**	
1	**01**	**02**	**2.03**	43	Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah							91,840,600		2,820,000		**3**					
1	**01**	**02**	**2.02**	44	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	ruang	20	5,510,880,000	5	852,337,050	5	-		-			**5**	**852,337,050**	**25**	**15.47**	

						Direhabilitasi Sedang/Berat																
1	**01**	**02**	**2.03**	51	Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan							31,924,625		1,150,000							
1	**01**	**02**	**2.03**	52	Sub.Keg.Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	Jumlah Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan							14,126,800		6,210,000							
1	**01**	**02**	**2.03**	54	Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan							47,284,650		-							
1	**01**	**02**	**2.03**	55	Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan							28,326,900		-							
1	**01**	**02**	**2.02**	58	Sub.Keg.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian		200	201,207,364		-		48,494,450		4,920,000	**#DIV/0!**	**10**	**-**	**4,920,000**	**-**	**2.45**	
1	**01**	**02**	**2.02**	59	Sub.Keg. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Guru Kelas Baru yang Telah Dibangun	ruang	20	5,299,140,200	2	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**2**	**-**	**10**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.02**	60	Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							56,457,600		-							
1	**01**	**02**	**2.02**	64	Sub.Keg.Rehabilitasi sedang berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di rehab							-		-							

1	**01**	**02**	**2.02**	67	Sub.Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa							234,277,000		-							
1	**01**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Cakupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan.**	ruang	0	**11,537,643,856**	**130.94**	**2,147,365,115**		**4,717,463,466**		**76,539,050**	**#DIV/0!**	**2**	**131**	**2,223,904,165**	**#DIV/0!**	**19.28**	
1	**01**	**02**	**2.03**	02	Sub Keg. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang Telah Dibangun	paket	0	0	4	1,156,277,300	2	203,142,296		11,483,000	**-**	**6**	**4**	**1,167,760,300**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	03	Su.Keg.Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah gedung yang irehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	paket	440	-	3	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**3**	**-**	**1**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	04	sub.Keg.Rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana ,prasarana dan utilitas PAUD	jumlah sarana ,prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat		**100**		1	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**-**	**1**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	07	Sub Keg. Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	280	-	1	166,395,000	3	127,432,600		-	**-**	**-**	**1**	**166,395,000**	**0**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	12	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga PAUD yang Tersedia	lembaga paud	612	5,924,758,000	1	355,416,250	1	-		-	**-**	**#DIV/0!**	**1**	**355,416,250**	**0**	**6.00**	
1	**01**	**02**	**2.03**	16	Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Vasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	unit	24		15	349,364,532	45	338,806,555		21,031,440	**-**	**6**	**15**	**370,395,972**	**63**	**#DIV/0!**	

						Kompetensi dan Kualifikasi															
1	**01**	**02**	**2.03**	17	Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah	20	489,175,400	158	20,967,250	57	47,007,800		8,702,500	-	**19**	**158**	**29,669,750**	**790**	**6.07**	
1	**01**	**02**	**2.03**	18	Sub.Keg. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	orang	200		158	8,835,840	53	1,587,300,000		-	-	**-**	**158**	**8,835,840**	**79**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	19	Sub Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS PAUD	Jumlah Kapasitas Pengelolaan dana BOS PAUD							41,077,310		10,619,660		**26**					
1	**01**	**02**	**2.03**	20	Sub.Keg.Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang dijaga							-		-		**#DIV/0!**					
1	**01**	**02**	**2.03**	25	Sub Keg.Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	dokumen					12	55,103,605		10,764,950		**20**					
1	**01**	**02**	**2.03**	28	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	ruang	10	5,123,710,456	6	0		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**6**	**-**	**60**	**-**	
1	**01**	**02**	**2.03**	29	Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi	Komunitas	20		5	0	9	26,975,910		13,937,500	-	**52**	**5**	**13,937,500**	**25**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**02**	**2.03**	30	Sub.Keg.Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	ruang					10	1,116,097,900		-		**-**					
1	**01**	**02**	**2.**	37	Sub.Keg.Pemberian Layanan	Jumlah Pemberian Layanan							65,729,730		-		**-**					

			03		Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Pendampingan bagi Satuan Pendidikan																
1	**01**	**02**	**2.03**	38	Sub Keg. Rahabilitasi sedang berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab							-		-		**#DIV/0!**					
1	**01**	**02**	**2.03**	39	Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkattan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	siswa	600		50	90,108,943	100	68,608,760		-	**-**		**50**	**90,108,943**	**8**	**#DIV/0!**	
					Sub.Keg.Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah								-		-							
					Sub.Keg.Rehab sedang/Berat Sarana prasarana dan Utilitas Sekolah								-		-							
					Sub Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga peserta Didik PAUD								1,040,181,000		-							
1	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Cakupan Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan yang Dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan.**	orang	280	**1,990,246,720.0**	**40.00**	**68,955,797.0**		**433,901,660.0**		**8,359,200**	**#DIV/0!**	**2**	**40**	**77,314,997**	**14**	**3.88**	
1	**01**	**02**	**2.04**	10	Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik.		**100**	1,129,000,000		-		-		-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	

1	**01**	**04**	**2.04**	15	Sub Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi.	dokumen	8	422,238,600	50	66,755,797	50	27,632,105		873,600	-	**3**	**50**	**67,629,397**	**625**	**16.02**	
1	**01**	**04**	**2.04**	17	Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Sekolah	4			2,200,000	5	319,100,000		-	**-**	**-**	**-**	**2,200,000**	**-**	**#DIV/0!**	
1	**01**	**04**	**2.04**	27	Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Vasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							24,323,605		-		**-**					
1	**01**	**04**	**2.04**	46	Sub Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		**100**	439,008,120			1350	62,845,950		7,485,600	**-**	**12**	**-**	**7,485,600**	**-**	**1.71**	
1	**01**	**04**			**PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**			**2,832,420,842**	**85.714**	**1,910,419,529**		**150,002,000**		**19,011,230**			**86**	**1,929,430,759**			

1	**01**	**04**	1.01		**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Prosentase Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan yang Memenuhi Standar dan Rasio Guru dan Murid**			**2,832,420,842**	**85.714**	**1,910,419,529**		**150,002,000**		**19,011,230**							
1	**01**	**04**	1.01	01	Sub Keg. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen		1,927,942,962	3	51,030,203	2	84,375,750		2,184,950							
1	**01**	**04**	1.01	02	Sub Keg. Penataan Pendistribusian Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusiaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Penidikan Nonformal/kesetaraan	Laporan		904,477,880	3	1,859,389,326	1	65,626,250		16,826,280							

Tabel.2.1.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Lingkup Kabupaten/Kota Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran

	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Target RPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV								
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 =8+9+10+11*		*13 = 6 + 12*		*14 = 13/5 x 100%*		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		BELANJA LANGSUNG			**100**	**662,791,738,266**	**36.83**	**174,595,033,594**	**100**	**221,872,155,446**		**33,700,911,468**		**73,140,607,262**		**-**		**-**	0.00	**106,841,518,730**	**37**	**281,436,552,324**	**37**	**42**		
		PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**482,702,810,600**	**40.47**	**153,107,659,162**		**182,673,880,799**		**33,254,686,468**		**71,416,447,126**		**-**		**-**	0	**104,671,133,594**	**40**	**257,778,792,756**	**40**	**53**		DISDIK
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**82,662,600**	**41.67**	**18,380,575**	**100**	**6,858,250**		**-**		**2,364,250**		**-**		**-**	0	**2,364,250**	42	-	41.67	-		DISDIK

1		Sub. Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	dokumen	**8**		2	3,693,350	**2**	1,174,950		-		833,700				0	0	833,700	2	-	25	#DIV/0!	
2		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	**4**			2,521,400	**2**	738,500		-						0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
3		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	**4**	82,662,600	1	3,161,025	**1**	1,199,800		**-**		1,084,300				0	0	1,084,300	1	-	25	-	
4		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	**4**			2,889,425	**1**	862,400		-						0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	

5		Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	**4**		1	2,714,775	**1**	1,137,500		-		446,250				0	0	446,250	1	-	25	#DIV/0!	
6		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**8**	0	1	3,400,600	**2**	1,745,100		-						0	0	-	1	-	13	#DIV/0!	DISDIK
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD**		**100**	**474,747,944,360**	**19.35**	**152,976,734,914**	**100**	**182,352,982,529**	**8.57**	**33,233,791,568**		**71,300,160,297**		**-**		**-**	8.57	**104,533,951,865**	28	-	28	-	DISDIK
7		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	56	473,110,292,424	3	152,672,868,564	14	182,014,907,129	3	33,233,791,568		71,148,912,447		-		0	3	104,382,704,015	6	-	11	-	DISDIK

8		Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Dokumen	48	1,424,218,840	3	297,597,575	2	334,758,100		-		151,247,850		-		0	0	151,247,850	3	-	6	-	DISDIK
9		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	72	213,433,096	1	3,177,350	1	1,460,900		-						0	0	-	1	-	1	-	DISDIK
10		Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	72		3	3,091,425	18	1,856,400		-						0	0	-	3	-	4	#DIV/0!	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**256,503,600**	**100**	**5,363,450**	**100**	**54,957,950**		**1,300,000**		**24,887,500**		-		**-**	0	**26,187,500**	100	-	100	-	DISDIK

11		Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	**8**			1,670,100	2	1,257,900		-					0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
12		Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen	**8**	256,503,600	1	3,693,350	2	53,700,050		1,300,000		24,887,500				0	0	26,187,500	1	-	13	-	DISDIK
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dihasilkan**		**100**	**-**	**-**	**1,299,375**	**100**	**943,950**		**-**		**-**		**-**		**-**	0	**-**	-	-	-	#DIV/0!	
13		Sub.Keg.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4			1,299,375	1	943,950		-						0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**440,893,520**	**7.41**	**400,000**	**100**	**39,431,550**		**-**		**29,878,690**		**-**		**-**	0.00	**29,878,690**	7	-	7	-	DISDIK

14		Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	**4**		1	0	1	-		-						0	0	-	1	-	25	#DIV/0!	
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	paket	4	44,051,560		0		-		-						0	0	-	-	-	-	-	DISDIK
15		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang cCtak dan Pengganda an yang Disediakan	peket	4	19,523,200		400,000	1	1,936,550		-						-	0	-	-	-	-	-	DISDIK
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	96	377,318,760	1	0		37,495,000				29,878,690				0	0	29,878,690	1	-	1	-	DISDIK
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan**		100	-	**100**	**-**	**100**	**61,521,350**		**-**		**-**		**-**		**-**	0	**-**	100	-	100	#DIV/0!	
		Sub.Keg.Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Disediakan	unit	8			0		12,540,092		-						0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	

16		Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8			0	2	48,981,258		-		-				0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**6,881,765,280**	**100**	**57,960,420**	**100**	**87,191,220**	**25.00**	**15,229,900**		**34,431,000**		**-**		**-**	25	**49,660,900**	125	-	125	-	DISDIK
17		Sub Keg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	6,765,312,280	1	3,687,100	1	3,315,600		1,300,000		1,500,000		-		0	0	2,800,000	1	-	25	-	DISDIK
18		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air yang Disediakan	laporan	4	107,229,000	1	**54,273,320**	1	83,875,620	1	13,929,900		32,931,000		-		**0**	1	46,860,900	2	-	50	-	DISDIK
19		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	9,224,000	1		1	-		-						**0**				-		-	

20		Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan					1	-		-						-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DISDIK
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**293,041,240**	**55.36**	**47,520,428**	**100**	**69,994,000**		**4,365,000**		**24,725,389**		**-**		**-**	0.00	**29,090,389**	55	-	55	-	DISDIK
21		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	124	18,350,240	31	47,520,428	31	-	**31**	4,365,000		-		-		0	31	4,365,000	62	-	50	-	DISDIK
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	kendaraan	124	102,883,000				44,710,000		-		24,725,389				-	0	24,725,389	-	-	-	-	

		Operasional atau lapangan	perizinanya.																					
		Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diprlihara	unit	115	76,808,000		0										0	0	-	-	-	-	-	DISDIK
		Sub.Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	95,000,000		0	1	-		-					1	0	1	-	1	-	25	-	
22		Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4			0	1	25,284,000		-					1	0	1	-	1	-	25	#DIV/0!	DISDIK
		PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Presentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan /atau Jasa Sesuai SPM Pendidikan.**		**100**	**177,256,506,824.00**	**70.03**	**19,576,954,903**		**39,048,272,647**		**446,225,000**		**1,705,148,906**		**-**		**-**	0.00	**2,151,373,906**	70	21,728,328,809	70	12	DISIK

		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Cakupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan**		**100**	**89,160,371,140**	**64.07**	**10,078,238,404**	**100**	**22,299,023,346**	**65.98**	**132,480,000**		**432,968,300**		**-**		**-**	65.98	**565,448,300**	130	10,643,686,704	130	12	DISDIK
23		Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	12	4,279,479,156	14	628,786,887	3	213,477,400		-				-		0	0	-	14	628,786,887	117	15	DISDIK
24		Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	ruang	40	1,483,921,600	5	809,774,682	10	-		-		-		-		0	0	-	5	809,774,682	13	55	DISDIK
25		Sub Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang Telah Dibangun	ruang	12	1,266,948,400	2	425,979,925	3	-		-				-		0	0	-	2	425,979,925	17	34	DISDIK
		Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	unit	48	3,060,653,600	15	0		341,018,000								0	0	-	15	-	31	-	DISDIK
		Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1,801,608,672		1,562,415,144		391,595,981								0		-		1,562,415,144			

		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi, Sedang/Berat			0		259,475,018		-							0		-		259,475,018			
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0		84,648,558		-							0		-		84,648,558			
		Sub Keg. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang direhab			-		0		-							0		-		-			
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhab			-		0		-							0		-		-			
		Sub Keg. Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Mebeler Sekolah yang Tersedia			3,588,890,600		1,567,495,000		204,257,250				25,100,000.00			0		25,100,000		1,592,595,000			
		Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang Tersedia			22,661,636,388		945,225,960		-							0		-		945,225,960			

		Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa						136,679,300		2,880,000.00		62,802,950.00				0		65,682,950				
		Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Komptensi dan Kulaifikasi					859,314,700		933,111,125		129,600,000.00		248,770,000.00				0		378,370,000				
		Sub.Keg.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata	ruang	44		9			44,511,050				10,890,000.00		-		0	0	10,890,000	9	10,890,000	20	#DIV/0!	DISDIK
26		Sub Keg Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah SD yang Mengelolah Dana BOS	unit	48	39,086,009,560	7	139,468,003	12	13,655,180,000		-				-		0	0	-	7	139,468,003	15	0	DISDIK
27		Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah satuan pendidikan yang mengelolah dana BOS	ruang	80		33		21	158,376,700		-		1,325,000.00		-		0	0	1,325,000	33	1,325,000	41	#DIV/0!	DISDIK
28		Pembangunan Laboratoriu	Jumlah Ruang Laboratoriu	unit	8		5	1,465,200,707	2	-		-				-		0	0	-	5	1,465,200,707	63	#DIV/0!	

		m Sekolah Dasar	m Sekolah Dasar yang Telah Dibangun																					
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SD	Jumlah Laboratorium SD yang telah direhabilitasi	unit	16		1	0		-								0	0	-	1	-	6	#DIV/0!	
29		Sub.Keg.Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi	ruang	136		2		1	27,406,550		-				-		0	0	-	2	-	1	#DIV/0!	
30		Sub.Keg. Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	unit	16		6	85,024,925	1			-		14,035,000.00		-		0	0	14,035,000	6	99,059,925	38	#DIV/0!	
		Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	unitt	4		2			52,770,300								0	0	-	2	-	50	#DIV/0!	
31		Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan Layanan Pendampingan	paket	12		1		1	53,797,575		-		-		-		0	0	-	1	-	8	#DIV/0!	DISDIK
		Sub Keg. Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia	paket	4	-	1	0		-						-		0	0	-	1	-	25	#DIV/0!	DISDIK

32		Sub Keg. Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	paket	12	5,299,140,200	1	0	1	839,900,150		-		-		-		0	0	-	1	-	8	-	DISDIK
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	satuan pendidikan	640	-		105,593,239		473,739,600								-	0	-	-	105,593,239	-	#DIV/0!	DISDIK
33		Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang	80		20		20	94,235,025		-		-		-		0	0	-	20	-	25	#DIV/0!	DISDIK
		Sub Keg. Penyelenggaaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD/Mi yang Mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2021/2022	satuan	640	203,887,644	160			19,963,400						-		0	0	-	160	-	25	-	
34		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi, Sedang/Berat	sekolah	640	6,428,195,320	160	1,139,835,656	160	2,974,940,940	**160**	-		70,045,350		-		-	160	70,045,350	320	1,209,881,006	50	19	DISDIK
35		Sub.Keg.Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Dasar	jumlah satuan pendidikan yang dievaluasi	unit	20		2	0	8	-		-				-		0	0	-	2	-	10	#DIV/0!	

		Sub.Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	unit	16		2			1,684,063,000						-		0	0	-	2	-	13	#DIV/0!	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Cakupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan**		**100**	**74,568,245,108**	**45.09**	**7,282,395,587**	**100**	**11,597,884,175**	**76**	**307,690,000**		**1,187,282,356**		**-**		**-**	**75.78**	**1,494,972,356**	121	8,777,367,943	120.87	12	DISDIK
		Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	44	5,299,140,200	2	434,721,535		-						-		0	0	-	2	434,721,535	5	8	
37		Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	ruang	20	3,468,123,096	4	329,687,304		-		-		-		-		0	0	-	4	329,687,304	20	10	DISDIK
38		Sub Keg. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	ruang	8	1,782,431,938	1	1,067,613,447	4	-		-		-		-		0	0	-	1	1,067,613,447	13	60	DISDIK
39		Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah	ruang	16	1,631,876,146	1	0		-		-		-		-		0	0	-	1	-	6	-	DISDIK

			yang dibangun																					
		Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang telah dibangun	unit	12	2,961,868,000	2	0		109,684,500		-		437,500.00		-		0	0	437,500	2	437,500	17	0	DISDIK
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	jamban	8	4,183,112,000	3	1,292,621,399	6	803,889,400		-		572,585,706.00		-		0	0	572,585,706	3	1,865,207,105	38	45	DISDIK
40		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan yang Memadai	ruang	24	4,874,052,280	3			-		-		-		-		0	0	-	3	-	13	-	DISDIK
41		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bearat	ruang				798,960,932	1	-		-		-		-		0		-		798,960,932			
42		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang Direhab	ruang	20	5,510,880,000	5			-		-		-		-		0	0	-	5	-	25	-	DISDIK
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumah Sarana Prasarana Sekolah yang Telah Direhabiloitasi	ruang	20	2,107,467,200		927,567,638	5	-		-				-		-	0	-	-	927,567,638	-	44	DISDIK

			Sedang/Berat																					
		Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler Sekolah yang Tersedia	ruang	20	2,004,348,000		1,083,626,115	1	43,273,700	-	-				-		-	0	-	-	1,083,626,115	-	54	DISDIK
43		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang tersedia	jamban	8	2,896,625,200	4	0		190,901,350	-	-		-		-		0	0	-	4	-	50	-	DISDIK
44		Sub Keg. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Paket	8	4,080,836,000	1	166,283,375	3	-		-		-		-		0	0	-	1	166,283,375	13	4	DISDIK
45		Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Paket	12	7,837,327,760	1			85,960,050		-		70,219,150		-		0	0	70,219,150	1	70,219,150	8	1	DISDIK
		Sub.Keg.Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah Pertama	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi	Paket	4	-	1	0		-	-					-		0	0	-	1	-	25	#DIV/0!	DISDIK
		Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Vasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi,	sekolah	208	201,207,364		247,627,767	45	1,064,796,600		307,690,000		528,940,000		-		-	0	836,630,000	-	1,084,257,767	-	539	DISDIK

			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi. Profesionalisme																					
		Sub.Keg.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Dana Dampingan BOS bagi Sekolah Jenjang SMP di Kab. Lembata				0		24,162,950						-		-		-		-			
		Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah SMP yang Mengelola Dana BOS				81,349,025	52	8,722,483,000						-		-		-		81,349,025			
		Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah						91,840,600				2,820,000		-		-		2,820,000					
		Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				852,337,050	5	-						-		-		-					
		Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	sekolah	208	-	52			31,924,625				1,150,000		-		0	0	1,150,000	52	1,150,000	25	#DIV/0!	

46		Sub.Keg.Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	Jumlah Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	orang	200		15			14,126,800	45			6,210,000		-		0	45	6,210,000	60	6,210,000	30	#DIV/0!	
		Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	sekolah	208					47,284,650		-				-		0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	DISDIK
47		Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Sekolah	208	25,728,949,924	52			28,326,900	52	-		-		-		-	52	-	104	-	50	-	DISDIK
		Sub.Keg.Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian					-		48,494,450				4,920,000		-		-							
		Sub.Keg. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Guru Kelas Baru yang Telah Dibangun					0		-						-		-							
		Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							56,457,600						-		-							

		Sub.Keg.Rehabilitasi sedang berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di rehab							-						-		-						
		Sub.Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa							234,277,000						-		-						
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	**Cakupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelolah Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan**		**100**	**11,537,643,856**	**130.94**	**2,147,365,115**		**4,717,463,466**	**20.6**	**6,055,000**		**76,539,050**		**-**		**-**	20.64	**82,594,050**	152	**2,229,959,165**	**152**	**19**	**DISDIK**
		Sub Keg. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	24	5,123,710,456	6	1,156,277,300	2	203,142,296				11,483,000.00		-		0	0	11,483,000	6	1,167,760,300	25	23	DISDIK
48		Su.Keg.Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah gedung yang irehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	unit	16	0	4	0		-		0				-		0	0	-	4	-	25	#DIV/0!	

		sub.Keg.Rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana ,prasarana dan utilitas PAUD	jumlah sarana ,prasarana dan utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	ruang	12	-	3	0		-						-		0	0	-	3	-	25	#DIV/0!	
		Sub Keg. Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					166,395,000	3	127,432,600						-		0		-		166,395,000			
		Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga PAUD yang Tersedia					355,416,250	1	-						-		0		-		355,416,250			
		Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Vasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					349,364,532	45	338,806,555				21,031,440		-		0		21,031,440		370,395,972			
		Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					20,967,250	57	47,007,800				8,702,500		-		0		8,702,500		29,669,750			

		Sub.Keg. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				8,835,840	53	1,587,300,000						-		0		-		8,835,840			
		Sub Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS PAUD	Jumlah Kapasitas Pengelolaan dana BOS PAUD						41,077,310		6,055,000		10,619,660		-		0		16,674,660					
		Sub.Keg.Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang dijaga						-						-		0		-					
		Sub Keg.Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan					12	55,103,605				10,764,950		-		0		10,764,950					
49		Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	paket	4	-	1	0		-		-		-		-	0	0	-	1	-	25	#DIV/0!	
50		Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi	paket	440	5,924,758,000	1	0	9	26,975,910		-		13,937,500.00		-		0	0	13,937,500	1	13,937,500	0	0	DISDIK
51		Sub.Keg.Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	orang	280		15		10	1,116,097,900	45	-		-		-		0	45	-	60	-	21	#DIV/0!	DISDIK
52		Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampin	Jumlah Pemberian Layanan Pendampin	Satdik	632	489,175,400	158			65,729,730		-		-		-		0	0	-	158	-	25	-	DISDIK

		gan bagi Satuan Pendidikan	gan bagi Satuan Pendidikan																				
53		Sub Keg. Rahabilitasi sedang berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Satdik			158			-		-		-		-		0		-		-		
54		Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkattan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	unit	24		1	90,108,943	100	68,608,760						-		0	0	-	1	90,108,943	4	#DIV/0!	
		Sub.Keg.Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas sekolah								-						-		0		-				
		Sub.Keg.Rehab sedang/Berat Sarana prasarana dan Utilitas Sekolah								-						-		0		-				
		Sub Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga peserta Didik PAUD		satuan pendidikan	20		5			1,040,181,000						-		0	0	-	5	-	25	#DIV/0!	

		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	**Cakupan Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan yang Dikelola Sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan**		**100**	**1,990,246,720.0**	**40.00**	**68,955,797**		**433,901,660**	-	**-**		**8,359,200**		**-**		**-**	**0.00**	**8,359,200**	**40**	**77,314,997**	**40**	**4**	**DISDIK**
55		Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik.	lembaga	20	1,129,000,000		-		-		-		-		-		-	0	-	-	-	-	-	DISDIK
56		Sub Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi.	orang	280	422,238,600	50	66,755,797		27,632,105		-		873,600		-		0	0	873,600	50	67,629,397	18	16	DISDIK
59		Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Laporan	4	904,477,880	3	2,200,000	1	319,100,000		-		-		-		0	0	-	3	2,200,000	75	0	DISDIK

		Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan							24,323,605						-		0							
56		Sub Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Warga Belajar	600	439,008,120			1350	62,845,950		-		7,485,600		-		-	0	7,485,600	-	7,485,600	-	2	DISDIK
		PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**			**2,832,420,842**	**85.714**	**1,910,419,529**		**150,002,000**		**-**		**19,011,230**		**-**		**-**							
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	**Prosentase Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan yang Memenuhi Standar dan Rasio Guru dan Murid**			**2,832,420,842**	**85.714**	**1,910,419,529**		**150,002,000**		**-**		**19,011,230**		**-**		**-**							
		Sub Keg. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga		100	1,927,942,962	**85.71**	51,030,203	2	84,375,750		**-**		**2,184,950**		**-**		**-**	0.000	**2,184,950**	**86**	**53,215,153**	**86**	**3**	**DISDIK**

		Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kependidikan Satuan Pendidik Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																					
58		Sub Keg. Penataan Pendistribusian Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusiaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD dan Penidikan Nonformal/ kesetaraan	dokumen	8	904,477,880	3	1,859,389,326	1	65,626,250		-		16,826,280		-		0	0	16,826,280	3	1,876,215,606	38	207	DISDIK

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.

Perencanaan perubahan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Berikut ini disajikan informasi tentang Rencana Kinerja Dinas Pendidikan
Tahun 2025. Adalah 3 Program, 13 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **222.423.900.000**- dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL ; 3.2

TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

SKPD: Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata

					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Indikator	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Pencapaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			OPD
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/berkurang	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					**DINAS PENDIDIKAN**									**216,788,549,475**	**222,004,752,046**	**5,216,202,571**	
1	**1**				**PROGRAM PENUNJANG**												
1	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									**177,786,535,403**	**182,673,880,799**	**4,887,345,396**	
1	01	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat daerah**	**Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat daerah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**16,480,100**	**6,858,250**	(9,621,850)	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat daerah	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**6 dokumen**	**6 dokumen**	3,196,200	1,174,950	(2,021,250)	

1	01	01	2.01	02	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 dokumen**	**1 dokumen**	2,576,000	738,500	(1,837,500)	
1	01	01	2.01	03	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 dokumen**	**1 dokumen**	2,287,950	1,199,800	(1,088,150)	
1	01	01	2.01	04	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 dokumen**	**1 dokumen**	2,685,200	862,400	(1,822,800)	
1	01	01	2.01	05	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 dokumen**	**1 dokumen**	2,538,900	1,137,500	(1,401,400)	
1	01	01	2.01	06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 laporan	2 laporan	3,195,850	1,745,100	(1,450,750)	

1	01	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat daerah**	**Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat daerah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**177,283,750,561**	**182,352,982,529**	5,069,231,968	
1	01	01	2.02	01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1466 orang	1466 orang	176,938,235,411	182,014,907,129	5,076,671,718	
1	01	01	2.02	02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 dokumen	1 dokumen	339,699,450	334,758,100	(4,941,350)	
1	01	01	2.02	05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 dokumen	1 dokumen	2,950,550	1,460,900	(1,489,650)	
1	01	01	2.02	07	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah lap Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah lap Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 laporan	2 laporan	2,865,150	1,856,400	(1,008,750)	
1	01	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**57,544,050**	**54,957,950**	(2,586,100)	

1	01	01	2.03	01	Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 dokumen**	**2 dokumen**	56,008,350	1,257,900	(54,750,450)	
1	01	01	2.03	06	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 laporan**	**2 laporan**	1,535,700	53,700,050	52,164,350	
1	01	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**Cakupan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**943,950**	**943,950**	-	
1	01	01	2.05	03	Sub.Keg.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 dokumen**	**1 dokumen**	943,950	943,950	-	
1	01	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**89,691,900**	**39,431,550**	(50,260,350)	
1	01	01	2.06	01	Sub.Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	-	-	-	

1	01	01	2.06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	-	-	-	
1	01	01	2.06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	3,819,900	1,936,550	(1,883,350)	
1	01	01	2.06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 laporan**	**1 laporan**	85,872,000	37,495,000	(48,377,000)	
1	01	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**128,346,472**	**61,521,350**	(66,825,122)	
1	01	01	2.07	05	Sub.Keg.Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Mebel yang disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**5 unit**	**5 unit**	15,675,115	12,540,092	(3,135,023)	
1	01	01	2.07	06	Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**3 unit**	**4 unit**	112,671,357	48,981,258	(63,690,099)	
1	01	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**87,229,370**	**87,191,220**	(38,150)	

1	01	01	2.08	01	Sub Keg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 laporan	1laporan	3,353,750	3,315,600	(38,150)	
1	01	01	2.08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 laporan	1laporan	83,875,620	83,875,620	-	
1	01	01	2.08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 laporan	1laporan	-	-	-	
1	01	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daera**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**122,549,000**	**69,994,000**	(52,555,000)	
1	01	01	2.09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan perorangan aau dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**31 unit**	**31 unit**	65,660,000	44,710,000	(20,950,000)	

1	01	01	2.09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diprlihara	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diprlihara	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	I unit	1 unit		-	-	
1	01	01	2.09	09	Sub.Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	I unit	I unit		-	-	
1	01	01	2.09	10	Sub.Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 unit**	**1 unit**	56,889,000	25,284,000	(31,605,000)	
1	01	02			**PROG. PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**38,719,415,472**	**39,048,272,647**	328,857,175	
1	01	02	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**22,246,517,069**	**22,299,023,346**	52,506,277	
1	01	02	2.01	02	Sub Keg. Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang bertambah	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**21 ruang kelas**	**21 ruang kelas**	422,710,150	839,900,150	417,190,000	
1	01	02	2.01	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang	Jumlah Ruang Guru/kepala	Jumlah Ruang Guru/kepala	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 unit**	**2 unit**	214,153,600	213,477,400	(676,200)	

					Guru/Kepala Sekolah/TU	sekolah/TU yang Telah dibangun	sekolah/TU yang Telah dibangun										
1	01	02	2.01	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehtan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah dibangun	Jumlah Ruang UKS yang Telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**5 ruang UKS**	**5 ruang UKS**	317,018,000		(317,018,000)	
1	01	02	2.01	05	Sub Keg. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang Telah dibangun	Jumlah Perpustakaan yang Telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 ruang	2 ruang	-		-	
1	01	02	2.01	06	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 unit	2 unit	-	341,018,000	341,018,000	
1	01	02	2.01	07	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 unit**	**2 unit**	391,976,431	391,595,981	(380,450)	
1	01	02	2.01	08	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi, sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi, sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**20 ruang kelas**	**20 ruang kelas**	2,174,668,400	2,974,940,940	800,272,540	
1	01	02	2.01	09	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi, sedang/berat	Jumlah Ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi, sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**4 ruang**	**4 ruang**	-		-	

1	01	02	2.01	10	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telahd ibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 ruang**	**2 ruang**	-		-	
1	01	02	2.01	11	Sub Keg. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 ruang**	**1 ruang**	-		-	
1	01	02	2.01	12	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Jumlah sarana utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**3 unit**	**3 unit**	264,683,500	473,739,600	209,056,100	
1	01	02	2.01	13	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas kepala sekolah/guru /penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 unit**	**2 uniit**	-		-	
1	01	02	2.01	14	Sub Keg. Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Mebeler sekolah yang tersedia	Jumlah Mebeler sekolah yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	380,081,050	204,257,250	(175,823,800)	
					Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	160 Peserta Didik	160 Peserta Didik	159,855,600	136,679,300	(23,176,300)	
1	01	02	2.01	17	Sub Keg. Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan peserta didik yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	-		-	

1	01	02	2.01	22	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang tersedia	Jumlah Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	16 paket	16 paket	1,742,462,250	1,684,063,000	(58,399,250)	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar an ujian	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar an ujian	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	160 satuan pendidikan	160 satuan pendidikan	31,541,675	19,963,400	(11,578,275)	
1	01	02	2.01	27	Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/gol.pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kalifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/gol.pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kalifikasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	335 orang	335 orang	1,507,168,900	933,111,125	(574,057,775)	
1	01	02	2.01	28	Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	160 satuan pendidikan	160 satuan pendidikan	89,168,550	44,511,050	(44,657,500)	
1	01	02	2.01	29	Sub Keg Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mengelolah dana BOS	Jumlah SD yang mengelolah dana BOS	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	160 satuan pendidikan	160 satuan pendidikan	13,655,180,000	13,655,180,000	-	
					Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah satuan pendidikan yang mengelolah dana BOS	jumlah satuan pendidikan yang mengelolah dana BOS	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	500 orang	500 orang	435,457,788	158,376,700	(277,081,088)	
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Jumlah ruang laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**.. ruang**	**.. ruang**	-		-	

					Sub.Keg.Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**160 Orang**	**160 Orang**	92,468,925	27,406,550	(65,062,375)	
					Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**9 Komunitas**	**9 Komunitas**	91,443,900	52,770,300	(38,673,600)	
					Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan Layanan Pendampingan	Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan Layanan Pendampingan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**160 kegiatan**	**160 kegiatan**	67,448,875	53,797,575	(13,651,300)	
					Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**160 Orang**	**160 Orang**	112,815,075	94,235,025	(18,580,050)	
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium SD	Jumlah Laboratorium SD yang telah direhabilitasi	Jumlah Laboratorium SD yang telah direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**2 ruang**	**2 ruang**			-	
1	01	02	2.01	38	Sub.Keg. Koordinasi,Perencanaan Supervisi dan Evaluasi layanan di bidang pendidikan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**4 dokuen**	**4 dokumen**	96,214,400		(96,214,400)	
1	01	02	2.02		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**Angka melek huruf dan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**11,972,785,725**	**11,597,884,175**	(374,901,550)	
1	01	02	2.02	02	Sub.Keg. Pembanguna	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertamba	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertamba	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 ruang	2 ruang	-		-	

					n Ruang Kelas Baru												
1	01	02	2.02	03	Sub Keg. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	jumlahRuang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	4 ruang	4 ruang			-	
1	01	02	2.02	04	Sub Keg. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah dibangun	Jumlah Ruang UKS yang Telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 ruang	1 ruang			-	
1	01	02	2.02	06	Sub Keg. Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**1 ruang**	**1 ruang**	-		-	
1	01	02	2.02	09	Sub Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 unit	2 unit	-		-	
1	01	02	2.02	12	Sub Keg. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang telah dibangun	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 unit	2 unit	110,489,500	109,684,500	(805,000)	
1	01	02	2.02	14	Sub Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Rehabilitasi ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	**50 ruang**	**50 ruang**	110,214,500	803,889,400	693,674,900	
1	01	02	2.02	15	Sub Keg. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba		5 ruang	-		-	

1	01	02	2.02	24	Sub Keg. Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumah sarana prasaranautilitas sekolah yang telah direhabiloitasi sedang/berat	Jumah sarana prasaranautilitas sekolah yang telah direhabiloitasi sedang/berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	4 unit	4 unit	-		-	
1	01	02	2.02	26	Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler sekolah yang tersedia	Jumlah Meubeler sekolah yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	4 paket	4 paket	131,526,300	43,273,700	(88,252,600)	
1	01	02	2.02	28	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 paket	1 paket	378,130,250	190,901,350	(187,228,900)	
					Sub.Keg.Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	7450 peserta didik	7450 peserta didik	94,424,850	85,960,050	(8,464,800)	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah perserta didik yang mengikuti prses belajar dan ujian	Jumlah perserta didik yang mengikuti prses belajar dan ujian	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	52 satdik	52 satdik	76,381,375	48,494,450	(27,886,925)	
1	01	02	2.02	37	Sub.Keg.Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	24 paket	24 paket	683,256,450	234,277,000	(448,979,450)	
1	01	02	2.02	40	Sub.Keg. Pengembangan Karir Pendidik an Tenaga Kependidikan pada satuan peniikan SMP	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/ golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	120 oran	120 oran	1,143,563,750	1,064,796,600	(78,767,150)	
					Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	180 orang	180 orang	204,134,300	91,840,600	(112,293,700)	

					Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	3 dokumen	3 dokumen	55,837,400	31,924,625	(23,912,775)	
1	01	02	2.02	41	Sub.Keg.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba			34,494,300	24,162,950	(10,331,350)	
					Sub.Keg.Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	Jumlah Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	Jumlah Sosialisai dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 dokumen	1 dokuen	28,271,150	14,126,800	(14,144,350)	
					Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	52 komunitas	52 komunitas	69,169,700	47,284,650	(21,885,050)	
					Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 kegiatan	1 kegiatan	48,645,250	28,326,900	(20,318,350)	
					Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	50 orang	50 orang	81,763,650	56,457,600	(25,306,050)	
1	01	02	2.02	42	Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP yang Mengelola Dana BOS	Jumlah sekolah SMP yang Mengelola Dana BOS	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	52 satdik	52 satdik	8,722,483,000	8,722,483,000	-	

1	01	02	2.03		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**Cakupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelolah sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.**	**Cakupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelolah sesuai standar pelayanan minimal satuan pendidikan.**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**4,017,008,533**	**4,717,463,466**	700,454,933	
1	01	02	2.03	01	Sub.Keg. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	umlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	10 ruang	10 ruang	386,777,250	1,116,097,900	729,320,650	
1	01	02	2.03	02	Sub Keg. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	5 unit	5 unit	110,182,400	203,142,296	92,959,896	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	3 unit	3 unit			-	
1	01	02	2.03	04	sub.Keg.Rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana ,prasarana dan utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba		1 unit			-	
1	01	02	2.03	07	Sub Keg. Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	7 paket	7 paket		127,432,600	127,432,600	

1	01	02	2.03	12	Sub Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang tersedia	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang tersedia	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	20 paket	20 paket	1,040,181,000	1,040,181,000	-	
1	01	02	2.03	14	Sub.Keg.Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi satuan PAUD		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba		5 satuan pendidik			-	
1	01	02	2.03	16	Sub.Keg.Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan FasilitasiKenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensidan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan FasilitasiKenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensidan Kualifikasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	150 orang	150 orang	365,551,855	338,806,555	(26,745,300)	
1	01	02	2.03	17	Sub Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	50 satuan pendidikan	50 satuan pendidikan	52,181,750	47,007,800	(5,173,950)	
1	01	02	2.03	19	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	138 orang	138 orang	90,187,133	41,077,310	(49,109,823)	
					Sub.Keg. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	53 Satdik	53 satdik	1,587,300,000	1,587,300,000	-	
					Sub Keg.Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	12 dokumen	12 dokumen	88,118,210	55,103,605	(33,014,605)	

					Sub.Keg.Fasilatasi Komunitas belajar Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi	Jumlah satuan penidikan yang dievaluasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	9 komunitas	9 komunitas	61,166,005	26,975,910	(34,190,095)	
					Sub.Keg.Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 dokumen	1d okuen	108,195,860	65,729,730	(42,466,130)	
1	01	02	2.03	27	Sub.Keg.Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkattan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkattan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	100 orang	100 orang	127,167,070	68,608,760	(58,558,310)	
1	01	02	2.04		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**483,104,145**	**433,901,660**	(49,202,485)	
1	01	02	2.04	10	Sub Keg. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	401 peserta didik	401 peserta didik			-	
1	01	02	2.04	12	Sub Keg. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1350 peserta didik	1350 peserta didik	83,423,875	62,845,950	(20,577,925)	
					Sub.Keg.Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	5 satdik	5 satdik	319,100,000	319,100,000	-	

					Sub.Keg.Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	Jumlah Koordinasi , Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	1 dokumen	1 dokumen	42,105,810	24,323,605	(17,782,205)	
1	01	02	2.04	15	Sub Keg. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	50 peserta	50 peserta	38,474,460	27,632,105	(10,842,355)	
1	01	04			**PROG. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**282,598,600**	**282,598,600**	-	
1	01	04	2.01		**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**Angka Melek Huruf dan Rasio Ketersedian Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah**	**DISDIK**	**DISDIK**	**Lewoleba**	**Lewoleba**	100%	100%	**282,598,600**	**282,598,600**	-	

1	01	04	2.01	01	Sub Keg. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidik Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 dokumen	2 dokumen	146,075,000	84,375,750	(61,699,250)	
1	01	04	2.01	02	Sub Keg. Pennataan Penistribuian Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	DISDIK	Lewoleba	Lewoleba	2 laporan	2 laporan	136,523,600	65,626,250	(70,897,350)	

BAB IV.
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukan ada tidaknya kesesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2025. Perubahan Renja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dan masukan dari masing – masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pendidikan, yang meliputi Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan pendidikan, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Semoga rencana kerja perubahan tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lembata tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Lewoleba, Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lembata

Wenseslaus Ose,S.Sos,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 196808191999031005

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rencana kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan;dan /atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, namun berdasarkan Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, menunjukan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025. Perubahan dilakukan dengan melakukan pergeseran antar program, kegiatan, sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, paguanggaran.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan.Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025i ni menjadi pedoman penyusunan perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2025.

1.2 LandasanHukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan danKeuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLembataNomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata (Berita Daerah KabupatenLembataTahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian

target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2025

Evaluasi pelaksanaan terhadap Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II perlu dilakukan untuk memastikan target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaiamana tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1

Kajian (Review) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi s/d Triwulan II (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, dan Olahraga									
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	60	36	12	12	50	12	60	100
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	18	21	6	3	50	6	18	100
2.19.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, RDPA, DPA, RDPPA, DPPA, RENJA dan Evaluasi Renja yang tersusun	35	21	6	3	50	6	18	100
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	100	52	26	26	100	26	100	100
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	105	25	25	25	100	25	105	100
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pengelola Keuangan SKPD	6	2	1	1	50	2	6	100
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	10	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi s/d Triwulan II (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku yang dijilid dan barang cetakan & penggandaan	10	4	2	1	50	2	40	100
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jml Laporan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	30	10	10	2	20	10	30	100
2.19.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran	20	36	12	12	20	10	20	100
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	10	5	3	60	10	20	100
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	0	30	30	20	20	100	100
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4	2	1	0	0	1	2	80
2.19.02.2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	4	2	1	0	0	1	2	80
2.19.02.2.01.08	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	200	50	50	0	0	50	200	90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi s/d Triwulan II (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Jml Atlit yang berprestasi	8	8	4	4	100	1	1	90
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota • Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya sain	8	8	1	1	30	1	20	90
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20	6	3	1	30	6	20	90
2.19.03.2.02	Penyelenggaran Kejuaraan dan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jml Cabang olahraga yang dibina	8	8	1	1	100	1	1	100
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Daerah Kab/Kota									
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8	2	2	0	0	2	8	100
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	120	60	30	30	100	60	120	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalammemajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	120	30	30	0	0	30	120	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi s/d Triwulan II (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2	1	1	1	50	1	2	100
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan									
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		4	1	1	0	0	1	4	100
.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	1	1	0	0	1	4	100
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Organisasi di Bidang Budaya	156	25	5	0	0	25	156	100
2.22.03.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masy pelakunya dlm Daerah Kab/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	156	25	5	0	0	25	156	100
2.22.03.2.02.01	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	156	25	5	0	0	25	156	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi s/d Triwulan II (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.03.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yg Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan .	156	20	5	0	0	7	9	100
2.22.03.2.03.01	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	156	20	5	0	0	7	9	100

Berdasarkan table diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah(<30%) yaitu :

1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota terdapat beberapa Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV
2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah terdapat satu Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV
3) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terdapat beberapa Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV
5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
6). Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat satu sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
7).Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat satu Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.berikut ini :

Tabel. 2. Matriks Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel. 2. Matriks Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Keria Perubahan Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA AN KEBUDAYAAN								Rp4.814.728.956					5,606,575,562
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp1.984.554.354					2,490,839,213
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14.274.508					12,000,000
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	6 Dokumen	6 dokumen	14.274.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	14.374.508,
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp1.931.254.240					2,047,926,613
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	25 Orang/bul	100 Persen	1.931.254.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	1.931.754.240
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	1 Dokumen	100 Persen	152.862.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	176,496,000

								Perangkat Daerah											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Keria Perubahan Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								Rp14.617.000,00					147,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	2 Paket	100 %	5.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	12,000,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	8.742.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	105,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Keria Perubahan Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24.408.606,00					30,000,000
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100 %	5 Unit	100 %	24.408.606,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	100 %	30.000,000
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								Rp106.097.472,00					454,349,669
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader								Rp106.097.472,00					454,349,669
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan wirausaha	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	3 Kelompok	35 Orang	30 orang	Rp56.592.071,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing usahawan muda	3 Kelompok	175,901,230

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Keria Perubahan Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								Rp2.401.198.761,00					1,661,386,680
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								Rp171.061.729,00					1,101,023,180

2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	4 Unit	80 %	Rp171.061.729,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	1,101,023,180
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp2.124.069.527,00					560,363,500
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	Rp304.245.542,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500
					Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	Rp1.819.823.985,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500
					Kegiatan Pembinaan dan Pengemnbangan Olahraga								Rp106.067.505,00					

					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalammemajukan Olahraga	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	Rp43.152.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500
					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	Rp62.914.605,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							Rp37.579.830,00						75.000.000
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							Rp37.579.830,00						75.000.000

					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan	Terselenggaranya Kejiatan kepramuukaan Tingkat Kabupaten/Kota (ETMC, Soeratin, Piala Bupati)	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	4 Laporan	2 Dokumen	2 Kejuaraan	Rp37.579.830,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Olahraga antardesa, antarkecamatan dan antar Kabupaten/Kota	4 Laporan	560,363,500	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								Rp285.298.539,00					623,394,550
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								Rp285.298.539,00					623,394,550
2	22	2	2.01		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								Rp104.672.214,00					331,254,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Keria Perubahan Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Even	156 Objek	156 Objek	Rp104.672.214,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	4 Even	286,254,000
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								Rp180.626.325,00					292,140,550

2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Dalam Daerah Kabupaten	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Even	156 Objek	1 kegiatan	Rp180.626.325,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan daerah untuk diperkenalkan pada ivent daerah dan Nasional	4 Even	292,140,550
												TOTAL	Rp4.814.728.956,00					5,229,970,112

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN KEBUDAYAAN,

APOLONARIS MAYAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710723 199903 1 007

,

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2025

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan

cara melakukan pergeseran antar Sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan Sub kegiatan, penambahan maupun

pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2019 Nomor 285, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 285);

14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
2. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Lembata

Periode Pelaksanaan Triwulan II 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	*2*	*3*	*4*		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**19.240.031.087**		**6.430.318.717**		**2.774.830.693**		**247.278.171**		**787.924.933**					**-**	**1.035.203.104**	**-**	**7.465.521.821,00**	**-**	**38,80**	**Dinas Parekr**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**13.994.629.757**	**80**	**4.747.534.975**	**20**	**1.967.231.023**	**5**	**213.678.171**	**5**	**679.574.933**		**-**		**-**	**10,00**	**893.253.104**	**90,00**	**5.640.788.079,00**	**90,00**	**40,31**	**Dinas Parekraf**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**%**	**100**	**200.000.000**	**80**	**45.183.938**	**20**	**8.947.752**	**5**	**2.259.600**	**5**	**2.249.372**		**-**		**-**	**10,00**	**4.508.972**	**90,00**	**49.692.910,00**	**90,00**	**24,85**	**Dinas Parekraf**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	40.000.000	8	8.421.593	4	1.502.448	1,00	752.500	1,00	166.948					2,00	919.448	10,00	9.341.041,00	62,50	23,35	Dinas Parekraf
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	4	20.000.000	8	7.213.924	1	1.472.786	0,25	-	0,06	710.500					0,31	710.500	8,31	7.924.424,00	207,81	39,62	Dinas Parekraf
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	4	20.000.000	-	7.427.524	1	1.477.248	0,25	-	0,06	530.250					0,31	530.250	0,31	7.957.774,00	7,81	39,79	Dinas Parekraf
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	4	40.000.000	-	6.605.774	1	1.477.248	0,25	752.500	0,06	-					0,31	752.500	0,31	7.358.274,00	7,81	18,40	Dinas Parekraf
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	4	40.000.000	-	7.020.774	1	1.477.248	0,25	-	0,06	785.500					0,31	785.500	0,31	7.806.274,00	7,81	19,52	Dinas Parekraf
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	8	40.000.000	1	8.494.349	2	1.540.774	0,50	754.600	0,13	56.174					0,63	810.774	1,63	9.305.123,00	20,31	23,26	Dinas Parekraf
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Laporan			-	-			-		-											
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**9.961.575.077**	**20**	**3.428.974.951**	**20**	**1.795.369.780**	5,00	**202.313.699**	1,25	**645.794.620**		**-**		**-**	**6,25**	**848.108.319**	**26,25**	**4.277.083.270,00**	**26,25**	**42,94**	**Dinas Parekraf**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	56	9.215.004.837	14	3.235.229.545	14	1.697.264.554	3,50	202.108.249	0,88	604.483.794					4,38	806.592.043	18,38	4.041.821.588,00	32,81	43,86	Dinas Perekraf
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah doukumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	690.570.240	180	193.745.406	1	98.105.226	0,25	205.450	0,06	41.310.826					0,31	41.516.276	180,31	235.261.682,00	4.507,81	34,07	Dinas Perekraf
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28.000.000	-	-		-	-		-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan	72	28.000.000	-	-		-	-		-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Laporan**	**-**	**173.333.280**	**8**	**43.367.428**	**2**	**22.331.450**	0,50	**-**	0,13	**6.698.700**		**-**		**-**	**0,63**	**6.698.700**	**8,63**	**50.066.128,00**	**-**	**28,88**	**Dinas Perekraf**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Dokumen	8	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	145.333.280	2	43.367.428	2	22.331.450	0,50	-	0,13	6.698.700					0,63	6.698.700	2,63	50.066.128,00	32,81	34,45	Dinas Perekraf
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**Laporan**	**8**	**90.000.000**	**8**	**11.320.481**	**20**	**3.846.750**	5,00	**-**	1,25	**1.000.400**		**-**		**-**	**6,25**	**1.000.400**	**14,25**	**12.320.881,00**	**178,13**	**13,69**	**Dinas Perekraf**
		Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	40.000.000	1	11.320.481	1	3.846.750	0,25	-	0,06	1.000.400					0,31	1.000.400	1,31	12.320.881,00	32,81	30,80	Dinas Perekraf
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bombingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	4	50.000.000	-	-	-	-	-		-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**334.000.000**	**80**	**149.859.204**	**20**	**55.642.073**	5,00	**4.470.000**	1,25	**12.653.307**		**-**		**-**	**6,25**	**17.123.307**	**86,25**	**166.982.511,00**	**86,25**	**49,99**	**Dinas Perekraf**
		Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	paket	4	10.000.000	1	3.154.425	1	1.413.471	0,25		0,06											
		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	80.000.000	1	31.100.198	1	3.960.602	0,25	-	0,06	1.162.307					0,31	1.162.307	1,31	32.262.505,00	32,81	40,33	Dinas Perekraf

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	40.000.000	1	16.649.750	1	2.875.000	0,25	-	0,06	-					0,31	-	1,31	16.649.750,00	32,81	41,62	Dinas Perekraf
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	dokumen	2	4.000.000		-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	100	200.000.000	46	98.954.831	25	47.393.000	6,25	4.470.000	1,56	11.491.000					7,81	15.961.000	53,81	114.915.831,00	53,81	57,46	Dinas Perekraf
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**unit**	**60**	**920.000.000**	**4**	**31.510.950**		**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**4,00**	**31.510.950,00**	**6,67**	**3,43**	**Dinas Perekraf**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Unit	24	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	28	60.000.000	4	31.510.950	-	-	-	-	-						-	-	4,00	31.510.950,00	14,29	52,52	Dinas Perekraf
		Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	2	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Perekraf
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**laporan**	**12**	**1.985.180.800**	**80**	**917.280.252**	**20**	**23.703.218**	5,00	**1.185.000**	1,25	**2.232.126**		**-**		**-**	**6,25**	**3.417.126**	**86,25**	**920.697.378,00**	**718,75**	**46,38**	**Dinas Perekraf**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan surat menyurat	laporan	4	1.892.448.000	197	886.450.000	1	1.823.250	0,25	1.000.000	0,06	-					0,31	1.000.000	197,31	887.450.000,00	4.932,81	46,89	Dinas Perekraf
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Laporan	4	82.732.800	24	23.995.000	1	20.134.684	0,25	185.000	0,06	1.913.188					0,31	2.098.188	24,31	26.093.188,00	607,81	31,54	Dinas Perekraf
		Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	4	10.000.000	20	6.835.252	1	1.745.284	0,25	-	0,06	318.938					0,31	318.938	20,31	7.154.190,00	507,81	71,54	Dinas Perekraf
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**unit**	**178**	**330.540.600**	**80**	**120.037.771**	**20**	**57.390.000**	5,00	**3.449.872**	1,25	**8.946.408**		**-**		**-**	**6,25**	**12.396.280**	**86,25**	**132.434.051,00**	**48,46**	**40,07**	**Dinas Perekraf**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jaewab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas I atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Parekraf
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/opersional rodea dua dan roda empat yang layak operasi	Unit	56	260.540.600	62	108.576.083	14	56.270.000	3,50	3.449.872	0,88	8.946.408					4,38	12.396.280	66,38	120.972.363,00	118,53	46,43	Dinas Parekraf
		Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	unit	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	12	10.000.000	-	1.460.000	-	1.120.000	-	-	-	-					-	-	-	1.460.000,00	-	14,60	Dinas Parekraf
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	20.000.000	-	10.001.688	-	-	-	-	-	-					-	-	-	10.001.688,00	-	50,01	Dinas Parekraf
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
1	Meningkatnya daya saing Pariwisata dan ekonomi kreatif	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**persentase Kunjungan Wisata**	**Jumlah kunjungan wisata**	**#####**	**3.335.094.040**	**46**	**1.115.289.301**	**3.913**	**807.599.670**		**33.600.000**		**108.350.000**		**-**		**-**	**-**	**141.950.000**	**46,00**	**1.257.239.301,00**	**0,38**	**37,70**	**Dinas Parekraf**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota	**Tersediannya Jumlah pengelollan daya tarik wisata**	**jumlah**	**12**	**610.094.040**	**-**	**-**	**2**	**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Parekraf**
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik wisata kabupaten/kota	jenis	8	410.094.040	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya tarik wisata Kabuapten/kota	dokumen	4	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Tersedianya pengelolaan kawasan strategis pariwisata**	**Kawasan**		**300.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Parekraf**
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan	Kawasan	4	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	**Tersedianya pengelolaan destinasi Pariwisata**	**jumlah**		**2.425.000.000**	**3**	**1.115.289.301**		**807.599.670**	-	**33.600.000**	-	**108.350.000**		**-**		**-**	**-**	**141.950.000**	**3,00**	**1.257.239.301,00**	**-**	**51,84**	**Dinas Parekr**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Pengembangan Destinasi pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Destinasi kabuapten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, pementapan, Revitalisasi)	lokasi	11	2.150.000.000		-		-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah D Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten/Kota yang tersedia dan dipelihara	unit	11	275.000.000	-	-		250.000.000	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupeten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupeten/kota	Laporan		-	3	1.115.289.301		557.599.670	-	33.600.000	-	108.350.000					-	141.950.000	3,00	1.257.239.301,00	-	-	Dinas Parekraf
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**	**Lama kunjungan**	**2-3**	**1.159.717.200**	**20.000**	**76.890.130**	**2-3**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**76.890.130,00**	**43,77**	**6,63**	**Dinas Parekraf**
		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	**Jumlah kunjungan wisata**	**hari**		**1.159.717.200**	**46**	**76.890.130**	**2-3**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**46,00**	**76.890.130,00**		**6,63**	**Dinas Parekraf**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Gokumen	16	699.740.000	-	-	-	-	-		-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	3	150.000.000	1	76.890.130	-	-									-	-	1,00	76.890.130,00	33,33	51,26	Dinas Parekraf
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	Dokumen	12	134.977.200	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumenKerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK**				**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Parekraf**
		Pengembangan Ekosisten Ekonomi Kreatif	**Jumlah Pengembangan Ekosisten ekonomi kreatif**			**-**	**-**	**-**		**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Parekraf**
		Penyediaan Insfrastruktur	Jumlah insfrastruktur Ekonomi Kreatif	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekra
5		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Lama kunjungan**	**hari**	**180**	**750.590.090**	-	**490.604.311**	-	**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**490.604.311,00**	**-**	**65,36**	**Dinas Parekraf**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Tersediannya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat**			**519.940.210**		**445.699.836**		**-**	-	**-**	-	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**445.699.836,00**	**-**	**85,72**	**Dinas Parekraf**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	orang	320	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	prang	280	294.940.210	70	88.006.058	-	-			-	-					-	-	70,00	88.006.058,00	25,00	29,84	Dinas Parekraf
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa	0rang	-	-	40	130.192.529	-	-			-	-					-	-	40,00	130.192.529,00	-	-	Dinas Parekraf
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	4	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	Dinas Parekraf
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan kompetensi sumber Daya Manusia Ekonomi	orang	-	-	105	146.119.642	80	-			-	-					-	-	105,00	146.119.642,00	-	-	Dinas Parekraf
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	20	81.381.607	20	-			-	-					-	-	20,00	81.381.607,00	-	-	Dinas Parekraf
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Meningkatnya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif**			**230.649.880**	**30**	**44.904.475**	**100**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**30,00**	**44.904.475,00**	**-**	**19,47**	**Dinas Parekraf**
		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mrngikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	180	230.649.880	30	44.904.475	100	-		-		-		-		-	-	-	30,00	44.904.475,00	16,67	19,47	Dinas Parekraf

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kabupaten/Kota.
   Masalah : Terdapat paket pekerjaan pembangunan Rumah Walet di BCL masih dalam proses persiapan lokasi.
   Solusi : Percepatan proses persiapan lokasi.
2. Sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupeten/kota.
   Masalah : Realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Event Rally Wisata masih pada satu kegiatan/event pendukung yakni Festival Nale sedangkan event utama yakni Festival Lamaholot masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa Sub Kegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendasar yaitu :

1. Penyesuaian PAD
2. Pemyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah baik transfer berupa, DAU , DAK, DBH maupun transfer Propinsi
4. Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD, pengahapusan Sub Kegiatan , kegiatan dan penyesuaian terget kinerja, penyesuaian gaji dan tunjangan serta penambahan sub kegiatan bersifat penting dan mendesak untuk di laksanakan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.746.967.833,00**	**2.096.784.505,00**	**1.967.231.023,00**	**1.388.707.206,00**							**4.135.675.039,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 Laporan	12 Laporan	14.811.150,00	14.809.652,00	8.947.752,00	-5.863.398,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.502.448,00	-966.077,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.086,00	1.472.786,00	-995.739,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	2.468.348,00	1.477.248,00	-991.277,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.468.525,00	2.468.174,00	1.540.774,00	-927.751,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.926.369.723,00	1.798.769.330,00	1.795.369.780,00	-130.999.943,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		2.576.411.369,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.822.967.833,00	1.697.264.554,00	1.697.264.554,00	-125.703.279,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.389.768.809,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	103.401.890,00	101.504.776,00	98.105.226,00	-5.296.664,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			172.642.560,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	25.487.340,00	25.205.350,00	22.331.450,00	-3.155.890,00			-	- -	-		43.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.487.340,00	25.205.350,00	22.331.450,00	-3.155.890,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			36.333.320,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.468.525,00	6.207.750,00	3.846.750,00	1.378.225,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.468.525,00	6.207.750,00	3.846.750,00	1.378.225,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah*				100 %	100 %	71.955.793,00	122.674.127,00	55.642.073,00	-16.313.720,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		84.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.576.905,00	1.413.471,00	1.413.471,00	-163.434,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.975.888,00	8.168.256,00	3.960.602,00	-9.015.286,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.100.000,00	9.001.400,00	2.875.000,00	-7.225.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	47.303.000,00	104.091.000,00	47.393.000,00	90.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				25 %	25 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		790.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	647.767.702,00	25.448.296,00	23.703.218,00	-624.064.484,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		496.295.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	625.708.875,00	1.823.250,00	1.823.250,00	-623.885.625,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			473.112.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.716.400,00	20.135.000,00	20.134.684,00	1.418.284,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			20.683.200,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.342.427,00	3.490.046,00	1.745.284,00	-1.597.143,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	58.107.600,00	103.670.000,00	57.390.000,00	-717.600,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		85.135.150,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	56.647.600,00	97.830.000,00	56.270.000,00	-377.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			65.135.150,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.460.000,00	5.840.000,00	1.120.000,00	-340.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisata**				**18000 Orang**	**18000 Orang**	**944.000.000,00**	**1.335.766.353,00**	**807.599.670,00**	**683.523.510,00**							**1.627.523.510,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata*				3 Lokasi	3 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Destinasi Wisata		152.523.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			102.523.510,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata*				4 Lokasi	4 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Kawasan Wisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata*				3 Lokasi	3 Lokasi	944.000.000,00	1.335.766.353,00	807.599.670,00	-136.400.330,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di Destinasi Wisata		1.375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Waijarang	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	1 Laporan	294.000.000,00	1.085.766.353,00	557.599.670,00	263.599.670,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**760.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.320.700,00**							**758.679.300,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	760.000.000,00	0,00	0,00	-760.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		758.679.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			33.744.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	4 Promosi	760.000.000,00	0,00	0,00	-760.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			549.935.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Lama kunjungan wisata**				**3 Hari**	**3 Hari**	**681.768.152,00**	**206.801.484,00**	**0,00**	**-481.620.682,00**							**200.147.470,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Tersedianya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	112.986.380,00	0,00	-300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		142.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				80 Orang	80 Orang	300.000.000,00	78.306.947,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				70 Orang	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			67.485.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				20 Laporan	20 Laporan	0,00	34.679.433,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Tersedianya Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif*				30 Orang	30 Orang	381.768.152,00	93.815.104,00	0,00	-381.768.152,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		57.662.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	381.768.152,00	93.815.104,00	0,00	-381.768.152,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			57.662.470,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	J U M L A H								**5.132.735.985,00**	**3.639.352.342,00**	**2.774.830.693,00**	**-2.357.905.292,00**							**6.722.025.319,00**	

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target ki_nerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pcrubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

..:.:Kabupaten Lembata,

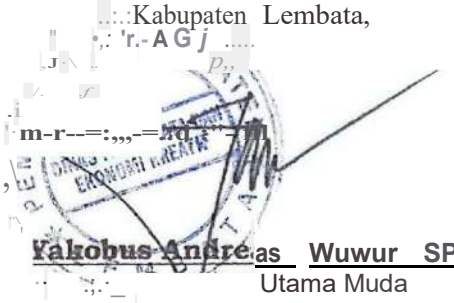

Yakobus Andreas Wuwur SP. Msi

Utama Muda

NIP . 718 199903 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata lima tahunan yakni tahun 2023–2026, yang disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional upaya kesehatan dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan kesehatan.

Dalam upaya merealisasikan tujuan ini perlu dijabarkan dalam pelaksanaan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kerja dan rencana kinerja, serta kebijakan pembanguan kesehatan selama satu tahun.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang kesehatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tahun 2024 yang menjadi dasar bagi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja

Organisasi Perangkat Daerah dan dalam upaya mencapai tujuan SDGs yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia.

Sebagai komitmen dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lembata khususnya dan Nasional pada umumnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21)

11. Keputusan Bupati Lembata Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan kerja Perangkat selaku Pejabat Pengguna

Anggaran, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Melaksanakan Sebagian Kewengangan Pejabat Pengguna Anggaran Untuk Melaksanakan Sebagian Kewengan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

C. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lembata.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Memudahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025.
2. Mengendalikan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja Dinas Kesehatan;
3. Sebagai dasar pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
4. Sebagai dasar penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Mempermudah proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pencapaian tujuan atas urusan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan keluarga dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

D. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penuslisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU, memuat Evaluasi Renja Tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang Telaah Arah Dan kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024, target Kinerja dan Pendanaannya..

BAB V. PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2024 dan Capaian sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 20265 Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan dinas kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1.Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 telah direncanakan 5 program dan 18 kegiatan serta 66 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.101.201.880.757.- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.92.587.477.849,74.- atau sebesar 91,49%, dimana masuk dalam “kategori baik”.

Sementara Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 telah direncanakan 05 program dan 18 kegiatan serta 66 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.95.198.249.781.-

Berdasarkan perencanaan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 pencapaian target kinerja secara umum sudah baik, dimana jika diukur menggunakan rating penilaian skala capaian kinerja; begitu pula jika diukur dengan realisaasi keuangan maka dinas kesehatan masuk dalam "*kategori Baik".* Selanjutnya untuk tahun 2025 belum dilakukan peni;laian karena belum dijalankan.

Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ini antara lain aspek pelayanan umum belum menunjukan pencapaian yang memuaskan.

Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Perkiraan Tahun 2025 serta Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata meliputi indicator terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan dan terhadap realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2024 telah dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatandengan hasil bahwa sebagian indikator belum dapat mencapai target yang diharapkan, namun semuanya sudah masih pada kategori baik.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2024 sesuai indikator Kinerja Pelayaanan Dinas Kesehatan tahun 2023 – 2026 adalah 1.509% dimana berdasarkan skala pengukuran kinerja termasuk dalam kategori **"sangat *baik*",** dengan rata-rata perindikator sebesar 83,86%; sementara untuk capaian kinerja keuangan sebesar 91,49%; dengan kategori "*baik*".

Rincian capaian tahun 2024 sesuai indikator Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Indikator yang belum tercapai.

   Ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan antara lain

   1). Angka Kematian Ibu (AKI) dalam satu tahun anggaran sebesar 149,48/100.000 kelahiran hidup, dengan presentase capaian sebesar -98,95%;

   2). Angka Kematian Bayi dalam satu tahun anggaran sebesar 11,96/1.000 kelahiran hidup, dengan presentase capaian sebesar 80,40%;

   3). Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dalam satu tahun anggaran sebesar 7,73% dengan presentase capaian sebesar 89,57%;

   4). Presentase Balita Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap dalam satu tahun anggaran sebesar 42,78% dengan presentase capaian sebesar 45,03%;

   5). Presentase penderita Hypertensi yang dilayani dalam satu tahun anggaran sebesar 24% dengan presentase capaian sebesar 32%;

   6). Presentase penderita Diabetes Melitus yang dilayani dalam satu tahun anggaran sebesar 68%, dengan presentase capaian sebesar 80%;

   7). Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilayani dalam satu tahun anggaran sebesar 68%, dengan presentase capaian sebesar 97,14%;

   8). Presentase Penduduk Usia 20-59 tahun mendapat Skrining Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebesar 67% dengan presentase capaian sebesar 69,79%;

   9). Presentase Penduduk Usia >60 tahun mendapat skrining kesehatan dalam satu tahun anggaran 44,66% dengan presentase capaian sebesar 51,33%;

   10). Presentase Indikator Keluarga Sehat dalam satu tahun anggaran sebesar 19,37, dengan presentase capaian sebesar 32,28%;

11). Presentase desa / Kelurahan melaksanakan STBM dalam satu tahun anggaran sebesar 100% dengan presentase capaian sebesar 105,26%;

12). Presentase minimal aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana, obat, vaksin, perbekalan dan alat kesehatan dalam satu tahun anggaran sebesar 73,12% dengan presentase capaian sebesar 86,02%.

2. Indikator yang sudah tercapai.

Ada beberapa indikator yang sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan antara lain

1) Prevalensi Balita Stunting dalam satu tahun anggaran sebesar 6,85% dengan presentase capaian sebesar 123,89%
2) Presentase Orang dengan TB yang dilayani dalam satu tahun anggaran sebesar 100% de ngan presentase capaian sebesar 117,65%;
3) Presentase Orang dengan resiko Terinfeksi HIV yang dilayani dalam satu tahun anggaran sebesar 92,36%, dengan presentase capaian sebesar 263,89%;
4) Angka Harapan Hidup dalam satu tahun anggaran sebesar 73,40 tahun dengan presentase capaian sebesar 107%;
5) Presentase Posyandu Aktif dalam satu tahun anggaran sebesar 92,45% dengan presentase capaian sebesar 108,76%;
6) Presentase Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang terakreditasi minimal Strata Utama dalam satu tahun anggaran sebesar 76,92% dengan presentase capaian sebesar 118,34%.

3. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator.

Akan dijelaskan faktor penyebab belum tercapainya indikator dengan kategori cukup dimana capaiannya masih dibawah 75% atau masih dalam kategori Cukup dan Kurang antara lain

1) Cakupan Pelayanan Balita : 66,42% (66,42%);

Masih rendahnya capaian ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kunjungan balita kesarana pelayanan kesehataan dan Posyandu, akibat kesibukan orang tua

2) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil KEK : 41,90% (41,90%);
   Rendahnya capaian ini karena sasaran atau target yang ditetapkan terlalu tinggi terhadap kondisi real terkait jumlah ibu Hamil KEK yang ada.
3) Cakupan Pelayanan Hypertensi : 60,12% (60,12%)
   Rendahnya tingkat kunjungan dipuskesmas karena rendah kesadaran untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan secara rutin dan berkala
4) Cakupan Pelayanan Penderita HIV : 31,09% (31,09%)
   Rendahnya percapaian ini disebabkan oleh penentuan sasaran belum sesuai dengan perhitungan permasing-masing kelompok rentan atau beresiko.
5) Cakupan Kunjungan Masyarakat miskin : 17,84% (17,84%)
   Rendahnya minat masyarakat berkunjung kesarana pelayanan kesehatan dikarenakan akses jangkauaan dan keenggnaan dengan alasan ekonomi karena banyak yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat maupun BPJS Kesehatan
6) Cakupan Rumah Tangga Sehat : 39,67% (66,12%)
   Masih banyak rumah yang belum memenuhi standar rumah sehat.
7) Rasio Tenaga Kesehatan terhadap penduduk sesuai masing-masing profesi : 5,65% (64,30%0
   Masih kurang tenaga kesehatan untuk beberapa profesi tertentu pada sarana kesehatan yang ada.
8) Cakupan Kunjungan Pasien : 12,74% (12,74%)
   Rendahnya minat masyarakat berkunjung kesarana pelayanan kesehatan dikarenakan akses jangkauaan dan keenggnaan dengan alasan ekonomi karena banyak yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat maupun BPJS Kesehatan
9) Jumlah Perjanjian Kerja sama : 0
   Tidak adanya perjanjian kerja sama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait Kesehatan maupun organisasi kemasyarakat lainnya.

10) Presentase Fasilitas Pendukung Sistim Informasi Kesehatan: 25% (50%)
Belum terpenuhinya Puskesmas dengan fasilitas pendukung SIK dimana Fasilitas yang ada hanya pada 3 Puskesmas

11) Presentase tenaga Sistim Informasi Kesehatan :0
Belum ada tenaga kesehatan yang mengikuti pelathan sistim informasi kesehatan

4. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram dan kegiatan sesuai indikator dalam Renstra Tahun 2023-2026 :
Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :
   1) Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga mudah sakit karena rendahnya akses terhadap imunisasi.
   2) Dimungkinkan menurunnya Usia Harapan Hidup karena tingginya kasus kematian terutama pada bayi dan balita.
   3) Dimungkinkan adanya perubahan status gizi balita terutama gizi buruk yang berdampak pada peningkatan stunting.
   4) Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, neonatal, bayi dan balita.
   5) Kasus penyakit HIV-AIDS dimungkinkan meningkat dari tahun sebelumnya jika dilakukan skreaning terhadap sasaran yang beresiko tinggi terhadap HIV.
   6) Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:
   7) Mengintegrasikan program kesehatan keluarga dan Gizi dengan program dan sektor terkait lainnya;
   8) Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas)sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan, kelas ibu, dan memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp;
   9) Mengoptimalkan peran “PSC 119 YES” untuk melayani ibu hamil beresiko;

10) Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja, calon pengantin dan WUS (wanita usia subur) dengan program pemberian zink, asam folat dan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS;
11) Maksimalkan program suami siaga, pembinaan pada bidan serta mewajibkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami;
12) Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas;
13) Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentang akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan resiko finansial warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC).

Selanjutnya Capaian tahun 2024 sesuai dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara umum Kategori Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebesar 99,28% dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator yang belum tercapai.
   Dari ke 12 Indikator yang ada 6 indikator yang belum mencapai target dengan capaianya masih dibawah 100% antara lain ;
   1). Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 92,98%;
   2). Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 89%;
   3). Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 91,39%;
   4). Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : 94%
   5). Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 89,63%;
   6). Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 86,80%;
2. Indikator yang sudah mencapai target :
   Indikator yang sudah mencapai target sebanyak 2 indikator yakni
   1). Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 103,69%;
   2). Pelayanan Kesehatan Balita : 103,68%;

3). Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : 102,96%)'
4). Pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus : 101,90%;
5). Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat : 110,94 %;
6). Pelayanan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV.: 118,55%);

3. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator

Dari capaian yang diperoleh, ada 6 indikator melebihi target atau diatas 100% dimana termasuk dalam kategori sangat baik; , ada 6 indikator dengan rentang antara 75% - 100%, dimana masuk dalam kategori baik.

Dari capaian yang diperoleh terhadap 12 (dua belas) indikator semuanya masuk dalam indikator dengan rentang baik dan sangat baik, dengan pencapaian terendah 86,80% dimana capaian dengan kategori baik namun masih dianggap belum mencapai target antara lain :

1) Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 92,98%;
   Masih belum tercapaianya target pelayanan kesehatan ibu bersalin yakni sebesar 7,02% mungkin akibat dari beberapa puskesmas yang belum melaporkan capaian triwulan 4 yakni sebanyak 8 puskesmas; selain itu ada ibu yang masih melahirkan tidak di sarana dan prasarana yang memadai.
2) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 89%;
   Masih belum tercapaianya target pelayanan kesehatan bayi baru lahir yakni sebesar 11% mungkin penyebabnya sama dengan pelayanan kesehatan ibu hamil yakni ada beberapa puskesmas yang belum melaporkan capaian triwulan 4 yakni sebanyak 8 puskesmas; selain itu ada ibu yang masih melahirkan tidak di sarana dan prasarana yang memadai.
3) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 91,39%;
4) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : 94%
5) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 89,63%;
   Rendahnya capaian ini dikarenakan dari target yang ditetapkan tidak semuanya akses ke fasyankes, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya

kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin (check up berkala), sementara dari yang tercakup selama ini kebanyakan dari orang yang berkunjung dengan alasan lain atau sakit lainnya.

6) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 86,80%;

4. Implikasi yang timbul terhadap capaian program dan kegiatan sesuai indikator

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan: Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah :

1) Masih dimungkinkan adanya kematian ibu dan bayi karena pertolongan persalinan tidak pada sarana daan prasarana yang memadai dimana masih ada ibu yang bersaalin dirumah.
2) Masih dimungkinkan rendahnya kunjungan penderita Hypertensi ke fasyankes karena gangguan social.
3) Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV karena masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala, dan adanya dampak atas diskriminasi sosial masyarakat.

5. Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

1). Melakukan sosialisasi terkait gangguan social yang ada dan yang mungkin timbul serta cara menghadapinya dengan harapan dapat meningkatkan atensi masyarakat untuk akses ke fasyankes yang ada.
2). Melakukan sosialisasi terkait penyakit tertentu yang timbul terutama pada usia produktif dan pada usia lanjut.
3). Mengintensifkan kegiatan Good Pagi dengan melibatkan puskesmas dan dinas kesehatan secara rutin dan berkala.
4). Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas.
5). Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentang akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial warga terhadap akses

pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal HealthCoverage (UHC).

Sementara untuk Capaian sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 sesuai dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang sudah tercapai.

   Dari ke 12 Indikator yang ada yang dianggap sudah mencapai target adalah capaian sama atau diatas 25% yakni sebanyak 10 indikator antara lain :

   1). Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : 26,44%;
   2). Pelayanan Kesehatan Balita : 48,12%;
   3). Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar : 38,30%;
   4). Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : 36,37%)'
   5). Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : 58,94%;
   6). Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi : 34,33%;
   7). Pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus : 45,92%;
   8). Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan gangguan Jiwa Berat : 54,79%;
   9). Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB. : 36,22%;
   10). Pelayanan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV.: 31,30%).

2. Indikator yang belum tercapai.

   Indikator yang belum tercapai sebanyak 2 (dua) indikator yakni :

   1). Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : 23,63%;
   2). Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin : 22,99%;

3. Faktor Penyebab tidak tercapainya target indikator

   Dari capaian yang diperoleh tidak terdapat 2 (dua) indikator masih dibawah target yakni

   1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;

      Masih rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih beberapa ibu hamil terutama pada kehamilan trimester pertama yang enggan memeriksakan kehamilan ke sarana kesehatan karena ketidaktahuan ibu akibat kehamilan yang tidak direncanakan, bahkan kehamilan diluar nikah.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

Masih rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih beberapa ibu melahirkan dirumaah akibat terlaambat dalam mengambil keputusan untuk persalinan disarana kesehatan yang memadai.

4. Implikasi yang timbul terhadap capaian program dan kegiatan sesuai indikator

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan: Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan antara lain adalah :

a. Masih dimungkinkan rendahnya kunjungan ibu hamil ke fasyankes ;
b. Dimungkinkan masih rendahnya cakupan pelayanan persalinan karena masih masih beberapa keluargaa yang tidak terjangkau jampersal serta kebiasaan masyarakat yeng menunggu keputusan keluarga.

5. Rencana Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

a. Melakukan sosialisasi terkait tanda-tanda kehamilan.
b. Mengintensifkan kegiatan Good Pagi dengan melibatkan puskesmas dan dinas kesehatan secara rutin dan berkala.
c. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas.
d. Membangun komitmen bersama terutama pemerintah tentang akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC).

Selanjutnya capaian kinerja dan realisasi keuangan untuk masing- masing program sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini terdiri dari 7 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.55.657.503.788,50- dan realisasi keuangan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 adalah sebesar Rp. 13.736.330.664.-atau sebesar 24,66%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.36.644.075.652- dan realisasi keuangan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 adalah sebesar Rp.57.600.000.- atau sebesar 6,32%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
   Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.1.226.152.030..-. dan realisasi keuangan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 adalah sebesar Rp.0.-. atau sebesar 0%.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.416.298.200..- dan realisasi keuangan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 adalah sebesar Rp.0 atau sebesar 0,00%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.1.208.273.970.-. dan realisasi keuangan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 adalah sebesar Rp.121.600.000. atau sebesar 19,13%.

Secara keseluruhan capaian realisasi keuangan terhadap program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 adalah sebesar 14,62%.,dimana sesuai Skala Pengukuran Kinerja masih termasuk dalam kategori “kurang”.

Masih rendahnya realisasi capaian keuangan ini disebabkan oleh beberapa kegiatan fisik yang sedang berjalan dimana masih belum dilakukan pentahapan pencairan keuangan.

Rincian realisasi program dan kegiatan serta capaian keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada table 2.1.

A. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan maka secara umum kinerja Dinas Kesehatan 2025 sampai triwulan 1 cukup bagus karena secara pencapaian berdasarkan waktu dengan persepsi capaian 25% pada triwulan pertama dimana dari 12 (dua belas) Indikator SPM yang ada hanya 2 indikator yang capaiannya masih dibawah 25% yakni Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sebesar 23,63%, dan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian sebesar 22,99 %.

Sementara Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dengan mengacuh pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026, yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2024 ini antara lain aspek kesejateraan, kesehatan dan aspek pelayanan umum, belum menunjukan pencapaian karena belum ada laporan hasil capaian sampai dengan Juni 2024. Sementara analisis terhadap program dan kegiatan bahkan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD belum maksimal menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk mewujudkan *Visi "Lembata Yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan".*

Secara umum dapat dikatakan bahwa belum tercapainya cakupan pelayanan kesehatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM-Kesh) belum memenuhi standar diseluruh fasilits pelayanan kesehatan yang ada.

   Terkait dengan sumber daya kesehatan dimana kompetensi sumber daya manusia aparatur kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan teknis yang dimiliki sudah memadai tetapi secara kuantitas berdasarkan rasio sarana kesehatan yang ada masih kurang, sehingga penyebaran tenaga kesehatan belum bisa dialokasikan secara merata pada sarana kesehatan yang ada baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes maupun polindes yang ada.

Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan kompetensi dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional sangat dibutuhkan disesuaikan dengan perkembangan penyakit dan kompleksitas masalah kesehatan juga terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya dapat terpenuhi standarisasi sumber daya manusia kesehatan yang selanjutnya dapat mendukung pelaksanaan fungsi puskesmas dalam melakukan pelayanan. Selain itu rekruitmen dan penempatan tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan jumlah sarana kesehatan yang ada serta, jumlah dan tingkat persebaran penduduk di masing – masing wilayah.

2. Rendahnya sinergisitas antara bidang di Dinas Kesehatan dan dengan sector terkait lainnya.

   Sistim koordinasi yang baik sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian suatu program dan atau kegiatan baik koordinasi internal dinas kesehatan dalam hal ini koordinasi antar bidang maupun koordinasi lintas sektor terkait.

   Untuk merealisasikan kerja sama ini perlu dilakukan penggalangan komitmen lintas bidang dan lintas sector terkait, dalam bentuk perjanjian kerja sama melalui ***"Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda)"*** yang idealnya dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yakni sebelum penyusunan Rencana Kerja dan pada akhir pelaksanaan Rencana Kerja sebagai evaluasi kegiatan terkait.

   Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah untuk membagi kewenangan dan pertimbangan beban alokasi anggaran dalam upaya pencapaian suatu program dan atau kegiatan sehingga lebih terinci peran dan fungsi masing – masing bidang ataupun sector terkait.

3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi kesehatan

   Data dan informasi kesehatan sangat penting dan harus digunakan sebagai alat evaluasi kinerja kesehatan berdasarkan periodesasi waktu dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan suatu kegiatan baik dasi segi implemantasi maupun dari besaran

anggaran. Ketika data dan informasi terpola dalam sistim pelaporan tertentu maka nilai data dan informasi ini sangat ditentukan oleh waktu.

Secara umum kurang ketersediaan data dan informasi yang valid dipengaruhi oleh lemahnya managemen data terkait pencatatan, pelaporan, pendistribusian dan pendokumentasian, baik di puskesmas dan jaringan maupun di Dinas kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan managemen data yang baik melalui peningkatan pengetahuan dan keahliaan terkait pengelolaan data untuk menjadi informasi yang baik dan benar serta sesuai dengan periodesasi waktu yang ditentukan. Selain itu perlu dukungan Model Sistim Informasi Kesehatan yang memadai dan terus berkembang serta alat pendukung pelaksanaan model Sistim Informasi Kesehatan dimaksud; dimana rencana kedepannya akan dikembangkan ***"Rekam Medik Elektronik (RME)"*** untuk puskesmas sehingga semua kegiatan akan terangkum dalam satu model pencacatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan ***"SATU SEHAT"***

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dan juga Dinas Kesehatan.

   Dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai terlebih yang memenuhi standar tidak hanya berpatokan pada kebutuhan puskesmas tetapi lebih pada sejauh mana peran dan fungsi puskesmas tersebut.

   Begitu juga pada tingkat Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes. berupa peralatan kesehatan yang sesuai standar guna mendukung pelaksanaan pelayanan di puskesmas dan jaringannya.

Beberapa hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas kesehatan perlu mendapat perhatian khusus sehingga upaya peningkatan pada beberapa aspek tersebut menjadi komitmen dan prioritas pada tahun 2025.

Capaian kinerja program tahun 2024 secara keseluruhan jika dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan tahun 2024 berimbang. sementara berdasarkan Indikator Standar Pelayanan

Minimal sampai triwulaan 1 tahun 2025 ada 10 (sepuluh) indikator yang sudah mencapai target namun 2 (dua) indikator masih belum mencapai target, dengan kategori indeks pencapaian sebesar 39,37% dimana jika dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 14,62%, maka kinerja pencapaian indikator SPM masih lebih tinggi atau lebih baik.

B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dari hasil analisis kinerja Dinas Kesehatan 2024, dan pencapaian sampai triwulan ke satu tahun 2025 maka dapat dikemukakan isi-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Puskesmas dalam mendukung upaya promotif dan preventif belum terimplementasi secara maksimal dalam pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga (Goog Pagi / PIS PK);
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelayanan kesehatan belum dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada pemerataan dan penempatan belum sesuai dengan standar kebutuhan;
3. Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal dalam keterkaitan dengan pemenuhan standar dimana sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat;
4. Rendahnya pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas yang berdampak pada rendahnya Mutu Pelaksanaan Akreditasi Puskesamas, dimana menjadi determinan utama peningkatan fungsi puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah / BLUD Puskesmas.
5. Belum optimalnya hasil pemantauan dan evaluasi program kesehatan sebagai tolok ukur indikator keberhasilan / kinerja pembangunan kesehatan;
6. Belum adanya indicator untuk mengukur kinerja di daerah (yang dipakai selama ini adalah indikator SPM yang merupakan indikator nasional), dimana ada beberapa target dari indikator tersebut belum sesuai dengan kondisi di daerah;

7. Masih kurang tersedianya data dan informasi kesehatan baik sebagai alat evaluasi kinerja maupun sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, dimana hal ini disebabkan masih lemahnya managemen data terkait pencatatan, pelaporan, dan distribusi, baik di tingkat dinas kesehatan maupun di Puskesmas dan jaringannya;

8. Rendahnya sinergisitas dalam upaya pencapaian program pembangunan kesehatan, baik dengan sektor terkait maupun antara program di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;

9. Alokasi dana bidang kesehatan belum diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif dan belum diarahkan untuk pencapaian prioritas program tertentu.

C. Review Terhadap RKPD.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Kesehatan yakni perencanaan pembangunan kesehatan daerah maka intervensi dan implementasi upaya kesehatan tahun 2025 yang relevan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kesehatan yakni "Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat dari terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat."

Partisipasi masyarakat serta sarana dan prasaran pendukung sangat diperlukan dalam proses pembangunan bidang kesehatan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunan kesehatan. Namun disisi lain Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertugas mengintegrasikan seluruh perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lembata baik antar program, antar urusan maupun antar perangkat daerah terkait, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan peningkatan pelayanan Kesehatan.

Dari uraian tersebut tugas Dinas Kesehatan pada tahun 2025 sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari

kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 anggaran yang dialokasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata sebesar *Rp.95.198.249.780,50..-*.

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas serta ketepatan program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2025 harus benar sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat dilaksanakan sesuai tahapan atau periode waktu. Untuk itu Dinas Kesehatan wajib membuat suatu prioritas program dan atau kegiatan sesuai masalah yang ada yang disinkronkan dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPD

Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Bahwa dalam proses penyusunan RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Bahwa penyusunan Renja tetap menyesuaikan RKPD dimana terkait dengan program dan kegiatan serta perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2025 sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Lembata tahun 2025.

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat, sektor terkait maupun Lembaga mitra lainnya melalui Musrenbang Kecamatan untuk diakomodir melalui Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, lebih berfokus pada kegiatan pendukung peningkatan pelayanan kesehatan khususnya sarana prasarana dan peralatan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara untuk kegiatan rutin tetap menjadi kegiatan wajib yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Selanjutnya Dinas Kesehatan wajib berkomitmen untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan bidang kesehatan demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melakukan memperhatikan rencana program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, LSM, stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dengan tetap mengacuh pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026.

Selain usulan masyarakat, penting juga mengakomodir kegiatan yang menjadi perhatian pihak lain, yang dianggap berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, dimana hal ini juga merupakan komitmen nasional yang didukung Lembaga Donor yang konsen terhadap peningkatan upaya kesehatan tertentu antara lain komitmen percepatan penurunan Stunting, dan penyakit tertentu seperti Aids, Tubercolosis dan Malaria (ATM).

Bahwa pada dasarnya semua usulan kegiatan masyarakat, LSM, maupun Stakholder terkait lainnya tetap diterima sebagai masukan dan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan tahun 2024, yang diurutkan berdasarkan prioritas dimana program dan kegiatan yang belum terakomodir akan dijadi prioritas pertama pada perencanaan tahun berikutnya dengan tetap menyesuaikan pada menu kementerian kesehatan untuk sumber anggaran dari pusat.
Sementara program dan kegiatan rutin pada Dinas Kesehatan tetap direncanakan sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 – 2029.

Kebijakan umum pembangunan kesehatan sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah Menjamin Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk disetiap kelompok dan wilayah melalui penguatan transformasi sistim kesehataan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, dengan Strategi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis sebagai berikut:

a. Strategi

Dalam upaya merealisasikan kebijakan umum pembangunan kesehatan tahun 2025-2029 maka strategi yang diambil antara lain :

1) Penguatan Transformasi layanan Primer melalui promosi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat disetiap siklus hidup;

2) Penguatan Transformasi layanan Primer melalui kolaborasi pentahelix untuk meningkatkan gaya hidup sehat;

3) Penguatan Transformasi layanan Primer dan lanjutan serta SDM Kesehatan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan;

4) Penguatan Transformasi sistim ketahanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman kesehatan;

5) Penguatan Transformasi pendanaan kesehatan dan tatakelola pemerintahan sektor kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan;

6) Penguatan Transformasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang eficien, terjangkau, dan inklusif;

7) Peningkatan Transformasi Internal Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya transformasi kesehatan.

b. Tujuan Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI 2025–2029 adalah

1) Masyarakat sehat disetiap siklus hidup;
2) Masyarakat berperilaku hidup sehat;
3) Layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau;
4) Sistim ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
5) Tatakelola dan Pendanaan Kesehataan yang efektif;
6) Teknologi kesehatan yang maju;
7) Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi Learning Organition.

c. Sasaran Strategis *pembangunan kesehatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan RI. tahun 2025–2029* adalah :

1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak dan usia dewasa daan lansia;
2) Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
3) Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat;
4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes;
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan;
6) Meningkatnya Kualitas sistim ketahanan kesehatan;
7) Meningkatnya keselarasana kebijakan dan prioritas bidang kesehataan antara pemerintah pusat dan daerah;
8) Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan;
9) Meningkatnya kualitas ekosistim Teknologi kesehatan;
10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji klinis;
11) Meningkatnya kualitas tatakelola Kementerian Kesehatan

2. Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026

a. Strategi

Agar pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna

maka strategi utama pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Penanganan stunting dan percepatan dan penurunan AKI / AKB;
2) Penguatan Pelayanan Kesehatan;
3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
4) Peningkatan Pengendalian Penyakit, baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi;
5) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6) Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

b. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mendukung strategi sesuai dengan rencana pembangunan kesehatan Propinsi NTT adalah

1) Peningkatan kemampuan puskesmas;
2) Peningkatan akses, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3) Peningkatan sistim informasi kesehatan daerah, surveilans, monitoring dan evaluasi terpadu;
4) Pengembangan dan pemantapan kelangsungan pembiayaan dan pemeliharaan sistem jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
5) Pemenuhan jumlah, mutu, jenis dan penyebaran kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan jejaringnya termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
6) Pemenuhan ketersediaan, mutu, dan keamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
7) Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diPosyandu, UKS dan Desa Siaga serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dan Kadarzi;
8) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya ;

9) Peningkatan kualitas koordinasi lintas program dan sektor untuk perbaikan gizi masyarakat, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, peningkatan promosi dan pendidikan kesehatan.
10) Pengembangan jejaring kerjasama antar daerah dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama masalah kesehatan lintas wilayah;
11) Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan;
12) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, penanggulangan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan;
13) Mengupayakan adanya regulasi yang mendukung upaya-upaya bidang kesehatan, termasuk pembinaan dan pemberian perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta;
14) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai;
15) Peningkatan pelayanan kesehatan komunitas, kesehatan matra, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan khusus, dan kesehatan haji serta pemerataan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTP).

c. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kesehatan Provinsi NTT adalah meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

d. Sasaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di NTT maka sasaran tujuh Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan..

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Kabupaten Lembata

1. Tujuan

   Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

   a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
   b. Penguatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan;

2. Sasaran

   Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah:

   a. Meningkatanya Status Kesehatan Masyarakat;
   b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat;
   c. Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar;
   d. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap sarana, prasarana obat dan vaksin, perbekalan dan alat kesehatan.

Dalam upaya merealisasikan visi daerah terutama dibidang kesehatan dan mendukung pencapaian sasaran upaya kesehatan sesuai Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, maupun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025–2029, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menetapkan Strategi dan Kebijakan antara lain :

1. Strategi

   a. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
   b. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
   c. Meningkatkan Upaya Perbaikan Status Gizi Masyarakat;

d. Meningkatkan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas melalui Rekruitmen, Distribusi secara proporsional;
f. Melakukan Penguatan Peraturan Perundangan dalam Aspek Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kompetensi dan Lisensi SDM Kesehatan serta Penerapannya;
g. Meningkatkan sinergisitas lintas program dan sector serta kerjasama kemitraan melalui external agency;
h. Meningkatkan Managemen Sistim Informasi Kesehatan (SIK) secara elektronik.

2. Kebijakan

Selain strategi yang diambil dinas kesehatan juga menetapkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan sesuai sasaran guna merealisasikan Visi daerah, dengan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan KIA KB dalam akselerasi untuk menurunkan AKI, AKB;
b. Perbaikan gizi masyarakat;
c. Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit;
d. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
e. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta optimalisasi sistim rujukan serta peningkatan fungsi dan pengembangan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
f. Penguatan Sinergisitas lintas program dan lintas sector serta kerjasama kemitraan melalui external agency;
g. Pengembangan Managemen Sistim Informasi Kesehatan (SIK) secara elektronik dan pengadaan unit pendukungnya.

Selanjutnya dapat dilihat sinkronisasi tujuan dan sasaran antara Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2025–2029 dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur 2024–2026 sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Tujuan
    a. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2025 dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2025–2029 dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2024-2026.

       Dari 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2025 Semuanya sinkron dengan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi dan Renstra Kementerian Kesehatan

2. Sinkronisasi Sasaran
    a. Adanya sinkronisasi antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2025 dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 – 2029 dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2024 – 2026.

       Dari 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2025 Semua sasaran sinkron dengan sasaran yang termuat dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Propinsi Tahun 2024-2026 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

BAB. IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun anggaran 2025, dinas kesehatan kabupaten lembata akan melaksanakan 5 (lima) program dan 18 (delapana belas) kegiatan serta 70 (tujuh puluh) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.*85.591077.764.*-, dimana masing–masing program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten dengan pagu sebesar Rp.54.795.994.107.,
   a. Tujuan Program
      Meningkatkan Pelayanan Administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah
   b. Sasaran Program
      Meningkatnya cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah
   c. Target
      Target cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran sebanyak 70 Dokumen.
   d. Kegiatan
      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp.28.146.578.934.-,
   a. Tujuan Program
      Meningkatnya usia harapan hidup
   b. Sasaran Program
      Meningkatnya usia harapan hidup.
   c. Target
      Target usia harapan hidup untuk Kabupaten Lembata tahun 2022 adalah sebesar 68 tahun

d. Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten, Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten, Penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas layanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.1.231.652.030.,

a. Tujuan Program

Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan.

b. Sasaran Program

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

c. Target

Target meningkatnya kapasitas SDM di 9 puskesmas

d. Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten, dan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten.

4. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan pagu sebesar Rp.416.298.200.,

a. Tujuan Program

Menyediakan Obat dan Vaksin di puskesmas sesuai kebutuhan

b. Sasaran Program

Tersedianya obat dan faksin di puskesmas

c. Target

Target yang ingin dicapai adalah sebesar 93 %;

d. Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Pemberian ijin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional, kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah tangga, dan

kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan pagu sebesar Rp.1.000.554.493.-
   a. Tujuan Program
      1) Jumlah Media Promkes yang diadakan
      2) Terlaksananya Gerakan Masyarakat sehat dan PHBS
   b. Sasaran Program
      1) Jumlah Media Promkes yang diadakan
      2) Terlaksananya Gerakan Masyarakat sehat dan PHBS
   c. Target

      Target yang ingin dicapai adalah
      1) 81 buah
      2) 9 puskesmas
   d. Kegiatan

      Kegiatan yang mendukung program ini antara lain kegiatan Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten, Pelaksanaan sehat dalam rangka promosif, preventif tingkat daerah kabupaten, dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat tingkat daerah kabupaten.

Uraian rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1.

BAB. V
PENUTUP

Tugas dan fungsi serta kedudukan Dinas Kesehatan selaku unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan. Dengan demikian agar tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik maka Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 wajib untuk dipedomani oleh setiap unsur yang melakukan pelayanan kesehatan di kabupaten Lembata baik bidang dan sekretariat di Dinas Kesehatan, puskesmas dan Jaringannya.

Agar optimal dalam pelaksanaannya maka hal-hal berikut harus diperhatikan antara lain:

1. Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dengan berkonsultasi pada PPTK masing–masing yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi dalam kaitan dengan penyusunan RAPBD Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKA untuk setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada dokumen antara lain :
   a. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2017- 2025;
   b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026;
   c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata,

dr. Goerilya A.Huar Noning
Pembina Tingkat I
NIP. 19741114 200604 1008

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya

saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar Sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan Sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang perbenihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4079, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4663);
9. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Profinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 75);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025);
22. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025.
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
3. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaiamana tersaji pada table berikut ini.

Berdasarkan table diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
   Masalah : Adanya penyesuaian belanja bahan lainnya dan belanja sosialisasi yang mendukung pangan lokal yakni Cabe Lestari.
   Solusi : Percepatan belanja bahan/alat dan sosialisasi pangan local.
2) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
   Masalah : Belum dilaksanakannya Sosialisasi dan Penyusunan Peta FSVA.
   Solusi : Percepatan Sosialisasi dan Penyusunan Peta FSVA.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   Masalah : Belum terealisasinya belanja bahan dan belanja mobilisasi jagung mendukung ketahanan pangan.
   Solusi : Percepatan belanja dan realisasi keuangan triwulan III dan IV.
4) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
   Masalah :Belum terealisasinya belanja bahan uji keamanan pangan segar, belanja uji laboratorium dan pengiriman sampel uji LAB.
   Solusi : Percepatan belanja dan realisasi keuangan triwulan III dan IV.
5) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
   Masalah :
   a) Belum terealisasinya belanja hibah yakni hibah Pekarangan Pangan Lestari (penumbuhan) yang bersumber dari Dana Non Fisik.
   b) Belum terealisasinya belanja bibit tanaman yakni Bawang tuk-tuk dan Bawang umbi.

   Solusi : Percepatan kontrak/belanja dan realisasi keuangan di triwulan III dan IV.

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Masalah :

a) Belum terealisasinya belanja bahan kimia yakni Pupuk GDM untuk pengembangan tanaman tembakau.
b) Belum terealisasinya belanja bibit tanaman tembakau .

Solusi : Percepatan realisasi belanja di triwulan III dan IV.

7) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

Masalah :

a) Adanya penyesuaian belanja mengikuti JUKNIS DAK Fisik.
b) Menunggu penyaluran Dana DAK Fisik dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Solusi : Percepatan penyesuaian belanja dan realisasi keuangan di triwulan III dan IV.

8) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingakat Kabupaten/ Kota.

Masalah :

a) Belum terealisasinya belanja Bahan Kimia yakni SL Pengembangan kacang hijau, SL Pelatihan komoditi kelapa, SL Jagung asep dan SL Asmarah.
b) Belum terealisasinya belanja Bibit tanaman yakni SL Pengembangan kacang hijau, SL Pengembangan ubi kayu, SL Jagung asep dan SL Asmarah.
c) Belum terealisasinya belanja bahan- bahan lainnya yakni bahan pendukung SL Asmarah.
d) Penyesuaian belanja pakan ternak Ayam dan Babi.

Solusi : Percepatan pekerjaan / kontrak, sehingga dapat mempercepat realisasi keuangan di triwulan III dan IV.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa Sub Kegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendasar yaitu :

1. Penyesuaian PAD
2. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Silpa Tahun 2024
3. Penyesuaian Dana Insentif Fiskal,
4. Penyesuaian dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029
5. Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD, pengahapusan Sub Kegiatan , kegiatan dan penyesuaian terget kinerja, serta penyesuaian gaji dan tunjangan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Plt. Kepala Dinas,

Muktar Hada, SP.

Pembina

NIP. 19740515 200012 1 005

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025
TRIWULAN II

No	Tujaun/Sasaran		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2025(%)	
												I		II		III		IV							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	1		2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5x100%	
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						100	18.638.466.398	98,20	17.108.767.798	100	23.560.112.359	4	3.756.846.330	-	4.184.094.394	-	-	-	-	4	7.940.940.724	102	25.049.708.522	102	134,40
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100	205.757.681	10	188.137.100	50	913.179.315	-	-		-		-		-	-	-	10	188.137.100	10	91,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						100	205.757.681	10	188.137.100	60	913.179.315	-	-		-		-		-	-	-	10	188.137.100	10	91,44
1	Tujuan ; Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat berkelanjutan. Sasaran; Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	90	132.635.281	-	-	90	855.115.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Persentase	90	132.635.281	-	-	90	855.115.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2.09.03.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	12	90.660.181	9	88.502.325	4	535.741.215	-										9	88.502.325	75	97,62
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	12	12.720.800	3	5.480.000	4	10.155.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.480.000	25	43,08
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	12	29.254.300	9	34.025.000	4	16.763.550	-										9	34.025.000	75	116,31
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang di kembangkan	Unit	4	-	-	-	1,00	292.455.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan**	**Laporan**	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Laporan	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**Persentase**	**60**	**38.707.900**	**70**	**188.137.100**	**60**	**30.877.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**	**188.137.100**	**116,67**	**486,04**
		2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase**	**60**	**38.707.900**	**70**	**31.237.500**	**60**	**30.877.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70**	**31.237.500**	**116,67**	**80,70**
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis Ketahaan dan Kerentanaan Pangan yang di Muktahirkan	Dokumen	2	38.707.900	1	32.163.400	2	30.877.800	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	32.163.400	50	83,09
3		**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persentase**	**90**	**34.414.500**	**-**	**-**	**90**	**27.185.550**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persentase**	**90**	**34.414.500**	**-**	**-**	**90**	**27.185.550**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-

		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	9	34.414.500	3	1.871.000	12	27.185.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.871.000	33	5,44
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						**100**	**18.432.708.717**	**85,00**	**16.920.630.698**	**50**	**22.646.933.044**	4	**3.756.846.330**	**-**	**4.184.094.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**7.940.940.724**	**89**	**24.861.571.422**	**89**	**134,88**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**100**	**18.432.708.717**	**119,00**	**16.920.630.698**	**50**	**22.646.933.044**	4	**3.756.846.330**	**-**	**4.184.094.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**7.940.940.724**	**123**	**24.861.571.422**	**123**	**134,88**
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**15.122.464.843**	**100**	**13.335.236.963**	**100**	**14.756.329.430**	4	**3.756.846.330**		**3.722.109.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**7.478.955.724**	**104**	**20.814.192.687**	**104**	**137,64**
		3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12.880.500**	**12**	**41.252.810**	**12**	**6.438.600**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	**12**	**41.252.810**	**100**	**320,27**
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2.771.800	3	515.500	8	1.385.750	-				-	-	-	-	-	-	3	515.500	50	18,60
		3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.670.050	-	889.940	1	834.100	-		-		-	-	-	-	-	-	-	889.940	-	53,29
		3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.711.950	-	515.500	1	1.355.900	-		-		-	-	-	-	-	-	-	515.500	-	19,01
		3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.523.300	-	-	1	761.350	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.578.200	-	515.500	1	1.289.050	-		-		-	-	-	-	-	-	-	515.500	-	19,99

		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1.625.200	-	400.000	2	812.450	-		-		-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	24,61
		3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**14.847.194.952**	**100**	**12.396.007.622**	**100**	**14.557.715.009**	-	**3.756.846.330**		**3.680.402.020**	-	-	-	-	-	**7.437.248.350**	**100**	**19.833.255.972**	**100**	**133,58**
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	14	14.671.241.052	3	3.065.049.685	14	14.383.590.309	8	3.756.846.330	-	3.596.148.020	-	-	-	-	8	7.352.994.350	11	10.418.044.035	79	71,01
		3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	172.296.000	3	56.960.000	12	172.296.000	6	-	-	84.254.000	-	-	-	-	6	84.254.000	9	141.214.000	75	81,96
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.504.850	-	400.000	1	752.300	-	-			-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	26,58
		3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	2.153.050	6	400.000	18	1.076.400	10	-	-		-	-	-	-	10	-	16	400.000	89	18,58
		3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**Laporan**	**4**	**33.631.800**	**6**	**12.027.900**	**4**	**32.245.750**	-	-		**15.255.000**	-	-	-	-	-	**15.255.000**	**6**	**27.282.900**	**150**	**81,12**
		3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2.771.800	1	307.900	2	1.385.750	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	307.900	50	11,11
		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	30.860.000	1	11.720.000	2	30.860.000	-	-	-	15.255.000	-	-	-	-	-	15.255.000	1	26.975.000	50	87,41
		3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Penataan Pegawai Perangkat Daerah**	**Laporan**	**4**	**2.331.050**	**2**	**2.949.000**	**1**	**1.165.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	**2.949.000**	**50**	**126,51**

		3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	2.331.050	-	285.000	1	1.165.500	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	285.000	-	12,23
		3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Penataan aktivitas sumber daya perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**81.962.544**	**100,00**	**111.884.230**	**100**	**41.984.462**	-	**-**	**-**	**7.730.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.730.000**	**100**	**119.614.230**	**100**	**145,94**
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.620.800	-	1.720.095	1	2.620.800	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.720.095	-	65,63
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	14.254.744	-	4.803.242	1	7.126.512	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4.803.242	-	33,70
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.060.000	-	-	1	3.017.150	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	59.027.000	4,00	78.218.700	1	29.220.000	-	-		7.730.000	-	-	-	-	-	7.730.000	4	85.948.700	400	145,61
		3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**25**	**-**	**-**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	-	3,00	-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	3	-	150	-
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-

		3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**25**	**67.948.997**	**12**	**511.566.700**	**12**	**65.597.109**	-	-		**3.393.800**	-	-	-	-	-	**3.393.800**	**12**	**514.960.500**	**48,00**	**757,86**
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.862.000	12	476.820.000	12	6.646.500	-		-	700.000	-	-	-	-	-	700.000	12	477.520.000	100	6.073,77
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	57.589.800	12	32.251.700	12	57.589.800	-		-	2.693.800	-	-	-	-	-	2.693.800	12	34.945.500	100	60,68
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.497.197	12	2.495.000	1	1.360.809	-	-			-	-	-	-	-	-	12	2.495.000	1.200	99,91
		3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**76.515.000**	**100**	**216.131.651**	**100**	**51.183.000**	-	-		**15.328.574**	-	-	-	-	-	**15.328.574**	**100**	**231.460.225**	**100,00**	**302,50**
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	63.840.000	38	180.171.151	34	44.850.000	-		-	15.328.574	-	-	-	-	-	15.328.574	38	195.499.725	110	306,23
		3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		-	1	2.000.000	1	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	2.000.000	-	-
		3.27.01.2.09.0009	3.27.02.2.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.675.000	1	-	1	6.333.000	-	-	-		-		-		-	-	1	-	100	-
		3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	1	33.960.500	1	-	-	-	-		-		-	-	-	-	1	33.960.500	100	-

		3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Tujuan ; Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya Pertanian sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran ; Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani**	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Sektor Pertanian**	**Ton**	**80.900**	**797.174.250**	**76.383**	**1.072.428.000**	**76.200**	**1.028.656.750**	-	-		**37.100.000**	-	-	-	-	-	**37.100.000**	**76.383**	**1.109.528.000**	**94,42**	**139,18**
		3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Komoditi**	**2**	**723.959.000**	**4**	**1.054.763.000**	**2**	**170.266.750**	-	-		**2.600.000**	-	-	-	-	-	**2.600.000**	**4**	**1.057.363.000**	**200,00**	**146,05**
		` 3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	723.959.000	8	1.054.763.000	9	170.266.750	-	-	-	2.600.000	-	-	-	-	-	2.600.000	8	1.057.363.000	400	146,05
		3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Dokumen**	**9**	**73.215.250**	**6**	**17.665.000**	**9**	**172.324.750**	-	-		**19.500.000**	-	-	-	-	-	**19.500.000**	**6**	**37.165.000**	**66,67**	**50,76**
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	9	73.215.250	9	17.665.000	9	172.324.750	-	-	-	19.500.000	-	-	-	-	-	19.500.000	9	37.165.000	100	50,76
		3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**Ton/Ekor**	**5**	-	-	-	-	**686.065.250**	-	-	-	**15.000.000**	-	-	-	-	-	**15.000.000**	-	**15.000.000**	-	-
		3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain,	Ekor	5	-	-	-	50	686.065.250	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-
5		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi sektor pertanian**	**Ton**	**80.900**	**695.761.284**	**76.383**	**454.117.440**	**76.200**	**4.999.691.881**	-	-		**225.850.000**	-	-	-	-	-	**225.850.000**	**76.383**	**679.967.440**	**94,42**	**97,73**

		3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Meningkatanya Prasarana Pertaniaan**	**Ha**	**12**	**695.761.284**	**11**	**454.117.440**	**3**	**352.893.960**	-	-		**225.850.000**	-	-	-	-	-	**225.850.000**	**11**	**679.967.440**	**91,67**	**97,73**
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	-	81.242.000	-	-	5	81.242.000	-			23.800.000,00							-	-	-	-
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola	Dokumen	3	614.519.284	4	454.117.440	9	271.651.960	-	-	-	202.050.000	-	-	-	-	-	202.050.000	4	656.167.440	133	-
		3.27.03.2.02	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Unit**	**6**	-	-	-		**4.646.797.921**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		3.27.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	-	-	-	121	849.838.230	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		3.27.03.2.01.0005	Pengendaluian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit					63	563.927.250														
		3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura uyang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1				1	495.813.126														
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prtasarana Pertranian Lainnya	Jumlah PrasaranaPertanian Lainnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					14	1.907.150.526														
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan ,Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.	Jumlah Rumah Potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipeliharan serta beroperasi	unit	1				1	193.328.000														
			Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan penggembalaan umum yang dikelola	Ha	4				4	636.740.789														

6		**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**persentase**	**100**	**176.946.100**	**100**	**170.683.600**	**100**	**655.435.273**	-	-	-	**1.060.000**	-	-	-	-	-	**1.060.000**	**100**	**171.743.600**	**100,00**	**97,06**
		3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terjaminya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Laporan**	**12**	**176.946.100**	**9**	**170.683.600**	**9**	**655.435.273**	-	-	-	**1.060.000**	-	-	-	-	-	**1.060.000**	**9**	**171.743.600**	**75,00**	**97,06**
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	176.946.100	9	170.683.600	9	655.435.273	-	-	-	1.060.000	-	-	-	-	-	1.060.000	9	171.743.600	75	97,06
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Laporan**	**12**	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
7		**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan**	**persentase**	**100**	**29.542.100**	**100**	**22.562.650**	**100**	**14.770.550**	-	-	-	**175.000**	-	-	-	-	-	**175.000**	**100**	**22.737.650**	**100,00**	**76,97**
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendaliaan dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Ha**	**90**	**29.542.100**	**90**	**22.562.650**	**90**	**14.770.550**	-	-	-	**175.000**	-	-	-	-	-	**175.000**	**90**	**22.737.650**	**100,00**	**76,97**
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Orgnisme Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	90	29.542.100	90	22.562.650	90	14.770.550	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	175.000	90	22.737.650	100	76,97
8		**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**Dokumen**	**2**	-	-	-		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

		3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Izin Usaha Pertanian/Peternakan**	**Dokumen**	**2**	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
9		**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**Persentase**	**100**	**1.610.820.140**	**100**	**1.865.602.045**	**100**	**1.192.049.160**	-	-	-	**197.800.000**	-	-	-	-	-	**197.800.000**	**100**	**2.063.402.045**	**100,00**	**128,10**
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani**	**Gapoktan**	**22**	**1.610.820.140**	**20**	**1.865.602.045**	**20**	**1.192.049.160**	-	-	-	**197.800.000**	-	-	-	-	-	**197.800.000**	**20**	**2.063.402.045**	**90,91**	**128,10**
		3.27.07.2.01.0001	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	9	-	9	103.500.000	84	576.024.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	9	103.500.000	100	-
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	9.220.140	4	5.975.000	9	379.609.660	-			25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	4	30.975.000	200	335,95
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingakat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	9	1.601.600.000	10	1.756.127.045	9	236.415.500	-		-	172.800.000	-	-	-	-	-	172.800.000	10	1.928.927.045	111	120,44
												-														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**18.638.466.398**	**98,20**	**17.108.767.798**	**100**	**23.560.112.359**	-	**3.756.846.330**	-	**4.184.094.394**	-	-	-	-	-	**7.940.940.724**	**98**	**25.049.708.522**	**98,20**	**134,40**

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERINDAG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Dinas Kopersi, Perindustian dan perdagangan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar Sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan Sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Dinas Kopeasi, Perindutrian dan Perdagangan digunakan sebagai pedoman dalammenyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas koperasi Perindutrian dan Perdagangan Tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);
11. Peratuaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Lembata Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Nomor …. Tahun 2023 tentang Perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor
21. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor
22. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah dan unit kerja

dibawahnya pada dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten lembata.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Perindutrian dan Perdagangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah.

Tujuan penysunan Renja Dinas Koperasi, perindutrian dan Perdagangan Tahun 2023 adalah

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Perindutrian dan Perdagangan Tahun 2025
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
3. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV. PENUTUP
Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaiamana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel…….(lihat tabel evaluasi Renja Triwulan II 2025)

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan yaitu :

1. Hamper semua sub kegiatan belum mencapai 30% disebabkan masih penyesuaian Sumber Dana.

   Solusi :

   1. Diharapkan kedepannya sumber dana dapat dianggarkan sesuai dengan dengan aturan yang berlaku.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 menunjukan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa Sub Kegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendasar yaitu :

1. Penyesuaian PAD
2. Pemyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Silpa Tahun 2025
3. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah baik transfer berupa, DAU, DAK, DBH maupun transfer Propinsi
4. Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD, pengahapusan Sub Kegiatan , kegiatan dan penyesuaian terget kinerja, penyesuaian gaji dan tunjangan serta penambahan sub kegiatan bersifat penting dan mendesak untuk di laksanakan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindusrian dan perdagangan dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja dinas Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Kepala Dinas

WILHELMUS LEUWHEQ,S.FIL.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700628 199903 1008

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan, melalui serangkaian pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan dikoordinasikan, disinergikan, serta diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renja PD dilakukan berdasarkan Renstra PD dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman perencanaan tahunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilakukan melalui beberapa tahapan penting sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

   Tahap ini meliputi orientasi awal mengenai Renja PD serta pengumpulan dan penyiapan data serta informasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan dokumen.
2. Penyusunan Rancangan Awal

Rancangan Awal Renja PD di susun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023–2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD

   Penyusunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor: B/100.3.4.2/1/Bapp/III/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024. Dalam forum ini dilakukan penyempurnaan rancangan Renja PD dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, serta dilakukan penajaman terhadap target kinerja program dan kegiatan, lokasi pelaksanaan, dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Rancangan akhir Renja PD dirumuskan untuk mempertajam program, kegiatan, serta pagu indikatif perangkat daerah, dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan Renja PD

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir oleh Bappelitbangda untuk memastikan keselarasan antara program, kegiatan, dan pagu indikatif dalam Renja PD dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka dokumen Renja PD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja PD berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, dan pagu indikatif, serta mengacu pada Renstra PD untuk memastikan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang telah disusun dalam Rancangan Awal Renja PD. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan target kinerja dalam

Renja PD dengan dokumen Renstra PD. Selain itu, penyusunan Renja PD juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya, Renja PD digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomr 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023 - 2042
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).
15. Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan, sinergi, dan konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan efisiensi dalam alokasi berbagai sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah secara khusus, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.
b. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.
c. Menjadi instrumen evaluasi dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dilakukan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan memuat uraian tentang

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan Renja. Selain itu dalam Bab ini juga memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja serta menguraikan pokok bahasan (sistematika penulisan).

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kajian evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan triwulan II dan Analisis Kinerja.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

Bab IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan.

Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala teknis maupun non-teknis yang dijumpai di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun Perubahan Renja, khususnya dalam menilai apakah program dan kegiatan tersebut telah mencapai target, berpotensi tercapai, atau justru perlu disesuaikan kembali agar dapat terlaksana secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Periode Pelaksanaan Januari s.d Maret 2025

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah		%	320	27.541.590.600	160	4.986.602.882	80	2.493.301.441	25	578.464.530							25	578.464.530	185	5.565.067.412	58	20	DLH
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	400	392.500.000	200	24.070.208	100	12.035.104	-	-							-	-	200	24.070.208	50	6	DLH
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	8	65.416.666	4	3.752.800	2	1.876.400	-	-							-	-	4	3.752.800	50	6	DLH
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	65.416.666	2	3.227.000	1	1.613.500	-	-							-	-	2	3.227.000	50	5	DLH
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	65.416.666	2	3.525.200	1	1.762.600	-	-							-	-	2	3.525.200	50	5	DLH
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	65.416.666	2	4.107.688	1	2.053.844	-	-							-	-	2	4.107.688	50	6	DLH
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	65.416.666	2	4.534.510	1	2.267.255	-	-							-	-	2	4.534.510	50	7	DLH
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	8	65.416.670	4	4.923.010	2	2.461.505	-	-							-	-	4	4.923.010	50	8	DLH
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi.		%	400	16.493.315.912	200	4.123.328.978	100	2.061.664.489	25	512.415.506							25	512.415.506	225	4.635.744.484	56	28	DLH
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Orang / bulan	56	15.569.487.312	28	3.892.371.828	14	1.946.185.914	8	492.801.506							8	492.801.506	36	4.385.173.334	63	28	DLH
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	48	885.120.000	24	221.280.000	12	110.640.000	4	19.614.000							4	19.614.000	28	240.894.000	57	27	DLH
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	4	17.130.400	2	4.282.600	1	2.141.300	-	-							-	-	2	4.282.600	50	25	DLH
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	72	21.578.200	36	5.394.550	18	2.697.275	-	-							-	-	36	5.394.550	50	25	DLH
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah		%	400	205.431.776	200	51.357.944	100	25.678.972	25	3.360.000							25	3.360.000	225	54.717.944	56	27	DLH
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	20.805.400	2	5.201.350	1	2.600.675	-	-							-	-	2	5.201.350	50	25	DLH
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	12	184.626.376	6	46.156.594	3	23.078.297	3	3.360.000							3	3.360.000	9	49.516.594	75	27	DLH
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah		%	400	1.739.850.000	200	5.141.056	100	2.570.528	-	-							-	-	200	5.141.056	50	0	DLH
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	4	335.100.000	2	5.141.056	1	2.570.528	-	-							-	-	2	5.141.056	50	2	DLH
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Orang	8	936.500.000	4	-	2	-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Orang	8	468.250.000	4	-	2	-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan aktivitas sumber daya perangkat daerah		%	400	1.266.500.000	200	80.183.934	100	40.091.967	-	-							-	-	200	80.183.934	50	6	DLH
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Paket	4	468.250.000	2	2.952.950	1	1.476.475	-	-							-	-	2	2.952.950	50	1	DLH

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Paket	4	468.250.000	2	15.290.984	1	7.645.492	-	-							-	-	2	15.290.984	50	3	DLH
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Paket	4	165.000.000	2	10.750.000	1	5.375.000	-	-							-	-	2	10.750.000	50	7	DLH
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	200	165.000.000	100	51.190.000	50	25.595.000	-	-							-	-	100	51.190.000	50	31	DLH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	400	3.756.000.000	200	-	100	-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	40	1.878.000.000	20	-	10	-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	12	939.000.000	6	-	3	-	-	-							-	-	6	-	50	-	DLH
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	12	939.000.000	6	-	3	-	-	-							-	-	6	-	50	-	DLH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	400	731.956.292	200	544.200.762	100	272.100.381	25	54.959.640							25	54.959.640	225	599.160.402	56	82	DLH
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	10	365.978.146	2	6.077.500	1	3.038.750	3	1.000.000							3	1.000.000	5	7.077.500	50	2	DLH
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	10	182.989.073	2	69.777.600	1	34.888.800	3	2.759.640							3	2.759.640	5	72.537.240	50	40	DLH
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Laporan	4	182.989.073	2	468.345.662	1	234.172.831	0	51.200.000							0	51.200.000	2	519.545.662	56	284	DLH
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	400	2.956.036.620	200	158.320.000	100	79.160.000	25	7.729.384							25	7.729.384	225	166.049.384	56	6	DLH
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	40	1.178.018.310	20	-	10	-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	16	1.178.018.310	8	158.320.000	4	79.160.000	2	7.729.384							2	7.729.384	10	166.049.384	61	14	DLH
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	16	600.000.000	8	-		-	-	-							-	-	8	-	50	-	DLH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS		Dokumen	4	600.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		%	400	600.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	600.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokuman	4	-	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		%	400	-	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	8	-	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-							-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		%	100	8.373.929.282	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		%	400	5.364.824.002	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	36	520.000.000	18	-		-	-	-							-	-	18	-	50	-	DLH

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
					Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																									
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	8	520.000.000	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	36	520.000.000	18	-		-	-	-							-	-	18	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Masyarakat Kabupaten Lembata	Lokasi	40	520.000.000	20	-		-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	Laporan	4	1.094.941.334	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Paket	40	1.094.941.334	20	-		-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Unit	8	547.470.668	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	400	547.470.666	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		%	100	1.504.552.640	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Laporan	4	1.504.552.640	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	TErlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota		%	100	1.504.552.640	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	752.276.320	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ha	0	752.276.320	0	-		-	-	-							-	-	0	-	50	-	DLH
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Kegiatan	8	-	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		%	100	200.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		%	100	200.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ha	4	100.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Unit	4	100.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		%	100	200.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		%	400	100.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Masyarakat Kabupaten Lembata	Laporan	4	100.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah		%	400	100.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
						dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya																				
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	100.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH		%	100	400.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	400	400.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	20	100.000.000	10	-		-	-	-							-	-	10	-	50	-	DLH
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Masyarakat Kabupaten Lembata	Badan Usaha	28	100.000.000	14	-		-	-	-							-	-	14	-	50	-	DLH
2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Masyarakat Kabupaten Lembata	Orang	8	100.000.000	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Masyarakat Kabupaten Lembata	Orang	4	100.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		%	100	25.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		%	400	25.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	25.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		%	100	5.700.000.000	50	1.420.000.000	25	710.000.000	-	-							-	-	50	1.420.000.000	50	25	DLH
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	400	5.700.000.000	200	1.420.000.000	100	710.000.000	-	-							-	-	200	1.420.000.000	50	25	DLH
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	4.010.701.200	2	1.002.675.300	1	501.337.650	-	-							-	-	2	1.002.675.300	50	25	DLH
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Masyarakat Kabupaten Lembata	Orang	400	1.669.298.800	200	417.324.700	100	208.662.350	-	-							-	-	200	417.324.700	50	25	DLH
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Masyarakat Kabupaten Lembata	Keluarga	40	10.000.000	20	-		-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Masyarakat Kabupaten Lembata	Lembaga	8	10.000.000	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	-	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	400	-	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Masyarakat Kabupaten Lembata	Entitas	20	-	10	-		-	-	-							-	-	10	-	50	-	DLH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten		%	100	75.000.000	50	-		-	-	-							-	-	50	-	50	-	DLH
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	400	75.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Masyarakat Kabupaten Lembata	Pengaduan	8	25.000.000	4	-		-	-	-							-	-	4	-	50	-	DLH
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Perkara	20	25.000.000	10	-		-	-	-							-	-	10	-	50	-	DLH
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masyarakat Kabupaten Lembata	Perkara	4	25.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan		%	100	2.460.000.000	50	701.950.000	25	550.000.000	-	-							-	-	50	701.950.000	50	29	DLH
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah		%	400	2.460.000.000	200	701.950.000	100	550.000.000	-	-							-	-	200	701.950.000	50	29	DLH
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Lembata	Kelompok	4	10.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	10.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Masyarakat Kabupaten Lembata	Dokumen	4	1.184.400.000	2	398.050.000	1	398.050.000	-	-							-	-	2	398.050.000	50	34	DLH
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ton	400	10.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ton	4	10.000.000	2	-		-	-	-							-	-	2	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Masyarakat Kabupaten Lembata	Unit	40	10.000.000	20	-		-	-	-							-	-	20	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ton	400	10.000.000	200	-		-	-	-							-	-	200	-	50	-	DLH
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di	Masyarakat Kabupaten Lembata	Ton	200	1.215.600.000	100	303.900.000	50	151.950.000	-	-							-	-	100	303.900.000	50	25	DLH

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		PD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
						TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																								
									11.988	45.575.519.882	5.988	7.108.552.882	1.430	3.753.301.441	147	578.464.530	-	-	-	-	-	-	147	578.464.530	6.135	23.061.052.236	51	51	

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi fisik kinerja Dinas Lingkungan Hidup hingga triwulan I Tahun 2025 adalah 72,31% dengan realisasi keuangan sebesar 41,77%. Terdapat perbedaan Fisik dengan keuangan yang dapat diukur sesuai Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan pencapaian/realisasi fisik kinerja Dinas Lingkungan Hidup masuk pada interval ke tiga yakni 66% ≤ 75% dengan kriteria penilaian "*Sedang*". Sedangkan pencapaian/realisasi kinerja keuangan masih sangat rendah karena capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yakni pada interval ke lima dibawah 50% dengan kriteria penilaian "*sangat rendah*".

Capaian kinerja keuangan program dan kegiatan masih rendah karena masih terdapat beberapa kegiatan yang belum realisasikan keuangannya sebagai akibat dokumen pendukung belum lengkap.

- Sub Kegiatan yang tingkat pencapaian realisasi fisik masih dibawah 50% berserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya :
  1. Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup masih berada pada angka 0% dikarenakan hingga pada akhir triwulan 1 tahun 2025 kegiatan ini belum dapat dilaksanakan.
- Sub Kegiatan yang tingkat pencapaian realisasi fisik sudah diatas atau sama dengan 50% :

1. Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
2. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
3. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
4. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
5. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
6. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
7. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah mencapai 63,39%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan
8. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN telah mencapai 57,29%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
9. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
10. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
11. Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
12. Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

13. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
14. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
15. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
16. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
17. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
18. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah mencapai 63,3928571428571%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
19. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN telah mencapai 57,29%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
20. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
21. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
22. Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
23. Realisasi Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah mencapai 75%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
24. Realisasi Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

25. Realisasi Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
26. Realisasi Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
27. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
28. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
29. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
30. Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
31. Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
32. Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
33. Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
34. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
35. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
36. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

telah mencapai 56,25%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

37. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
38. Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah mencapai 60,9375%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
39. Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
40. Realisasi Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
41. Realisasi Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
42. Realisasi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
43. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
44. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
45. Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
46. Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

47. Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
48. Realisasi Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
49. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
50. Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
51. Realisasi Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
52. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
53. Realisasi Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
54. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
55. Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
56. Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
57. Realisasi Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
58. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,

Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

59. Realisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
60. Realisasi Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
61. Realisasi Sub Kegiatan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
62. Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
63. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
64. Realisasi Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
65. Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
66. Realisasi Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
67. Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

68. Realisasi Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
69. Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
70. Realisasi Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
71. Realisasi Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
72. Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
73. Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
74. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
75. Realisasi Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
76. Realisasi Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

77. Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
78. Realisasi Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.
79. Realisasi Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional telah mencapai 50%. Realisasi ini sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas yang menyebabkan persentase realisasi belum maksimal, terdapat pula beberapa faktor lainnya, antara lain:

- Penjadwalan ulang program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyesuaian terhadap alokasi anggaran;
- Disiplin aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan yang masih belum optimal;
- Koordinasi administrasi pelaksanaan tugas yang belum berjalan secara efektif.

Sebagai tindak lanjut atas masih rendahnya kinerja kegiatan dan kinerja keuangan tersebut, selain langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya, akan diupayakan pula peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara pimpinan, staf, dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor Tahun 2025 tanggal 31 Mei Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, dapat disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lembata Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							4.988.451.810,00	3.753.301.441,00	3.485.229.025,00							5.404.588.083,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.988.451.810,00	3.753.301.441,00	3.485.229.025,00							5.404.588.083,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							4.988.451.810,00	3.753.301.441,00	3.485.229.025,00							5.404.588.083,00	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	320	80	90%	90 %	90 %	2.655.751.309,00	2.493.301.441,00	2.283.295.690,00						90 %	2.840.469.101,00	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	5.172.163,00	12.035.104,00	12.035.104,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	140.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	2	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	921.163,00	1.876.400,00	1.336.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	30.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	1.613.500,00	442.850,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	30.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	858.600,00	2.053.844,00	545.550,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	848.100,00	2.267.255,00	1.492.155,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	2	3 laporan	3 Laporan	3 Laporan	827.100,00	2.461.505,00	1.605.505,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		3 Laporan	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	1.798.680.398,65	2.061.664.489,00	2.061.664.489,00			-	-	ASN Lingkup Dinas	100 %	2.090.122.341,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Lingkungan Hidup			
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	14	30 orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.683.736.282,65	1.946.185.914,00	1.946.185.914,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang/bulan	1.900.122.341,00	DLH
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	14 dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	113.544.970,00	110.640.000,00	108.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		14 Dokumen	150.000.000,00	DLH
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	664.236,00	2.141.300,00	2.141.300,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Laporan	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	18	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	734.910,00	2.697.275,00	1.300.600,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		4 Laporan	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400	100	100%	100 %%	100 %%	26.354.238,00	25.678.972,00	25.678.972,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %%	38.000.000,00	DLH
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	1	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.619.480,00	2.600.675,00	2.600.675,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Dokumen	15.000.000,00	DLH
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	3	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.734.758,00	23.078.297,00	21.840.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		12 Laporan	23.000.000,00	DLH
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	1.933.080,00	2.570.528,00	2.570.528,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	150.000.000,00	DLH
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	1	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.933.080,00	2.570.528,00	1.065.136,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		12 Dokumen	100.000.000,00	DLH
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	4	4 orang	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	78.505.344,35	40.091.967,00	40.091.967,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	120.000.000,00	DLH
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.196.588,35	1.476.475,00	1.476.475,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		1 Paket	0,00	DLH
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1	2 Paket	2 Paket	2 Paket	33.201.406,00	7.645.492,00	3.723.959,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Paket	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	2 Paket	2 Paket	2 Paket	16.250.350,00	5.375.000,00	2.245.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2 Paket	20.000.000,00	DLH
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	50	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	22.857.000,00	25.595.000,00	13.830.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100.000.000,00	DLH
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	10	20 unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Unit	0,00	DLH
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	3	10 unit	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Unit	0,00	DLH
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	3	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	100.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															an, Semua Kel/Desa							
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	400	100	100%	100 %	100 %	298.655.335,00	272.100.381,00	272.100.381,00			-	-	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	102.346.760,00	DLH
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.176.925,00	3.038.750,00	3.038.750,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.131.650,00	34.888.800,00	32.908.706,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.346.760,00	234.172.831,00	107.459.115,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.346.760,00	DLH
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400	100	100%	100 %	100 %	296.450.750,00	79.160.000,00	79.160.000,00			-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	100 %	100.000.000,00	DLH
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	10	10 Unit	-	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		10 Unit	0,00	DLH
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	7	7 Unit	7 Unit	7 Unit	246.450.750,00	79.160.000,00	27.455.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		7 Unit	50.000.000,00	DLH
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	4	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	DLH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00						1 Dokumen	90.500.000,00	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	1 Dokumen	60.500.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Dokumen	60.500.000,00	DLH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	30.000.000,00	DLH
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																	
						Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		3 Dokumen	0,00	DLH
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Dokumen	30.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru					
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	25	25%	-	25 %	743.810.783,00	0,00	218.670.000,00						25 %	1.085.618.982,00	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400	100	25%	25 %	25 %	503.757.843,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	607.566.042,00	DLH
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	36	9	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	101.245.450,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		16 Dokumen	200.000.000,00	DLH
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	8	2	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	103.427.124,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Dokumen	200.000.000,00	DLH
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																	
						Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	36	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	7.566.042,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	7.566.042,00	DLH
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	400	100	100	100 Dokumen	100 Dokumen	291.519.227,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		100 Dokumen	200.000.000,00	DLH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25	25	25%	25 %	25 %	178.052.940,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	178.052.940,00	DLH
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4	1	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	178.052.940,00	0,00	218.670.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		9 Laporan	178.052.940,00	DLH
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	100	25	25%	25 %	25 %	62.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	300.000.000,00	DLH
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4	1	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Dokumen	200.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi																	
						luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	2	2 Ha	2 Ha	18 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		18 Ha	0,00	DLH
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																	
						jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8	1	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Kegiatan	100.000.000,00	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100	25	25%	25 %	25 %	101.260.000,00	0,00	0,00						25 %	400.000.000,00	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100	25	25%	25 %	25 %	101.260.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	400.000.000,00	DLH
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																	
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Dokumen	0,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru					
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4	1	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Ha	100.000.000,00	DLH
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																	
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Unit	300.000.000,00	DLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	25	25%	25 %	25 %	87.369.718,00	0,00	0,00						25 %	204.000.000,00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4	1	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	59.109.718,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	15 Laporan	100.000.000,00	DLH
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																	
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4	1	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.109.718,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Laporan	100.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru					
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	400	100	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	28.260.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	4 Dokumen	104.000.000,00	DLH
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4	1	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Dokumen	100.000.000,00	DLH
2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																	
						jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	80	80	80 Usaha	80 Usaha	80 Usaha	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		80 Usaha	2.000.000,00	DLH
2	11	05	2.02	0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota																	
						jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Unit	2.000.000,00	DLH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	100	25	25%	25 %	25 %	160.000.000,00	0,00	0,00						25 %	275.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH	400	100	25%	25 %	25 %	160.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	275.000.000,00	DLH
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20	5	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		10 Dokumen	165.000.000,00	DLH
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																	
						Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4	1	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		5 Orang	0,00	DLH
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	28	7	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		10 Badan Usaha	110.000.000,00	DLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK	Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100	25	25%	25 %	25 %	50.000.000,00	0,00	0,00						25 %	100.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	400	25	25%	25 %	25 %	50.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	100.000.000,00	DLH
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	4	12	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Dokumen	100.000.000,00	DLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	25	25%	25 %	25 %	710.000.000,00	710.000.000,00	703.362.790,00						25 %	201.000.000,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400	100	25%	25 %	25 %	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	201.000.000,00	DLH
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	1	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	355.000.000,00	501.337.650,00	173.245.415,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		12 Dokumen	100.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru					
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	400	100	500 Orang	500 Orang	500 Orang	355.000.000,00	208.662.350,00	47.817.375,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		500 Orang	100.000.000,00	DLH
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	8	80	80 Lembaga	80 Lembaga	18 Lembaga	0,00	0,00	482.300.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		18 Lembaga	1.000.000,00	DLH
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00						-	0,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyaraka	3	3	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masyarakat Kabupaten Lembata	3 Dokumen	0,00	DLH
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20	5	100 Entitas	100 Entitas	100 Entitas	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		100 Entitas	0,00	DLH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	100	25	25%	25 %	25 %	100.000.000,00	0,00	0,00						25 %	88.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten																
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	400	100	25%	25 %	25 %	100.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kabupaten Lembata	25 %	88.000.000,00	DLH
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	8	2	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Pengaduan	0,00	DLH
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
						Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	2	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2 Perkara	33.000.000,00	DLH
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	5	5 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		5 Perkara	55.000.000,00	DLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase wilayah perkotaan yang memiliki sarana pengolahan sampah dan Presentase pengurangan sampah diperkotaan	100	25	25%	25 %	25 %	210.260.000,00	550.000.000,00	279.900.545,00						25 %	120.000.000,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang dikelolah	400	100	25%	25 %	25 %	210.260.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan	4. Peningkatan mitigasi dan	Masyarakat Kabupa	25 %	120.000.000,00	DLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	adaptasi perubahan iklim	ten Lembata			
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	2	2 Unit	2 Unit	15 Unit	100.000.000,00	398.050.000,00	185.150.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		15 Unit	0,00	DLH
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	200	50	1 Ton	1 Ton	1 Ton	110.260.000,00	151.950.000,00	94.750.545,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		1 Ton	120.000.000,00	DLH
JUMLAH												4.988.451.810,00	3.753.301.441,00	3.485.229.025,00							5.404.588.083,00	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata merencanakan pelaksanaan 11 program utama pada Tahun Anggaran 2025. Program-program ini mencakup berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dukungan administratif dinas. Dari keseluruhan program tersebut, tercatat sebanyak 22 kegiatan yang terbagi dalam 58 sub kegiatan.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp4.658.951.810, mengalami penyesuaian menjadi Rp4.850.420.923 setelah perubahan, yang mencerminkan penguatan pada beberapa prioritas program strategis antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan layanan administratif, keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta jasa dan sarana penunjang lainnya. Kegiatan-kegiatan dalam program ini memiliki pagu yang cukup besar karena menjadi fondasi pelaksanaan seluruh operasional dinas.

   Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp2.655.751.309 dan sesudah perubahan menjadi Rp2.283.295.690,00. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dengan total 27 sub kegiatan, antara lain:

   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp5.172.163,00 dan sesudah perubahan Rp7.185.060,00, untuk membiayai 6 sub kegiatan.
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp1.798.680.399,00 dan sesudah perubahan Rp2.058.467.814,00, untuk membiayai 4 sub kegiatan.
   3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp26.354.238,00 dan sesudah perubahan Rp24.440.675,00, untuk membiayai 2 sub kegiatan.
   4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp1.933.080,00 dan sesudah perubahan Rp1.065.136,00, untuk membiayai 2 sub kegiatan.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp78.505.344,00 dan sesudah perubahan Rp21.275.434,00, untuk membiayai 4 sub kegiatan.
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp150.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp0,00, untuk membiayai 3 sub kegiatan.
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp298.655.335,00 dan sesudah perubahan Rp143.406.571,00, untuk membiayai 3 sub kegiatan.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebelum perubahan Rp296.450.750,00 dan sesudah perubahan Rp27.455.000,00, untuk membiayai 3 sub kegiatan.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk mendukung tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan seperti RPPLH dan KLHS sebagai dasar kebijakan dan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan. Total pagu program ini sebelum perubahan sebesar Rp150.000.000 dan sesudah perubahan menjadi Rp0. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan total 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan pagu sebelum perubahan Rp50.000.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 1 sub kegiatan.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pagu sebelum perubahan Rp100.000.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 2 sub kegiatan.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini memiliki peran penting dalam mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan, program ini mengintegrasikan pengawasan dan intervensi teknis. Total pagu sebelum

Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp743.810.783,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp218.670.000,00. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan total 8 sub kegiatan, antara lain:

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp503.757.843,00 dan sesudah perubahan Rp0,00, untuk membiayai 4 sub kegiatan.
2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp178.052.940,00 dan sesudah perubahan Rp218.670.000,00, untuk membiayai 1 sub kegiatan.
3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp62.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp0,00, untuk membiayai 3 sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini berupaya mengelola potensi keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Lembata secara berkelanjutan. Total pagu sebelum perubahan sebesar Rp101.260.000 dan sesudah perubahan meningkat menjadi Rp0. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp101.260.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 3 sub kegiatan.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3

Program ini fokus pada pengelolaan limbah B3 untuk mencegah pencemaran lingkungan. Total pagu program sebelum perubahan sebesar Rp87.369.718 dan sesudah perubahan meningkat menjadi Rp0. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan:

1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan pagu sebelum perubahan Rp59.109.718 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 1 sub kegiatan.

2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam Satu Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp28.260.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 3 sub kegiatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Program ini bertujuan menjaga kepatuhan terhadap regulasi PPLH melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan. Total pagu sebelum perubahan sebesar Rp160.000.000 dan sesudah perubahan menjadi Rp0. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan:

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dengan pagu sebelum perubahan Rp160.000.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 3 sub kegiatan.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengakuan dan pelestarian kearifan lokal. Total pagu program ini sebelum perubahan sebesar Rp50.000.000 dan sesudah perubahan meningkat menjadi Rp0. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

1) Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, dan Pengetahuan Tradisional dengan pagu sebelum perubahan Rp50.000.000 dan sesudah perubahan Rp0 untuk membiayai 1 sub kegiatan.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap isu lingkungan melalui pendidikan dan penyuluhan. Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp 710.000.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 703.362.790,00. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan total 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp 710.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp 703.362.790,00, untuk membiayai 3 sub kegiatan.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp 20.000.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 0,00. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan total 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp 20.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp 0,00, untuk membiayai 1 sub kegiatan.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran ketentuan lingkungan hidup. Melalui program ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata memastikan adanya mekanisme respons cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp 100.000.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 0,00. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan total 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu sebelum perubahan Rp 100.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp 0,00, untuk membiayai 1 sub kegiatan.

11. Program Pengelolaan Sampah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan di Kabupaten Lembata. Fokus program mencakup pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga,

mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengangkutan, pemilahan, pemrosesan, dan pengurangan sampah melalui berbagai pendekatan berbasis masyarakat.

Total pagu program ini sebelum perubahan adalah Rp 210.260.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.279.900.545,00 Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan total 2 sub kegiatan, antara lain:

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan pagu sebelum perubahan Rp 210.260.000,00 dan sesudah perubahan Rp.279.900.545,00, untuk membiayai 2 sub kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian rumusan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan R-DPPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, Agustus 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Christianus Rimbaraya, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19791116 200604 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi : (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan; (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain : orientasi mengenai perubahan renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja dan penetapan perubahan renja setelah Perubahan RKPD ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lembata wajib melakukan penyusunan perubahan rancangan renja.

Perubahan Rancangan Renja-Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Selanjutnya dokumen Perubahan

Rancangan Renja ini disempurnakan menjadi rancangan akhir perubahan renja dan ditetapkan menjadi dokumen renja perubahan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan.

Dokumen perubahan renja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sebagai komitmen bersama menuju Lembata yang Produktif dan Berdaya Saing menuju Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017);
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 92 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 92);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja adalah : mengakomodir berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun Anggaran 2025 serta mewujudkan sinergisitas antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I tentang PENDAHULUAN, memuat latar belakang penyusunan perubahan renja yang menjelaskan keterkaitan antara perubahan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, landasan hukum yang memuat penjelasan tentang peraturan perundangan-undangan yang dijadikan acuan penyusunan perubahan renja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II tentang EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II, menguraikan capaian kinerja, permasalahan atau faktor penghambat dalam merealisasikan kinerja serta solusi atau tindak lanjut yang diperlukan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Bab III tentang RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Pada bagian ini juga diuraikan kompilasi jumlah program/kegiatan dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bagian.

Bab IV PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2025 dan Capaian Indikator s/d Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi dilakukan guna mengetahui apakah pelaksanaan RENJA sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum. Selain itu evaluasi pelaksanaan RENJA dilakukan dalam rangka mengetahui kendala yang dihadapi selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi atau pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut perlu terus dilanjutkan atau tidak. Selain itu evaluasi pelaksanaan RENJA dilakukan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan apakah sudah mencapai target atau belum dan atau adanya kemungkinan akan tercapai atau tidak pada akhir tahun anggaran sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RENJA.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		PD
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				**6.065.278.379,00**		**1.917.614.764,00**	**31,62**	**31,62**	**BKPSDMD**
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				**6.065.278.379,00**		**1.917.614.764,00**	**31,62**	**31,62**	**BKPSDMD**
5	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**25**	**4.004.802.735,00**	**25**	**1.789.466.826,00**	**44,68**	**44,68**	**BKPSDMD**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**5.831.904,00**	**4**	**5.526.904,00**	**94,77**	**94,77**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.924.703,00	2	2.924.703,00	100,0	100,00	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2.907.201,00	2	2.602.201,00	100,0	89,51	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	**Dokumen**	**29**	**3.123.615.117,00**	**12**	**1.618.652.917,00**	**41,4**	**51,82**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	2.983.986.891,00	6	1.558.014.917,00	42,9	52,21	BKPSDMD
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang terbayar	Jasa	12	133.834.550,00	6	60.638.000,00	50,0	45,31	BKPSDMD
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.876.757,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2.916.919,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang/Aset Perangkat Daerah Yang berkualitas**	**Dokumen**	**12**	**22.992.106,00**	**6**	**10.080.000,00**	**50,0**	**43,84**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	22.992.106,00	6	10.080.000,00	50,0	43,84	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengurusan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**2.846.181,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.846.181,00	-	-	-	-	BKPSDMD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		PD
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perkantoran yang tersedia pada Perangkat Daerah**	**%**	**28**	**152.617.480,00**	**16,26**	**28.727.179,00**	**58,1**	**18,82**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.945.850,00	1	1.402.100,00	100,0	28,35	BKPSDMD
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.045.630,00	1	7.600.365,00	100,0	42,12	BKPSDMD
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.424.000,00	1	3.655.000,00	100,0	43,39	BKPSDMD
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	121.202.000,00	13,26	16.069.714,00	53,0	13,26	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Paket**	**22**	**458.256.117,00**	**0**	**-**	**-**	**-**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	55.606.175,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	402.649.942,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan	**36**	**148.294.830,00**	**12**	**83.134.635,00**	**33,3**	**56,06**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	106.392.562	6	67.600.000,00	50,0	63,54	BKPSDMD
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39.693.916,00	6	15.534.635,00	50,0	39,14	BKPSDMD
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.208.352,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (setelah dilakukan Pemeliharaan)**	**Paket**	**14**	**90.349.000,00**	**7**	**43.345.191,00**	**50,0**	**47,98**	**BKPSDMD**
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	52.300.000,00	5	29.545.191,00	62,5	56,49	BKPSDMD
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	27.600.000,00	2	13.800.000,00	40,0	50	BKPSDMD
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.449.000,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)**	**%**	**25**	**2.060.475.644,00**	**25**	**128.147.938,00**	**100,0**	**6,22**	**BKPSDMD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		PD
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Dokumen**	**8**	**356.075.781,00**	**101**	**78.548.582,00**	**1.262,5**	**22,06**	**BKPSDMD**
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	15.024.025,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	263.202.009,00	1	77.983.433,00	50,0	-	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	20.535.650,00	100	565.149,00	10.000,0	2,75	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	14.883.975,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	13.927.838,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	15.806.834,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	12.695.450,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN**	**Dokumen**	**16**	**312.178.438,00**	**2**	**2.021.250,00**	**12,5**	**0,65**	**BKPSDMD**
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	5	9.708.831,00	2	2.021.250,00	40,0	20,82	BKPSDMD
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	10	11.718.531,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	290.751.076,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN**	**Orang**	**12**	**1.269.624.075,00**	**5**	**36.716.325,00**	**41,7**	**2,89**	**BKPSDMD**
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	9	258.035.100,00	5	36.716.325,00	55,6	14,23	BKPSDMD
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	1	47.500.000,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	756.291.100,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Fasilitasi	1	207.797.875,00	-	-	-	-	BKPSDMD
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Dokumen**	**35**	**122.597.350,00**	**8**	**10.861.781,00**	**22,9**	**8,86**	**BKPSDMD**
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	16.319.437,00	1	3.023.031,00	100,0	18,52	BKPSDMD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		PD
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	2	34.999.650,00	1	3.885.000,00	50,0	11,10	BKPSDMD
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	30	22.048.413,00	5	2.720.000,00	16,7	12,34	BKPSDMD
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2	49.229.850,00	1	1.233.750,00	50,0	2,51	BKPSDMD

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata membawa dampak terhadap perencanaan di Kabupaten Lembata antara lain :

1. RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, yang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerahnya menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 90/2019 serta Kepmen Nomor 050-3708/2020 dengan tetap mempertahankan target indicator RPJMD/RENSTRA yang sudah ada;
2. Penyusunan RKPD 2025 wajib menggunakan kodefikasi sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmen Nomor 050-3708/2020;
3. Perubahan ini berdampak pada pelaksanaan evaluasi RENJA. Evaluasi RENJA dan Pencapaian Renstra selama masa transisi ini hanya dapat dilakukan untuk pelaksanaan tahun 2023-2026 sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya menggunakan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2026-2030 yang merujuk pada RPJMD periode 2023-2026 dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2023-2026. Penyusunan dokumen evaluasi renja menggunakan kodefikasi sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmen 050-3708/2020.

Mengevaluasi RENJA dalam pelaksanaan teknisnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD/DPA SKPD. Karena Rencana Kerja yang termuat dalam Dokumen Perencanaan diwujudkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Anggaran. Dengan kata lain, instrument pelaksanaan rencana kerja adalah pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.1. terlihat realisasi anggaran sebesar Rp.1.917.614.764, dengan tingkat capaian sebesar 31,62%. Tingkat capaian kinerja tersebut masih rendah karena dibawah 50%. Diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan dalam 2 (dua) triwulan kedepan.

Terdapat 20 Sub Kegiatan yang direncanakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA.2025. Sub kegiatan tersebut menyebar pada 10 kegiatan dalam 2 program yakni Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah. Prosentase penyerapan anggaran dan kinerja dari 20 sub kegiatan berdasarkan realisasi anggaran dan kinerja sampai dengan kondisi pertengahan tahun (triwulan II) sebesar 31,62% atau dibawah 50%. Berikut besaran prosentase realisasi anggaran maupun kinerja dari masing-masing sub kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 100%;
2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar 89,50%;
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar 52,21%
4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 45,30%
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 0%;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar 0%;
7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 43,84%
8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 28,34%;
9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 42,11%;

10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 43,38%;
11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 13,25%;
12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 0%;
13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 63,53%;
14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 39,13%;
15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar %;
16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 56,49%;
17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 50%;
18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 0%;
19) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar 29,62%;
20) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar 2,75%;
21) Pengelolaan Lembaga Profesi ASN sebesar 0%;
22) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar 0%;
23) Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar 0%;
24) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar 0%
25) Pengelolaan Mutasi ASN sebesar 20,81%;
26) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar 0%;
27) Pengelolaan Promosi ASN sebesar 0%;
28) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebesar 14,22%;
29) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar 0%;
30) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat sebesar 0%;
31) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN sebesar 0%;
32) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar 18,52%;
33) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar 11,10%
34) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai sebesar 12,33;
35) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar 2,50%;

Adapun factor penghambat pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah :

1) Beberapa sub kegiatan direncanakan anggaran kasnya pada triwulan III dan IV (semester II) sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam semester I;
2) Terdapat beberapa sub kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan namun karena keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban sehigga terbaca belum terealisasi keuangannya;
3) Adanya Perubahan APBD sehingga terdapat beberapa rincian objek belanja yang melekat pada beberapa sub kegiatan menunggu penetapan perubahan untuk mengeksekusinya;
4) Ketersediaan Sumber Daya Manusia pendukung kegiatan ini sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

Berdasarkan hasil evaluasi beserta factor penghambatnya, dapat diambil langkah untuk pelaksanaan RENJA sampai dengan akhir tahun maupun tahun berikutnya antara lain :

1) Agar dilakukan akselerasi/percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga realiasi keuangan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran;
2) Perumusan indikator kinerjanya harus konsisten mulai dari RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan RENJA serta DPPA sehingga tidak menghambat dalam proses pengukuran indicator kinerja;
3) Agar masing-masing perangkat daerah dalam mengusulkan kegiatan menggunakan pertimbangan yang logis, rasional dan disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaannya sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.
4) Pentingnya pelatihan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata.

2.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan guna mengetahui apakah program/kegiatan dan pagu yang sudah termuat pada Rancangan Awal RKPD sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Sehingga hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan penyesuaian kembali dalam Usulan RENJA Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 2.2.
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Analisis Kebutuhan				
						Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				**5.264.912.415**	**KEPEGAWAIAN**			**4.574.336.077**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.657.404.114**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.569.253.978**	
5	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**5.798.750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**20.388.410**	
5	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lewoleba	2 dokumen	2.899.375	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.482.852	
5	03	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lewoleba	1 dokumen	-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	
5	03	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lewoleba	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	
5	03	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lewoleba	1 dokumen	2.899.375	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.905.558	
5	03	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lewoleba	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	
5	03	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lewoleba	2 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	
5	03	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lewoleba	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
5	**03**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.218.325.845**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.800.231.747**	
5	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lewoleba	14 orang/bulan	3.115.044.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.654.044.995	
5	03	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lewoleba	12 Dokumen	97.482.375	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	133.834.550	
5	03	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lewoleba	1 Laporan	2.899.375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.876.757	
5	03	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Lewoleba	18 Laporan	2.899.375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.475.445	
5	**03**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**23.059.375**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**26.153.874**	
5	03	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lewoleba	2 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Analisis Kebutuhan				
						Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
5	03	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lewoleba	2 Laporan	23.059.375	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	26.153.874	
5	**03**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2.846.181**	
5	03	01	2,05	0005	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lewoleba	2 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.846.181	
5	**03**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**129.175.028**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**160.343.550**	
5	03	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lewoleba	2 paket	5.458.125	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	12.893.650	
5	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lewoleba	2 paket	10.996.703	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	30.494.350	
5	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lewoleba	2 paket	3.506.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.534.550	
5	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lewoleba	10 Laporan	109.214.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	107.421.000	
5	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**30.731.950**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**309.635.460**	
5	03	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lewoleba	2 Unit	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	
5	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Lewoleba	5 Unit	30.731.950	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	309.635.460	
5	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**202.209.425**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**143.535.756**	
5	03	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lewoleba	12 Laporan	158.319.350	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	103.882.562	
5	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lewoleba	12 Laporan	39.833.908	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.870.890	
5	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lewoleba	12 Laporan	4.056.167	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.782.304	
5	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**48.103.741**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**106.119.000**	
5	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lewoleba	8 unit	35.183.741	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	71.190.000	
5	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lewoleba	10 unit	2.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 jenis	19.320.000	
5	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lewoleba	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.609.000	
5	03	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah komponen gedung kantor yang terpelihara	Lewoleba	3 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah komponen gedung kantor yang terpelihara	1 unit	-	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.607.508.301**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**1.005.082.099**	
5	**03**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**139.048.528**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			**187.102.769**	
5	03	02	2,01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lewoleba	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	-	
5	03	02	2,01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lewoleba	2 Dokumen	123.661.439	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	136.694.247	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Analisis Kebutuhan				
						Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
5	03	02	2,01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lewoleba	100 Dokumen	2.539.200	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	13.337.850	
5	03	02	2,01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lewoleba	1 lembaga	-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10.179.000	
5	03	02	2,01	0011	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lewoleba	1 Dokumen	12.847.889	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 sitem	12.927.838	
5	03	02	2,01	0012	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Lewoleba	4 dokumen	-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 dokumen	13.963.834	
5	03	02	2,01	0010	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Lewoleba	4 Laporan	-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	-	
5	**03**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**				**297.599.889**	**Mutasi dan Promosi ASN**			**169.004.658**	
5	03	02	2,02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Lewoleba	200 Dokumen	-	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	4.859.403	
5	03	02	2,02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lewoleba	500 Dokumen	-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	-	
5	03	02	2,02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Lewoleba	200 PNSD	297.599.889	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 PNSD	164.145.255	
5	**03**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**				**1.150.118.599**	**Pengembangan Kompetensi ASN**			**552.326.150**	
5	03	02	2,03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Lewoleba	100 PNSD	13.750.632	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 PNSD	78.546.600	
5	03	02	2,03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Lewoleba	50 PNSD	-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 PNSD	7.500.000	
5	03	02	2,03	0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Lewoleba	250 Dokumen	387.900.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	250 Dokumen	466.279.550	
5	03	02	2,03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Lewoleba	10 orang	748.467.967	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	250 Dokumen	-	
5	**03**	**02**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**20.741.285**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**96.648.522**	
5	03	02	2,04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lewoleba	1 Dokumen	12.518.175	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	10.956.106	
5	03	02	2,04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lewoleba	1 Laporan	-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	35.908.778	
5	03	02	2,04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Lewoleba	50 Orang	4.042.360	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	18.163.163	
5	03	02	2,04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lewoleba	25 Laporan	4.180.750	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	31.620.475	
								TOTAL	**5.264.912.415**				**4.574.336.077**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan RENJA Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada Perubahan RENJA Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 3.1.
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2025

Organisasi : : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	03				**KEPEGAWAIAN**											5.253.145.257	4.706.169.381					10.629.685.448
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											3.378.775.335	3.701.087.282					3.798.345.155
5	03	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											48.767.880	20.388.410					50.000.000
5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 dokumen	2 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	10.000.000	9.482.852	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 dokumen	1 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	10.000.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 dokumen	1 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	2.000.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 dokumen	1 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	12.000.000	10.905.558	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 dokumen	1 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	4.767.880	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi enyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Laporan	2 Laporan	16 dokumen	16 dokumen	6.000.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	4 Laporan	4 Laporan	16 dokumen	16 dokumen	4.000.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											2.981.414.354	2.932.065.051					3.240.670.288

5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	14 bulan	14 bulan	34 Dokumen	34 Dokumen	2.833.723.428	2.785.878.299	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	3.005.345.738
5	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	12 Dokumen	12 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	118.549.714,00	133.834.550	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	221.324.550
5	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Laporan	1 Laporan	34 Dokumen	34 Dokumen	11.141.212,00	2.876.757	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	7.000.000
5	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	18 Laporan	18 Laporan	34 Dokumen	34 Dokumen	18.000.000,00	9.475.445	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	7.000.000
5	**03**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**33.725.952**	**26.153.874**					**31.608.100**
5	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang/Aset Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	4 dokumen	4 dokumen	20%	20%	3.725.952	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang/Aset Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Laporan	2 Laporan	20%	20%	30.000.000	26.153.874	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	26.608.100
5	**03**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5.000.000**	**2.846.181**					**10.000.000**
5	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur untuk mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2.846.181	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	**03**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**139.867.149**	**160.343.550**					**132.500.000**
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Paket	2 Paket	25%	25%	4.196.960	12.893.650	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	2.500.000
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Paket	2 Paket	25%	25%	20.670.189	30.494.350	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	20.000.000

5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Paket	2 Paket	25%	25%	20.000.000	9.534.550	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	10 Laporan	10 Laporan	25%	25%	95.000.000	107.421.000	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	100.000.000
5	**03**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**10.000.000**	**309.635.460**					**10.000.000**
5	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung TUPOKSI Perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Unit	2 Unit	17 Paket	17 Paket	5.000.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	10.000.000
5	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung TUPOKSI Perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	5 Unit	5 Unit	17 Paket	17 Paket	5.000.000	309.635.460	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	-
5	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**80.000.000**	**143.535.756**					**215.143.167**
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya jasa pelayanan administasi perkantoran dalam mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	10.000.000	103.882.562	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	175.400.860
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya jasa pelayanan administasi perkantoran dalam mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	40.000.000	34.870.890	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	34.742.307
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya jasa pelayanan administasi perkantoran dalam mendukung TUPOKSI perangkat daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	30.000.000	4.782.304	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**80.000.000**	**106.119.000**					**108.423.600**
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	8 Unit	8 Unit	16 Paket	16 Paket	45.000.000	71.190.000	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	93.423.600
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	10 unit	10 unit	16 Paket	16 Paket	12.500.000	19.320.000	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000

5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Unit	1 Unit	16 Paket	16 Paket	10.000.000	15.609.000	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung TUPOKSI Perangkat Daerah	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Unit	1 Unit	16 Paket	16 Paket	12.500.000	-	DAU		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung Tupoksi perangkat daerah	20%	5.000.000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**1.874.369.922**	**1.005.082.099**					**6.831.340.293**
5	**03**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**358.844.867**	**187.102.769**					**457.244.998**
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Semuia Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000	-	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	19.980.850
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	198.844.867	136.694.247	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	303.534.680
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	100 Dokumen	100 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000	13.337.850	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	38.454.960
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Lembaga	1 Lembaga	8 Dokumen	8 Dokumen	16.000.000	10.179.000	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	20.221.040
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	60.000.000	12.927.838	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	25.907.680
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	4 dokumen	4 dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000	13.963.834	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	33.847.858
5	03	02	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya fasilitasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	4 Laporan	4 Laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000	-	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	15.297.930
5	**03**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**291.463.326**	**169.004.658**				**0**	**317.852.870**
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Meningkatnya pendayagunaan, pengembangan, pembinaan Manajemen ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	200 dokumen	200 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	4.859.403	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	24.072.830

5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Meningkatnya pendayagunaan, pengembangan, pembinaan Manajemen ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	500 dokumen	500 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	-	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	30.084.000
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Meningkatnya pendayagunaan, pengembangan, pembinaan Manajemen ASN	Kabupaten Lembata, Nubatukan , Lewoleba Timur	20%	20%	200 dokumen	200 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	251.463.326	164.145.255	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	263.696.040
5	**03**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**1.120.503.797**	**552.326.150**					**5.973.850.025**
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatnya Pendayagunaan Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	100 orang	100 orang	120 orang	120 orang	400.000.000	78.546.600	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	1.000.000.000
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Meningkatnya Pendayagunaan Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	5 orang	5 orang	120 orang	120 orang	40.000.000	7.500.000	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	175.000.000
5	03	02	2,03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Meningkatnya Pendayagunaan Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	250 Dokumen	250 Dokumen	120 orang	120 orang	650.503.797	466.279.550	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	3.498.850.025
5	03	02	2,03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pendayagunaan Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	10 orang	10 orang	120 orang	120 orang	30.000.000	0	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	1.300.000.000
5	**03**	**02**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**103.557.932**	**96.648.522**				**0**	**82.392.400**
5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja dan Disiplin ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 dokumen	1 dokumen	20%	20%	35.490.700	10.956.106	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	10.645.280
5	03	02	2,04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja dan Disiplin ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	1 Laporan	1 Laporan	20%	20%	19.184.043	35.908.778	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	16.251.410
5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Meningkatnya kinerja dan Disiplin ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	50 orang	50 orang	20%	20%	16.089.800	18.163.163	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	17.488.040
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rasio PNS Dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Non Guru dan Non Nakes)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Meningkatnya kinerja dan Disiplin ASN	Kabupaten Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	20%	25 Laporan	25 Laporan	20%	20%	32.793.389	31.620.475	DAU		Cakupan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang APIIKKK	20%	38.007.670
													TOTAL			**5.253.145.257**	**4.706.169.381**				**10.629.685.448**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan penting dalam pelaksanaan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

a. Setiap bidang/seksi wajib menyusun RKA Perubahan Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmoniskan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana termuat dalam Perubahan RENJA, maka penyusunan RKA Perubahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

4.2. Kaidah pelaksanaan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2025

a. Setiap bidang/seksi yang menjadi unit kerja pelaksana RENJA harus mengevaluasi RENJA Perubahan tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam perubahan RENJA dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubaha APBD Tahun Anggaran 2025;

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun berikutnya;

4.3. Rencana Tindaklanjut Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025

a. Setiap bidang/seksi sebagai PPTK harus mendalami Perubahan RENJA tahun 2025 secara sungguh-sungguh saat pembahasan perubaha anggaran;

b. Setiap bidang/seksi wajib menyusun DPPA dan Anggaran Kas dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. Setiap bidang/seksi selaku PPTK wajib melaksanakan DPPA sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah;

d. Setiap bidang/seksi selaku PPTK wajib mengendalikan pelaksanaan DPPA dan membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian rumusan Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan,

SAID KOPONG, S.SOS,.M.SI
NIP. 19720702 199803 1 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan;dan /atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Renja Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Lembata, namun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan hasil

pengendalian pelaksanaan renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata sampai dengan triwulan ITahun 2025, menunjukan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025. Perubahan dilakukan dengan melakukan pergeseran antar program, kegiatan, sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, paguanggaran.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan.Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025ini menjadi pedoman penyusunan perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2025.

1.2 LandasanHukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan danKeuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLembataNomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 05Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah KabupatenLembataTahun 2022 Nomor30);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk

mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rentra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2025

Evaluasi pelaksanaan terhadap Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I perlu dilakukan untuk memastikan target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaiamana tersaji pada tabel berikut ini.

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LEMBATA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		**954**	**919.581.115.327**	**188**	**209.187.454.129**	**96**	**229.884.910.621**		**4.322.921.895**		-		-		-	-	**4.322.921.895**	**188**	**213.276.106.024**	**19,71**	**23,19**	**BKAD**
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**568**	**130.617.319.168**	**123**	**15.579.288.088**	**38**	**44.521.736.015**		**3.789.482.645**		-		-		-	-	**3.789.482.645**	**123**	**19.214.500.733**	**29,57**	**14,71**	**BKAD**
2.01		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen/komponen yang dibutuhkan**	**64**	**160.000.000**	**7**	**15.984.495**	**8**	**13.516.673**		-	-			-		-	-	-	**7**	**15.984.495**	**10,94**	**9,99**	**BKAD**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24	40.000.000	2	1.374.680	2	1.578.418		-		-		-		-	-	-	2	1.374.880	8,33	3,44	BKAD
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4	20.000.000	1	2.099.940	1	1.818.600		-		-		-		-	-	-	1	2.099.940	25,00	10,50	BKAD
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	20.000.000	1	1.805.530	1	1.979.450		-		-		-		-	-	-	1	1.805.530	25,00	9,03	BKAD
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4	40.000.000	1	2.552.820	1	2.577.600		-		-		-		-	-	-	1	2.552.820	25,00	6,38	BKAD
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	40.000.000	1	7.019.825	1	2.933.975		-		-		-		-	-	-	1	7.019.825	25,00	17,55	BKAD
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8		0		1	1.227.205		-		-		-		-	-	-	1	-	12,50	#DIV/0!	BKAD
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	-	1	1.131.500	1	1.402.025		-		-		-		-	-	-	1	1.131.500	6,25	#DIV/0!	BKAD
2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi**	**66**	**127.551.743.920**	**16**	**14.511.507.367**	**30**	**43.533.417.528**		**3.712.075.833**		-		-		-	-	**3.712.075.833**	**16**	**18.223.583.220**	**24,24**	**14,29**	**BKAD**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	120.793.086.415	14	14.193.348.180	14	43.296.647.625		3.675.693.833								3.675.693.833	14	17.869.042.013	100,00	14,79	
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	6.730.657.505	1	315.312.657	16	233.982.828		36.382.000								36.382.000	1	351.694.657	2,08	5,23	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	28.000.000	1	2.846.550		2.787.075										-	1	2.846.550	25,00	10,17	
4		Koodinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		68		-			1.705.412										-	-	-	-	#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		8		-			1.287.956										-	-	-	-	#DIV/0!	
2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tupoksi Perangkat Daerah.**	**8**	**108.627.040**		**22.453.370**		**23.043.913**		**3.360.000**		-		-		-		**3.360.000**		**25.813.370**	-	23,75	
6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	108.627.040	2	22.453.370		23.043.913		3.360.000								3.360.000	2	25.813.370	25,00	23,75	
2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penataan Aktifitas Sumber Daya Perangkat Daerah**	**60**	**787.400.000**	**15**	**355.818.775**	-	**169.705.822**		**4.493.200**		-		-		-		**4.493.200**	**15**	**360.311.975**	**25,00**	**45,76**	
1		Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4	22.400.000	1	7.941.580		8.394.630											1	7.941.580	25,00	35,45	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	160.000.000	1	43.670.377		46.201.102											1	43.670.377	25,00	27,29	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	55.000.000	1	9.419.800		7.000.000											1	9.419.800	25,00	17,13	
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	550.000.000	12	294.787.018		106.110.000		4.493.200								4.493.200	12	299.280.218	25,00	54,41	
2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**28**	**60.000.000**		**154.270.000**															-	-	
		Pengadaan Meubel	jumlah peralatan dan mesin lainnya	28	60.000.000		-		-										-	-	-	-	-	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	28	60.000.000	2	154.270.000		113.110.708										-	2	154.270.000	7,14	257,12	
2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**144**	**1.503.349.485**	**36**	**254.568.794**	-	**273.637.154**		**54.032.831**		-		-		-		**54.032.831**	**36**	**308.601.615**	**25,00**	**20,53**	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	1.091.624.000	12	185.804.000		177.752.500		43.200.000								43.200.000	12	229.004.000	25,00	20,98	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	401.725.485	12	61.821.634		86.803.800		10.192.831								10.192.831	12	72.014.665	25,00	17,93	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung wab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	10.000.000	12	6.942.950		9.080.854		640.000								640.000	12	7.582.950	25,00	75,80	
2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa Pemeliharaan barang milik Daerah**	**228**	**446.198.720**	**49**	**264.685.277**	**-**	**508.414.925**		**15.520.781**		**-**		**-**		**-**		**15.520.781**	**49**	**280.206.058**	**21,49**	**62,80**	
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	184	426.198.720	46	93.872.277		139.166.065		13.810.781								13.810.781	46	107.683.058	25,00	25,27	
6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	10.000.000	2	13.067.000		62.570.000		1.710.000								1.710.000	2	14.777.000	5,00	147,77	
6		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	10.000.000	1	157.746.000		306.678.860										-	1	157.746.000	25,00	1.577,46	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah dan % Capaian Temuan dan Penyelesaian Hasil pengawasan APIP**	**356**	**787.894.366.825**	**65**	**193.143.415.865**	**58**	**184.644.248.897**		**494.351.250**		**-**		**-**		**-**		**494.351.250**	**58**	**193.637.767.055**	**18,26**	**24,58**	
2.01		**Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**40**	**4.038.774.872**	**7**	**1.425.733.754**	**-**	**1.062.369.915**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**7**	**1.425.733.754**	**17,50**	**35,30**	
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	8	169.172.000	1	19.479.350		41.660.717										-	1	19.479.350	12,50	11,51	
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	8	169.172.000	1	12.988.250		30.817.761										-	1	12.988.250	12,50	7,68	
3		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	8	1.755.931.160	2	333.579.660		507.610.109										-	2	333.579.660	25,00	19,00	
4		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	8	1.587.380.160	2	421.695.252		455.649.657										-	2	421.695.252	25,00	26,57	
5		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8	357.119.552	1	637.991.252		25.431.661										-	1	637.991.252	12,50	178,65	
5		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		141.762.267										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.02		**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**144**	**57.954.734.884**	**36**	**12.207.580.994**	**36**	**13.135.721.834**		**192.306.000**		-		-		-		**192.306.000**	**36**	**12.399.886.994**	**25,00**	**21,40**	
1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	48	565.953.512	12	88.040.960	12	144.897.539										-	12	88.040.960	25,00	15,56	
2		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	48	276.557.640	12	71.638.347	12	41.389.333										-	12	71.638.347	25,00	25,90	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi,fasilitasi,asistensi ,sinkronisasi,supervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	48	57.112.223.712	12	12.048.001.687	12	12.949.434.962		192.306.000								192.306.000	12	12.240.307.687	25,00	21,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Perrungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).		-	-	-	-	12	56.310.530										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		-	-	-	-	39	136.313.027										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.01		**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**172**	**3.063.799.712**	**22**	**670.454.897**	**22**	**540.791.054**		-		-		-		-		-	**22**	**670.454.897**	**12,79**	**21,86**	
1		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan,triwulanan dan semesteran	72	118.665.816	18	13.792.232	18	12.453.714										-	18	13.792.232	25,00	11,62	
2		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	8	388.177.480	1	71.920.785	1	92.350.262										-	1	71.920.785	12,50	18,53	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	84	1.258.527.280	2	441.426.767	2	391.570.729									-		2	441.426.767	2,38	35,07		
4		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	1.298.419.135	1	143.315.113	1	44.316.349									-		1	143.315.113	12,50	11,04		
		Kegiatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**8**	**722.837.089.377**	**4**	**178.838.546.160**	**2**	**160.905.363.854**		**302.045.250**		-		-		-		**302.045.250**	**4**	**179.141.591.410**	**50,00**	**24,78**		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	702.369.524.791	2	177.862.202.817	1	168.275.907.463									-		2	177.862.202.817	50,00	25,32		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	20.467.544.585	2	977.343.343	1	1.629.456.431		302.045.250							302.045.250		2	1.279.388.593	50,00	6,25		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**40**	**1.169.427.334**	**8**	**384.750.236**	**8**	**518.927.900**		**39.088.000**		-		-		-		**39.088.000**	**8**	**423.838.236**	**20,00**	**36,24**		
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		**40**	**1.169.427.334**	**8**	**384.750.236**	**8**	**518.927.900**		**39.088.000**		-		-		-		**39.088.000**	**8**	**423.838.236**	**20,00**	**36,24**		
		Penyusunanan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8	60.382.150	2	23.042.369	2	48.163.564									-		2	23.042.369	25,00	38,16		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	10.362.872	2	24.328.500	2	10.353.611									-		2	24.328.500	25,00	234,09		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	628.810.076	1	151.941.417	1	306.662.572		39.088.000							39.088.000		1	191.029.417	12,50	30,38		
		Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	8	400.198.445	1	79.735.425	1	53.794.936									-		1	79.735.425	12,50	19,92		
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	4	31.793.260	1	26.406.950	1	17.459.976									-		1	26.406.950	25,00	83,06		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2024)		Target kinerja & anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit @rang Jat. Daerah Penang gungja wab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 9 x 100		15
		Penyelunaan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	4	37.660.531	1	79.266.575	1	82.492.250											1	79.266.575	25,00	209,50	

Lewoleba, 30 Juni 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lukman Suksin,SE

Pembina Utama Muda

NIP.19700424 200012 1 005

Berdasarkan table diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah(<30%) yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
5) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdapat beberapa Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV
6) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah terdapat beberapa Sub Kegiatan akan dilakukan padat riwulan III dan IV
7) Kegiatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah khusus pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dalan pelaksanaanya harus di sertai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
8) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa Sub Kegiatan akan dilakukan pada triwulan III dan IV

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Selisih/(Kurang) (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							213.354.918.632,00	230.135.409.521,00	226.854.041.714,00	13.390.526.082,00							226.975.992.236,00	
	X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							213.354.918.632,00	230.135.409.521,00	226.854.041.714,00	13.390.526.082,00							226.975.992.236,00	
	5.02	KEUANGAN							213.354.918.632,00	230.135.409.521,00	226.854.041.714,00	13.390.526.082,00							226.975.992.236,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	18.495.744.775,00	44.837.040.087,00	46.393.312.272,00	18.695.185.09 1,00							36.256.990.867,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	24.000.000,00	13.519.873,00	8.992.999,00	-15.007.101,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	1.579.418,00	849.368,00	-1.650.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.819.600,00	1.116.376,00	-1.383.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.979.400,00	1.341.000,00	-1.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.477.000,00	1.931.426,00	-1.568.574,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	2.933.975,00	2.257.460,00	-7.742.540,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.227.305,00	701.331,00	-798.669,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.402.825,00	775.900,00	-724.200,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						16.825.526.754,00	43.036.410.894,00	46.883.060.252,00	28.977.683.476,00				-	-			33.942.998.055,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	16.581.526.754,00	43.036.647.624,00	46.591.537.036,00	28.832.010.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH	-	-	-	-	32.213.918.983,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.006.000,00	233.962.824,00	389.592.689,00	16.032.859,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-	-	1.714.576.172,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	10.006.000,00	2.797.071,00	1.845.625,00	6.151.376,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-	-	-	7.560.055,56	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				18 Laporan	18 Laporan	2.506.000,00	1.796.412,00	1.038.706,00	-1.485.294,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-	-	3.500.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran																				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.506.000,00	1.267.954,00	661.208,00	-834.794,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-	-	-	3.500.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-	-	27.768.021,00	23.043.911,00	21.777.700,00	-6.990.321,00			-	-	-	-	34.136.765,36	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua		-	-	-	-	7.000.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0008	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27.768.021,00	23.043.911,00	21.777.700,00	-6.990.321,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	-	-	-	-	27.136.765,36	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	10.000.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang				0 0	0 0	76.006.000,00	0,00	0,00	-71.955.000,00	Kab. Lombata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						117.500.000,00	169.796.822,90	138.444.248,50	396.955.754,00				-			134.500.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	8.394.630,00	5.236.750,00	-2.263.230,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA	-	-			2.500.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	46.291.192,00	31.753.488,00	-28.246.504,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA	-	-			30.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA	-	-			10.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	262.000.000,00	108.110.000,00	87.944.000,00	182.056.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA	-	-			100.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					-	500.000.000,00	113.110.700,00	68.956.622,00	-431.043.378,00			-	-			463.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	113.110.700,00	68.956.622,00	-31.043.378,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATA	-	-			80.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.37.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			300.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.38	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							362.500.000,00	173.457.154,50	191.185.416,00	-171.314.681,00			-	-			375.637.372,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.38.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	276.000.000,00	177.762.500,00	139.211.500,00	-160.738.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA	-	-			272.909.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.38.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.010.000,00	65.800.800,00	76.043.100,00	3.958.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL		- -			100.431.372,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.50.0.000,00	9.050.954,00	8.950.119,00	-1.599.881,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		- -			2.500.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daera i Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	246.410.000,00	308.414.925,00	302.865.155,00	54.415.155,00				- -	-	-			126.549.680,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan				46 Unit	46 Unit	79.410.000,00	138.186.965,00	108.241.365,00	28.791.965,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		- -			106.549.680,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.05	Pemeliharaan Mebel																				
			Jumlah Mebe yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- -			5.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	20.010.000,00	62.679.000,00	27.480.000,00	7.480.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN		- -			0,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedu g Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.00.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- -			5.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	25.00.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- -			5.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	308.679.880,00	167.144.780,00	167.144.080,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PENGHEMAT		-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pe ayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pe ayanan publik			5.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**213.354.518.932,00**	**239.136.496.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.299.526.082,00**									**226.978.592.236,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KE**							**213.354.518.932,00**	**239.136.496.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.299.526.082,00**									**226.978.592.236,00**	
	5.02.01.2.09.0.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**213.354.518.932,00**	**239.136.496.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.299.526.082,00**									**226.978.592.236,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**213.354.518.932,00**	**239.136.496.521,00**	**226.654.041.714,00**	**13.299.526.082,00**									**226.978.592.236,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-				-	-	**194.466.710.937,00**	**184.578.633.631,00**	**179.809.658.127,00**	**-1.645.794.937,00**									**180.463.863.636,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	830.90.000,00	1.204.132.182,00	855.022.379,00	25.022.079,00				-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pe ayanan publik 3.	-		15.308.466.758,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0.01	Koordinasi dan Penyusunan RLP dan RPAS																				

			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	41.660.717,00	24.052.721,00	9.052.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			42.293.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																				
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	30.817.781,00	20.325.684,00	5.325.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			42.293.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 0	2 0	338.000.000,00	147.619.109,00	461.059.675,00	66.059.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2.			438.982.790,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	338.000.000,00	455.849.887,00	396.982.112,00	43.982.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			396.845.040,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																				
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	28.431.961,00	10.621.887,00	-19.378.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			14.278.065.026,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	141.782.387,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			116.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	13.038.273.992,00	13.128.345.391,00	11.236.575.429,00	-1.811.698.567,00			-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2.	-		418.907.676,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	144.897.539,00	87.835.749,00	51.835.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			141.488.376,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.3.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyebitan Anggaran Kas dan SPD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	41.389.332,00	23.332.768,00	-26.667.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			69.129.410,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																				

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	12.862.271.462,00	12.149.434.662,00	11.004.257.809,00	-1.846.016.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK PENERANGAN JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL		3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik			69.279.189,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																				
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	56.316.530,00	31.356.529,00	-16.941.480,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL		3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik			60.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pendatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	0 6	50.000.000,00	138.313.027,00	80.049.683,00	30.049.683,00	Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATA		3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan			80.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	467.000.000,00	140.791.054,00	305.335.929,00	-160.664.071,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3.	-		165.459.529,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																				
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	15.006.900,00	12.453.714,00	4.368.232,00	-10.941.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			29.998.454,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																				
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	80.350.282,00	59.500.444,00	22.495.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			97.344.375,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	335.000.000,00	101.670.726,00	218.146.441,00	-116.853.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik			314.831.926,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Temuan/ LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																				

			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	44.516.340,00	38.630.812,00	8.389.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL		3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 2. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			345.117.284,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.92.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	180.073.496.885,00	169.105.383.884,00	167.421.671.694,00	12.651.825.171,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3.	-		173.944.227.673,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.92.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																				
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	174.659.812.021,00	166.175.907.460,00	163.792.215.263,00	-8.976.597.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik			170.946.610.083,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.92.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.404.804.244,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	-3.775.227.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan, Semua	DSA BELANJA LAINNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SDA KEHUTANAN DANA		3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik			3.001.811.870,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.93**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-				-	-	**440.000.000,00**	**118.927.809,00**	**481.121.314,00**	**539.427.334,00**							**1.279.427.334,00**	
	5.02.93.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-					-	440.000.000,00	118.927.809,00	481.121.314,00	31.121.314,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3.	-		1.279.427.334,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																				
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.193.564,00	12.351.388,00	-27.634.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			80.382.160,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.900.000,00	10.351.811,00	5.495.424,00	-4.504.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			10.382.172,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0005	Pemeliharaan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	108.663.572,00	340.747.686,00	190.747.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			638.810.076,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				-	-	100.000.000,00	1,00	0,00	-100.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3.			110.000.000,00	BADAN KEJANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.93.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	53.794.536,00	59.037.118,00	-46.962.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			400.198.445,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	17.469.670,00	12.881.530,00	2.133.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			31.763.266,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.93.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	62.492.250,00	30.618.250,00	5.618.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan			37.850.531,00	BADAN KE JANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								213.264.618.632,00	230.138.400.231,00	226.664.041.714,00	13.399.826.083,00							226.978.882.236,00	

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

KEPALA BADAN KEUANGANDAEARAH
KABUPATEN LEMBATA,

LUKMAN SUKSIN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700424200012 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat Renja daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerh, yang disusun berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan;dan /atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun tahapan penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah meliputi penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Lembata menjadi pedoman penyusunan Perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daearah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata (Berita

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Pendapatan Daerah dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang pengawasan urusan pemerintahan dan Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyususnan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan triwulan I.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan terhadap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun 2025 perlu dilakukan untuk memastikan target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD :

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran dan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah (PD) Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10		11 (7+8+9+10)		12 (5+11)		13=(12/4*100%)		14
			k		Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
BADAN KEUANGAN DAERAH			100	%	21.653.701.679	48,7	10.541.929.856	21,2	6.323.336.050	10,7	679.565.915	-	-	-	-	-	-	10,7	679.565.915	3,1	679.565.915	0,8	2.865.373.943	Bapenda
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	13.968.291.407	55,7	7.793.305.682	33,6	4.965.100.164	13,6	679.565.915	-	-	-	-	-	-	13,6	679.565.915	69,3	8.472.871.597	17,3	2.118.217.899	Bapenda
5 02 01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	%	100.726.000	47,8	48.185.725	17,3	17.400.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	47,8	48.185.725	12,0	12.046.431	Bapenda
5 02 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, perubahan rencana perangkat daerah	12	Dokumen	11.488.290	8	8.090.754		2.899.950	-	-							0,0	-	8,0	8.090.754	19,8	2.272.688,50	Bapenda
5 02 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	5	dokumen	18.987.180	3	3.858.255	1	2.899.950	-	-							0,0	-	3,0	3.858.255	5,1	964.563,75	Bapenda
5 02 01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	5	dokumen	14.344.770	2	5.099.176	-		-	-							####	-	#####	5.099.176	8,9	1.274.794,00	Bapenda
5 02 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	5	dokumen	14.955.390	3	7.326.401	1	2.899.950	-	-							0,0	-	3,0	7.326.401	12,2	1.831.600,25	Bapenda
5 02 01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	5	dokumen	14.754.920	3	10.996.926	1	2.899.950	-	-							0,0	-	3,0	10.996.926	18,6	2.749.231,50	Bapenda
5 02 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	10	dokumen	12.3 2.090	6	6.870.938	2	2.899.950	-	-							0,0	-	6,0	6.870.938	14,0	1.717.734,50	Bapenda
5 02 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20	dokumen	13.843.440	12	4.943.275	4	2.901.000	-	-							0,0	-	12,0	4.943.275	8,9	1.235.818,75	Bapenda

5 02 01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100	%	13.117.803.667	55,1	6.697.974.317	30,6	4.013.256.612	16,5	661.289.394	-	-	-	-	-	-	16,5	661.289.394	67,5	7.358.863.711	16,9	1.839.715.928	Bapenda
5 02 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bulan	12.632.584.577	42	5.432.634.604	14	3.837.833.282	4,0	632.198.394						-	16,5	632.198.394	55,9	7.064.832.998	14,0	1.766.208.249,50	Bapenda
5 02 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	60	Bulan	442.162.360	36	244.336.650	12	166.624.450	12,0	29.091.000						-	17,5	29.091.000	61,8	273.427.650	15,5	68.356.912,50	Bapenda
5 02 01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	5	dokumen	12.625.000	3	10.862.000	1	2.899.950	-							-	0,0	-	86,7	10.862.000	21,7	2.715.500,00	Bapenda
5 02 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	90	dokumen	15.783.930	54	7.241.688	18	2.899.950	-							-	0,0	-	45,9	7.241.688	11,5	1.810.422,00	Bapenda
5 02 01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis TA 2025	5	dokumen	13.867.890	3	2.496.375	1	2.901.000	-	-						-	0,0	-	18,4	2.496.375	4,6	624.843,75	Bapenda
5 02 01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		%	97.700.560	53,1	52.073.315	26,5	25.959.900	19,4	5.040.000	-	-	-	-	-	-	19,4	5.040.000	74,5	98.913.315	18,6	14.728.329	Bapenda
5 02 01.2.03.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	10	Laporan	48.855.290	6	6.778.877	2	2.899.950	-	-	-						0,0	-	13,9	6.778.877	3,5	1.694.719,25	Bapenda
5 02 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Barang Pengguna yang disusun	10	Laporan	48.855.290	6	47.094.438	2	23.059.950	21,9	5.040.000	-						21,9	5.040.000	106,6	52.134.438	26,7	13.033.609,50	Bapenda
5 02 01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan untuk mendukung Tupoksi Perangkat Daerah		%	-	100,0	5.355.338	100,0	2.899.950	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	######	5.355.338	#####	1.338.835	Bapenda
5 02 01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang difasilitasi				100	5.355.338	20	2.899.950	-								0,0	-	#####	5.355.338	#####	1.338.834,50	
5 02 01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			%	312.319.200	109,7	342.581.580	71,4	222.915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	######	342.581.580	#####	85.645.395	Bapenda

5 02 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	30	Jenis	15.855.000	5	7.676.581	5	3.394.625	-								0,0	-	48,4	7.676.581	12,1	1.919.145,25	Bapenda
5 02 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	300	Jenis	68.764.290	180	63.336.507	60	12.454.153	-								0,0	-	100,9	69.336.507	25,2	17.334.126,75	Bapenda
5 02 01.2.06.05	Penyediaan Sprang Cetak dan Penggandan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	10	Jenis	28.254.000	6	11.531.992	2	3.516.030	-								0,0	-	40,8	11.531.992	10,2	2.882.998,00	Bapenda
5 02 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	Jenis	6.480.000	2	500.000	1	1.000.000	-	-							0,0	-	7,7	500.000	1,9	125.000,00	Bapenda
5 02 01.3.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Interfaa kekuasaan dalam Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	50	kali	193.026.000	-	253.536.500	25	202.550.000	-								0,0	-	131,3	253.536.500	32,8	63.384.125,00	Bapenda
5 02 01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Cakupan pemingkatan sarana pendukung bapokol	**100**	**%**	**47.515.000**	**107,8**	**51.292.000**	**891,9**	**424.231.888**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**#####**	**51.292.000**	**#####**	**12.822.000**	**Bapenda**
5 02 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	35	Unit	15.855.000	-	-	5	263.540.675	-								0,0	-	0,0	-	0,0	-	Bapenda
5 02 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10	Jenis	15.855.000	-	-	3	19.774.201	-								0,0	-	0,0	-	0,0	-	Bapenda
5 02 01.3.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25	Unit	15.855.000	5	51.292.000	5	143.917.012	-								0,0	-	323,5	51.292.000	80,9	12.823.000,00	Bapenda
5 02 01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Penyelenggaraan Manajemen PNS dan Non PNS/PPK**	**100**	**%**	**127.105.180**	**63**	**278.879.656**	**81,7**	**193.909.796**	**10,9**	**10.279.500**	-	-	-	-	-	-	**10,9**	**10.279.500**	**1.692**	**289.256.156**	**422,9**	**73.312.539**	**Bapenda**
5 02 5.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Intensitas Pelayanan Jasa Surat Menyurat	25	Bulan	15.860.000	15	243.858.671	12,0	80.762.119	9,9	8.000.000							9,9	8.000.000	1608,3	251.858.671	402,1	62.964.667,75	Bapenda
5 02 5.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Telepon	15	Jenis	98.007.900	9	27.937.650	3,0	17.310.900	13,7	2.379.500							13,7	2.379.500	30,3	30.317.150	7,7	7.579.287,50	Bapenda
5 02 5.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih dalam mendukung Jasa Kebersihan Kantor	65	Jenis	13.487.280	30	7.074.335	13,0	5.838.747	-	-							0,0	-	52,5	7.074.335	13,1	1.768.583,75	Bapenda
5 02 01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**Dok**	**185.601.410**	**179,0**	**310.572.751**	**94,0**	**174.524.290**	**1,6**	**2.857.021**	-	-	-	-	-	-	**1,6**	**2.857.621**	**#####**	**310.429.772**	**#####**	**79.607.443**	**Bapenda**

5	02	5.02.09.02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	60	Unit	140.691.415	18	239.591.491	33,0	123.670.000	2,3	2.857.021							2,3	2.857.021	164,5	231.439.512	41,1	57.859.628,00	Bapenda
5	02	5.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	8			4	3.822.000	1,0	9.931.520									0,0	-	#####	3.822.000	#####	956.500,00	
5	02	5.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					16.581.250		4.142.250									0,0	-	#####	16.581.250	#####	4.145.312,50	
5	02	5.02.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dikelola	2	Unit	45.000.000		66.568.010	1,0	36.560.520	-	-							0,0	-	148,0	66.568.010	37,0	16.847.302,50	Bapenda
5	**02**	**04.2.01**	**Program Penyelenggaraan Pemungutan Daerah**	**Persentase Capaian Realisasi PAD tahun yang Bersangkutan**			**7.865.470.263**	**35,9**	**2.743.624.174**	**17,9**	**1.339.215.886**	**-**	**-**	#####	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**15,9**	**2.746.624.174**	**3,8**	**687.156.544**	**Bapenda**
5	02	04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan PajakDaerah	Jumlah Produk Hukum tentang Pendapatan Asli Daerah	60	Unit	657.164.860		106.405.880	30	38.577.344	-								0,0	-	19,2	106.406.880	4,0	26.601.470,00	Bapenda
5	02	04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Produk Hukum tentang Pendapatan Asli Daerah	60	Unit	657.164.860		140.600.434	30	61.921.888	-								0,0	-	21,4	140.600.434	5,3	35.150.108,50	Bapenda
5	02	04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem Pajak	10	kali	318.714.729		22.782.891	9	21.741.505	-								0,0	-	7,5	22.782.891	1,9	5.945.722,75	Bapenda
5	02	04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana pungut yang disediakan	20	Jenis	1.000.826.203		683.836.375	10	240.378.835	-								0,0	-	66,4	683.836.375	16,6	170.959.093,75	Bapenda
5	02	04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang terdata	3000	Objek Pajak	336.615.958		310.722.236	1.500	97.096.946	-								0,0	-	92,3	310.722.236	23,1	77.680.559,50	Bapenda
5	02	04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aparatur pengelola Aplikasi yang didampingi	12	Orang	432.339.372		5.066.925	6	6.353.531	-								0,0	-	1,2	5.066.925	0,3	1.266.726,25	Bapenda
5	02	04.2.01.07	Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan/ Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah dokumen Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB yang diverifikasi					4.851.915		24.884.651	-								0,0	-	#####	4.851.915	#####	1.212.978,75	
5	02	04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib pajak daerah yang diverifikasi					5.008.768		12.721.293	-								0,0	-	#####	5.008.768	#####	1.252.192,00	
5	02	04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak dan Retribusi yang dikonsultasikan	6	Dokumen	2.707.420.500		624.940.194	3	380.672.354	-								0,0	-	23,1	624.940.194	5,8	156.235.048,50	Bapenda

5	02	04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data verifikasi pajak yang dikirim	6	Dokumen	131.836.920		18.852.582	3	56.830.174	-								0,0	-	14,4	18.852.582	3,6	4.738.145,50	Bapenda
5	02	04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah PAD yang direalisasikan	54	milyar	774.322.822		291.794.894	27	128.169.852	-								0,0	-	37,7	291.794.894	8,4	72.948.723,50	Bapenda
5	02	04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak daerah yang ditindaklan					5.222.768		24.106.297	-								0,0	-	#####	5.222.768	#####	1.305.692,00	
5	02	04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diendalikan	6	Dokumen	615.154.040		40.688.826	3	20.396.331	-								0,0	-	6,6	40.688.826	1,8	10.172.206,50	Bapenda
5	02	04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						23.763.506		29.181.203	-								0,0	-	#####	23.763.506	#####	5.940.876,50	
5	02	04.2.01.15	Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah						462.985.998		185.983.682	-								0,0	-	#####	462.985.998	#####	115.746.499,50	
Rata-Rata Capaian Kinerja %																									
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja																									
Tindak lanjut yang dilaksanakan (dalam triwulan berkutnya *)																									
Tindak lanjut yang dilaksanakan dalam Rapat SKPD Kabupaten/Kota berikutnya *)																									

Disusun
di Lewoleba, tanggal 05 April 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lembata,

Thomas Tip Des Lelangnan, SH., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19651230 199312 1 002

Dievaluasi
di Lewoleba, tanggal Juni 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Lembata,

drh. Mathias A.K. Beyeng
Pembina Utama Muda
NIP. 19720514 200003 1 007

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahanya itu :

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolan Pajak Daerah secara fisik tetap dilaksanakan di triwulan I sementara pengganggarannya di anggarkan pada triwulan II dan III.
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Derah secara fisik tetap dilaksanakan di triwulan I sementara pengganggarannya di anggarkan pada triwulan II dan IV
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah secara fisik tetap dilaksanakan di triwulan I sementara pengganggarannya di anggarkan pada triwulan II dan secara fisik tetap dilaksanakan di triwulan I sementara pengganggarannya di anggarkan pada triwulan II, III dan IV
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pajak Daerah secara realisasi fisik dilaksanakan namun realisasi keuangaan dianggarkan sebesar Rp. 1.810.313,00 sedangkan pertanggungjawabannya belum dilaksanakan, dan akan di SPJ pada triwulan berikutnya.
5. Sub Kegiatan Pendataan da Pendaftaran Objek Pajak Daerah akan dilakukan pada triwulan II, III dan IV
6. Sub kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah akan dilakukan pada triwulan III dan IV
7. Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.
8. Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah akan dilakukan pada triwulan II, III dan IV.
9. Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.

10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.
11. Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.
12. Sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah secara fisik di lakukan di triwulan I dan akan di pertanggungjawabkan pada triwulan II, III dan IV.
14. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.
15. Sub kegiatan Elektronisasi Transaksi Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan pada triwula II, III dan IV.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Periode Tahun 2025				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja							Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN									5.365.000.000					5.901.500.000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4.470.000.000					4.917.000.000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerh									45.000.000					49.500.000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000,00(	DAU		h	25%	5.500.000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen PerubahanDPA SKPD	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen PerubahanDPA SKPD	1 dokumen	20.000.00(	DAU			25%	22.000.000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	2 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	2 laporan	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.114.915.800					4.526.407.160
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14 orang/ bulan	Lewoleba	25%	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14 orang/ bulan	3.953.415.80(	DAU, PAD			25%	4.348.757.160
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	137.500.00(	DAU, PAD			25%	151.250.000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	8.000.00(	DAU			25%	8.800.000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan hasil laporan koordinasi penyusunan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan hasil laporan koordinasi penyusunan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	8.000.00(	DAU			25%	8.800.000

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Periode Tahun 2025			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen laporan dan hasil analisa prognosis realisasi anggaran	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen laporan dan hasil analisa prognosis realisasi anggaran	1 laporan	8.000.00(	DAU			25%	8.800.000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16.000.000					17.600.000
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	2 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	2 dokumen	8.000.00(	DAU			25%	8.800.000
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah lapora penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah lapora penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	8.000.00(	DAU			25%	8.800.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								8.000.000				25%	8.800.000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Admin strasi Kepegawaian	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	8.000.00(	BHP, BHP Prov			25%	8.800.000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD				25%	Jumlah ASN SKPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	-				25%	-
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130.000.000				25%	143.000.000
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	Lewoleba	25%	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	12.000.00(	BHP			25%	13.200.000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Lewoleba	25%	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	28.000.00(	BHP			25%	30.800.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Lewoleba	25%	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.000.00(	BHP			25%	11.000.000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	75.000.00(	DAU			25%	82.500.000
5	02	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								47.500.000				25%	52.250.000
5	02	02	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	10 unit	Lewoleba	25%	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	10 unit	23.000.00(	BHP			25%	25.300.000

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Periode Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	Lewoleba	25%	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	5.000.00(	BHP			25%	5.500.000
5	02	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	Lewoleba	25%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	19.500.00(	BHP			25%	21.450.000
5	02	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.000.000				25%	38.500.000
5	02	02	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.00(	DAU			25%	5.500.000
5	02	02	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Telepon yang disediakan	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik, Air dan Telepon yang disediakan	1 laporan	15.000.00(	DAU			25%	16.500.000
5	02	02	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 paket	Lewoleba	25%	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 paket	15.000.00(	BHP			25%	16.500.000
5	02	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								73.584.400				25%	80.942.840
5	02	02	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	Lewoleba	25%	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	28.584,40(	DAU			25%	31.442,840
5	02	02	2.09	05	Pemeliharaan Meubel	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah meubel yang dipelihara	10 unit	Lewoleba	25%	Jumlah meubel yang dipelihara	10 unit	10.000.00(	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	Lewoleba	25%	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10.000.00(	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah gedung yang dipelihara dan gudang arsip yang disewa	2 gedung	Lewoleba	25%	Jumlah gedung yang dipelihara dan gudang arsip yang disewa	2 gedung	25.000.00(	BHP			25%	27.500.000
5	02	02	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi PD	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	2 gedung	Lewoleba	25%	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	2 gedung	-				25%	-
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								895.000.000					984.500.000
5	02	02	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah								895.000.000				25%	984.500.000

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Periode Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	02	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	10.000.000	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	10.000.000	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	10.000.000	BHP			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	Lewoleba	25%	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	350.000.000	PAD			25%	385.000.000
5	02	02	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	1 laporan	30.000.000	BHP			25%	33.000.000
5	02	02	2.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	10.000.000	BHP			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	72.000 OP	Lewoleba	25%	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	72.000 OP	10.000.000	BHP			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dokumen	10.000.000	BHP			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil layanan dan konsultasi pajak daerah	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen hasil layanan dan konsultasi pajak daerah	1 dokumen	345.000.000	DAU			25%	379.500.000

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Periode Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	02	02	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah laporan hasil penelitian dan verifikasi data pajak daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan hasil penelitian dan verifikasi data pajak daerah	1 laporan	10.000.000	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah PAD yang direalisasikan	Rp. 21,000,000,000,-	Lewoleba	25%	Jumlah PAD yang direalisasikan	Rp. 21,000,000,000,-	60.000.000	DAU			25%	66.000.000
5	02	02	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 dokumen	10.000.000	BHP			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 dokumen	Lewoleba	25%	Jumlah dokumen hasil pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 dokumen	10.000.000	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	10.000.000	PAD			25%	11.000.000
5	02	02	2.01	15	Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	Lewoleba	25%	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	10.000.000	PAD			25%	11.000.000

Lewoleba, 05 April 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lembata,

Thomas Tip Des Lelangrian, SR., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19651230 199312 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 07 April 2025
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lembata

Thomas Tip Des Lelangrian, SH.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP 19651230 199312 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 yang menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk menjamin keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta sinergis dalam upaya mewujudkan target kinerja yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dilakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesbangpol dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan yang meliputi pergeseran antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, serta memuat penambahan atau pengurangan target kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan renja sampai triwulan II Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kabupaten Lembata

Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2025

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD

SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran dan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025).		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah (PD) Penanggungjawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100%		15
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEMBATA					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
					300	**15.015.282.414**	**100**	22.237.242.291	**34**	**3.387.985.264**	**17**	**500.058.481**	**1**	**###########**	**11**	-	**1**	-	**30**	**1.361.508.567**	**89**	**23.591.683.858**	**30**	**#DIV/0!**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		**100**	**10.504.317.629**	**100**	2.414.933.244	**100**	**2.181.217.746**	**4**	**498.108.481**	**6**	**###########**	**7**	-	**3**	-	20	1.057.090.867	**374**	**3.464.957.111**	**374**	**33**		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**		**100**	**200.000.000**	**25**	14.268.000	**25**	**7.256.700**	**17**	-	**2**	**6.933.000**	**4**	-	**2**	-	25	6.933.000	**24**	**14.134.000**	**24**	**7**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra Renja Renja Perubahan	Dokumen	24	40.000.000	6	2.378.000	6	1.209.450	2	-	1	1.155.500	2	-	1	-	6	1.155.500	12	3.533.500	50	9		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	20.000.000	1	2.378.000	1	1.209.450	1	-	-	1.155.500	-	-	-	-	1	1.155.500	2	3.533.500	50	18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	20.000.000	1	2.378.000	1	1.209.450	1	-	-	1.155.500	-	-	-	-	1	1.155.500	2	3.533.500	50	18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	40.000.000	1	2.378.000	1	1.209.450	1	-	-	1.155.500	-	-	-	-	1	1.155.500	2	3.533.500	50	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	40.000.000	1	2.378.000	1	1.209.450	1	-	-	1.155.500	-	-	-	-	1	1.155.500	2	3.533.500	50	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	40.000.000	1	2.378.000	1	1.209.450	1	-	-	1.155.500	-	-	-	-	1	1.155.500	2	3.533.500	50	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	-	1		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**8.882.619.389**	**25**	1.857.262.814	**25**	**1.968.056.808**	**6**	**457.253.421**	**7**	##########	**7**	**-**	**6**	**-**	**45**	**932.112.410**	**90**	**2.789.375.224**	**90**	**31**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	56	8.304.379.389	14	1.728.238.614	14	1.862.387.708	2	439.941.421	4	##########	4	-	4	-	14		28	2.604.371.624	50	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	48	522.240.000	12	126.554.550	12	104.044.550	3	17.312.000	3	37.433.700	3	-	3	-	12	54.745.700	24	181.300.250	50	35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	28.000.000	1	2.469.650	1	1.624.550	1	-	-	1.233.700	-	-	-	-	1	1.233.700	2	3.703.350	50	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	72	28.000.000	18		18	-	4	-	5	-	5	-	4	-	18	-	36	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Ketersediaan Dokumen Pengelola Barang Pengguna SKPD**		**100**	**142.054.240**	**25**	22.538.000	**25**	**21.546.200**	**-**	**3.360.000**	**10**	**6.720.000**	**10**	**-**	**5**	**-**	**5**	**10.080.000**	**10**	**32.618.000**	**10**	**23**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	28.000.000	3		3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	6	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	114.054.240	2	22.538.000	2	21.546.200	-	3.360.000	1	6.720.000	1	-	-	-	2	10.080.000	4	32.618.000	50	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terselenggaranya manajemen PNS**		**100**	**160.000.000**	**25**		**25**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**13**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Orang	8	40.000.000	2		2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	120.000.000	2		2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan admnistrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**330.000.000**	**25**	260.863.122	**25**	**43.650.702**	**-**	**20.526.780**	**0**	**13.382.700**	**0**	**-**	**0**	**-**	**15**	**33.909.480**	**2.540**	**294.772.602**	**2.540**	**89**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	20	10.000.000	5	2.465.800	5	1.260.454	-	-	1	1.250.000	3	-	1	-	5	1.250.000	10	3.715.800	50	37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkpaan Kantor yang disediakan	Paket	20	60.000.000	5	7.488.000	5	5.100.498	-		1	3.248.000	3	-	1	-	5	3.248.000	10	10.736.000	50	18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	####	40.000.000	#####	4.988.900	#####	4.131.750	-	-	-	1.974.700	-	-	-	-	-	1.974.700	2.500	6.963.600	25	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	20	20.000.000	5		5	-	-	-	1	-	3	-	1	-	5	-	10	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	200.000.000	10	245.920.422	10	33.158.000	-	20.526.780	-	6.910.000	-	-	-	-	-	27.436.780	10	273.357.202	25	137	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**		**100**	**160.000.000**	**25**	32.225.000	**25**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**14**	**-**	**4**	**-**	**7**	**-**	**14**	**32.225.000**	**14**	**20**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	40.000.000	2		2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	-	50	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	120.000.000	5	32.225.000	5	-	-	-	1	-	3	-	1	-	5	-	10	32.225.000	50	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**335.524.000**	**25**	143.173.471	**25**	**50.552.336**	**6**	**12.749.280**	**6**	**16.170.560**	**6**	-	**6**	-	**126**	**28.919.840**	**252**	**172.093.311**	**252**	**51**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	384	292.128.000	96	117.950.000	96	29.407.750	24	9.700.000	24	10.100.000	24	-	24	-	96	19.800.000	192	137.750.000	50	47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	96	33.396.000	24	22.548.471	24	19.963.350	6	3.049.280	6	6.070.560	6	-	6	-	24	9.119.840	48	31.668.311	50	95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	10.000.000	6	2.675.000	6	1.181.236	1	-	1	-	2	-	2	-	6	-	12	2.675.000	50	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara**		**100**	**294.120.000**	**25**	84.602.837	**25**	**90.155.000**	**3**	**4.219.000**	**3**	**40.917.137**	**3**	-	**3**	-	**16**	**45.136.137**	**52**	**129.738.974**	**52**	**44**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	32	214.120.000	8	77.312.837	8	90.155.000	2	4.219.000	2	40.917.137	2	-	2	-	8	45.136.137	16	122.448.974	50	57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	80	20.000.000	20		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	25	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	32	20.000.000	8	7.290.000	8	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	16	7.290.000	50	36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	20.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	20.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**		174	-	-	300.441.180	44	117.678.970	-	-	-	23.609.450	60	-	-	-	60	23.609.450	60	324.050.630	35	#DIV/0!	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi negara		**174**	-	-	300.441.180	**44**	**117.678.970**	-	-	-	**23.609.450**	**60**	-	-	-	60	**23.609.450**	60	**324.050.630**	**35**	**#DIV/0!**	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		200	154.332.880	-	300.441.180	50	9.157.200	-	-	-	30.213.450	50	-	-	-	50	19.812.000	50	320.253.180	**25**	**208**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		348		-		87	108.521.770	-	-	-	23.609.450	87	-	-	-	87	13.208.000	87	13.208.000	**25**	**#DIV/0!**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Terselenggaranya politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA**	**Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**		100	1.236.040.440	-	18.287.528.517	5	642.320.098	25	-	-	6.604.000	-	-	-	-	25	6.604.000	25	18.294.132.517	25	1.480	

		SERTA BUDAYA POLITIK																						
		Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya partisipasi aktif Ormas dan LSM dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan		**100**	**1.236.040.440**	-	18.287.528.517	**25**	**642.320.098**	**25**	-	-	**6.604.000**	-	-	-	-	25	6.604.000	25	18.294.132.517	**25**	**1.480**	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200	1.176.240.440	-	18.268.554.117	50	642.320.098	50	-	-	6.604.000	-	-	-	-	50	6.604.000	50	18.275.158.117	25	1.554	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan	4	59.800.000	-	18.974.400	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18.974.400	25	32		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Terlaksanany a pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**100**	**60.200.000**	-	9.479.650	**25**	**5.514.250**	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	9.479.650	25	16		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		**100**	**60.200.000**	-	9.479.650	**25**	**5.514.250**	**25**	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	9.479.650	25	16		

	lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Laporan	4	60.200.000	-	9.479.650	1	5.514.250	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9.479.650	25	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Laporan	100	151.923.300	-	77.454.700	25	17.671.750	25	-	-	4.969.750	-	-	-	-	25	4.969.750	25	82.424.450	25	54	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terciptanya harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan	Laporan	**100**	151.923.300	-	77.454.700	**25**	17.671.750	**25**	-	-	4.969.750	-	-	-	-	25	4.969.750	25	82.424.450	25	54	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		**200**	**151.923.300**	-	77.454.700	**50**	17.671.750	**50**	-	-	**4.969.750**	-	-	-	-	50	4.969.750	50	82.424.450	25	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	Terlaksananya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	Dokumen	100	3.062.801.045	-	1.147.405.000	5	423.582.450	25	1.950.000	-	###########	-	-	-	-	25	269.234.500	25	1.416.639.500	25	46	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Semakin berkualitasnya penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional		**100**	**3.062.801.045**	-	1.147.405.000	**25**	**423.582.450**	**25**	**1.950.000**	-	###########	-	-	-	-	25	269.234.500	25	1.416.639.500	**25**	**46**	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		200	2.921.787.790	-	1.142.605.000	50	15.333.275	50	1.950.000	-	2.800.500	-	-	-	-	50	4.750.500	50	1.147.355.500	25		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	141.013.255	-	4.800.000	1	408.249.175	1	-	-	###########	-	-	-	-	1	264.484.000	1	269.284.000	25	191	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										Rata-Rata Capaian Kinerja %														
										Predikat Kinerja														

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, nampak bahwa realisasi kinerja Badan Kesbangpol hingga triwulan II Tahun 2025 adalah 40,19% dengan realisasi keuangan untuk Belanja Operasional sebesar 40,19% yakni terealisasi Rp. 1.361.508.567,- dari total anggaran Rp. 3.387.985.264,-. Pencapaian kinerja program/kegiatan dan realisasi keuangan sudah sesuai dengan perencanaan. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena rencana capaian program/kegiatan serta realisasi keuangan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai perencanaan. Masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan. Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

- Disiplin aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang masih rendah.
- Terbatasnya jumlah aparatur dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Badan Kesbangpol.

Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraiakan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang Capaian Kinerja kegiatan dan realisasi keuangan yang masih 0%. Hal ini disebabkan karena penganggaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan IV.
2. Terhadap kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut diatas maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:
   - Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf, antar Bidang dan seksi serta antara Badan Kesbangpol dengan stakeholders dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan;
   - Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggaran dan target pencapaian kinerja program/kegiatan prioritas dan dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Secara umum rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, mengakomodir 6 program, dengan 13 kegiatan, 36 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.387.985.264,- yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD

   Perubahan Renja tahun 2025 terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan pagu Rp. 2.181.217.746,- jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu Rp. 4.069.553.608,-.
2. Urusan Pemerintahan Umum

   Dalam Perubahan Renja tahun 2025 direncanakan 5 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu Rp. 1.206.767.518,-, jika dibandingkan dengan Renja tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja Badan Kesbangpol dalam tahun anggaran 2025 berkaitan dengan urusan ini terdiri dari 5 program dan 5 kegiatan dengan pagu Rp. 1.808.054.064,-.

Uraian lengkap rencana program/kegiatan dan anggaran pada perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang(10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.255.635.421,00	4.069.553.608,00	3.387.985.264,00	-1.867.650.157,00							**5.183.111.428,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							5.255.635.421,00	4.069.553.608,00	3.387.985.264,00	-1.867.650.157,00							**5.183.111.428,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							5.255.635.421,00	4.069.553.608,00	3.387.985.264,00	-1.867.650.157,00							**5.183.111.428,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	2.552.959.779,00	2.261.499.544,00	2.181.217.746,00	376.039.572,00							**2.928.999.351,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja	-				-	-	15.000.000,00	14.513.100,00	7.256.700,00	-7.743.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD Hasil Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			dan Laporan Hasil													tatakelola dan kinerja					
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.418.850,00	1.209.450,00	-1.290.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BUNGA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	-				-	-	1.909.765.294,00	1.975.345.408,00	1.968.056.808,00	58.291.514,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja	-		2.358.574.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.803.666.644,00	1.862.387.708,00	1.862.387.708,00	58.721.064,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kab. Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik			2.214.014.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	101.098.650,00	110.538.850,00	104.044.550,00	2.945.900,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kab. Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik			130.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.418.850,00	1.624.550,00	-875.450,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	27.628.868,00	23.704.150,00	21.546.200,00	-6.082.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja	-		35.513.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Peningkatan tatakelola dan pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV
PENUTUP

1. Catatan penting dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2025 :

   a. Setiap Kepala Bidang wajib menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) Tahun 2025 yang dihimpun dan diharmonisasikan oleh Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Para Kepala Bidang harus saling berkoordinasi untuk menjamin sinergitas dan konsistensi antara Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dengan RDPPA Tahun Anggaran 2025.
   c. Dalam hal alokasi atau ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana termuat dalam Perubahan Rencana Kerja, maka penyusunan RDPPA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

2. Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2025

   a. Setiap Bidang yang menjadi unit kerja pelaksanaan Rencana Kerja harus mengevaluasi Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 yakni membandingkan antara target program/kegiatan dan jumlah dana dalam Perubahan Rencana Kerja dengan jumlah program/kegiatan yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
   b. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :
   a. Setiap Kepala Bidang wajib Menyusun RDPPA dan anggaran kas dan direkap oleh Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan untuk disampaikan kepada TAPD guna mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
   b. Setiap Kepala Bidang sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan wajib mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam DPPA Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Kabupaten Lembata,

Petrus Kanisius Payong, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19710212 200012

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencnaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerjs Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila ada ketidaksesuian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- ✓ Perekembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan;
- ✓ Keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunkan untuk tahun berjalan.

Penyusunan dokumen ini dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain : orientasi mengenai perubahan renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja dan penetapan perubahan renja setelah perubahan RKPD ditetapkan dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar Sub kegiatan, penambahan maupun penghapusan Sub kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomr 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Nomor 001,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nonor 0116);Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata (Berita Acara Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 67;
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44;
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47) ;
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan konsintensi dan sinegergitas antara proses perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target – target kinerja Bappelitbangda Kab. Lembata.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Bappelitbangda Kab. Lembata Tahun 2025;
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan;
3. Menjadi instrumen evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan triwulan I.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Terget Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan I dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappelitbangda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target ataukah belum serta kemungkinan akan tercapai atau tidak akhir tahun pelaksanaan anggaran sehingga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025, pada tabel berikut ini :

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%). Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp.795.261.337 atau sebesar 0,13% dari pagu anggaran sebesar Rp.6.047.630.912,-. Realisasi pencapaian keuangan ini masih rendah ini diakibatkan banyak program dan kegiatan yang belum dilaksankan dan adanya efisensi anggaran sehingga baru dilaksanakan pada triwulan I. Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- ✓ Adanya rasionalisasi anggaran sebagai akibat dari munculnya peraturan perudang-undangan / juknis yang merupakan kebijakan nasional dan daerah;
- ✓ Disiplin aparatur dalam melaksanakan program / kegiatan yang masih kurang
- ✓ Belum efektifnya koordinasi administrasi pelaksanaan tugas.

Gambaran singkat capaian kinerja dan realisasi keuangan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja sub kegiatan yang masih 0% antara lain :
    - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
    - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Bulanan
    - ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
    - ✓ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian
    - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Pengadaan Mebel
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- ✓ Koordinasi Penysusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- ✓ Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

2. Terhadap kinerja sub kegiatan dan kinerja keuangan yang masih sangat rendah tersebut maka perlu tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :
   - ✓ Melakukan koordinasi yang efektif antara pimpinan dan staf antar bidang dalam rangka percepatan pelaksanaan sub kegiatan;
   - ✓ Akan dilakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan kembali anggara dan target pencapaian kinerja dan program/kegiatan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Dari tabel diatas menunjukan adanya perubahan rencana kerja pada beberapa Sub Kegiatan dan kegiatan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mendasar yaitu :

1. Penyesuaian PAD;
2. Pemyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Silpa Tahun 2024;
3. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah baik transfer berupa, DAU , DAK, DBH maupun transfer Propinsi;
4. Penyesuaian Dana Alokasi Umum Spesifik Grant;
5. Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD, pengahapusan Sub Kegiatan , kegiatan dan penyesuaian terget kinerja, penyesuaian gaji dan tunjangan serta penambahan sub kegiatan bersifat penting dan mendesak untuk di laksanakan.

BAB IV. PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencnanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Bappelitbangda Kab. Lembata Tahun 2024 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

Kepala Badan,

drh. Mathias A. K. Beyeng
Pembina Utama Muda
NIP. 19720702 199803 1 009

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan lokasi serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenan. Perangkat daerah menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah, dalam penyusunannya berkoordinasi, bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan, adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target – target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antara kegiatan, penambahan maupun penghapusan kegiatan; penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2042;
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Nomor 40 Tahun 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target – target kinerja dinas khususnya dan pembangunan daerah umumnya.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata tahun 2025;
b. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan;
c. Menjamin instrumen evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2025 sampai dengan triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi serta pendanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata dapat dijelaskan, ada beberapa sub kegiatan yang prosentase capaiannya kurang dari 50% atau bahkan sama sekali belum terealisasi sehingga diupayakan untuk sub kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sebelum akhir tahun. Oleh karena itu lebih diprioritaskan pada program yang berdampak luas pada peningkatan layanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.

Adapun beebrapa alasan teknis dalam realisasi anggaran OPD adalah ;

1. Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 1,878,129,878 atau (67,86%)

2. Terdapat beberapa kegiatan Wajib dengan masing-masing sub kegiatan belum atau masih dibawah 50 % kondisi per 31 Agustus 2025 dengan penjelasan ;

   a. Proses Transfer dana sesuai dengan sumber dana dalam membiayai kegiatan pada urusan Wajib (sumber dana DID) terlambat masuk pada rekening BUD.

   b. Penyerapan dana yang belum mencapai 50 % agar dapat dilaksanakan dan direalisasikan dalam triwulan ke 3 dan atau sebelum berakhirnya tahun anggaran.

3. Sub kegiatan pada program penunjang yang realisasi belum masih di bawah 50 %, namun kegiatan sudah dilaksanakan dengan pencapaian fisik 100%. Alasan keterbatasan uang persedian OPD.

4. Untuk realisasi semua kegiatan dan sub kegiatan lainnya dapat dilihat pada sebaran tabal

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BPBD KABUPATEN LEMBATA

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada matriks dibawah ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, pagu RKPD sebelum perubahan Rp. 2.588.984.219,-. membiayai 2 Program, 12 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Sedangkan pagu RKPD setelah perubahan sebesar Rp. 2.774.909.653,- membiayai 2 Program, 9 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja 2025 ini dilatar belakangi :

Adanya efisiensi anggaran oleh pemerintahan daerah maka terjadi pengurangan pagu pada belanja operasional dari kegiatan dan sub kegiatan antar SKPD maupun internal SKPD, penghapusan sub kegiatan, penyesuaian target kinerja dan penyesuaian gaji serta tunjangan.

Memperhatikan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut maka terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel tersebut bahwa:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 2.188.984.472 dan membiayai 8 (delapan) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, pagu setelah perubahan Rp. 2.032.933.912 membiayai 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.
2. Progran Wajib (Penanggulangan Bencana) pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 399.999.747, membiayai 4 (empat) kegiatan dan 20 (Sembilan belas) sub kegiatan dan pagu setelah perubahan Rp. 741.975.741 membiayai 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Mengacu dari usulan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 terdapat 2 program kerja dengan 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan nilai total pagu anggaran sebesar Rp.2.774.909.653,- jika terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penambahan pagu anggaran program/kegiatan, memunculkan 2 alternatif pendekatan melalui :

1. Penentuan prioritas program/kegiatan yang memberi dampak signifikan pada indikator prioritas target capaian kunci seperti pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah serta tugas, fungsi dan layanan utama BPBD Kabupaten Lembata;
2. Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Perubahan Renja BPBD Kabupaten Lembata tahun 2025.

Dan untuk memenuhi harapan agar ada perimbangan rancangan awal dan analisis kebutuhan maka disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Penyusunan Renja Perubahan BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 acuan dari Renja Tahun 2025 sebagai manifestasi dari visi dan misi kepala daerah terpilih;
b. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan dalam Renja Perubahan BPBD Kabupaten Lembata Tahun 2025, seyogyanya selalu dikembalikan pada upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota, propinsi dan pusat, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.

Lewoleba, Agustus 2025
Kepala Pelaksana BPBD

Yohanes Gregorius Solang Demo, ST., MM
NIP. 197306132005011014

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN NUBATUKAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perangkat Daerah Menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian dengan program dan kegiatan berkenaan juga adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Permendagri tersebut, maka Kecamatan Nubatukan melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah, dengan cara melakukan pergeseran antar kegiatan, penambahan maupun penghapusan kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja, pagu anggaran, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Renja Kecamatan Nubatukan digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rncana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nubatukan Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pencapaian target-target kinerja kecamatan khususnya dan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nubatukan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Nubatukan Tahun 2025
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

3. Menjadi instrument evaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.4 Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Perubahan Rencana Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif.

BAB IV.PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nubatukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten /Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata
Periode Pelaksanaan Tahun 2025

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		PD Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11 =7+8+9+10*		*12 = 6 + 11*		*13 = 12/5 x 100%*		15
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
KECAMATAN				*%*	**100%**	**34.361.118.181**	**25%**	**7.671.974.947**	**0,06**	**1.758.124.783**	**25%**	**1.709.603.166**		**-**		**-**		**3.426.931.286**	0,25	11.098.906.233	25,00	32,30	
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	%	**100%**	**33.498.112.948**	25%	**7.234.758.725**	6,25%	**1.745.807.383**	0,00%	**1.675.333.366**	0%	-	0,00%	-	6,25%	**3.421.140.749**	6,50	10.655.899.474	650,00	31,81	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan**	%	100%	**265.291.200**	25%	**5.961.600**	25,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	25%	-	1	5.961.600	50,00	2,25	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	27.015.600	2	423.800	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	423.800	20,00	1,57	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	67.944.000	1	1.554.450		-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.554.450	20,00	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	63.789.600	1	1.663.400		-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	1.663.400	20,00	0,00	Kec. Nubatukan

7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	106.542.000	1	2.125.150		-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.125.150	20,00	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	106.542.000	1	194.800		-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	194.800	20,00	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	%	100%	**30.604.258.029**	25%	**6.783.470.819**	25,00%	**1.639.535.745**	25%	**1.555.949.942**	0	-		-	50%	**3.195.485.687**	1	9.978.956.506	75,00	32,61	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	29.126.849.549	113	6.426.751.169	3	1.569.218.745	0	1.555.352.367		-	0	-	3	3.124.571.112	116	9.551.322.281	#######	32,79	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	1.361.338.480	12	354.458.000	3	70.317.000	0	-		-	0	-	3	70.317.000	15	424.775.000	150,00	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	61.304.400	1	597.575		-	0	452.675		-	0	-	0	452.675	1	1.050.250	20,00	0,00	Kec. Nubatukan

7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	54.765.600	1	1.664.075		-	0	144.900	0	-	0	-	0	144.900	1	1.808.975	2,08	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	%	100%	**179.003.100**	25%	**1.436.775**	25,00%	-	0%	-	0	-		-	25%	-	1	1.436.775	50,00	0,80	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	71.607.600	2	694.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	694.000	40,00	0,97	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	107.395.500	1	742.775		-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	742.775	20,00	0,00	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**%**	**100%**	**1.136.229.960**	**25%**	**17.872.625**	**-**	**-**	**25%**	**2.902.425**	**-**	**-**		**-**	**0**	**2.902.425**	1	20.775.050	**50**	**1,83**	**Kec. Nubatukan**
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	60	331.524.700	5	2.097.155	-	-	0	117.455		-	0	-	0	117.455	5	2.214.610	8	0,67	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket	60	331.524.700	5	7.274.420	-	-	0	2.209.970		-	0	-	0	2.209.970	5	9.484.390	8	2,86	Kec. Nubatukan

7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	750	236.590.280	2	4.351.050	-	-	0	575.000		-	-	-	-	575.000	2	4.926.050	0	2,08	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	750	236.590.280	1	4.150.000	-	-	0	-		-	-	-	-	-	1	4.150.000	0	1,75	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	%	100%	**174.551.009**	25%	**22.469.658**		**-**		**-**		**-**			0	-	0	22.469.658	25,00	12,87	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	15	174.551.009	3	22.469.658			0	-					0	-	3	22.469.658	20,00	12,87	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	%	100%	**277.326.750**	25%	**354.602.248**	6,25%	**104.824.638**	25%	**113.020.999**	-	**-**		**-**	0,313	**217.845.637**	1	572.447.885	56,25	206,42	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	1.346.179.538	12	324.862.000	2	102.400.000	0	109.800.000		-	0	-	2	212.200.000	14	537.062.000	29,17	39,90	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48	183.160.844	12	27.048.600	3	2.424.638	0	3.220.999		-	0	-	3	5.645.637	15	32.694.237	31,25	17,85	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	48	183.160.844	1	2.691.648	-	-	0	-		-	0	-	0	-	1	2.691.648	2,08	1,47	Kec. Nubatukan
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**	%	100%	**861.452.900**	25%	**48.945.000**	5	**1.447.000**	25%	**3.460.000**	-	**-**		**-**	5,25	**4.907.000**	6	53.852.000	550,00	6,25	Kec. Nubatukan

7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	304	583.643.488	20	48.945.000	5	1.447.000	0	3.460.000		-	-	-	5	4.907.000	25	53.852.000	8,22	9,23	Kec. Nubatukan
07.01.02	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	%	100	**318.909.529**	**25%**	**351.446.022**	6,25%	**4.343.000**	0,00%	**33.114.800**	-	-	25%	-	0,313	**37.457.800**	1	388.903.822	0,56	121,95	Kec. Nubatukan
7.01.02.2.01		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		%	100	**156.350.649**	25%	**63.591.022**	6,25%	**-**	0,00%	**-**		-	25%	-	0,313	**-**	1	63.591.022	0,56	40,67	Kec. Nubatukan
7.01.02.2.01.01		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	156.350.649	1	63.591.022	0	-		-		-	0	-	0	-	1	63.591.022	25,00	40,67	Kec. Nubatukan
7.01.02.2.04		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Presentasi Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	%	100	**156.350.649**	25%	**287.855.000**	6,25%	**4.343.000**	25%	**33.114.800**		-		-	0,313	**37.457.800**	1	325.312.800	0,56	208,07	Kec. Nubatukan

7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimahkan	Laporan	4	156.350.649	1	287.855.000	0	4.343.000		33.114.800		-		-	0	37.457.800	1	325.312.800	25,00	208,07	Kec. Nubatukan
7.01.03	Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**	%	100	**25.597.177.272**	**25%**	**37.144.150**	**-**	**7.974.400**	25%	**1.155.000**	**-**	-	25%	-	0,5	**9.129.400**	1	46.273.550	0,75	0,18	Kec. Nubatukan
7.01.03.2.01		**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan desa**	%	100	**803.007.532**	**25%**	**37.144.150**	-	**7.974.400**	0%	**1.155.000**	-	-	25%	-	0,25	**9.129.400**	1	46.273.550	0,50	5,76	Kec. Nubatukan
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Deaa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2	4.101.500	2	2.098.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	2.098.000	100,00	51,15	Kec. Nubatukan
7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8	100.802.000	2	12.068.900	-	7.974.400	0	-	0	-	0	-	0	7.974.400	2	20.043.300	25,00	19,88	Kec. Nubatukan

7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	140.306.250	1	22.977.250	-	-	0	1.155.000	0	-	0	-	0	1.155.000	1	24.132.250	12,50	17,20	Kec. Nubatukan
7.01.04	Terlaksannaya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	%	100	**25.597.177.272**	**25%**	**2.008.000**	-	-	0%	-	-	-	25%	-	0,25	-	1	2.008.000	0,50	0,01	Kec. Nubatukan
7.01.04.2.02		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	%	100	**803.007.532**	**25%**	**2.008.000**	-	-		-	-	-	25%	-	0,25	-	1	2.008.000	0,50	0,25	Kec. Nubatukan
7.01.04.2.02.01		Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan atau/ Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	4.016.000	1	2.008.000	-	-		-	0	-	0	-	0	-	1	2.008.000	100,00	50,00	Kec. Nubatukan
7.01.05	Terlaksannaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	%	100	**328.188.782**	25%	**30.770.350**	-	-	-	-	-	-	25%	-	0,25	-	1	30.770.350	0,50	9,38	Kec. Nubatukan

7.01.05.2.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	%	100	**328.188.782**	25%	**30.770.350**	-	-	-	-	-	-	25%	-	0,25	-	1	30.770.350	0,50	9,38	Kec. Nubatukan
7.01.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tungggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	600	178.213.782	150	17.564.100		-		-		-	0	-	0	-	150	17.564.100	25,00	9,86	
7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	60	149.975.000	12	13.206.250		-		-		-	0	-	0	-	12	13.206.250	20,00	8,81	
7.01.06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Desa**	%	100	**178.213.782**	25%	**15.847.700**	-	-	-	-	-	-	25%	-	0,25	-	1	15.847.700	0,50	8,89	Kec. Nubatukan
7.01.06.2.01		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	%	100	**178.213.782**	25%	**15.847.700**	-	-	-	-	-	-	25%	-	0,25	-	1	15.847.700	0,50	8,89	Kec. Nubatukan

7.01.06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	66	178.213.782	11	5.135.000		-		-		-	0	-	0	-	11	5.135.000	16,67	2,88	
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Dokumen	66	178.213.782	11	2.000.000		-		-		-	0	-	0	-	11	2.000.000	16,67	1,12	
7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	66	178.213.782	11	3.675.000		-		-		-	0	-	0	-	11	3.675.000	16,67	2,06	
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	66	178.213.782	11	5.037.700		-		-		-	0	-	0	-	11	5.037.700	16,67	2,83	
KELURAHAN LEWOLEBA BARAT					100%	**2.589.274.265**	25%	**530.516.016**		-	25%	**15.356.000**		-		-		2.589.274.265	0,25	3.119.790.281	25,00	120,49	
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinata han Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	%	100	**26.274.265**	25%	**17.916.016**		-	25%	**356.000**		-		-							
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	%	100	**26.274.265**	25%	**3.412.631**		-		-		-		-							

7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	16.524.265	5	2.457.631		-		-			0	-	0	-	5	2.457.631	20,00	14,87	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	955.000		-		-			0	-	0	-	2	955.000	20,00	9,79	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		100%	**16.524.265**	25%	**4.005.000**		-		**-**		**-**		**-**							
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	25	16.524.265	1	4.005.000		-		-			0	-	0	-	1	4.005.000	4,00	24,24	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%		25%	**6.398.385**		-		**356.000**		**-**		**-**							
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	279.565		-		50.000		-	0	-	0	50.000	1	329.565	20,00	25,99	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	12.128.025	12	6.118.820		-		306.000			0	-	0	306.000	12	6.424.820	240,00	52,97	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%		25%	**4.100.000**		-		**-**		**-**		**-**							

7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	35	5.381.250	7	4.100.000		-		-			0	-	0	-	7	4.100.000	20,00	76,19	
7.01.03	Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n**		100%	**2.563.000.000**	25%	**512.600.000**			25%	**15.000.000**		-		-							
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.563.000.000**	25%	**512.600.000**				**15.000.000**		-		-							
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	518.498.605	1	106.560.435				-			0	-	0	-	1	106.560.435	10,00	20,55	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	5	2.044.501.395	1	406.039.565				15.000.000		-	0	-	0	15.000.000	1	421.039.565	20,00	20,59	
KELURAHAN LEWOLEBA					100%	**2.506.285.655**		**510.802.848**			25%	**19.985.804**		-		-							
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinata han Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**39.285.655**	25%	**17.402.848**				**1.985.804**		-		-							

7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**27.979.030**	25%	**2.874.463**				**581.000**		-		-						
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	18.229.030	5	1.877.213				318.500	0	-		-	0	318.500	5	2.195.713	20,00	12,05	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	997.250				262.500	0	-		-	0	262.500	2	1.259.750	20,00	12,92	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**5.925.375**	25%	**5.748.385**				**1.404.804**		-		-						
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	279.565				100.000		-		-	0	100.000	1	379.565	20,00	29,94	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	4.657.500	1	5.468.820				1.304.804		-		-	0	1.304.804	1	6.773.624	20,00	145,43	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**8.780.000**				**-**		-		-						
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	45	5.381.250	9	8.780.000					0	-		-	0	-	9	8.780.000	20,00	163,16	

7.01.03	Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**		100%	**2.467.000.000**	25%	**493.400.000**			25%	**18.000.000**		-		-						
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.467.000.000**	25%	**493.400.000**				**18.000.000**		-		-						
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20	406.831.195	4	90.756.981						-		-	0	-	4	90.756.981	20,00	22,31	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	10	2.060.168.805	1	402.643.019				18.000.000		-		-	0	18.000.000	1	420.643.019	10,00	20,42	
KELURAHAN SELANDORO					100%	**2.522.192.540**		**492.895.151**			25%	**18.637.130**		-		-						
7.01.01	Tercapaiaan ya Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**46.192.540**	25%	**14.495.151**			25%	**827.657**		-		-						
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**25.615.390**	25%	**2.947.051**				**646.657**		-		-						

7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	15.865.390	5	1.877.051				397.907		-		-	0	397.907	5	2.274.958	20,00	14,34	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	1.070.000				248.750		-		-	0	248.750	2	1.318.750	20,00	13,53	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**15.195.900**	25%	**7.648.100**				**181.000**		**-**		**-**							
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	243.100				60.000	0	-		-	0	60.000	1	303.100	20,00	23,91	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	13.928.025	1	7.405.000				121.000		-		-	0	121.000	1	7.526.000	20,00	54,03	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**3.900.000**				**-**		**-**		**-**							
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	45	5.381.250	9	3.900.000						-		-	0	-	9	3.900.000	20,00	72,47	

7.01.03	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n**		100%	**2.476.000.000**	25%	**478.400.000**			25%	**17.809.473**		-		-						
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.476.000.000**	25%	**478.400.000**			25%	**17.809.473**		-		-						
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	546.643.555	1	104.665.774					0	-			0	-	1	104.665.774	20,00	19,15	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	5	1.929.356.445	1	373.734.226				17.809.473		-	1	-	1	17.809.473	2	391.543.699	40,00	20,29	
KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH					100%	**2.293.248.900**		**461.561.905**			25%	**19.065.800**		-		-						
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**45.248.900**	25%	**11.961.905**			25%	**2.223.810**		-		-						
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**28.271.750**	25%	**1.432.255**				-		-		-						
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	18.521.750	5	672.255					0	-	0	-	0	-	5	672.255	20,00	3,63	

7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	760.000					0	-	0	-	0	-	2	760.000	20,00	7,79	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		100%	**28.120.165**	25%	-		-		-		-		-						
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	25	16.524.265	1	-		-		-			0	-	0	-	1	-	4,00	0,00	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**11.595.900**	25%	**7.129.650**				**2.223.810**		-		-						
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	607.750				300.000	0	-		-	0	300.000	1	907.750	20,00	71,60	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	10.328.025	1	6.521.900				1.923.810	0	-		-	0	1.923.810	1	8.445.710	20,00	81,77	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**3.400.000**				-		-		-						
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	35	5.381.250	7	3.400.000				-	0		0	-	0	-	7	3.400.000	20,00	63,18	

7.01.03	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n**		100%	**2.248.000.000**	25%	**449.600.000**			25%	**16.841.990**		-		-						
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.248.000.000**	25%	**449.600.000**				**16.841.990**		-		-						
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	547.871.640	2	106.641.530							0	-	0	-	2	106.641.530	20,00	19,46	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	10	1.700.128.360	2	342.958.470				16.841.990	0	-	0	-	0	16.841.990	2	359.800.460	20,00	21,16	
KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR						**2.446.687.780**		**506.229.466**			25%	**17.464.163**		-		-						
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**42.687.780**	25%	**23.806.561**			25%	**6.457.007**		-		-						
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**25.710.630**	25%	**2.213.226**				**1.089.413**		-		-						
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	15.960.630	5	1.338.226				654.413	0	-		-	0	654.413	5	1.992.639	20,00	12,48	

7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	875.000				435.000	0	-	0	-	0	435.000	2	1.310.000	20,00	13,44	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		100%	**28.120.165**	25%	**8.531.900**		-		**2.423.971**		**-**		**-**							
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	25	16.524.265	1	8.531.900		-		-			0	-	0	-	1	8.531.900	4,00	51,63	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**11.595.900**	25%	**6.777.155**				**2.423.971**		**-**		**-**							
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	255.255				133.705	0	-			0	133.705	1	388.960	20,00	30,68	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	10.328.025	1	6.521.900				2.290.266	0	-		-	0	2.290.266	1	8.812.166	20,00	85,32	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**6.284.280**				**2.943.623**		**-**		**-**							

7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	35	5.381.250	7	6.284.280				2.943.623	0	-			0	2.943.623	7	9.227.903	20,00	171,48	
7.01.03	Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n**		100%	**2.404.000.000**	25%	**482.422.905**			25%	**11.007.156**		-		-							
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.404.000.000**	25%	**482.422.905**				**11.007.156**		-		-							
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	658.000.000	2	114.281.683							0	-	0	-	2	114.281.683	20,00	17,37	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	5	1.746.000.000	1	368.141.222				11.007.156		-		-		11.007.156	1	379.148.378	20,00	21,72	
KELURAHAN LEWOLEBA UTARA						**2.248.996.361**		**467.345.579**			25%	**19.712.280**		-		-							
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**30.996.361**	25%	**23.598.579**			25%	**1.712.280**		-		-							
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**12.219.211**	25%	**2.731.338**				-		-		-	0	-	0	2.731.338	25,00	22,35	

7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	35	2.469.211	5	1.856.338						-		-		-	5	1.856.338	14,29	75,18	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	875.000						-		-		-	2	875.000	20,00	8,97	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		100%	**29.920.165**	25%	**7.026.677**		-		**1.712.280**		**-**		**-**							
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Paket	25	16.524.265	1	7.026.677		-		-				-		-	1	7.026.677	4,00	42,52	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**13.395.900**	25%	**6.507.870**				**1.712.280**		-		-							
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	607.750				-		-				-	1	607.750	20,00	47,93	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	12.128.025	1	5.900.120				1.712.280		-		-		1.712.280	1	7.612.400	20,00	62,77	

7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**7.332.694**				**-**		-		-						
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	35	5.381.250	7	7.332.694						-		-		-	7	7.332.694	20,00	136,26	
7.01.03	Terlaksanana nya Pemberday aan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n**		100%	**2.218.000.000**	25%	**443.747.000**			25%	**18.000.000**		**-**		**-**						
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.218.000.000**	25%	**443.747.000**				**18.000.000**		-		-						
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	485.260.205	1	101.081.082				-				-		-	1	101.081.082	20,00	20,83	

7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	10	1.732.739.795	2	342.665.918				18.000.000		-		-		18.000.000	2	360.665.918	20,00	20,81	
KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN						**2.155.214.990**		**438.085.526**			25%	**19.996.400**		**-**		**-**							
7.01.01	Tercapaian ya Urusan Pemerinata han Daerah Kabupaten/ Kota	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**		100%	**42.214.990**	25%	**14.841.264**			25%	-		-		-							
7.01.01.2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**		100%	**29.108.365**	25%	**2.417.233**				-		-		-							
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	25	19.358.365	5	1.267.233						-		-		-	5	1.267.233	20,00	6,55	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	10	9.750.000	2	1.150.000						-		-		-	2	1.150.000	20,00	11,79	
7.01.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**		100%	**24.249.640**	25%	**3.788.766**		-		-		-		-							
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	25	16.524.265	1	3.788.766		-		-				-		-	1	3.788.766	4,00	22,93	
7.01.01.2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**		100%	**7.725.375**	25%	**2.568.150**				-		-		-							

7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.267.875	1	364.650				-		-		-		-	1	364.650	20,00	28,76	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	6.457.500	1	2.203.500				-		-		-		-	1	2.203.500	20,00	34,12	
7.01.01.2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentasi Pemeliharaan barang Milik Daerah**		100%	**5.381.250**	25%	**6.067.115**				**-**		**-**		**-**							
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40	5.381.250	8	6.067.115						-		-		-	8	6.067.115	20,00	112,75	
7.01.03	Terlaksanaanya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentasi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunana dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**		100%	**2.113.000.000**	25%	**423.244.262**			25%	**19.996.400**		**-**		**-**							
7.01.03.2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		100%	**2.113.000.000**	25%	**423.244.262**				**19.996.400**		**-**		**-**							
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	550.717.550	1	111.858.115				-				-		-	1	111.858.115	20,00	20,31	
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	5	1.562.282.450	1	311.386.147				19.996.400		-		-		19.996.400	1	331.382.547	20,00	21,21	

TOTAL	**11.079.411.438**		**1.758.124.783**		**1.839.820.743**		**-**		**-**							

Berdasarkan tabel diatas, maka terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah (<30%) yang disebabkan oleh permasalahan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini penganggarannya mengalami Efisiensi Anggaran dan ada pada semester II (dua)

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

   Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini penganggarannya mengalami efisiensi anggaran , dan ada pada semester II (dua),

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Masalahnya adalah bahwa dalam kegiatan ini penganggarannya mengalamai efisiensi anggaran sehingga di bawa ke semester II (dua)

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan ini mengalami Efisiensi anggaran sehingga di bawa ke semester II (dua), pelaksanaan pertanggungjawabannya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100 %
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini mengalami efisiensi anggaran dan proses untuk Ganti Uang (GU) biasanya membutuhkan waktu yang lama, sementara kegiatan harus tetap dilaksanakan sesuai yang ada pada DPA.

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%

6. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Masalahnya adalah bahwa dalam kegiatan ini mengalami efisiensi anggaran sehingga di bawa ke semester II (dua) dan proses untuk Ganti Uang (GU) biasanya membutuhkan waktu yang lama, sementara kegiatan ini harus tetap dilaksanakan sesuai yang ada pada DPA.

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%

7. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Masalahnya adalah bahwa dalam kegiatan ini mengalami efisiensi anggaran sehingga di bawa ke semester II (dua) dan proses untuk Ganti Uang (GU) biasanya membutuhkan waktu yang lama, sementara kegiatan ini harus tetap dilaksanakan sesuai yang ada pada DPA.

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%

8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini Sumber Dananya adalah DAU SG (Dana Kelurahan) yang proses salurnya memiliki mekanisme tersendiri dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu baru bisa dilaksanakan setelah dana masuk ke rekening pemerintah daerah, dan proses untuk Ganti Uang (GU) biasanya membutuhkan waktu yang lama, sementara kegiatan ini harus tetap dilaksanakan sesuai yang ada pada DPA.

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%

9. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daeran dan Peraturan Kepala Daerah

   Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini mengalamai efisiensi anggaran sehingga di geser ke semester II (dua)

   Solusinya akan dilaksanakan pada semester II dan akan terealisasi 100%.

10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

    Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini mengalami efisiensi anggaran dan di bawa ke semester II (dua) sehingga baru akan dilaksanakan pada semester II.

    Solusinya akan dilaksanakan pada semester II (dua) dan akan terealisasi 100%

11. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

    Masalahnya adalah bahwa kegiatan ini mengalamai efisiensi anggaran sehingga di geser ke semester II (dua)

    Solusinya akan dilaksanakan pada semester II dan akan terealisasi 100%.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Matriks berikut ini.

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Atadei Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NUBATUKAN							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.670.000,00	10.724.650,00	5.961.600,00	-26.708.400,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		36.723.885,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	547.600,00	423.800,00	-1.576.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.670.000,00	2.654.050,00	1.554.450,00	-6.115.550,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan			848.423,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD													tatakelola dan kinerja pelayaan publik				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.914.150,00	1.663.400,00	-5.836.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	4.280.150,00	2.125.150,00	-9.874.850,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.340.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	328.700,00	194.800,00	-1.805.200,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.650.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.028.102.975,00	6.784.647.369,00	6.783.470.819,00	-244.632.156,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		7.702.575.551,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ bulan	113 Orang/ bulan	6.701.082.975,00	6.426.751.169,00	6.426.751.169,00	-274.331.806,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.371.191.272,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	308.270.000,00	354.458.000,00	354.458.000,00	46.188.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			309.987.500,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.750.000,00	902.525,00	597.575,00	-6.152.425,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	2.535.675,00	1.664.075,00	-10.335.925,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n/Semesteran SKPD																	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	31.376.344,00	2.874.375,00	1.436.775,00	-29.939.569,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		34.701.660,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.425.670,00	1.388.400,00	694.000,00	-4.731.670,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			6.750.987,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.950.674,00	1.485.975,00	742.775,00	-25.207.899,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.950.673,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.500.000,00	2.097.155,00	2.097.155,00	-1.402.845,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.557.400,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.773.792,00	9.383.474,00	7.274.420,00	-36.499.372,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			50.351.171,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.857.700,00	6.555.000,00	4.351.050,00	-3.506.650,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola			696.476,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dan kinerja pelayaan publik				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.415.793,00	7.900.000,00	4.150.000,00	-9.265.793,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.629.030,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	94.984.750,00	28.979.658,00	22.469.658,00	-72.515.092,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			95.984.750,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			26.962.506,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelayaan publik				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	864.000.000,00	452.862.000,00	324.862.000,00	-539.138.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			950.400.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.833.516,00	27.048.600,00	27.048.600,00	1.215.084,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			28.416.867,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.503.185,00	2.691.648,00	-7.308.352,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	143.420.636,00	76.082.100,00	48.945.000,00	-94.475.636,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			161.619.092,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.553.304,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.350.000,00	0,00	0,00	-6.350.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.447.760,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.385.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.852.454,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**536.045.216,00**	**588.132.129,00**	**351.446.022,00**	**53.604.521,00**							**589.649.737,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	36.045.216,00	76.324.134,00	63.591.022,00	27.545.806,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		39.649.737,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	36.045.216,00	76.324.134,00	63.591.022,00	27.545.806,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			39.649.737,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	500.000.000,00	511.807.995,00	287.855.000,00	-212.145.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		550.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	511.807.995,00	287.855.000,00	-212.145.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			550.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	62.756.996,00	52.323.150,00	37.144.150,00	-25.612.846,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		69.627.833,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.421.780,00	4.101.500,00	2.098.000,00	-8.323.780,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			12.292.617,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.835.216,00	20.160.400,00	12.068.900,00	-24.766.316,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			39.835.216,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	15.500.000,00	28.061.250,00	22.977.250,00	7.477.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan	-		163.181.713,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tatakelola dan kinerja pelayaan publik				
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			163.181.713,00	KECAMATAN NUBATUKAN
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**4.016.000,00**	**2.008.000,00**	**15.617.332,00**							**35.617.332,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	4.016.000,00	2.008.000,00	-7.992.000,00			-	- -	-		12.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.016.000,00	2.008.000,00	-7.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			12.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**91.260.890,00**	**54.615.700,00**	**30.770.350,00**	**12.000.000,00**							**103.260.890,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	91.260.890,00	54.615.700,00	30.770.350,00	-60.490.540,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			103.260.890,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	35.760.890,00	28.203.200,00	17.564.100,00	-18.196.790,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			45.760.890,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	5 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			10.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	26.412.500,00	13.206.250,00	-31.793.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			46.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**72.650.000,00**	**31.795.700,00**	**15.847.700,00**	**202.517.332,00**							**275.167.332,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	72.650.000,00	31.795.700,00	15.847.700,00	-56.802.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		275.167.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			15.400.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	20.500.000,00	10.270.000,00	5.135.000,00	-15.365.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11Dokumen	11Dokumen	12.000.000,00	4.056.000,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	7.375.000,00	3.675.000,00	-6.325.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			16.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			13.200.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	30.150.000,00	10.094.700,00	5.037.700,00	-25.112.300,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			31.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			27.500.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA BARAT							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.863.068,00	2.457.631,00	-4.993.987,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.950.000,00	955.000,00	-4.395.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	10.472.835,00	4.005.000,00	-14.945.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.950.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	279.565,00	279.565,00	-1.220.435,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.278.420,00	6.118.820,00	6.118.820,00	-159.600,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.550.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.312.500,00	4.100.000,00	4.100.000,00	1.787.500,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.150.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	103.699.721,00	106.560.435,00	106.560.435,00	2.860.714,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			114.069.693,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	408.900.279,00	406.039.565,00	406.039.565,00	-2.860.714,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			409.800.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	3.611.080,00	1.877.213,00	-5.574.405,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.995.000,00	997.250,00	-4.352.750,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	0,00	0,00	-18.950.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	279.565,00	279.565,00	-1.220.435,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.242.000,00	5.468.820,00	5.468.820,00	4.226.820,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.514.625,00	8.780.000,00	8.780.000,00	5.265.375,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.250.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	103.699.721,00	90.756.981,00	90.756.981,00	-12.942.740,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			113.699.721,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	389.700.279,00	402.643.019,00	402.643.019,00	12.942.740,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			489.700.279,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN SELANDORO							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	3.267.427,00	1.877.051,00	-5.574.567,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.865.079,00	2.130.000,00	1.070.000,00	-4.795.079,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	243.100,00	243.100,00	-1.256.900,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.497.920,00	7.405.000,00	7.405.000,00	907.080,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			14.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.312.500,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.587.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.250.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	109.328.711,00	104.665.774,00	104.665.774,00	-4.662.937,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			120.261.582,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	385.871.289,00	373.734.226,00	373.734.226,00	-12.137.063,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Selandoro	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			424.458.417,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA TENGAH							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.405.273,00	672.255,00	-6.779.363,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			9.350.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.905.000,00	760.000,00	-4.590.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.950.000,00	15.051.455,00	0,00	-18.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			19.700.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	607.750,00	607.750,00	-892.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.777.919,00	6.521.900,00	6.521.900,00	743.981,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			7.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	3.576.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-176.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			888,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	109.574.328,00	106.641.530,00	106.641.530,00	-2.932.798,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			112.050.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	340.025.672,00	342.958.470,00	342.958.470,00	2.932.798,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			374.028.239,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.456.201,00	1.338.226,00	-6.113.392,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	1.855.000,00	875.000,00	-4.475.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.885.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	16.225.224,00	8.531.900,00	-10.418.100,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			20.845.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	255.255,00	255.255,00	-1.244.745,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.000.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.777.920,00	6.521.900,00	6.521.900,00	743.980,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	4.652.000,00	6.284.280,00	6.284.280,00	1.632.280,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	131.600.000,00	114.281.683,00	114.281.683,00	-17.318.317,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			144.760.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	349.200.000,00	369.314.190,00	368.141.222,00	18.941.222,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			384.120.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA UTARA							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.418,00	3.710.912,00	1.856.338,00	-5.595.080,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.150.000,00	1.950.000,00	875.000,00	-5.275.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			0,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	15.751.455,00	7.026.677,00	-11.923.323,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	607.750,00	607.750,00	-892.250,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.900.120,00	5.900.120,00	650.120,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	7.076.000,00	7.332.694,00	7.332.694,00	256.694,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	97.052.041,00	101.081.082,00	101.081.082,00	4.029.041,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			106.757.245,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	346.547.959,00	343.135.954,00	342.665.918,00	-3.882.041,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			381.202.754,00	KECAMATAN NUBATUKAN
		KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-1.639.148.679,00**							**14.473.233.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.638.047.015,00**	**7.593.662.818,00**	**7.358.781.049,00**	**939.664.070,00**							**9.577.711.085,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.473.490,00	61.009.362,00	35.900.822,00	-162.572.668,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		244.781.905,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.451.618,00	2.674.772,00	1.267.233,00	-6.184.385,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.288.683,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.350.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	-4.200.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.684.750,00	90.269.393,00	45.822.001,00	-162.862.749,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		249.676.920,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.950.000,00	3.788.766,00	3.788.766,00	-15.161.234,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			23.267.332,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	943.449.195,00	528.191.480,00	397.379.943,00	-546.069.252,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		1.058.060.425,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	364.650,00	364.650,00	-1.135.350,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			1.770.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.291.500,00	2.203.500,00	2.203.500,00	-88.000,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			3.300.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.290.261,00	115.946.189,00	88.809.089,00	-106.481.172,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-		251.190.739,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	6.076.000,00	6.067.115,00	6.067.115,00	-8.885,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.196.779,00	KECAMATAN NUBATUKAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.360.556.996,00**	**3.338.004.749,00**	**3.320.558.317,00**	**531.270.480,00**							**3.891.827.476,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.297.800.000,00	3.285.681.599,00	3.283.414.167,00	-14.385.833,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	-			3.659.017.930,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			2.750.000,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	110.143.510,00	111.858.115,00	111.858.115,00	1.714.605,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			121.157.861,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	312.456.490,00	312.010.575,00	311.386.147,00	-1.070.343,00	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			343.702.139,00	KECAMATAN NUBATUKAN
	J U M L A H								**12.718.560.117,00**	**11.610.227.096,00**	**11.079.411.438,00**	**-17.964.619.425,00**							**14.473.233.852,00**	

Berdasarkan Matriks tersebut, dapat di jelaskan bahwa terdapat perubahan anggaran yakni berkurangnya pagu anggaran pada Program dan Kegiatan sebagai akibat adanya Efisiensi Anggaran, sebagai berikut :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dari pagu awal sebesar Rp. 7.593.662.818, mengalami perubahan menjadi Rp. 7.358.781.049, berkurang sebesar Rp.234.881.769
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari pagu awal sebesar Rp. 538.132.129 mengalami perubahan menjadi Rp. 351.446.022, berkurang sebesar Rp. 236.686.107
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari pagu awal sebesar Rp.3.338.004.749 mengalami perubahan menjadi Rp. 3.320.558.317, berkurang sebesar Rp. 17.446.432
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, pagu awal sebesar Rp. 4.016.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.008.000, berkurang sebesar Rp. 2.008.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pagu awal sebesar Rp. 54.615.700 mengalami perubahan menjadi Rp. 30.770.350, berkurang sebesar Rp.23.845.350
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pagu awal sebesar Rp. 31.795.700 mengalami perubahan menjadi Rp. 15.847.700, berkurang sebesar Rp. 15.948.000

B. Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu awal sebesar Rp. 10.724.650,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 5.961.600,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu awal sebesar Rp. 6.784.647.369, mengalami perubahan menjadi Rp. 6.783.470.819,00
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah, pagu awal sebesar Rp 2.874.375 ,mengalami perubahan menjadi Rp. 1.436.775
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,pagu awal sebesar Rp. 61.009.362 mengalami perubahan menjadi Rp. 35.900.822
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu awal sebesar Rp. 90.269.393, mengalami perubahan menjadi Rp. 45.822.001
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu awal sebesar Rp. 528.191.480 mengalami perubahan menjadi Rp. 397.379.943
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu awal sebesar Rp. 115.946.189,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 88.809.089
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pagu awal sebesar Rp. 76.324.134, mengalami perubahan menjadi Rp. 63.591.022
9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pagu awal sebesar Rp. 511.807.995, mengalami perubahan menjadi Rp. 287.855.000
10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, pagu awal sebesar Rp 52.323.150 mengalami perubahan menjadi Rp. 37.144.150
11. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pagu awal sebesar Rp. 4.016.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.008.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, pagu awal sebesar 54.615.700 mengalami perubahan menjadi Rp 30.770.350.

13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pagu awal sebesar Rp. 31.795.700 mengalami perubahan menjadi Rp. 15.847.700

PENUTUP

Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nubatukan ini dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Lewoleba, 2025

CAMAT NUBATUKAN,

YOSEF DIONISIUS OLA, SE

NIP.19720523 200012 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LEBATUKAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang

dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir.

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Lebatukan dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Lebatukan dan Laporan Kinerja.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Lebatukan dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	4	4	100	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	14	14	100	14	14	25
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**-**	**-**	**0,06**	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	5	5	100	5	5	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000 Paket	-	2500	2500	100	2500	2500	25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 Paket	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	-	9	9	100	9	9	25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	-	3	3	100	3	3	25
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	44 Unit	-	11	11	100	11	11	25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	**25**	**25**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	-	250	30	250	250	250	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata mencapai target yang

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Lebatukan. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Lebatukan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata :
    1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
        - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
        - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
        - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
        - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.

- Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.

2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Lebatukan:

♦ Tantangan :

- Kondisi geografis Kecamatan yang wilyahnya luas dan perbukitan.
- Akses yang relative agak sulit hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.

- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN LEBATUKAN						**2.896.024.082,00**							**3.068028.992,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.896.024.082,00**							**3.068028.992,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.896.024.082,00**							**3.068028.992,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam menduking tupoksi perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**2.484/683.767.00**						**-**	**2.632.439.444,00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*	-			25 %	44.656.635,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	48.773.493,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.260.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		7.260.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.250.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		8.250.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.939..000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		4.780.530,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.759.635,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		3.712.963,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan				1 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		9.910.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN

			DPA-SKPD													
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.607.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		8.900.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.950.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		5.960.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan*	-			25 %	2.078.320.826.,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	2.159.643.898,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	1.797.867.464,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.065.065.777,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	83.048.650,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		85.048.650,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.860.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.860.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	8.544.712,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.669.471,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan*	-			25 %	25.563.846,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	27.563.846,00	KECAMATAN LEBATUKAN

			Dokumen Barang Milik Daerah													
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	8.470.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		8.470.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	17.093.846,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		19.093.846,00	KECAMATAN LEBATUKAN

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian*	-			25 %	54.600.000,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	78.560.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	12.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		13.800.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	42.600.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		64.760.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran*	-		25 %	67.138.937,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	73.704.331,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.963.300,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.011.350,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.484.265,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.032.692,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	10.719.632,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		11.791.595,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	3.876.864,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		4.264.550,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	45.094.676,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		49.604.144,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*	-		25 %	45.500.000,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat	-	58.400.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN

													Lebatukan			
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				5 Unit	11.500.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		12.650.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan/Komputer//Pc dan Printer Laptop	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*				5 Unit	34.000.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		45.750.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran*	-			25 %	79.469.445,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	87.416.390,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	75.182.625,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		82.700.888,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	2.300.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.530.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1.986.820,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.185.502,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah*	-		25 %	89.434.078,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan	-	98.377.486,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	65.433.422,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		71.976.764,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			8 Unit	8.600.656,00	Kab. Lembata, Lebatukan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		9.460.722,00	KECAMATAN LEBATUKAN

								Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM			Lebatukan				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	9.350.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		10.285.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	6.050.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.655.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	-		**25 %**	**115.891.274,00**						-	**128.480.402,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-		25 %	92.983.378,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	-	102.281.716,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	78.318.273,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		86.150.089,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan			1 Dokumen	14.665.115,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		15.131.627,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-		25 %	22.907.896,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	-	26.198.686,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	22.907.896,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		26.198.686,00	KECAMATAN LEBATUKAN

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan***	-		**25 %**	**21.648.500,00**						-	**23.813.459,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-		25 %	21.648.599,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	-	23.813.459,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1 Lembaga Kemasyarakatan	4.865.047,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		5.351.552,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			1 Dokumen	9.075.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		9.982.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN

	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.708.552,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		8.479.407,00	KECAMATAN LEBATUKAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***		-		**25 %**	**11.912.291,00**							-	**13.103.520,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*		-		25 %	6.044979,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		-	6.649.477,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6.044979,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		6.649.477,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi*		-		25 %	5.867.312,00			-	4. Reformasi	Masyarakat Desa di		-	6.454.043,00	KECAMATAN LEBATUKAN

		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*									birokrasi	Kecamatan Lebatukan			
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	5.867.312,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		6.454.043,00	KECAMATAN LEBATUKAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***				**25 %**	**16.000.000,00**								**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				25 %	15.415.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		16.956.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	7.550.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	8.305.000,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	7.865.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	8.651.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi***				**25 %**	**246.473.152,00**						**253.235.667,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi*	-			25 %	246.473.152,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	-	253.235.667,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	50.963.472,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		54.196.347,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	50.323.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		51.082.300,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	28.134.500,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		28.863.450,00	KECAMATAN LEBATUKAN

	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	27.855.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	28.174.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	27.615.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	28.174.500,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	27.249.000,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	27.774.900,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	17.190.679,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	16.818.420,00	KECAMATAN LEBATUKAN

	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	17.142.500,00	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan	17.764.250,00	KECAMATAN LEBATUKAN
	J U M L A H							**2.896.024.082,00**						**3.068028.992,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lebatukan didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Lebatukan, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Lebatukan dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lebatukan dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Lebatukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lebatukan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Lebatukan Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Lebatukan tahun 2025 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lebatukan Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lebatukan di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 12 kegiatan, 28 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.660.163.213,00,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.766.741.572,00,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 35.726.392,00,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 4.070.000,00,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 0,00,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,00,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 979.050,00,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 17 (tujuh belas) desa.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 12 kegiatan, 28 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Lebatukan Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								1.819.517.014								
								1.819.517.014							**3.068.028.992**	
								1.819.517.014							**3.068.028.992**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100%**	**1.766.741.572,**							**2.632.439.444**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi**				**25%**	**9.266.662**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**48.773.493**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			atas Kinerja Perangkat Daerah													
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	975.562	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		7.260.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.991.796	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		8.250.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		4.780.530,	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.385.811	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		3.712.963	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.588.856	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		9.910.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				2 Laporan	710.001	Kab. Lembata,	PENDAPATAN ASLI	-	-	Pegawai pada		8.900.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Lebatukan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)			Kantor Camat Lebatukan			
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	615.636	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		5.960.000	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**				**25%**	**1.643.364.697**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				**Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan**		**2.159.643.898**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang /Bulan	1.571.220.397	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.065.065.777	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				6 Dokumen	71.195.550	Kab. Lembata, Lebatukan	PENDAPATAN ASLI DAERA	-	-	Pegawai pada Kantor		85.048.650	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Tugas ASN						, Semua Kel/Desa	H (PAD)			Camat Lebatukan			
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	948.750	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.860.000	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.669.471	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**21.382.800**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**27.563.846**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		8.470.000	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik				2 Laporan	**21.382.800**	Kab. Lembata, Lebatukan	PENDAPATAN ASLI DAERA	-	-	Pegawai pada Kantor		19.093.846	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Daerah pada SKPD						, Semua Kel/Desa	H (PAD)			Camat Lebatukan			
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**0**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**78.560.000**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		13.800.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		64.760.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**12.025.986**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**73.704.331**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				5 Paket	913.125	Kab. Lembata, Lebatukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		2.011.350	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kantor yang Disediakan						, Semua Kel/Desa				Lebatukan			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	6.698.611	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.032.692	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		11.791.595	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	4.414.250	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		4.264.550	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan	PENDAPATAN ASLI DAERA	-	-	Pegawai pada		0	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan						, Semua Kel/Desa	H (PAD)			Kantor Camat Lebatukan			
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		49.604.144	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**0**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**58.400.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		12.650.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Komputer/Laptop/PC dan Printer	Jumlah Unit Peralatan dan Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		45.750.000	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**32.891.427**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**87.416.390**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	29.407.750	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		82.700.888	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Lebatukan			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	3.050.460	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		2.530.000	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	6.698.611	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa						2.185.502	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**47.810.000**	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		**98.377.486**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				9 Unit	44.970.000	Kab. Lembata, Lebatukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		71.976.764	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya						, Semua Kel/Desa				Lebatukan			
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		0	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	2.840.000	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		9.460.722	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		10.285.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Lebatukan		6.655.000	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**35.726.392**						**25%**	**1128.480.402**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraa**	**100%**			**25%**	**33.300.928**					**Masyarakat Desa di**	**25%**	**102.281.716**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										**Kecamatan Omesuri**			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	21.000.000	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		86.150.089	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	12.300.928	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		16.131.627	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**2.425.464**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**26.198.686**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	2.425.464	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Lebatukan		26.198.686	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**			**25%**	**4.070.000**						**25%**	**23.813.459**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**4.070.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**23.813.459**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa				2 Lembaga	4.070.000	Kab. Lembata,Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		5.351.552	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**0**						**25%**	**13.103.520**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**0**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**6.649.477**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		6.649.477	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**0**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**6.454.043,**	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		6.454.043,	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**12.000.000**						**25%**	**16.956.500**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**12.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**16.956.500**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		8.305.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	12.000.000	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		8.651.500	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**979.050**						**25%**	**253.235.667**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**979.050**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan**	**25%**	**253.235.667**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		54.196.347	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka				2 Dokumen	979.050	Kab. Lembata,Lebatukan,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Ketaha	4.Reformasi	Masyarakat Desa		51.082.300,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	nan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	di Kecamatan Lebatukan			
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		28.863.450	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat	Masyarakat Desa di Kecamatan		28.561.500	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Permusyawaratan Desa								Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Lebatukan			
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		8.174.500,	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		27.774.900	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkualitas dan Berkeadilan	politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		16.818.420	
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban	Masyarakat Desa di Kecamatan Lebatukan		17.764.250	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	umum, dan transformasi pelayanan publik				

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Lebatukan dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Lebatukan Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Lebatukan.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Lebatukan, September 2025

Camat Lebatukan,

Moses Museng, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP.19680407 199903 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN OMESURI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan

musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir.

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Omesuri dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Omesuri dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Omesuri dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4	4	100	2	2	25
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	14	14	100	14	14	25
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	12	12	100	12	12	25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	18	18	100	18	18	25
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**-**	**-**	**0,06**	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000 Paket	-	2500	2500	100	2500	2500	25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	10	10	100	10	10	25
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Paket	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384 Laporan	-	96	96	100	96	96	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96 Laporan	-	24	24	100	24	24	25
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	-	6	6	100	6	6	25
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	-	20	20	100	20	20	25
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	-	5	5	100	5	5	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	5	5	100	5	5	25
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	-	30	30	100	30	30	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Omesuri. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Omesuri, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata :
    1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
        - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
        - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
        - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
        - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
        - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.
    2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
    3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;

4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Omesuri:

♦ Tantangan :

- Kondisi geografis Kecamatan yang wilyahnya luas dan perbukitan.
- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	KECAMATAN OMESURI				**2.968.289.126**					**3.121.609.458**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.968.289.126**					**3.121.609.458**	
	KECAMATAN				**2.968.289.126**					**3.121.609.458**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.509.522.146**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.649.356.478**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	33.500.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**39.514.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.514.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.029.963.286**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.078.283.618**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	1.932.813.286	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	1.981.133.618	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	83.150.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	83.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**19.469.990**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**19.469.990**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	7.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.469.990	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.469.990	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**25.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**65.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**85.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**109.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**98.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**120.500.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	18.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**130.719.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**130.719.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	122.328.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	122.328.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5.891.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5.891.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	2.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**86.869.370**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**86.869.370**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	61.869.370	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	61.869.370	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	5.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**116.275.510**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**119.261.510**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**90.194.510**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**93.180.510**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	59.680.510	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	59.680.510	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	30.514.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	33.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**26.081.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**26.081.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	26.081.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kab. Lembata,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	26.081.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Omesuri, Semua Kel/Desa				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Omesuri, Semua Kel/Desa				
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**44.991.470**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**44.991.470**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**44.991.470**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**44.991.470**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.991.470	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.991.470	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**10.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**12.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**6.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	**6.000.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**5.500.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**6.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	**6.000.000**	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**41.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**50.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**41.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**50.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	8.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	10.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000,00	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**246.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**246.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**246.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	246.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	32.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	32.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	29.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	29.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	31.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	31.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	29.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	29.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	35.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	29.500.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	29.500.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	29.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	29.500.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp. 3.121.609.458,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Omesuri didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Omesuri, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Omesuri dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Omesuri dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Omesuri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Omesuri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Omesuri Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Omesuri tahun 2025 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Omesuri Tahun 2023-2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Omesuri di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.661.223.140,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.601.953.140,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 10.875.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 12.677.500,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.082.500,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 28.255.500,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 5.379.500,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 22 (dua puluh dua) desa.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Omesuri Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								1.661.223.140							**3.121.609.458**	
								1.661.223.140							**3.106.609.458**	
								1.661.223.140							**3.106.609.458**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100%**	**1.601.953.140**							**2.634.356.478**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**				**25%**	**10.731.350**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**39.514.000**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.370.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		7.514.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.388.950	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.577.450	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.577.450	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		6.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.900.750	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		6.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.372.750	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.544.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**				**25%**	**1.457.207.602**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**2.078.283.618**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	1.386.179.852	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		1.981.133.618	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	68.930.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		83.150.000	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.055.750	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		7.000.000	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.042.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		7.000.000	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**15.243.500**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**19.469.990**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.162.750	Kab. Lembata, Omesuri,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		7.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14.080.750	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		12.469.990	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**0**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**65.000.000**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		35.000.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		30.000.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**10.859.253**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**94.500.000**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.161.541	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		4.000.000	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	3.490.462	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		25.000.000	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		15.000.000	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		11.000.000	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	2.207.250	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		12.000.000	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		2.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	3.000.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		40.000.000	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**0**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**120.000.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		25.000.000	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		15.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		30.000.000	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		25.000.000	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		25.000.000	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**86.381.435**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**130.719.500**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	69.616.600	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		122.328.400	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	15.466.450	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.891.100	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	1.298.385	Kab. Lembata, Omesuri,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		2.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**21.530.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**86.869.370**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	21.530.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		61.869.370	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Omesuri		5.000.000	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**10.875.000**						**25%**	**119.261.510**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**25%**	**5.840.750**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**93.180.510**	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5.840.750	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		59.680.510	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		33.500.000	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**5.034.250**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**26.081.000**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	5.034.250	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		26.081.000	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**			**25%**	**12.677.500**						**25%**	**44.991.470**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**12.677.500**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**44.991.470**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.677.500	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		44.991.470	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.082.500**						**25%**	**12.000.000**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.082.500**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**6.000.000**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.082.500	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		6.000.000	
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**0**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**6.000.000**	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		6.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**28.255.500**						**25%**	**50.000.000**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**28.255.500**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**50.000.000**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	13.080.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		10.000.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	15.175.500	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		40.000.000	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**5.379.500**						**25%**	**246.000.000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**5.379.500**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**246.000.000**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		30.000.000	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	4.042.500	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		32.500.000,	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		29.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		31.000.000	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		29.000.000	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	1.337.000	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		35.000.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		29.500.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Omesuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri		29.500.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Omesuri dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Omesuri Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Omesuri.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Balauring, 2025

Camat Omesuri,

Ade Hasan Yusup, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19730609 200012 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BUYASURI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir.

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buyasuri dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Buyasuri dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buyasuri dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun n-1)2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2	2	100	2	**2**	**25**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	-	100	1	1	25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	0,00	25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25

	SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4	4	100	2	2	25
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	14	14	100	14	14	25
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	12	12	100	12	12	25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	18	18	100	18	18	25
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000 Paket	-	2500	2500	100	2500	2500	25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	10	10	100	10	10	25
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Paket	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384 Laporan	-	96	96	100	96	96	25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96 Laporan	-	24	24	100	24	24	25
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	-	6	6	100	6	6	25
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	-	20	20	100	20	20	25
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	-	5	5	100	5	5	25
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	5	5	100	5	5	25
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	120 Orang	-	30	30	100	30	30	**25**

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	**2**	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1	1	100	2	25,00	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Buyasuri. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Buyasuri, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata :

1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
   - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
   - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
   - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
   - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
   - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.

2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Buyasuri:

♦ Tantangan :

- Kondisi geografis Kecamatan yang wilyahnya luas dan perbukitan.
- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	KECAMATAN BUYASURI				**3.216.921.593**					**3.529.710.090**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3.216.921.593**					**3.529.710.090**	
	KECAMATAN				**2.982.821.593**					**3.308.410.090**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.982.821.593,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**3.308.410.090**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	49.000.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**35.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	7.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	7.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.000.000,	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.546.371.593**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.791.696.625**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	2.380.671.593	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	2.615.345.945	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	151.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	166.350.680	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**12.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**10.000.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**15.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**70.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**101.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**75.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	11.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	49.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**90.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**80.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**130.719.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**130.719.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	42.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	110.127.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	6.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	11.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	12.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**108.950.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**118.986.065**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	84.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	90.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	8.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	7.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	10.886.065	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**81.600.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**76.600.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	66.600.000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**50.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	66.600.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	50.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**26.600.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kab. Lembata, Buyasuri,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	26.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Dilimpahkan	Semua Kel/Desa				Dilimpahkan	Semua Kel/Desa				
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**38.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**53.200.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**38.500.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**53.200.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	26.600.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	6.500.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Laporan	13.300.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.300.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**11.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**18.300.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**6.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**13.300.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	**13.300.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**5.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**5.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	**5.000.000**	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**33.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**25%**	**24.900.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**33.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**24.900.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	8.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	11.600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Republik Indonesia					
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.300.000,00	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**70.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**48.300.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**70.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**48.300.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	13.300.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	5.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal- hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp. 3.529.710.090,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Buyasuri didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Buyasuri, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Buyasuri dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buyasuri dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Buyasuri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buyasuri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buyasuri Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Buyasuri tahun 2024 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buyasuri Tahun 2023- 2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buyasuri di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 12 kegiatan, 29 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.838.358.005,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.780.018.005,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 11.881.450,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 9.457.450,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.490.700,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 27.358.400,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 8.152.000,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 20 (dua puluh) desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 12 kegiatan, 29 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Buyasuri Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								1.838.358.005							**3.198.963.625**	
								1.838.358.005							**3.198.963.625**	
								1.838.358.005							**3.198.963.625**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100%**	**1.780.018.005**							**3.098.163.625**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**				**25%**	**9.164.650,00**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**42.000.000,00**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.190.150	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.329.500,	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.312.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.665.700	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.883.400	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.333.200	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	450.700,00	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**				**25%**	**1.647.214.483**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**2.781.696.625**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	1.577.586.283	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		2.615.345.945	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	68.930.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		166.350.680	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	698.200	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**13.803.700**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**7.000.000**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	839.500	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12.964.200	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**-**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**-**	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**9.576.022**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**46.900.000**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.000.000	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	4.297.272	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		26.600.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa				Buyasuri			
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	1.978.750	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		13.300.000	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	3.300.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**-**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**93.140.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		46.560.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		46.580.000	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**76.929.150**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**120.127.000,00**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	64.041.800	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		113.127.000	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	12.887.350	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		7.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa				Buyasuri			
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**23.330.000**					**Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri**		**7.300.000,00**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	23.330.000	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		7.300.000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi				2 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Buyasuri		-	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**11.881.450**						**25%**	**26.600.000**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**25%**	**7.596.500,**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**-**	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	7.596.500,	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentrama	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan Berkeadilan	n, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**4.284.950**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**26.600.000**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	4.284.950	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		26.600.000	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**			**25%**	**9.457.450,**						**25%**	**13.300.000**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**9.457.450,**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**13.300.000**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	9.457.450,	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		13.300.000	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**1.490.700**						**25%**	**13.300.000**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**1.490.700**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**13.300.000**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.490.700	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		13.300.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**5.000.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**6.000.000**	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**27.358.400**						**25%**	**11.600.000**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**27.358.400,**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**11.600.000**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	11.485.000,	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		11.600.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	15.873.400	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**20.261.150**						**25%**	**36.000.000**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**20.261.150**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri**	**25%**	**36.000.000**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman,	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Berkeadilan	ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	11.441.500	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		6.600.000	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		-	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		7.000.000,	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	8.819.650	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		7.600.000	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi				1 Dokumen	-	Kab.	PENDAPATAN	Memperkuat	4.Reformasi	Masyarak		7.800.000,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kawasan Perdesaan						Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	at Desa di Kecamatan Buyasuri			
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	-	Kab. Lembata, Buyasuri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Buyasuri		7.000.000	

BAB V
PENUTUP

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Buyasuri dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Buyasuri Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Buyasuri.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Renja Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2025

Plt.Camat Buyasuri,

Sang'ud Boli, A.md

NIP. 19701005 200012 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN ILE APE TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir.

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Ile Ape dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Ile Ape dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ile Ape dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**25**	**7,20**	**-**	**7,90**	**17,83**	**26,51**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25**	**20,45**	**-**	**20,45**	**7,12**	**30,23**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2	1	-	1	**18,75**	**15,09**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	-	1	12,50	20,05
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	-	-	-	25,00	29,70
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	-	1	0,00	29,70
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	-	-	-	25,00	24,75
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8 Laporan	-	2	2	-	-	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4	4	-	-	25,00	0,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**25**	**11,67**	**-**	**12,22**	25,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	14	14	-	14	**11,67**	**33,19**
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	12	3	-	3	25,00	33,75
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1	0	-	1	6,25	24,15
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	18	4	-	4	0,00	14,97
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**5,00**	5,56	0,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	3	-	-	-	**0,00**	**22,25**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	2	-	-	1	0,00	0,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**-**	0,00	34,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	2	-	-	-	**0,00**	**0,00**
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	2	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**-**	**-**	**0,06**	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	-	-	-	-	**0,00**	**4,77**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5	-	-	3	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	-	0	-	-	-	0,00	11,89
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000 Paket	-	2500	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	5	-	-	3	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	-	-	-	-	-	0,00	18,78
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	10	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**-**	0,00	0,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	2	-	-	-	**0,00**	**29,33**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Paket	-	4	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	1	-	-	-	0,00	234,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	-	4	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	5	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**21**	**-**	**21,03**	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384 Laporan	-	96	96	-	96	**21,03**	**40,70**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96 Laporan	-	24	4	-	4	25,00	40,58
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	-	6	6	-	6	4,17	47,19
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**4,44**	**-**	**4,44**	25,00	30,87
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	8	8	-	8	**4,44**	**8,38**
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	-	20	-	-	-	25,00	11,77
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	8	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	5	-	-	-	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	-	-	-	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Bangunan Lainnya									
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	-	-	-	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**12,50**	0,00	0,00
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**-**	**25,00**	**0,95**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	-	5	5	-	-	**25,00**	**0,00**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	5	5	-	-	25,00	0,00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	25,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1	1	-	1	**25,00**	**4,32**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**25**	25,00	4,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**25**	**0,00**	**18,64**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	-	-	1	**0,00**	**18,64**
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	**-**	**25**	**0**	**-**	**25**	0,00	18,64
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	3	-	-	3	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	0,00	
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	**25,00**	**12,19**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	-	1	**25,00**	**24,38**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	25,00	24,38
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	1	1	-	1	**25,00**	**0,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	25,00	0,00
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	**25,00**	**16,12**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	-	30	30	-	30	**25,00**	**16,12**
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	-	1	25,00	14,15
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**6,67**	25,00	16,61
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**6,67**	**25,00**	**3,06**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	-	**25,00**	**3,06**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	8 Dokumen	-	2	2	-	2	25,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pendayagunaan Aset Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	-	25,00	12,53
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	-	25,00	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	-	25,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	2	25,00	0,00
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1	1	-	-	25,00	9,88
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2	2	-	-	25,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				25%	25%	25%		25%	25%	25%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				25%	25%	25%		25%	25%	25%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Ile Ape. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ile Ape, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata :

1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
   - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
   - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
   - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
   - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
   - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.

2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ile Ape:

♦ Tantangan :

- Kondisi geografis Kecamatan yang wilyahnya luas dan perbukitan.
- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	KECAMATAN ILE APE				**2,628,339,979**					**2,628,339,979**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Cepat, Tepat**	**100%**	**2,389,309,691**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Cepat, Tepat**	**100%**	**2,389,309,691**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**53,824,525**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**53,824,525**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah	2 Dokumen	7,858,975	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perengkat Daerah	2 Dokumen	7,858,975	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	3 Dokumen	7,954,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	3 Dokumen	7,954,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	2 Dokumen	7,954,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. RKA SKPD	2 Dokumen	7,954,700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10 Dokumen	7,501,450	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10 Dokumen	7,501,450	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	10 Dokumen	7,209,550	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	10 Dokumen	7,209,550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7,390,450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7,390,450	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	2 Laporan	7,954,700	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	2 Laporan	7,954,700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentasi Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2,110,834,152**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentasi Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2,110,834,152**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,026,186,252	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2,026,186,252	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	78,290,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	78,290,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	3,178,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	3,178,950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD dan Laporan dan Lap. keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD	2 Laporan	3,178,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD dan Laporan dan Lap. keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ prognosis SKPD	2 Laporan	3,178,950	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**11,741,050**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**11,741,050**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	7,299,100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	7,299,100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,441,950	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,441,950	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**0%**	**20,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosenase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**0%**	**20,000,000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	31 Orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	31 Orang	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**	**25%**	**52,235,614**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**	**25%**	**52,235,614**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	2,935,275	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	2,935,275	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	15,637,276	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	15,637,276	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	10,790,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	10,790,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	17,250,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	17,250,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang	2 Dokumen	2,623,063	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang	2 Dokumen	2,623,063	

			disediakan					disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	3,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	3,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**100,100,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**100,100,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	100,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	100,000	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	50,000,000	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**26,317,012**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**26,317,012**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	21,934,512	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	21,934,512	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	4,382,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	4,382,500	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**14,257,338**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**14,257,338**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	4 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	4 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 Unit	2,840,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 Unit	2,840,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	735,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	735,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	682,338	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	682,338	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**25%**	**9,707,338**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**25%**	**9,707,338**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**25%**	**7,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**25%**	**7,000,000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	5 Laporan	7,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	5 Laporan	7,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**25%**	**1,032,600**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**25%**	**1,032,600**	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1,032,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1,032,600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**1,674,738**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	**Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**25%**	**1,674,738**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	1,674,738	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	1,674,738	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**25%**	**187,032,563**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25%**	**187,032,563**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**12,032,563**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**12,032,563**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,745,363	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	7,745,363	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	2,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah dokumen sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	2,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2,287,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2,287,200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat		**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**25%**	**175,000,000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**		**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**25%**	**175,000,000**	

	Pencegahan Covid- 19 di Tk. Desa dan Kelurahan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	175,000,000	Pencegahan Covid- 19 di Tk. Desa dan Kelurahan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	175,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4,781,450**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**4,781,450**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**2,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**2,000,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2,000,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			**25%**	**2,781,450**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah**			**25%**	**2,781,450**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau POLRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsunya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	2 Laporan	2,781,450	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau POLRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsunya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	2 Laporan	2,781,450	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum**	**25%**	**10,472,576**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum**	**25%**	**10,472,576**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Derah**	**25%**	**10,472,576**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Derah**	**25%**	**10,472,576**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan	34 Orang	4,685,376	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan	34 Orang	4,685,376	

	Pemeliharaan Keutuhan NKRI		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negaran RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI			
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	34 Orang	1,287,200	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	34 Orang	1,287,200	
	Pelaksanaan Tugas FORKOMPIMCAM	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	4,500,000	Pelaksanaan Tugas FORKOMPIMCAM	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	4,500,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Prosentase Pemerintahan Desa yang terbina dan Terawasi**	**25%**	**27,036,361**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Prosentase Pemerintahan Desa yang terbina dan Terawasi**	**25%**	**27,036,361**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	**25%**	**27,036,361**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Prosentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi**	**25%**	**27,036,361**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perkades	2 Dokumen	1,072,600	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perkades	2 Dokumen	1,072,600	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2,575,411	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2,575,411	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2,043,850	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2,043,850	

			yang dilaksanakan					yang dilaksanakan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	2 Dokumen	2,266,450	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	2 Dokumen	2,266,450	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3,266,450	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	3,266,450	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumentasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	7,266,450	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumentasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	7,266,450	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	1,266,450	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	1,266,450	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	7,278,700	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Lembata Ile Ape, Laranwutun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	7,278,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	KECAMATAN ILE APE				**3.340.741.059**					**3.521.772.107**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3.340.741.059**					**3.521.772.107**	
	KECAMATAN				**3.340.741.059**					**3.521.772.107**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**2.887.821.878**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100%**	**3.054.812.324**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	41.000.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**25%**	**45.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.391.609.219**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**25%**	**2.450.650.819**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	2.323.609.219	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	2.323.609.219	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	109.041.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	8.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**29.786.352**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**25%**	**18.776.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	8.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.786.352	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.776.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**130.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**25%**	**140.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	85.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	90.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**67.995.160**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**25%**	**122.995.160**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Paket	37.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	40.995.160	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40.995.160	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**90.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**25%**	**98.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	79.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	19.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**64.354.567**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**25%**	**77.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, WULANDO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	9.354.567	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lembata, WULAND	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Laporan	12.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		NI, Semua Kel/Desa					ONI, Semua Kel/Desa				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**73.076.580**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**25%**	**102.390.345**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49.076.580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49.076.580	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	5.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	15.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	2 Unit	14.313.765	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**46.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**25%**	**53.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**30.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**25%**	**37.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	18.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	18.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**16.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**25%**	**16.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 Laporan	16.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**168.861.108**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**25%**	**78.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**168.861.108**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**25%**	**78.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	2 Lembaga	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	2 Lembaga	19.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1 Dokumen	19.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000	
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1 Laporan	134.861.108	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	1 Laporan		
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**11.339.200**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**15.335.050**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**25%**	**8.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	**8.000.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**6.339.200**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	25%	**7.335.050**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.339.200	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	**7.335.050**	
5	**PROGRAM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan**	**25%**	**16.000.000**	**PROGRAM**		**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan**	**25%**	**20.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Pemerintahan Umum**			**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Pemerintahan Umum**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**16.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25%**	**20.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	8.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	12.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**210.718.873**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**25%**	**300.624.733**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	**210.718.873**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	25%	300.624.733	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	40.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	40.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	33.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	33.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	33.300.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	33.300.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	30.600.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	30.600.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	30.300.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	30.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
							Kel/Desa				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	34.151.640	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	34.151.640	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	4.867.233	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	48.773.093	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lembata, WULANDONI, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	50.000.000	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp. 2.628.339.979,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ile Ape didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Ile Ape, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Ile Ape dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ile Ape dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Ile Ape.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Ape yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ile Ape tahun 2024 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ile Ape Tahun 2023-2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ile Ape di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 17 kegiatan, 50 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.628.339.979,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.389.309.691,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp9.707.338,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 187.032.563,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 4.781.450,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 10.472.576,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 8 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 27.036.361,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 17 (tujuh belas) desa.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Ile Ape Kab. Lembata
Tahun 2025

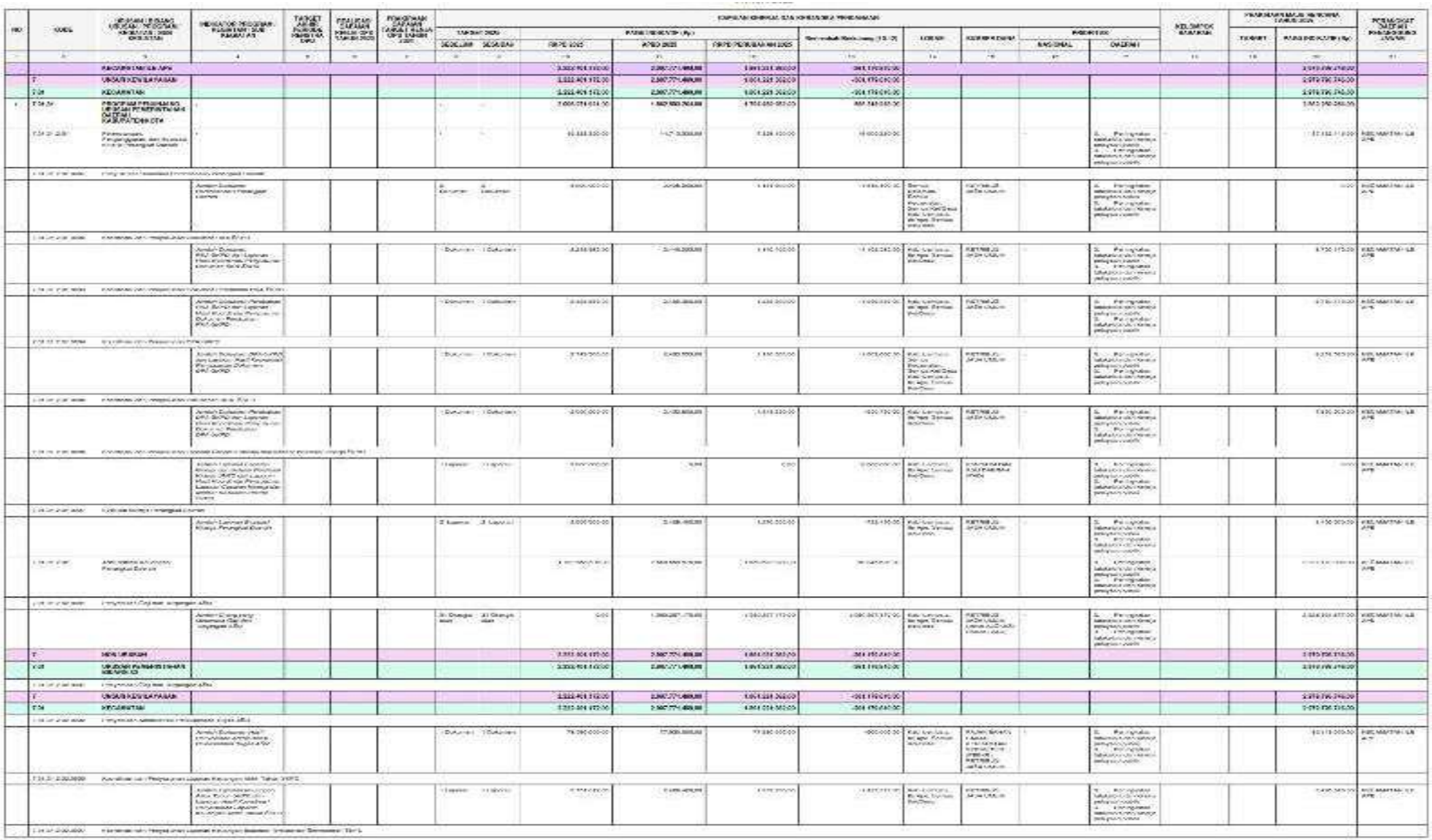

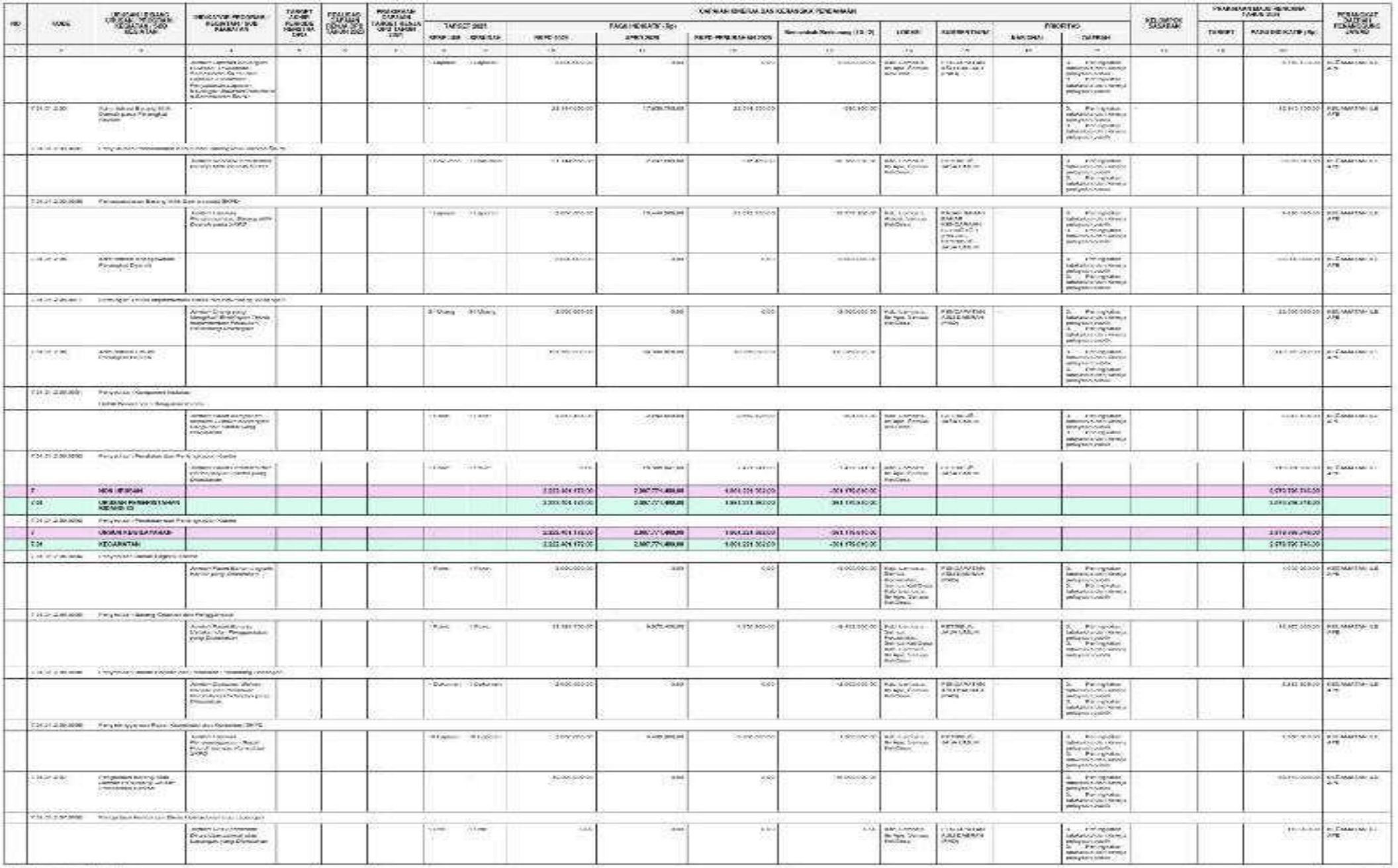

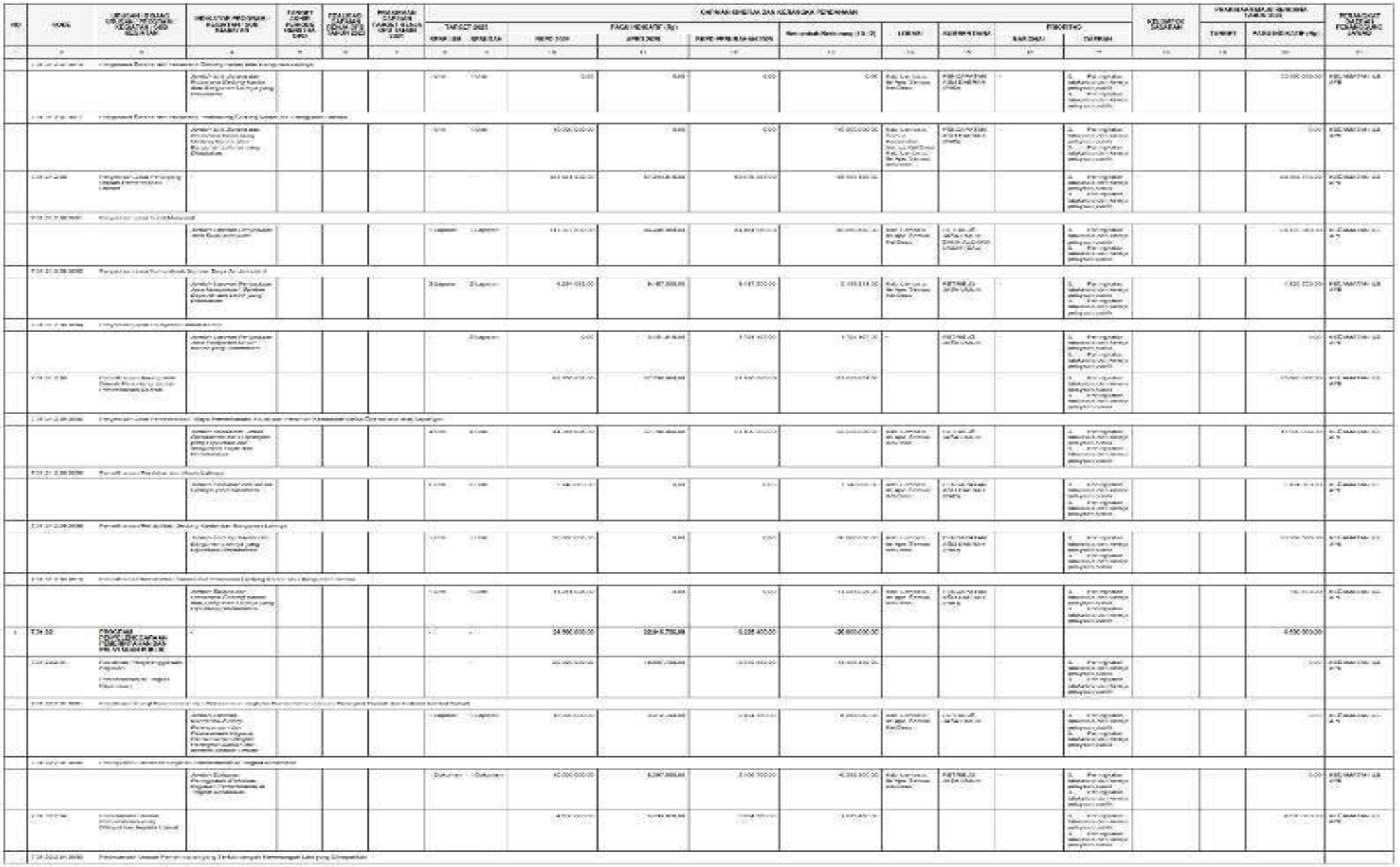

NO	KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SUB SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN BERJALAN	REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	CAPAIAN SPESIFIK DAN KUALIFIKASI PENERIMAAN										KELOMPOK SASARAN	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)									TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KUANTITAS	SATUAN	2025	2026	2027		LOKASI	KELOMPOK SASARAN	BARU/LAMA	PERTIMBANGAN				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
			Jumlah Lampiran Kecamatan dan Lampiran Lurah Tahun Pemerintahan				1 Lampiran	1 Lampiran												
1	X.XX.XX	PROGRAM PEMERINTAHAN, MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	43.000.004.00	22.956.500,00	11.408.750,00	227.224.247,00							251.000.001,00	
	X.XX.XX.XX	Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Umum														1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0001	Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi, Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Disusun dan Dilaporkan oleh Kecamatan dan Kelurah di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX.0003	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi, Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Disusun dan Dilaporkan oleh Kelurah				1 Dokumen	1 Dokumen	0.000.000.00	0.00	0.00	0.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Negara dan Pengamalan Pancasila																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi, Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Disusun dan Dilaporkan oleh Kelurah				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PARTISIPASI MASYARAKAT							0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	000.000.00							0.000.000,00	
	X.XX.XX.XX	Pengembangan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurah							0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00				1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0004	Pembinaan Ketentuan Lingkup Kegiatan Kegiatan Kecamatan dan Kelurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0005	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0006	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX	PROGRAM PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	43.000.004.00	22.956.500,00	11.408.750,00	227.224.247,00							251.000.001,00	
	X.XX.XX.XX	Pengembangan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurah							0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00				1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX.0007	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi, Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Disusun dan Dilaporkan oleh Kelurah				1 Dokumen	1 Dokumen	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0008	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0009	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0010	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0011	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					
	X.XX.XX.XX.0012	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurah dan Pelayanan Perkantoran Lurah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran	0.000.000.00	0.007.000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	Kab/Kota Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi	PEMERINTAHAN KELURAHAN (PKK)		1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan			0.000.000.00	KEC.MARTIN ILE APE	
	X.XX.XX.XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Lampiran Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kantor Camat dan Pelayanan Perkantoran Camat				1 Lampiran	1 Lampiran								1. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan 2. Pemerintahan Kecamatan dan Lurah Tahun Pemerintahan					

NO	KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, PERUBAHAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	TARGET CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KINERJA BELANJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASALAH KINERJA TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)											TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KINERJA	KEUANGAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		LOKASI	KELOMPOK	KAB/KOTA	DAERAH					
-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pemerintahan kemasyarakatan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan kemasyarakatan, Ketentraman dan ketertiban umum				Orang	Orang					Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora			1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan				
	7.01.2022.01.2008	Penyusunan Tugas Pokok Fungsi dan Peraturan di Desa																			
			Jumlah Dokumen Tugas Pokok Fungsi dan Peraturan di kecamatan				Dokumen	Dokumen	32.000.000,00	0	11.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora, Kec. Lamahora, Ile Ape, Desa Lamahora	PATTIMURA JAYA UMUM		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
-	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	32.497.742,00	28.497.000,00	43.077.000,00	6.000.000,00							31.720.000,00		
	7.01.2022.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengelolaan pemerintahan desa	-				-	-	32.192.242,00	28.497.000,00	43.077.000,00	6.000.000,00							31.720.000,00		KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2008	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Desa																			
			Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				Dokumen	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PATTIMURA JAYA UMUM		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2009	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa				Dokumen	Dokumen	2.500.000,00	1.500.000,00	2.179.000,00	2.500.000,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PATTIMURA JAYA UMUM		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			2.500.000,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2010	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok Fungsi Perangkat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Tugas pokok Fungsi Perangkat Desa				Dokumen	Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PATTIMURA JAYA UMUM		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			2.500.000,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2011	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				Dokumen	Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PEMERINTAH KABUPATEN (PKD)		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2012	Pembentukan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
			Jumlah Dokumen Pembentukan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Dokumen	Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PEMERINTAH KABUPATEN (PKD)		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2013	Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga																			
			Jumlah Dokumen Kerjasama Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga				Dokumen	Dokumen	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PATTIMURA JAYA UMUM		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			1.000.000,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2014	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				Dokumen	Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PEMERINTAH KABUPATEN (PKD)		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
	7.01.2022.01.2015	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa Lainnya				Dokumen	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Kec. Ile Ape, Desa Lamahora	PEMERINTAH KABUPATEN (PKD)		1. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan 2. Perangkat kecamatan dan kantor pelayanan			0,00	KEC. MAYENA ILE APE
		JUMLAH							3.333.514.100,00	2.887.271.000,00	1.384.233.000,00	261.150.000,00							3.999.296.270,00		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ile Ape dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Ile Ape Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Ile Ape.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Lewoleba, 2025
Camat Ile Ape,

Laurensius Lebe,S.Sos,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730915 200012 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN ATADEI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023- 2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Rumusan Rancangan Akhir.
   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan,

sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Atadei dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Atadei dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Atadei dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**25%**	**25%**	**-**	**100**	**100**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25%**	**25%**	**-**	**100**	**25%**	**25%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	25%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25%**	**25%**	**25%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang /Bulan	-	33 orang /Bulan	33 orang /Bulan	100%	33 orang /Bulan	33 orang /Bulan	25%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	-	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	25%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen -	1 Dokumen -	25%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	25%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	25%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	500 Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	-	50 Laporan	50 Laporan	100%-	50 Laporan	50 Laporan	25%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	8-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	25%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	25%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda Empat dan 8 Kendaraan Roda Dua	-	1 Kendaraan Roda Empat dan 8 Kendaraan Roda Dua	1 Kendaraan Roda Empat dan 8 Kendaraan Roda Dua	100%	1 Kendaraan Roda Empat dan 8 Kendaraan Roda Dua	1 Kendaraan Roda Empat dan 8 Kendaraan Roda Dua	25%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%-	2 Laporan	2 Laporan	40%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%-	3 Dokumen	3 Dokumen	60%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	25%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	25%
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Dokumen Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Failitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah dokumen yang difasilitasi rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang - Undangan	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Atadei, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Atadei. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Atadei, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata :
   1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
      - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
      - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
      - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
      - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
      - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.
   2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
   3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
   4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Atadei:
   - ♦ Tantangan :
     - Kondisi geografis Kecamatan yang wilayahnya luas dan perbukitan.

- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.251.359.015,00			-	-	-	-	2.251.359.015,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.245.359.015,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.245.359.015,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31.000.000,00			-	-	-	-	31.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	8.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.000.000,00			-	-	-	-	23.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-			-	11.000.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintahan Daerah														
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	7.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	1.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**6.000.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.000.000,00			-	-	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**6.000.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**4.000.000,00**						**-**	**4.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**6.000.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**9.000.000,00**						**-**	**9.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	9.000.000,00			-	-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	J U M L A H							**2.392.359.015,00**							**2.392.359.015,00**	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp 2.392.359.015,00,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Atadei didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Atadei, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Atadei dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Atadei dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Atadei.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Atadei yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Atadei Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Atadei tahun 2025 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Atadei Tahun 2023-2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Atadei di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.660.163.213,00,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.590.567.448,00,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 19.336.915,00,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 12.340.750,00,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.209.250,00,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 29.632.600,00,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 6.076.250,00,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 15 (lima belas) desa.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 18 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut *:*

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Atadei Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PABD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ATADEI							**2.635.942.664,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-302.237.029,00**							**2.381.359.015,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.403.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.403.520,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.403.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.403.520,00**							**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.481.130.287,00**	**2.353.727.365,00**	**2.299.691.549,00**	**-123.771.272,00**							**2.357.359.015,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.816.345,00	47.500.000,00	25.280.000,00	-23.536.345,00			-	--	-		18.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor da Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.403.520,00	0,00	0,00	-5.403.520,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.691.547,00	5.760.860,00	0,00	-17.691.547,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.391.547,00	0,00	0,00	-3.391.547,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	813.800,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	651.800,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	780.900,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	928.660,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.004.100,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	526.800,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.054.800,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei,	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

			Daerah										Semua Kel/Desa						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.154.191.665,00	2.203.418.968,00	2.194.851.418,00	40.659.753,00			-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-		2.251.359.015,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.069.451.665,00	2.124.685.218,00	2.124.685.218,00	55.233.553,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.245.359.015,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	77.040.000,00	75.864.000,00	68.580.000,00	-8.460.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	651.800,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	--			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	2.217.950,00	1.586.200,00	-4.113.800,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkata			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

			n/Semester an SKPD													n mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	28.365.760,00	21.410.600,00	20.458.400,00	-7.907.360,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	723.800,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.365.760,00	20.686.800,00	20.458.400,00	-2.907.360,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI

		Daerah																	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	52.500.000,00	17.648.155,00	9.884.415,00	-42.615.585,00			-	- -	-		31.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.750.000,00	672.000,00	672.000,00	-1.078.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	3.736.411,00	1.417.500,00	-18.582.500,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/ Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	1.639.744,00	994.915,00	994.915,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

															4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim					
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	11.600.000,00	6.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	76.733.720,00	0,00	0,00	-76.733.720,00			-	- -	-		13.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei,	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

			Dinas Jabatan yang Disediakan									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	35.173.533,00	0,00	0,00	-35.173.533,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	39.560.187,00	0,00	0,00	-39.560.187,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.831.250,00	57.988.782,00	49.217.316,00	-49.613.934,00			-	-	-		23.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	78.123.000,00	52.658.600,00	44.658.600,00	-33.464.400,00	Kab. Lembata, Atadei, Semu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

												a Kel/Desa							
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.708.250,00	4.558.716,00	4.558.716,00	-2.149.534,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	771.466,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.816.345,00	47.500.000,00	25.280.000,00	-23.536.345,00			-	- -	-		18.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	45.430.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7	**NON URUSAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	

	7.01	**KECAMATAN**						**2.630.539.144,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-296.833.509,00**							**2.381.359.015,00**	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	2.070.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.789.434,00**	**3.016.550,00**	**800.000,00**	**-10.789.434,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.264.450,00	3.016.550,00	800.000,00	-7.464.450,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	3.264.450,00	1.420.650,00	0,00	-3.264.450,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	6.524.984,00	0,00	0,00	-6.524.984,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	6.524.984,00	0,00	0,00	-6.524.984,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**-**				**-**	**-**	**43.174.150,00**	**30.365.800,00**	**13.240.900,00**	**-37.174.150,00**							**6.000.000,00**	

		KELURAHAN																	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	43.174.150,00	30.365.800,00	13.240.900,00	-29.933.250,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	34.774.225,00	17.665.900,00	8.440.900,00	-26.333.325,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	8.660.900,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.399.925,00	4.039.000,00	800.000,00	-2.599.925,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.200.000,00**	**1.595.900,00**	**800.000,00**	**-7.200.000,00**							**2.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	4.200.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-3.400.000,00			-	- -	-		2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	1.595.900,00	800.000,00	-3.400.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.748.793,00**	**37.202.535,00**	**15.746.436,00**	**-14.748.793,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	20.748.793,00	37.202.535,00	15.746.436,00	-5.002.357,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	30 Orang	4.000.000,00	10.897.535,00	2.946.436,00	-1.053.564,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																	
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI

	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.748.793,00	26.305.000,00	12.800.000,00	1.051.207,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**66.900.000,00**	**3.673.350,00**	**3.426.750,00**	**-60.900.000,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	66.900.000,00	3.673.350,00	3.426.750,00	-63.473.250,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKA	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI

			Administrasi Tata Pemerintahan Desa									a Kel/Desa	SI UMUM						
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	2.722.650,00	3.426.750,00	1.526.750,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI

			n Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									a Kel/Desa							
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	950.700,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN ATADEI

			katan																
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Atadei, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN ATADEI
	JUMLAH								**2.635.942.664,00**	**2.429.581.500,00**	**2.333.705.635,00**	**-17.964.619.425,00**							**2.381.359.015,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Atadei dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Atadei Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Atadei.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Atadei, September 2025

Camat Atadei,

KEC ATADEI

Marianus Demoor, S.Sos

Pembina Tk. I/IV b

NIP.19751208 200012 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN NAGAWUTUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Kantor Camat Nagawutung Tahun 2023-2026. Rencana Kerja tesebut telah dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025.

Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaannya, maka dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut mengharuskan terjadinya perubahan Renja Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025 yaitu:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya pengurangan target kinerja dan pagu.
b. Adanya penyesuaian terhadap kode rekening belanja
c. Adanya penyesuaian program dan kegiatan
d. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar program kegiatan, perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran.

Dengan demikian Perubahan Renja Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025 merupakan perwujudan dari sebuah mekanisme penyusunan anggaran yang harus dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas demi efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun berkenan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang– undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Nagawutung Tahun 2025 adalah penyesuaian nomenklatur belanja sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan seiring dengan perubahan volume kegiatan, kenaikan harga satuan barang, serta penyesuaian program dan kegiatan dan perubahan target kinerja SKPD dan penyesuaian kode rekening belanja.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Nagawutung Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian valume kegiatan sesuai RKPD Tahun 2025;
2. Penyesuaian harga satuan belanja berdasarkan kenaikan harga satuan belanja;

3. Penyesuaian perubahan target kinerja SKPD sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Penyesuaian Program dan Kegiatan;
5. Penyesuaian kembali kode rekening belanja.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kantor Camat Nagawutung Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penusliasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA, memuat Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat Rancangan Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR CAMAT NAGAWUTUNG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 maka dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025.

Hasil perhitungan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Nagawutung hingga Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran dan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp
				100	**13.526.286.385**	**49,67**	**4.418.592.960,00**	**11,38**	**2.222.439.816**	**28,19**	**516.875.940**	**24,67**	**536.830.869**					**52,86**	**1.053.706.809**	**55,69**	**5.472.299.769**	**55,69**	**40,46**
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan Cakupan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah	100	11.698.752.585	29,03	4.169.515.595	12,24	2.162.911.202	32,73	510.518.940	34,55	528.830.869					67,27	1.039.349.809	46,94	5.208.865.404	46,94	44,52
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja.	100	120.683.500	35,71	25.971.100	17,86	6.944.400	40,00	-	30,00	2.056.900					70,00	2.056.900	48,21	28.028.000	48,21	23,22
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	19.395.563	4	3.154.500	2	1.135.650	-	-	1	390.250					1	390.250	5	3.544.750	62,50	18,28

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	23.705.688	4	3.561.800	2	1.120.650	1	-	-	-					1	-	5	3.561.800	62,50	15,03
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	19.395.563	4	5.512.950	2	1.302.450	1	-	1	793.900					2	793.900	6	6.306.850	75,00	32,52
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	8	23.705.686	4	10.139.850	2	2.017.950	-		1						1	-	5	10.139.850	62,50	42,77
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	8	17.240.500	4	3.602.000	2	1.367.700	2		-	872.750					2	872.750	6	4.474.750	75,00	25,95
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.	16	17.240.500	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.	100	9.791.528.710	33,85	3.657.001.254	18,75	2.003.029.779	25,00	498.657.240	30,56	496.037.719					55,56	994.694.959	47,92	4.651.696.213	47,92	47,51
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	9.252.944.238	28	3.510.856.454	14	1.932.006.029	4	487.227.240	4	477.801.719					8	965.028.959	36	4.475.885.413	64,29	48,37
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jlh. Dokumen hasil Penyediaan Adm. Pelak. Tugas ASN	80	474.113.750	40	141.519.450	20	69.771.050	5	11.430.000	5	17.634.000					10	29.064.000	50	170.583.450	62,50	35,98

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD	8	25.860.750	4	4.625.350	2	1.252.700	-		2	602.000					2	602.000	6	5.227.350	75,00	20,21
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	48	38.609.972	-	-			-		-						-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen dan Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	107.753.125	37,50	44.029.350	21,43	21.293.200	25,00	3.360.000	25,00	5.040.000					50,00	8.400.000	53,57	52.429.350	53,57	48,66
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	21.550.625	-	-			-		-						-	-	-	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	48	86.202.500	24	44.029.350	12	21.293.200	3	3.360.000	3	5.040.000					6	8.400.000	30	52.429.350	62,50	60,82
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan SDM ASN, Dokumen dan Laporan Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	181.025.250	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-		-	-	-
		Pengadaan Pakian Dinas Besrta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	26	34.481.000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48	17.240.500	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	6	129.303.750	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	318.949.250	33,75	155.553.146	20,00	25.493.348	25,00	-	25,00	-					50,00	-	51,67	155.553.146	51,67	48,77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	48	12.930.375	24	1.359.000	12	1.394.662	3		3						6	-	30	1.359.000	62,50	10,51
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	56.031.625	24	100.776.146	12	18.538.186	3	-	3	-					6	-	30	100.776.146	62,50	179,86
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bagan Logistik Kantor yang disediakan	48	43.101.250	12	4.695.000	-		-		-						-	-	12	4.695.000	25,00	10,89
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	34.481.000	24	10.497.000	12	1.185.500	3		3						6	-	30	10.497.000	62,50	30,44
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	172.405.000	16	38.226.000	12	4.375.000	3		3						6	-	22	38.226.000	45,83	22,17
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah	20	631.426.875	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	157.625.000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8	114.575.000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8	107.753.125	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	150.000.000	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung Kantor yang diadakan	1	58.372.500	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jlh. sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang diadakan	4	43.101.250	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100	327.569.500	28,13	180.063.000	12,50	67.745.475	25,00	6.800.000	25,00	20.050.000					50,00	26.850.000	37,50	206.913.000	37,50	63,17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	258.607.500	24	162.717.000	12	59.450.275	3	6.500.000	3	19.300.000					6	25.800.000	30	188.517.000	62,50	72,90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	43.101.250	24	15.750.000	12	8.295.200	3	300.000	3	750.000					6	1.050.000	30	16.800.000	62,50	38,98
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	10.775.313	-	-											-	-	-	-	-	-

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	48	15.085.437	12	1.596.000	-		-		-						-	-	12	1.596.000	25,00	10,58
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Prangkat Daerah	100	219.816.375	36,36	106.897.745	18,18	38.405.000	20,00	1.701.700	30,00	5.646.250					50,00	7.347.950	49,09	114.245.695	49,09	51,97
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	40	150.854.375	20	103.382.745	10	38.405.000	2	1.701.700	3	5.646.250					5	7.347.950	25	110.730.695	62,50	73,40
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	21.550.625	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	8	17.240.500	2	3.515.000	-		-		-						-	-	2	3.515.000	25,00	20,39
		Pemeliharaan/Reahbilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunanan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	15.085.437	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Reahbilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunanan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	15.085.438	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	100	286.192.300	42,86	30.175.621	23,81	12.714.782	15,00	-	15,00	-					30,00	-	54,76	30.175.621	54,76	10,54

		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100	199.989.800	45,00	30.175.621	25,00	12.714.782	15,00	-	15,00	-					30,00	-	57,50	30.175.621	57,50	15,09
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jlh. Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keg. Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72	70.686.050	36	13.800.000	18	7.112.050	3		3						6	-	42	13.800.000	58,33	19,52
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dok. Peningkatan Efektifitas Keg. Pemerintahan di Tk. Kecamatan	8	129.303.750	4	16.375.621	2	5.602.732	-		-						-	-	4	16.375.621	50,00	12,66
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.	100	86.202.500	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	4	86.202.500	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kelurahan.	100	336.189.750	18,67	153.781.744	10,00	18.522.882	43,33	4.357.000	10,00	-					53,33	4.357.000,00	24,33	158.138.744	24,33	47,04
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	206.886.000	24,31	14.445.250	20,83	18.522.882	43,33	4.357.000	10,00	-					53,33	4.357.000	36,11	18.802.250	36,11	9,09

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang partisipasi dalam Forum Musrenbang di Desa	72	34.481.000	36	14.445.250	18	10.566.532	10	4.357.000	-	-					10	4.357.000	46	18.802.250	63,89	54,53
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	172.405.000	-	-	12	7.956.350	3		3	-					6	-	6	-	8,33	-
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Prosentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Keg. Masyarakat	100	43.101.250	25,00	134.791.544	-	-		-		-					-	-	25,000	134.791.544	25,00	312,73
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12	43.101.250	3	134.791.544	-										-	-	3	134.791.544	25,00	312,73
		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk. Kecamatan dan Kelurahan	100	86.202.500	12,50	4.544.950	-	-	-	-	-	-					-	-	12,50	4.544.950	12,50	5,27
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajad Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajad Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72	43.101.250	18	4.544.950	-		-		-						-	-	18	4.544.950	25,00	10,54

		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah tangga	72	43.101.250	-	-		-									-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta PenyelenggaraanPemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	100	86.202.500	25,00	15.500.000	12,50	2.157.700	-	-	-	-					-	-	25,000	15.500.000	25,00	17,98
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	43.101.250	50,00	15.500.000	25,00	2.157.700		-		-					-	-	50,000	15.500.000	50,00	35,96
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal di Wulayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	43.101.250	2	15.500.000	1	2.157.700									-	-	2	15.500.000	50,00	35,96
		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA di Wilayah Kecamatan	100	43.101.250	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-	-	-
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	4	43.101.250	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

5	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemeritahan Umum.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	86.202.500	37,50	41.420.000	21,43	14.517.700	25,00	2.000.000	25,00	8.000.000					50,00	10.000.000,00	53,57	51.420.000	53,57	59,65
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100	86.202.500	37,50	41.420.000	21,43	14.517.700	25,00	2.000.000	25,00	8.000.000					50,00	10.000.000,00	53,57	51.420.000	53,57	59,65
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undnagan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8	17.240.500	-	-		-									-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	68.962.000	24	41.420.000	12	14.517.700	3	2.000.000	3	8.000.000					6	10.000.000	30	51.420.000	62,50	74,56
6	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100	1.032.746.750	10,65	8.200.000	8,33	11.615.550	16,67	-	16,67	-					33,33	-	13,89	8.200.000	13,89	0,79
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100	1.032.746.750	10,65	8.200.000	8,33	11.615.550	16,67	-	16,67	-					33,33	-	13,89	8.200.000	13,89	0,79
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Perdes dan Perkades	72	181.550.625	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok. Yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	224.651.875	36	4.800.000	18	9.815.550	3		3					6	-	42	4.800.000	58,33	2,14
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jlh. Dok. Fasilitasi dalam rangka pelak. Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan	72	141.550.625	-	-	18	900.000	3	-	3	-		-		-	6	-	6	-	8,33	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah Dok. Hasil fasilitasi dalam rangka pelksanaan tugas dan fungsi BPD	72	141.550.625	36	3.400.000	18	900.000	3		3					6	-	42	3.400.000	58,33	2,40
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dok. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	72	141.550.625	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dok. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	72	141.550.625	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dok. Fasilitasi dalam rangka Pelak. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	72	21.550.625	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dok. Fasilitasi dalam rangka Kerja sama anatar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga	72	17.240.500	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penataan, Pemanfataan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dok. Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	72	21.550.625	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Rancangan program dan kegiatan dalam perubahan Renja tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LEMBATA

Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NAGAWUTUNG							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 %**	**25 %**	**2.332.895.867,00**	**2.221.227.588,00**	**2.162.911.202,00**	**520.174.987,00**							**2.853.070.854,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				25 %	25 %	15.430.771,00	12.333.250,00	6.944.400,00	-8.486.371,00			-	-	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		30.870.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.442.500,00	2.462.400,00	1.135.650,00	-306.850,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.961.250,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.604.700,00	2.467.400,00	1.120.650,00	-1.484.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.063.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.234.821,00	2.468.400,00	1.302.450,00	-2.932.371,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.961.250,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.468.400,00	2.017.950,00	2.017.950,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.063.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7	**NON URUSAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.579.200,00	2.466.650,00	1.367.700,00	-211.500,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap adm. keuangan dan juga pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah*				25 %	25 %	2.056.800.860,00	2.005.514.779,00	2.003.029.779,00	-53.771.081,00			-	-	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		2.494.207.104,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	0,00	1.932.006.029,00	1.932.006.029,00	1.932.006.029,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Duawutun	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.462.592.104,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7	**NON URUSAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-283.556.051,00**							**3.286.443.354,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	73.320.862,00	71.046.100,00	69.771.050,00	-3.549.812,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.117.750,00	2.462.650,00	1.252.700,00	-865.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.615.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah*				25 %	25 %	23.245.452,00	22.120.400,00	21.293.200,00	-1.952.252,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		27.562.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.245.452,00	22.120.400,00	21.293.200,00	47.748,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas SDM ASN pada Perangkat Daerah*				25 %	25 %	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		37.485.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	18.259.355,00	48.011.534,00	25.493.348,00	7.233.993,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		70.560.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	866.614,00	1.394.662,00	1.394.662,00	528.048,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			3.307.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.392.741,00	34.876.372,00	18.538.186,00	14.145.445,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			14.332.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.465.500,00	1.185.500,00	-814.500,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			8.820.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	9.275.000,00	4.375.000,00	-6.625.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			44.100.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Ketersediaan sarana prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		55.125.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.125.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	95.833.197,00	61.957.625,00	67.745.475,00	-28.087.722,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		81.033.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	85.402.597,00	53.662.425,00	59.450.275,00	-25.952.322,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.150.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.930.600,00	8.295.200,00	8.295.200,00	364.600,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Ketersediaan sarana prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi*				25 %	25 %	82.326.232,00	71.290.000,00	38.405.000,00	-43.921.232,00			-	- -	ASN pada Kantor Camat Nagawutung		56.227.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	69.608.732,00	71.290.000,00	38.405.000,00	-31.203.732,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.587.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			4.410.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.858.750,00	0,00	0,00	-3.858.750,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.858.750,00	0,00	0,00	-3.858.750,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**25 %**	**25 %**	**28.600.000,00**	**25.739.614,00**	**12.714.782,00**	**51.525.000,00**							**80.125.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tinhkat Kecamatan*				25 %	25 %	23.600.000,00	25.739.614,00	12.714.782,00	-10.885.218,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		58.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	14.794.150,00	7.112.050,00	3.512.050,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			25.000.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.945.464,00	5.602.732,00	-14.397.268,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			33.075.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentasi terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				25 %	25 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			22.050.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan**				**25 %**	**25 %**	**57.000.000,00**	**37.235.264,00**	**18.522.882,00**	**6.945.000,00**							**63.945.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa*				25 %	25 %	42.000.000,00	37.235.264,00	18.522.882,00	-23.477.118,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		52.920.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	21.303.564,00	10.566.532,00	-5.933.468,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			8.820.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	25.500.000,00	15.931.700,00	7.956.350,00	-17.543.650,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			44.100.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk. Kecamatan dan Kelurahan*				25 %	25 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2 Keluarga	2 Keluarga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25 %**	**25 %**	**8.600.000,00**	**4.981.250,00**	**2.157.700,00**	**13.450.000,00**							**22.050.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				25 %	25 %	3.600.000,00	4.981.250,00	2.157.700,00	-1.442.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	4.981.250,00	2.157.700,00	-1.442.300,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentasi pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*				25 %	25 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			11.025.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**25 %**	**25 %**	**33.600.000,00**	**29.185.550,00**	**14.517.700,00**	**-15.960.000,00**							**17.640.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				25 %	25 %	33.600.000,00	29.185.550,00	14.517.700,00	-19.082.300,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		17.640.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	33.600.000,00	29.185.550,00	14.517.700,00	-19.082.300,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			17.640.000,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**				**25 %**	**25 %**	**45.300.000,00**	**23.097.750,00**	**11.615.550,00**	**204.312.500,00**							**249.612.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang terfasilitasi, terekomendasi dan terawasi*				25 %	25 %	45.300.000,00	23.097.750,00	11.615.550,00	-33.684.450,00			-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik	Masyarakat Desa		249.612.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			45.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000,00	19.497.750,00	9.815.550,00	-3.684.450,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	- -			56.537.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.800.000,00	900.000,00	-4.100.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	-900.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			35.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lembata, Naga Wutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik 3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayaan publik			5.512.500,00	KECAMATAN NAGAWUTUNG
	JUMLAH								**2.505.995.867,00**	**2.341.467.016,00**	**2.222.439.816,00**	**-17.964.619.425,00**							**3.286.443.354,00**	

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sehingga tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Nagawutung disusun dengan tujuan Untuk :

a. Mengendalikan program dan Kegiatan Kantor Camat Nagawutung secara Efektif dan Efisien dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Nagawutung.
b. Memudahkan dalam penyusunan RDPPA/DPPA Kantor Camat Nagawutung.
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Nagawutung dalam mencapai sasaran program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
d. Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Nagawutung adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya semangat kerja aparatur untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mengimbangi kebutuhan dalam pelayanan publik;
c. Adanya standarisasi pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat;

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Nagawutung Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani dalam rangka Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran(RDPPA) Tahun Anggaran 2025.

Loang, Juli 2025

Camat Nagawutung,

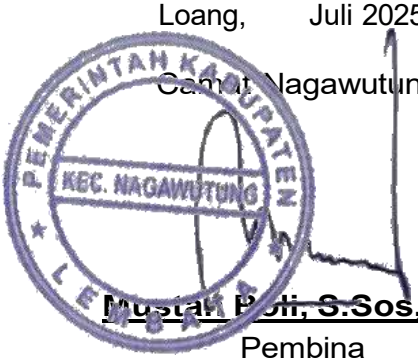

Mustafa Poli, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19770705 200801 1 039

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN WULANDONI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappelitbangda.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan.
   Meliputi orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
   Rancangan Awal Renja PD disusun berpedoman pada Renstra PD Tahun 2023-2026, hasil Evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan.
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lembata Nomor : B/100.3.4.2/1/BAPP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

   Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2024, dilakukan penyempurnaan rancangan renja dengan menggunakan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD di kecamatan serta melakukan penajaman target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Rumusan Rancangan Akhir.

   Perumusan rancangan akhir renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD, berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025.

6. Penetapan.

   Setelah dilakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, maka Rancangan akhir Renja telah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD untuk menjamin keselarasan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Wulandoni dan RPD Kabupaten Lembata di Tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan Kecamatan Wulandoni dan Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau belum dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada penyusunan perencanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Wulandoni dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4	4	100	2	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	-	14	14	100	14	14	25
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	-	12	12	100	12	12	25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	-	18	18	100	18	18	25
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**-**	**-**	**0,06**	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10000 Paket	-	2500	2500	100	2500	2500	25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	-	10	10	100	10	10	25
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Paket	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	-	1	1	100	1	1	25
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	-	4	4	100	4	4	25
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	384 Laporan	-	96	96	100	96	96	25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96 Laporan	-	24	24	100	24	24	25
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	-	6	6	100	6	6	25
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	-	20	20	100	20	20	25
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	-	8	8	100	8	8	25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	-	5	5	100	5	5	25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	-	2	2	100	2	2	25
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	-	5	5	100	5	5	25
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	5	5	100	5	5	25
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**-**	**25**	**25**	**-**	**25**	**25**	**25**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.03.2.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**		**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	-	3	3	100	3	3	25
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	-	1	1	100	1	1	25
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	120 Orang	-	30	30	100	30	30	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100**	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	1	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8 Dokumen	-	2	2	100	2	2	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pendekatan analisis kebutuhan berdasarkan target capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Sejauh mana pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wulandoni, dapat diikuti pada tabel 2.2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Rata-rata prosentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Wulandoni. s/d semester 1 Tahun 2024, capaian kinerja renstra dan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Wulandoni, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata :
   1. Secara atributif, kecamatan menjalankan tugas dan fungsi koordinasi. Selain itu kecamatan juga melaksanakan tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Akan tetapi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat belum banyak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Kekosongan kebijakan ini akan berimplikasi pada :
      - Peran camat dalam mengkoordinasikan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan dasar tidak optimal.
      - Alokasi anggaran mengikuti tugas dan fungsi organisasi, maka ketidakjelasan kewenangan kecamatan menyebabkan anggaran kecamatan tidak mencukupi bagi kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas strategisnya.
      - Kecamatan memiliki keterbatasan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna mendorong akuntabilitas sosial, termasuk dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan menangani keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dasar.
      - Kesempatan kecamatan untuk memperoleh informasi pelayanan dasar juga terbatas.
      - Pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pelayanan dasar di desa tidak optimal.
   2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai serta kualifikasinya sesuai dengan analisis jabatan;
   3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur pada setiap jabatan;
   4. Sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi sesuai standar.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wulandoni:
   - ♦ Tantangan :
     - Kondisi geografis Kecamatan yang wilyahnya luas dan perbukitan.

- Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan.
- Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, jalan, listrik dan air bersih.

♦ Peluang :

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata.
- Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasaran.
- Potensi investasi yang relative besar terutama di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata adalah :

- Program/kegiatan yang direncanakan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.
- Personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang belum memadai serta penataan administrasi .
- Pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang ditetapkan.
- Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor.
- Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masih kurang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WULANDONI						**3.340.741.059,00**							**3.521.772.107,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.340.741.059,00**							**3.521.772.107,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.340.741.059,00**							**3.521.772.107,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**2.887.821.878,00**						**-**	**3.054.812.324,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*	-			25 %	41.000.000,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	45.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		7.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		4.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan*	-			25 %	2.391.609.219,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	2.450.650.819,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.323.609.219,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		2.323.609.219,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		109.041.600,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		10.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah*	-			25 %	29.786.352,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	18.776.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

									Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM			Wulandoni				
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.786.352,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		10.776.000,00	KECAMATAN WULANDONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian*	-			25 %	130.000.000,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	140.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	45.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	85.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		90.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran*	-			25 %	67.995.160,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	122.995.160,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		20.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		37.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		9.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.995.160,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		40.995.160,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*	-			25 %	90.000.000,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	98.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	75.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		79.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran*	-			25 %	64.354.567,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	77.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	Pegawai pada Kantor Camat		50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

									Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM			Wulandoni			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.354.567,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		12.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah*	-			25 %	73.076.580,00			-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni	-	102.390.345,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	49.076.580,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		49.076.580,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	6.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		14.313.765,00	KECAMATAN WULANDONI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**25 %**	**46.000.000,00**						**-**	**53.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			25 %	30.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	37.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		18.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		18.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	-			25 %	16.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		16.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan***	**-**			**25 %**	**168.861.108,00**						**-**	**78.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			25 %	34.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	78.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		19.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

			Wilayah Kecamatan							ALOKASI UMUM			Wulandoni			
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-			-	134.861.108,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	0,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	134.861.108,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		0,00	KECAMATAN WULANDONI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**-**			**25 %**	**11.339.200,00**						**-**	**15.335.050,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			25 %	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			25 %	6.339.200,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	7.335.050,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	6.339.200,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		7.335.050,00	KECAMATAN WULANDONI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**-**			**25 %**	**16.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			25 %	16.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	20.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	8.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		12.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		8.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi***	**-**			**25 %**	**210.718.873,00**						**-**	**300.624.733,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi*	-			25 %	210.718.873,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni	-	300.624.733,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		40.500.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		33.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	33.300.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		33.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	30.600.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		30.600.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	30.300.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		30.300.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	34.151.640,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		34.151.640,00	KECAMATAN WULANDONI

	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	4.867.233,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		48.773.093,00	KECAMATAN WULANDONI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		50.000.000,00	KECAMATAN WULANDONI
	J U M L A H							**3.340.741.059,00**							**3.521.772.107,00**	

Dari tabel perbandingan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian indikator dan target capaian kinerja sub kegiatan.
2. Pagu indikatif pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan adalah sama yaitu sebesar Rp. 3.340.741.059,00,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat ini berfungsi untuk menjaring aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program kegiatan kedepannya.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wulandoni didiskusikan dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Lembata di Kecamatan. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabuapten Lembata Tahun 2025 di Kecamatan Wulandoni, maka usulan masyarakat untuk Kecamatan Wulandoni dikelompokan dalam 2 bagian yaitu :

1. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Energi dan SDM, Koperasi/UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Perpustakaan, Sosial, Ketenagakerjaan, Pertanian/Peternakan, Perikanan, komunikasi dan Informatika yang semuanya diakomodir dalam Renja SKPD yang melaksanakan urusan tersebut di atas.
2. Usulan masyarakat terhadap program/kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wulandoni dan telah diakomodir dalam Renja Kecamatan Wulandoni.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RKP, berpengaruh terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja.

Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupaka perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksnaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang dissabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantassa kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang relevan dan sinkron dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni adalah :

1. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan prestasi olahraga, kesetraaan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
2. Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
3. Pemerintah baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan penyelundupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wulandoni yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wulandoni Tahun 2025 terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tahun 2025
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Mengoptimalkan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program,kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Wulandoni tahun 2025 :

1) Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.
2) Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wulandoni Tahun 2023-2026.
3) Pencapaian indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wulandoni di Tahun 2025 sebanyak 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan, dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 1.660.163.213,00,- yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 1.590.567.448,00,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 19.336.915,00,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 12.340.750,00,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 2.209.250,00,-
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 29.632.600,00,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 6.076.250,00,-

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut di atas, tersebar di 15 (lima belas) desa.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata dalam Renja 2025, terdiri dari 6 Program, 15 kegiatan, 52 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Wulandoni Kab. Lembata
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								1.660.163.213							**3.521.772.107**	
								1.660.163.213							**3.521.772.107**	
								1.660.163.213							**3.521.772.107**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**100%**	**1.590.567.448,**							**3.054.812.324**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah**				**25%**	**11.174.150**					**Pegawai pada Kantor Camat Omesuri**		**45.000.000**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.470.850	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.223.200	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.711.600	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		6.000.000,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.575.500	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.400.800	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		7.000.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.691.700	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.100.500	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		4.000.000	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**				**25%**	**1.480.444.761**	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa				**Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni**		**2.450.650.819**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	1.409.677.271	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		2.323.609.219	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	68.930.000	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		109.041.600	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	824.150	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		10.000.000	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	1.013.340	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**				**25%**	**14.305.750**	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		**18.776.000**	
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	756.000	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.000.000	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	13.549.750	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		10.776.000	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian**				**25%**	**0**	Kab. Lembata, Wulandoni,				Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		**140.000.000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa							
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		50.000.000	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		90.000.000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran**				**25%**	**7.464.387**	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		**122.995.160**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		16.000.000	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	3.172.987	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		20.000.000	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Paket	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		0	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Paket	0	Kab. Lembata, Wulandoni,	PENDAPATAN ASLI	-	-	Pegawai pada Kantor		37.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)			Camat Wulandoni			
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Paket	991.400	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		9.000.000	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		0	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	3.300.000	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		40.995.160	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**				**25%**	**0**	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		**98.000.000**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		79.000.000	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		19.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni,	PENDAPATAN ASLI	-	-	Pegawai pada Kantor		0	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)			Camat Wulandoni			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				4 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		0	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**				**25%**	**49.658.400**	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa				Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		**77.000.000**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35.541.950	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		50.000.000	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	14.116.450	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.000.000	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				6 Laporan	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		12.000.000	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah**				**25%**	**27.520.000**	Kab. Lembata, Wulandoni,				Pegawai pada Kantor		**102.390.345**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa				Camat Wulandoni			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	27.520.000	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		49.076.580	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.000.000	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	0	Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		15.500.000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		5.000.000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pipelihara/direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		8.500.000	
	7.01.01.2.09.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai pada Kantor Camat Wulandoni		14.313.765	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**			**25%**	**19.336.915**						**25%**	**14.313.765**	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan**	**100%**			**25%**	**13.311.000**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Omesuri**	**25%**	**37.000.000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	13.311.000	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		18.500.000	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		18.500.000	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**			**25%**	**6.025.915**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	**16.000.000**	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				1 Laporan	6.025.915	Kab. Lembata,Wulandoni,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Ketahan	4.Reformasi birokrasi	Kecamatan Wulandoni		16.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	an Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partispasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan**	**100%**			**25%**	**12.340.750**						**25%**	**78.000.000**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**			**25%**	**12.340.750**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	**78.000.000**	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.340.750	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		78.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.209.250**						**25%**	**15.335.050**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**			**25%**	**2.209.250**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	8.000.000	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.209.250	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		8.000.000	
	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100%**			25%	**0**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	**7.335.050,**	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		7.335.050,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												transformasi pelayanan publik				
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**			**25%**	**57.436.950**						**25%**	**20.000.000**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**			**25%**	**57.436.950**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	**20.000.000**	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	29.440.000	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		12.000.000	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	27.996.950	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		8.000.000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												transformasi pelayanan publik				
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Pemerintahan Desa Yang Terbina dan Terawasi**	**100%**			**25%**	**13.626.600**						**25%**	**300.624.733**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	**100%**			25%	**13.626.600**					**Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni**	**25%**	**300.624.733**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		40.500.000	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	8.302.000	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		33.000.000,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		33.300.000	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		30.600.000	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		30.300.000,	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	5.324.600	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		34.151.640	
	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		48.773.093	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pelayanan publik				
	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	0	Kab. Lembata,Wulandoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.Reformasi birokrasi 4.Memperkuat Stabilitas politik, ketentraman, ketertiban umum, dan transformasi pelayanan publik	Masyarakat Desa di Kecamatan Wulandoni		50.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Wulandoni dan RPD Kabupaten Lembata di tahun 2023-2026. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Wulandoni Tahun 2025 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

Dalam hal alokasi ketersediaan anggaran daerah tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang termuat dalam renja ini, maka penyusunan RKA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan program prioritas daerah.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Wulandoni.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap sub kegiatan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Wulandoni, September 2025
Camat Wulandoni,

Petrus, L.H.M Gowing, SE
Pembina Tk. I
NIP.19710914 200012 1 006

PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN ILE APE TIMUR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2023-2026. Rencana Kerja tesebut telah dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025.

Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaannya, maka dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut mengharuskan terjadinya perubahan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025 yaitu:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya pengurangan target kinerja dan pagu.
b. Adanya penyesuaian terhadap kode rekening belanja
c. Adanya penyesuaian program dan kegiatan
d. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar program kegiatan, perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran.

Dengan demikian Perubahan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025 merupakan perwujudan dari sebuah mekanisme penyusunan anggaran yang harus dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas demi efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun berkenan.

1.2. **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tenang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Kantor Camat Ile Ape Timur dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2008 tenang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Kantor Camat Ile Ape Timur dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 47);

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ile Ape Timur Tahun 2025 adalah penyesuaian nomenklatur belanja sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan seiring dengan perubahan volume kegiatan, kenaikan harga satuan barang, serta penyesuaian program dan kegiatan dan perubahan target kinerja SKPD dan penyesuaian kode rekening belanja.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian valume kegiatan sesuai RKPD Tahun 2025;
2. Penyesuaian harga satuan belanja berdasarkan kenaikan harga satuan belanja;
3. Penyesuaian perubahan target kinerja SKPD sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;

4. Penyesuaian Program dan Kegiatan;
5. Penyesuaian kembali kode rekening belanja.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur Kabupaten Lembata disusun dengan sistematika penusliasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA, memuat Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat Rancangan Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR CAMAT ILE APE TIMUR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 maka dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025.

Hasil perhitungan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Ile Ape Timur hingga Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ILE APE TIMUR KABUPATEN LEMBATA
PERIODE PELAKSANAAN : 2024
EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN *II*

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD
Kantor Camat Ile Ape Timur
Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
Kecamatan Ile Ape Timur				%	600	10,112,875,740.00	190	1,771,317,766	233	1,876,332,696	48	280,632,970	-	624,200,455		624,200,455			4	904,833,42	23	2,676,151,19	39.67	26.4
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,Laporan Kinerja dan Lap. Keuangan yang Cepat dan Tepat	%	100.00	8,298,143,465.00	159	1,579,566,696	211	1,841,911,900	42	280,632,970	-	603,445,632	-	-	-	-	4	884,078,60	201.	2,463,645,29	201.	29.6
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah	%	100.0	138,303,002.00	31	18,487,472	14	11,639,250	2		-	2,895,650	-	-	-	-	2	2,895,65	33.	21,383,12	33	15.4
		Penyusunan Doku men Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	19,394,563.00	2	1,659,550	2	1,213,300	-		-	276,700	-	-	-	-		276,700		1,936,25	2	9.9
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	23,705,688.00	2	2,568,850	1	1,213,400	-		1	455,850	-	-	-	-	1	455,85		3,024,70	7	12.7
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	17,080,500.00	2	3,511,350	1	2,468,525	-		-	1,523,100	-	-	-	-		1,523,10		5,034,45	5	29.4
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	80	19,395,563.00	6	3,681,922	2	1,848,550	-		-		-	-	-	-				3,681,92	1	18.9
		Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	80	23,705,688.00	7	3,915,600	2	2,468,525	-		-	640,000	-	-	-	-		640,000		4,555,60		19.2
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	17,580,500.00	6	1,581,350	2	1,213,650	2		-		-	-	-	-	2			1,581,35	10	8.9
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	Laporan	16	17,440,500.00	4	1,568,850	4	1,213,300	-		-		-	-	-	-				1,568,85	2	9.0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2024%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentse Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**%**	**100**	**6,676,721,836**	**26**	**1,430,415,449**	**35**	**1,567,821,353**	**7**	**243,507,970**	**-**	**473,831,664**	**0**		**0**		**9**	**717,339,63**	**35**	**2,147,755,08**	**35.**	**32.**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	56	6,146,576,461	14	1,356,276,399	14	1,500,818,102	3	243,507,970	0	439,394,401	**0**		**0**		3	682,902,37	1	2,039,178,77	30.36	33.
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	24	431,012,500	6	63,923,250	2	64,560,851	1		-	32,577,688	-		-			32,577,68		96,500,93	2	22.3
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu. Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun	Laporan	8	25,860,750	2	3,496,175	-	1,464,000	-		-	1,387,875	-		-		2	1,387,87	-	4,884,05	5	18.8
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran/Prognosis SKPD	Laporan	18	73,272,125	4	6,719,625	18	978,400	3		-	471,700	-		-		3	471,70	-	7,191,32	3	9.8
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**107,753,125**	**2**	**22,598,425**	**2**	**21,373,300**	**1**		**-**	**10,322,550**	-				**1**	**10,322,55**	**3**	**32,920,97**	**3.00**	**30.**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	21,550,625.00	0	-	0	-	-		-		-		-							0.0
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Barang Pengguna SKPD	Laporan	8	86,202,500.00	2	22,598,425	2	21,373,300	1		-	10,322,550	-		-			10,322,55	-	32,920,97	3	38.
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Ketrsediaan Dokumen Kepegawaian**	**%**	**100**	**124,993,625.00**	**5**	**1,105,750**	**2**	**896,700**	**0**		**-**	**681,450**	-		-		**0**	**681,45**	**5**	**1,787,20**	**5**	**1.**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	20	17,240,500	0	-	0	-	-		-		-		-							0.0
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	20	17,240,500	5	1,105,750	2	896,700	-		-		-		-				-	1,105,75	2	6.
		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	34,481,000	0	-	0	-	-		-	681,450	-		-			681,45		681,45		1.9
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	4	56,031,625	0	-	0	-	-		-		-		-							0.0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum PD**	**%**	**100**	**310,329,000.00**	**95**	**12,375,710**	**137**	**101,899,243**	**31**	**37,125,000**	**-**	**57,809,636**	-		-		**3**	**94,934,63**	**126**	**107,310,34**	**126.0**	**34.**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	20	12,930,375	5	1,000,710	5	916,158	-		-		-		-				-	1,000,71	2	7.
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	Paket	72	56,031,625	0	-	32	97,217,385	31	37,125,000	-	56,494,936	-		-		3	93,619,93	3	93,619,93	4	167.0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	800	51,721,500	-	-	-	-	-		-		-		-							0.0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerj dan Realisasi Anggara Renja SKPD s/d Tahu 2024%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	400	34,481,000	-	-	100	3,765,700	-		-	1,314,700	-	-	-			1,314,700		1,314,700		3.(
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	392	155,164,500.00	90	11,375,000	-	-	-		-		-	-	-				9(	11,375,00(	2	7.1
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**%**	**20**	**590,922,750.00**	**0**	-	**0**	-											**0**		**0.00**	**0.(
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4	128,812,500.00	-	-	-	-														0.(
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Paket	8	67,287,500.00		-	-	-														
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	51,721,500.00	-	-	-	-	-		-		-	-	-						6	0.(
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300,000,000.00	-	-	-	-														0.(
		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	43,101,250	-	-	-	-	-		-		-	-	-							0.(
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran**	**%**	**100**	**112,063,251.00**	**24**	**70,266,800**	**6**	**88,483,420**	**0**		**0**	**41,954,412**	-	-	-		**0**	**41,954,412**	**24**	**112,221,212.00**	**24.0**	**100.1**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	43,101,250.00	12	60,330,000	3	79,269,600	-		-	38,800,000	-	-	-			38,800,000	12	99,130,000	2	229.9
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	48	43,101,250.00	12	9,936,800	3	9,213,820	-		-	3,154,412	-	-	-			3,154,412	12	13,091,21	2	30.2
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumalah Laporan Penyedeiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	10,775,313	-	-	-	-	-		-		-	-	-							0.(
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	24	15,085,438	-	-	-	-	-		-		-	-	-							0.(

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerj dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahu 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**237,056,876.00**	**13**	**24,317,090**	**15**	**49,798,634**	**1**		**-**	**15,950,270**					**1**	**15,950,270**	**14**	**40,267,360.00**	**14.0**	**16.9**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh. kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	52	150,854,375	13	24,317,090	13	47,619,884	1		-	15,950,270						15,950,270	14	40,267,360	2	26.0
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	8	21,550,625	-	-	-	-			-											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jemlah Peralatan dan Mesin lainnya yang depelihara	Unit	5	17,240,500	-	-	-	-														0.0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	17,240,500	-	-	-	-	-		-											0.0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15,085,438.00	-	-	-	-	-		-											0.0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15,085,438.00	-	-	2	2,178,750	-		-											0.0
2	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**%**	**100**	**286,192,300.00**	**11**	**18,142,322**	**11**	**27,427,025**	**5**		**-**	**7,085,000**					**5**	**7,085,000**	**16**	**25,227,322.0**	**16.**	**8.**
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terselenggaranya Keg. Di bidang Pemerintahan umum yang mendukung Tupoksi Kecamatan serta Target capaian Kinerja Daerah**	**%**	**100**	**199,989,800.00**	**10**	**13,434,000**	**10**	**20,559,110**	**5**			**6,585,000**					**5**	**6,585,000**	**15**	**20,019,000.0**	**15.00**	**10.0**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	70,686,050.00	5	2,800,000	5	6,585,000	5		-	6,585,000					5	6,585,000	10	9,385,000.0	5	13.2
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efeketifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	20	129,303,750.00	5	10,634,000	5	13,974,110	-		-									10,634,000	2	8.2

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerj dan Realisasi Anggara Renja SKPD s/d Tahu 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Proentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**%**	**100**	**86,202,500.00**	**1**	**4,708,322**	**1**	**6,867,915**	-		-	**500,000**						**500,000**		**5,208,32**		**6.**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Lapora n	4	86,202,500	1	4,708,322	1	6,867,915	-		-	500,000	-		-			500,000		5,208,32	2	6.
3	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Prosentase Terselnggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**%**	**100**	**336,189,750.00**	**6**	**144,541,104**	**6**	**-**	**6**		**-**								**144,541,104.0**	**6.**	**42.**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100**	**206,886,000.00**	**4**	**11,462,847**	**6**	**-**	**6**		**-**								**11,462,847.0**	**4**	**5.**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga	8	34,481,000.00	2	2,000,800	-	-	-		-								2,000,800.0	2	5.
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdyaan Masyarakat yang dialkukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokum en	4	43,100,000.00	1	600,000	-	-	-		-								600,00	2	1.
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilyah Kecamatan	Lapora n	4	129,305,000.00	1	8,862,047	-	-	-		-								8,862,047.0	2	6.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	**Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**%**	**100**	**43,101,250.00**	**2**	**133,078,257**	**6**	**-**											**133,078,257.0**		**308.**
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Lapora n	8	43,101,250.00	2	133,078,257	-	-	-		-								133,078,257.0	2	308.

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	**100**	**86,202,500.00**		-		-		-		-		-		-				**0.0**		**0.0**
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajad Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajad kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Keluarga	400	43,101,250.00	-	-		-	-		-		-		-				0.0		0.0
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	400	43,101,250.00	-	-		-	-		-		-		-						0.0
4	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Terselnggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**86,202,500.00**	**1**	**1,555,000**	**0**	**596,050**				**283,500**		-				**283,500**	**1**	**1,838,500.0**	**1**	**2.1**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**43,101,250.00**	1	**1,555,000**	**0**	-						-				**283,500**		**1,838,500.0**		**4.2**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergiatas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	43,101,250.00	1	1,555,000			-		-		-		-				1,555,000.0	2	3.0
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA**	**%**	**100**	**43,101,250.00**		-	0%	**596,050**	-		-	**283,500**	-		-			**283,500**		**283,500**		**0.0**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara RI	Laporan	4	43,101,250.00	-	-	1	596,050	-		-	283,500	-		-			283,500		283,500.0		0.0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
5	**Terlaksananya Koordinasi** Penyelenggaraan **Pemerintahan Umum**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	%	100	86,202,500.00	2	10,200,000	1	728,178	-		-	10,500,639						10,500,639		11,228,817.0	2.0	13.0
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah**	%	100	86,202,500.00	2	10,200,000	1	728,178	0		-	10,500,639						10,500,639		11,228,817.0	2	16.2
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Unadangan	Laporan	8	17,240,500.00			-	-														
		Pelaksanaan Tigas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	68,962,000.00	2	10,200,000	1	728,178	-		-	10,500,639						10,500,639		11,228,817.0	2	16.2
6	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan** Pemerintahan Desa	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi**	%	100	1,019,945,225	11	17,312,644	4	5,669,543	1		0	2,885,684	0		0		1	2,885,684	1	20,198,328	12.5	1.9
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koorinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase Desa yang Terfasilitasi mendapat Rekomendasi dan Terawasi**	%	100	1,019,945,225	11	17,312,644	4	5,669,543	1		0	2,885,684	0		0		1	2,885,684	12	20,198,328	12.5	1.9
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan PERDES dan PERKADES	Dokumen	16	61,550,625	2	400,000	0	-	0		0	-	0		0					400,000	12	0.6
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunakan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunakan Aset Desa	Dokumen	16	342,651,875	4	7,447,472	2	4,698,475	0		0	2,289,725	0		0			2,289,725		9,737,197	12.5	2.8
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KADES dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas KADES dan Perangkat Desa yang dilaksanakan	Dokumen	16	61,550,625	2	1,800,000	0	-	1		0	-	0		0					1,800,000	18.8	2.9
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Dokumen	8	61,550,625	0	-	0	-	0		0	-	0		0							0.0

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara Renja SKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerj dan Realisasi Anggara Renja SKPD s/d Tahu 2024(%)	
					K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6)*100	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	8	61,550,625	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-						0.0
		Fasilitasi sinkronisasai Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasai Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	Dokumen	8	61,550,625	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-						0.0
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	8	61,550,625	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-						0.0
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajian Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	4	61,550,625	1	1,290,000	0	-	0	-	0	-		-	0	-				1,290,000		2.
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagiunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	8	61,550,625	2	6,375,172	2	971,068	0	-	0	595,959		-	0	-		595,959		6,971,13		11.
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	8	61,550,625	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-						0.0
		Koordinasi Prndampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Laporan	81	123,337,725	0	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-						0.0

Faktor penghambat : Inkonsisten Pelaksanaan Anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Konsisten terhadap RKPD yang telah ditetapkan

Lamaau, 20 April 2024

Camat Ile Ape Timur

Nikolaus Ola, S.Sos

NIP. 19680421 200212 1 008

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Rancangan program dan kegiatan dalam perubahan Renja tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LEMBATA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD PERUBAHAN				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ILE APE TIMUR							**1,961,301,994.00**	**1,730,453,621.00**	**1,502,488,391.00**	**-227,965,230.00**							**2,123,155,172.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1,961,301,994.00**	**1,730,453,621.00**	**1,502,488,391.00**	**-227,965,230.00**							**2,123,155,172.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1,961,301,994.00**	**1,730,453,621.00**	**1,502,488,391.00**	**-227,965,230.00**							**2,123,155,172.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**				**25 %**	**25 %**	**1,835,431,198.00**	**1,626,595,400.00**	**1,451,104,442.00**	**-175,490,958.00**							**2,008,108,672.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah*				25 %	25 %	20,482,505.00	12,107,654.00	9,692,454.00	-2,415,200.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		36,477,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,375,380.00	1,293,154.00	1,176,004.00	-117,150.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,961,250.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,513,400.00	1,264,250.00	945,500.00	-318,750.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6,063,750.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,051,700.00	2,344,250.00	1,701,750.00	-642,500.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,548,550.00	1,699,150.00	1,338,400.00	-360,750.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,961,250.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,045,275.00	2,587,650.00	1,714,400.00	-873,250.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7,113,750.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,867,550.00	1,882,650.00	1,772,650.00	-110,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,557,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2,080,650.00	1,036,550.00	1,043,750.00	7,200.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1,574,075,603.00	1,453,084,969.00	1,311,430,278.00	-141,654,691.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		1,636,859,172.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,500,818,102.00	1,376,959,015.00	1,237,777,824.00	-139,181,191.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1,611,501,672.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	65,760,851.00	71,134,350.00	70,368,650.00	-765,700.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,468,250.00	2,478,804.00	985,404.00	-1,493,400.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6,615,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				24 Laporan	24 Laporan	5,028,400.00	2,512,800.00	2,298,400.00	-214,400.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18,742,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22,655,859.00	21,540,750.00	20,869,250.00	-671,500.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		5,512,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5,512,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22,655,859.00	21,540,750.00	20,869,250.00	-671,500.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5,096,700.00	1,363,900.00	1,014,000.00	-349,900.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		31,972,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	3,096,700.00	1,363,900.00	1,014,000.00	-349,900.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8,820,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14,332,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	32,695,827.00	12,891,702.00	7,583,052.00	-5,308,650.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		79,380,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,916,158.00	1,233,848.00	1,233,848.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3,307,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	10,248,269.00	4,593,354.00	2,329,554.00	-2,263,800.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14,332,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13,230,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,531,400.00	3,039,500.00	1,219,650.00	-1,819,850.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8,820,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	8,000,000.00	4,025,000.00	2,800,000.00	-1,225,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39,690,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33,250,000.00	0.00	0.00	0.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		72,555,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31,762,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16,537,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13,230,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73,679,820.00	63,559,925.00	69,980,408.00	6,420,483.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		81,165,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	61,466,000.00	53,084,025.00	59,484,025.00	6,400,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63,525,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10,213,820.00	9,242,100.00	9,880,000.00	637,900.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2,756,250.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000.00	1,233,800.00	616,383.00	-617,417.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3,858,750.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73,494,884.00	62,046,500.00	30,535,000.00	-31,511,500.00			-	- -	Pegawai Kantor Camat Ile Ape Timur		64,187,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	60,619,884.00	57,080,000.00	30,535,000.00	-26,545,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39,637,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR

	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5,512,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0.00	4,966,500.00	0.00	-4,966,500.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6,358,750.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3,858,750.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan**				**25 %**	**25 %**	**37,927,025.00**	**39,194,971.00**	**21,166,949.00**	**-18,028,022.00**							**0.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				25 %	25 %	23,059,110.00	29,523,471.00	16,547,449.00	-12,976,022.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	10,085,000.00	12,491,250.00	7,713,750.00	-4,777,500.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,974,110.00	17,032,221.00	8,833,699.00	-8,198,522.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	14,867,915.00	9,671,500.00	4,619,500.00	-5,052,000.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	14,867,915.00	9,671,500.00	4,619,500.00	-5,052,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**18,000,000.00**	**17,059,300.00**	**7,523,000.00**	**-9,536,300.00**							**33,075,000.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	18,000,000.00	17,059,300.00	7,523,000.00	-9,536,300.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000.00	2,155,400.00	1,800,000.00	-355,400.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11,000,000.00	14,903,900.00	5,723,000.00	-9,180,900.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		22,050,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				9 Keluarga	9 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1 Keluarga	1 Keluarga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11,025,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**6,546,050.00**	**4,301,200.00**	**2,176,500.00**	**-2,124,700.00**							**0.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	3,450,000.00	4,301,200.00	2,176,500.00	-2,124,700.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3,450,000.00	4,301,200.00	2,176,500.00	-2,124,700.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	3,096,050.00	0.00	0.00	0.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik				1 Laporan	1 Laporan	3,096,050.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Lamaau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-				-	-	**30,728,178.00**	**26,985,750.00**	**13,425,250.00**	**-13,560,500.00**							**4,410,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	30,728,178.00	26,985,750.00	13,425,250.00	-13,560,500.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4,410,000.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	30,728,178.00	26,985,750.00	13,425,250.00	-13,560,500.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**32,669,543.00**	**16,317,000.00**	**7,092,250.00**	**-9,224,750.00**							**77,561,500.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	32,669,543.00	16,317,000.00	7,092,250.00	-9,224,750.00			-	- -	Masyarakat 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur		77,561,500.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	8,698,475.00	14,252,000.00	6,292,250.00	-7,959,750.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,512,300.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/DesaKab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,512,300.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,512,300.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,512,300.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/DesaKab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7,971,068.00	2,065,000.00	800,000.00	-1,265,000.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/DesaKab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15,512,300.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				20 Laporan	20 Laporan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Semua Kel/DesaKab. Lembata, Ile Ape Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0.00	KECAMATAN ILE APE TIMUR
	JUMLAH								**1,961,301,994.00**	**1,730,453,621.00**	**1,502,488,391.00**	**-227,965,230.00**							**2,123,155,172.00**	

BAB IV
PENUTUP

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sehingga tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Ape Timur disusun dengan tujuan Untuk :

a. Mengendalikan program dan Kegiatan Kantor Camat Ile Ape Timur secara Efektif dan Efisien dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Ile Ape Timur.
b. Memudahkan dalam penyusunan RDPPA/DPPA Kantor Camat Ile Ape Timur.
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Ile Ape Timur dalam mencapai sasaran program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
d. Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Ile Ape Timur adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya semangat kerja aparatur untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mengimbangi kebutuhan dalam pelayanan publik;
c. Adanya standarisasi pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat;

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Ile Ape Timur Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani dalam rangka Penyusunan

Rancangan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (RDPPA) Tahun Anggaran 2025.

CAMAT ILE APE TIMUR,

NIKOLAUS OLA, S.SOS
Pembina Tk.I
NIP. 19680421 200212 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RENJA SKPD. Maka sebagai Perangkat Daerah RSUD Lewolebawajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya, dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD LewolebaTahun 2025 disusun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Renja Perubahan RSUD Lewoleba Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Lembata, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005–2025, RPD Tahun 2024– 2026, RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, serta Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lewoleba Tahun 2024–2026. Penyusunan Renja

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pelaksanaan APBD Perubahan, hasil evaluasi triwulan, serta kebijakan terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah. Dokumen ini mencakup revisi atas sasaran, indikator kinerja, dan alokasi anggaran guna mendukung pencapaian target pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renja Perubahan RSUD Lewoleba Tahun 2025 ini menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan program serta kegiatan prioritas rumah sakit, dengan mengacu pada kebijakan daerah dan nasional yang relevan. Penyusunannya memperhatikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan serta dinamika pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan peran strategis RSUD Lewoleba di tingkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daera

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Kepmendagri Nomor.050_5889 Tahun 2021 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Lembata Nomor: 78 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 78);.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Lewoleba Tahun 2025 ini adalah :

1. Menetapkan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Tahun 2025 yang menjadi indicator kinerja RSUD Lewoleba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai rumah sakit milik pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan keselaranan rencana program dan kegiatan prioritas RSUD Lewoleba dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektit dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan RSUD Lewoleba Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi RSUD Lewoleba dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lembata di bidang kesehatan.
2. Merumuskan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Lewoleba sepanjang Tahun 2025.
3. Menyelaraskan dengan perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Kabupaten Lembata, serta Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang kesehatan dan pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan RSUD Lewoleba Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ::

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMAPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 20235

Renja RSUD Lewoleba Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan tahunan yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lewoleba. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dievaluasi melalui hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Proses pengukuran kinerja dilaksanakan melalui tahapan penetapan indikator kinerja sebagaimana telah ditentukan dalam Renja Tahun 2025, dan dianalisis berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Uraian lengkap mengenai capaian kinerja dan anggaran RSUD Lewoleba sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renja Tahunan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Alat Kesehatan, Sarana, Prasarana Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Presentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Sarana, prasarana pelayanan kesehatan dirumah sakit sesuai standart	%	60	70,89	0	101,27

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit yang profesinal dibidangnya	Presentase ketersediaan SDM sesuai standart Rumah Sakit	%	60	76,73	0	85,26
Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang sesuai regulasi dan standart pelayanan di RS	Presentase capaian indicator standart pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	%	85			

Capaian Indikator Kinerja Utama menunjukan hasil yang positif pada capaian tujuan sasaran Tujuan Sasaran dengan Indikator Presentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Sarana, prasarana pelayanan kesehatan dirumah sakit sesuai standart mencapai target 70,89 dari target 70 dengan tingkat capaian 118,15 % dan Sasaran Ketersedian SDM sesuai standar Rumah Sakit mencapai 60,41 % dari target 90 % dengan capaian 76,73 % masih dalam kategori positif karena belum ada triwulan II, III dan IV Sedangkan Capaian Indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit belum dilakukan evaluasi sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. salah satu Sasaran dengan indikatar pencapaian

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan II Capaian		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2				3	4		5			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah**		**20**	**21,333,727,349**						
Perncanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	**Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkatat Daerah**		**20**	**14,694,230**						
Penyusanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	**6**	2,224,750						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	**1**	2,226,850						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	3,051,300						

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dukumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	2,746,800						
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dukumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	2,075,500						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2,369,030						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung Tupoksi Perangkat Daerah**	**%**	**20**	**21,213,679,349**						
Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	500	20,989,516,126		10,493,227,132	49,99			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	218,112,000		86,661,00	39,73			

Koordinasi dan Penyusanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Dok	1	3,229,487						
Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	18	2,821,736						
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD**		**20**	**55.817.000**		**21,000,000**				
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	2	2,661,250						
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	2	53,155,750		21,00,000	37,62			
Kegiatan Administrasi Kepegawaiann Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penataan pegawai perangkat Daerah**		**20**	**5,327,875**						
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Admistrasi Kepegawaian	Dok	1	5,327,875						

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daeah penunjang urusan pemerintah**			**81,796,560**						
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya Disediakan	Paket	5	81,796,560						
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**20**	**62,431,000**						
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dok	1	62,431,000		2.473.200	3,96			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Meningkatnya Saranna Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara**			**10,492,224,419**						
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah daerah dan Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			**9,023,991,119**						

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	10	991,893,386		400,651,550	40,39			
Sub KegiatanPemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	15	352,363,500		244.339.000	69,34			
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	3	7,679,734,233		3,264,098,264	42,50			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			**1,439,210,646**						
Sub Kegiatan Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola Pelayanan Promosi Kesehatan	Dok	5	153,610,554		11,734,750	7,64			
Pengelolaaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dok	1	5,325,218,864		2,006,142,936	37,67			
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dok	1	1,321,550,450		513,745,693	38,87			

Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujukan Balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaaan Layaran Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dok	1	437,104,100		74,158,480	16,97			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan Upaya kesehatan peroranangan dan upaya kesehatan masyarkat			**7,301,796,000**		**3,257,088,591**	44,61			
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasaran, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standard jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi resiko tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			7,301,796,000						
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	300	7,301,796,000		3,257,088,591	44,61			
PROGRAM PEEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan**			**276.858.850**						

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasaran, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standard jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi resiko tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit**			**103,094,925**						
Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarat	Dok	5	103,094,925		1.497.500	2,84			
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasaran, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standard jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi resiko tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit**			**173,763,925**						

Sub KegiatanBimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM)	DOk	1	173,763,925		45,358,360	45,23			
				45.273.875.951		**20,422,176,456**	**45,23**			

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Tabel 3.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	IntervalNilaiRealisasi Kinerja	KriteriaPenilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76≤90	Tinggi	
3	66≤75	Sedang	
4	51≤65	Rendah	
5	≤50	Sangat Rendah	

Sumber:Permendagri No.86Tahun 2017

Berdasarkan Tabel di atas, evaluasi capaian kinerja program pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan capaian program Sedang. RSUD Lewoleba melaksanakan Empat (4) program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, realisasi belum dapat dilaksanakan karena hingga akhir Triwulan I Dana Alokasi Khusus (DAK) belum tersedia atau belum diturunkan. Kondisi ini menyebabkan capaian kinerja dan anggaran pada program ini masih nol atau belum terealisasi.

Sementara itu, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja mencapai 25%. Meskipun capaian ini secara prinsip sudah sesuai dengan rencana, namun jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100%, maka capaian ini masih dikategorikan sangat rendah.

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan terkait pelayanan kesehatan oleh RSUD Lewoleba pada tahun 2025 adalah sulitnya aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil Kabupaten Lembata

Tugas Pokok Dan Fungsi Rsud Lewoleba Berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomo Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. RSUD Lewoleba mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dan /atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Lembata. Sedangkan dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Lewoleba 2025
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
5. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan rumah sakit);
6. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;

7. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
8. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
9. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
10. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
11. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna; l. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
12. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit;
13. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit;

Kebijakan dan langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Lewoleba yaitu:

1. Aksesibilitas Kesehatan: Mengembangkan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah terpencil melalui penguatan sistem rujukan, mobilisasi layanan, dan pemerataan sumber daya.
2. Penyebaran Informasi: Meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat terkait layanan, fasilitas, dan prosedur pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Lewoleba. Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Lewoleba 2025 16
3. Sistem Informasi: Memperbaiki dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit guna mendukung pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
4. Pengembangan Pelayanan: Menyesuaikan jenis layanan dengan perkembangan teknologi medis modern, termasuk integrasi alat dan metode mutakhir.
5. Standar KRIS: Mengimplementasikan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan rawat inap sesuai kebijakan nasional.
6. Diversifikasi Layanan: Menambah jenis layanan baru yang bersifat profit center, serta mengembangkan layanan unggulan seperti trauma center

7. Layanan VIP: Membangun dan mengoperasikan unit layanan VIP sebagai upaya meningkatkan mutu dan daya saing rumah sakit.
8. Akreditasi: Mempertahankan status akreditasi paripurna versi Snars melalui peningkatan mutu berkelanjutan.
9. Pengembangan Sarana dan Fasilitas: Melanjutkan pembangunan serta peningkatan sarana dan fasilitas penunjang untuk memastikan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermutu.

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh RSUD Lewoleba untuk mengatasi factor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Meningkatkan proses administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien dengan menjalin koordinasi antar bagian dan bidang;
2. Mengoptimalkan pemenuhan dokumen pelaporan serta pengajuan legalitas regulasi.

2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2025

Dalam rangka menyesuaikan kondisi dan dinamika pelaksanaan di lapangan selama periode implementasi Rencana Kerja (Renja), RSUD Lewoleba melakukan peninjauan kembali terhadap target kinerja dengan mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan anggaran yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Berikut disampaikan hasil review terhadap Renja RSUD Lewoleba Tahun 2025:

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran langkah langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan –kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan bebrapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Lewoleba yang direncanakan untuk perubahan meliputi.

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
        1) Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit sebesar Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp.
        2) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
        3) Pengadaan Obatm Bahan Habis Pakaim Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
    b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabuapaten/Kota
        1) Peneglolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
        2) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
    c. Penerbitan Izin Rumah Sakit C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tinggi Daerah Kabuapten/Kota
        1) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
    a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota
        1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

3. Program Pembeerdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
    a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabuapaten/Kota
        1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
    b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabuapten/Kota
        1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5) Koordinasi dan Penusunan Perubahan DPA-SKPD
        6) Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        2) Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
        2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
    d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pendataan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana kerja dan pendanaan RSUD Lewoleba tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra RSUD Lewoleba dan RPJMD Kabupaten Lembata. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Lewoelba di tahun 2024 adalah sebanyak 4 program dan 13 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp.49.555.929.959, sebelum perubahan. Sedangkan untuk perubahan kebutuhan dana adalah sebesar Rp. 50.030.523.648, Nilai total untuk tiap sumber pendanaan sesudah perubahan adalah seperti yang ditunjukkan pada Lampiran Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Lewoleba adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan.Renja RSUD Lewoleba merupakan dokumen resmi daerahyang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja RSUD Lewoleba Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester I tahun 2025 sekaligus untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025. Dalam upaya mencapai target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur RSUD Lewoleba, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun pada Renstra RSUD Lewoleba. Perubahan Rencana Kerja yang dilaksanakan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Lewoleba, Juli 2025

Direktur RSUD Lewoleba,

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
RSUD LEWOLEBA

drg. Yoseph Freinademets Paun
Pembina Tk.I
NIP 19840129 201101 1 006